

DIES NATALIS

51 1965
2016

DARI
KARANGMALANG
UNTUK
PENGEMBANGAN
ILMU DAN
PEMBANGUNAN
BANGSA

Pemikiran Para Guru Besar

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Editor : Danu Eko Agustinova, M.Pd

*Dari Karangmalang untuk
Pengembangan Ilmu dan
Pembangunan Bangsa;*

*Pemikiran Para Guru Besar
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta*

Editor : Danu Eko Agustinova, M.Pd

Penerbit :

FIS UNY & cv Primaprint

***Dari Karangmalang Untuk Pengembangan Ilmu dan
Pembangunan Bangsa;
Pemikiran Para Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Yogyakarta.***

Editor : Danu Eko Agustinova, M.Pd

Penerbit : FIS UNY & CV Primaprint Yogyakarta
Vila Seturan C2 Jl. Seturan Raya. Yogyakarta 55281.
telp: (0274) 383815

Cetakan ke-1 : September 2016

ISBN :

SAMBUTAN DEKAN FIS



Prof. Dr. Ajat Sudrajat M.Ag.

Puji dan syukur hanya bagi-Mu Ya Allah, Dzat Yang Maha Pemberi rahmat dan karunia lagi Maha 'Alim. Atas izin dan perkenan-Mu jua lah, buku yang merupakan kumpulan pidato Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, akhirnya dapat diterbitkan. Buku yang diberi judul "Dari Karangmalang Untuk Pengembangan Ilmu dan Pembangunan Bangsa", selain merupakan bentuk penghormatan atas karya intelektual mereka, juga sebagai fondasi dari sebuah mimpi bagi terwujudnya Mazhab Keilmuan Sosial Karangmalang pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, yang berlokasi di Karangmalang.

Pada saat yang bersamaan, buku dengan judul "Dari Karangmalang Untuk Pengembangan Ilmu dan Pembangunan Bangsa", sengaja diterbitkan pada saat peringatan Dies Natalis ke-51 FIS UNY bukanlah tanpa alasan. Selain dua alasan yang telah disebutkan di atas, peringatan hari kelahiran bagi siapa pun, apalagi bagi sebuah lembaga yang merupakan tempat berkiprahnya para pemikir, intelektual, dan cendekiawan, sungguh merupakan peristiwa yang tidak boleh hanya lewat begitu saja. Buku adalah sahabat terbaik yang akan memberikan pencerahan kepada para pembacanya, apalagi ketika di dalamnya berisi karya intelektual berupa pidato pengukuhan Guru Besar yang sekaligus menjadi penanda pencapaian tertinggi di bidang akademik. Selain diposisikan untuk melakukan proses napak tilas sekaligus refleksi perjalanan gagasan, juga sebagai bentuk kesadaran bahwa ruh dunia kampus ada pada produksi gagasan ini. Dalam konteks itulah makna dari kehadiran buku ini.

Penerbitan buku dengan judul “Dari Karangmalang Untuk Pengembangan Ilmu dan Pembangunan Bangsa”, menyusuli buku sebelumnya yang berjudul “Refleksi Pendidikan Indonesia”. Buku yang disebut terakhir merupakan kumpulan dari pidato dies natalis Fakultas Ilmu Sosial pada sepuluh tahun terakhir yang diterbitkan pada tahun 2014 atau dies ke-49. Inilah salah satu cara yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Yogyakarta untuk memelihara dan menjaga marwah para intelektual sekaligus memberikan penghargaan yang tinggi kepada ilmu pengetahuan.

Saya selaku pimpinan FIS menyampaikan ucapan terimakasih kepada tim editor yang telah mengupayakan untuk terbitnya buku ini. Kami sangat berharap, pemikiran dan gagasan yang tersaji dalam buku ini, semakin memperkuat dan mempercepat berseminya perkembangan gagasan Ilmu Sosial dalam bingkai keIndonesiaan yang telah menjadi mimpi besar di Fakultas Ilmu Sosial. Namun demikian, kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam buku ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan karya-karya yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Akhirnya, kepada para pembaca yang budiman disampaikan selamat menikmati, semoga mendapatkan seteguk air pelepas dahaga keilmuan. Semoga buku ini bisa menjadi teman yang baik dalam menjalani kehidupan serta memberi inspirasi untuk menuju kejayaan Indonesia yang dicita-citakan para *founding fathers*, Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Indonesia yang berdaulat dalam pengembangan ilmu, termasuk ilmu-ilmu sosial. Aamiin.

31 Agustus 2016

Prof. Dr. Ajat Sudrajat M.Ag.

MENGINDONESIAKAN ILMU-ILMU SOSIAL

OLEH : HALILI, S.PD., M.A.¹

Apa dan mengapa tema “mengindonesiakan” menjadi mendasak untuk diupayakan dalam konteks dinamika kontemporer ilmu-ilmu sosial dan kondisi aktual keindonesiaan? Apa dan bagaimana tantangan terbesar untuk agenda mengindonesiakan ilmu-ilmu sosial? Apa yang bisa kita lakukan?

Itulah beberapa pertanyaan kunci yang akan coba didiskusikan dalam artikel pendek nan semenjana ini. Namun sebelumnya penulis ingin *curhat* terlebih dahulu bahwa menyampaikan catatan untuk menghantarkan tulisan-tulisan para guru besar Fakultas Ilmu Sosial (dari mulanya bernama FKIS) Universitas Negeri Yogyakarta (dh. IKIP Yogyakarta) dalam buku ini merupakan tugas yang terlalu tinggi untuk penulis. Di sisi lain, penulis memaknai ini sebagai dorongan semangat sekaligus doa mudah-mudahan selalu ada akumulasi gagasan yang penulis produksi—syukur-syukur bisa disampaikan dalam forum sebagaimana seluruh gagasan pada bagian inti buku ini pernah dipidatokan pada *titimangsan*nya masing-masing.

EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI “MENGINDONESIAKAN”

Apa intensi di balik pilihan kata “mengindonesiakan” dalam tulisan ini? Ada dua makna utama yang dibayangkan. Pertama, “menjadikannya Indonesia”², dengan cara menginstrumentasi

1 Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Ketua Panitia Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta ke-51

2 KBBI mengartikan “Mengindonesiakan” dengan “menjadikan Indonesia (tentang kata)”. Secara tersirat pengindonesiaan hanya sebatas mengenai kata, dan karenanya

Indonesia sebagai laboratorium pokok untuk mengambil data-data utama (sebagai objek materiil) dalam rangka pengembangan teori-teori sosial serta menjadikan kekayaan orisinal Indonesia sebagai alternatif strategi, metode dan pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial. Isu ini sangat penting mengingat ilmu pengetahuan di bidang sosial dan humaniora tidak boleh tidak harus berakar pada entitas masyarakat tertentu, termasuk kita, masyarakat Indonesia.

Tidak ada ilmu pengetahuan yang betul-betul netral, *hattaa* ilmu eksakta sekalipun. Mengindonesiakan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu sosial, dalam konteks itu akan menegaskan bahwa ilmu itu bukan hanya soal ekspresi keilmuan sesuai kehendak (dan kepentingan—kalau ada) ilmuwan namun juga perkara bagaimana mengagungkan lokus dimana ilmu itu dikembangkan. Dengan demikian, membaca fenomena, fakta, dan data ilmiah dalam lokus Indonesia dengan selalu menggunakan optik ilmuwan Barat yang tidak betul-betul netral itu, adalah sebetuk kejahatan ilmuwan.

Secara objektif kita mesti akui bahwa Barat secara riil merupakan salah satu *logos sentrum*, terutama sejak saintisme menggelora pada abad 17 di Eropa—sebagai *logos sentrum* baru setelah berabad lama sebelumnya berlokus di Timur Tengah. Dalam euforia saintisme, para saintis berkeyakinan, ilmu pengetahuan dapat mengatasi seluruh persoalan manusia. Ilmu pengetahuan yang dibincang adalah ilmu alam, ilmu eksakta. Saintisme menempatkan ilmu sosial sebagai bukan ilmu, atau ilmu kelas dua. Untuk mengangkat derajat ilmu sosial mendekati derajat ilmu eksakta, maka diperkenalkan (juga dipaksakan) positivisme-empirik—pendekatan utama dalam eksakta—ke dalam ilmu sosial.

Objektivitas dan netralitas (kebebasnilaian) menurut saintis hanya dimungkinkan dengan pendekatan positivistik itu. Ilmu pengetahuan dibayangkan sebagai sistem yang tertutup. Kebenaran ilmu pengetahuan menampik kebenaran lain di luarnya: mistik, norma komunal, budaya, dan agama. Bahkan dalam kacamata

mengenai kata. <http://kbbi.web.id/Indonesia>, diakses pada 1 September 2016. Namun tulisan ini berusaha untuk melakukan ekstensifikasi tidak hanya pada soal kata, tapi mengenai pemaknaan.

saintifik, agama akan dinilai benar secara epistemologis jika teruji menurut metodologi ilmiah. Dalam konteks itu, ilmu sosial akhirnya pelan-pelan dilepaskan dari dimensi keruangan dimana manusia—yang makhluk sosial itu—berruang.

Oleh karena itu, mengindonesiakan dalam makna yang pertama sejatinya merupakan perlawanan atas kemapanan ilmu-ilmu pengetahuan (versi) Barat. Intelektual neo-marxist dari Italia, Antonio Gramsci (1891-1937) telah memberikan *warning* kepada kita semua bahwa hegemoni kelompok dominan dilakukan, antara lain, melalui indoktrinasi intelektual untuk membangun kesadaran palsu³—yang tentunya dikombinasi dengan paksaan fisik, dominasi ekonomi, serta indoktrinasi moral dan kultural. Situasi tersebut melahirkan kemapanan tunggal yang menghegemoni ilmu sosial dan studi-studi pembangunan yang oleh Syed Farid Alatas disebut sebagai *captive mind*.⁴ Instrumen perlawanan paling utama dan mendasar atas situasi tersebut adalah revolusi intelektual yang dalam bahasa Gramsci disebut kontra hegemoni.

Kedua, “berorientasi untuk Indonesia”, artinya masyarakat Indonesia dengan aneka kekhasan, kebutuhan, dan kepentingannya, harus menjadi penerima maslahat terbesar dari perkembangan ilmu-ilmu sosial. Sangat banyak kisah bagaimana perkembangan ilmu melalui riset-riset ilmiah yang berorientasi pada ilmu itu sendiri, bukan untuk masyarakat sekitar dimana diskoveri itu dilakukan, dan bahkan pada akhirnya menghancurkan masyarakat.

Sejarah eksplorasi Tembaga di Papua merupakan salah satu tragedi ilmiah yang paling tragik. Bermula dari catatan ekspeditif Kapten Jan Cartenz pada 1632 mengenai pegunungan bersalju di Papua yang kemudian disebut pegunungan Carstenz untuk mengenang jasa sang empunya nama, ekspedisi lebih serius dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907. Ekspedisi ilmiah kemudian berlanjut pada 1936 yang berujung pada “penemuan” kandungan tembaga⁵ di area pegunungan Timika

3 Adamson, Walter L (1980), *Hegemony and Revolution: Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory* (University of California Press Ltd, California dan London), hlm. 234

4 Syed Hussein Alatas (1996), *Intelektual Masyarakat Membangun* (Dewan Pustaka dan Bahasa, Malaysia), hlm. xviii

5 Itulah mengapa area pegunungan tersebut kemudian disebut sebagai Tembaga di Papua.

Papua yang pada perkembangannya dinamai Ertsberg. Temuan tersebut dilanjutkan dengan eksplorasi ilmiah yang dilakukan oleh ahli geologi Freeport bernama Forbes Wilson pada tahun 1959 yang akhirnya menemukan kandungan emas. Area yang dalam perspektif ulayat merupakan bagian dari hak tradisional suku-suku asli Papua—Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Damal, Moni dan Mee atau Ekari—adalah yang selanjutnya menjadi objek eksplorasi PT Freeport Indonesia melalui konsesi tahun 1967 yang “tahu-tahu” menjadi kontrak karya itu.

Yang menimpa masyarakat kemudian adalah tragedi. Terjadi pemiskinan besar-besaran di sekitar area eksplorasi Freeport, kesenjangan sosial ekonomi akut, kegagalan massif pembangunan di Papua, kejahatan ekologis dan penghancuran ekosistem, serta pelanggaran berat hak asasi manusia.⁶ Sampai titik ini, rasanya tidak perlu menoleh pada mega skandal lain untuk mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak jarang berhilir pada tragedi-tragedi kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Secara aksiologis, dua pemaknaan tersebut di tengah konteks faktual di sekitarnya berimplikasi pada tuntutan terhadap kaum intelektual, khususnya ilmuwan-ilmuwan sosial, untuk melakukan perjuangan intelektual yang serius dalam rangka mengindonesiakan ilmu-ilmu sosial pada dua ranah sekaligus; pengembangan ilmu itu sendiri dan pembangunan nasional kita sebagai bangsa merdeka. Bukan perkara gampang, tapi perjuangan tersebut dapat dimulai dengan agenda-agenda sederhana seperti riset, khususnya *grounded research*, dan publikasi ilmiah.

KENDALA KULTURAL DAN STRUKTURAL

Perlawanan intelektual tersebut bukan perkara mudah. Kendala terbesar untuk melaksanakan revolusi intelektual dalam ilmu-ilmu sosial hadir dalam dua lapisan, kultural dan struktural. *Pertama*, pada ranah kultural dapat kita identifikasi dua patogen psikologi sosial pokok yang sangat berpotensi menghambat, yaitu ketidakpercayaan pada orang lain (*distrust*) dan ketidakpercay-

6 Siti Maimunah (ed), (2006), *Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa Menjahaj Indonesia* (WALHI dan JATAM, Jakarta), hlm. 17-63.

aan pada diri sendiri (*lack of confidence*). Dua hambatan kultural tersebut mengingatkan penulis pada salah satu ciri negatif manusia Indonesia yang diceramahkan Muchtar Lubis pada tahun 1977, yaitu berwatak lemah.⁷

Soal *trust*, penulis tidak berpretensi secara khusus untuk melegitimasi adagium Francis Fukuyama, tetapi fenomena kontemporer memperkuat dugaan penulis bahwa telah terjadi degradasi *trust* secara serius di kalangan kita. Ada dua gejala menarik dalam pemanfaatan media sosial, khususnya yang berbasis *WhatsApp* dan *Facebook*⁸, yang dapat memperkuat hipotesis mengenai *distrust* tersebut. Penulis terlibat dalam banyak grup yang partisipannya sebagian besar para intelektual. Teramat sering kita mendapati postingan berupa nasehat-nasehat sederhana dan analisis-*analisis* fenomena harian dari para motivator, agamawan dan sebagainya, yang sejatinya mampu kita sampaikan dalam kalimat kita dengan *by name* kita sendiri. Akan tetapi faktanya kita lebih senang mem-viral-kan postingan orang-orang yang bahkan kita tidak kenal siapa mereka itu. Mengapa demikian? Dugaan saya, sekali lagi dugaan, disebabkan oleh rendahnya kepercayaan dari komunitas kepada sesama intelektual dalam komunitas tersebut—minimal di grup medsos itu. Sederhananya, dua kalimat yang dibagi atas nama Mario Teguh akan lebih dipercayai dibandingkan atas nama Mukidi misalnya, teman kantor yang mejanya berada persis di sebelah kita.

Fememena itu, di lain sisi, barangkali juga merupakan ekspresi dari gejala kedua; ketidakpercayaan diri. Di grup-grup media sosial kita kerap menemukan postingan mengenai analisis-*analisis* ilmiah yang masuk akal namun di atasnamakan seseorang yang “Pakar Kesehatan Harvard” lah, “Pakar Hukum Internasional UI” lah dan lain sebagainya. Beberapa postingan dibantah oleh yang memiliki nama dan dinyatakan sebagai *hoax* dan yang lain sulit untuk kita verifikasi. Jika fenomena itu dilakukan oleh *buzzer* untuk mengiring opini publik dan menciptakan “kesadaran palsu”

7 Muchtar Lubis, (2001) *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*. (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta)

8 Penulis tidak menggunakan aplikasi *Blackberry Messenger* (BBM), sehingga tidak bisa berbagi pengalaman mengenai lalu lintas informasi berbasis program tersebut. Namun demikian penulis menduga fenomena dimaksud tidak jauh berbeda.

menggunakan dunia maya, seperti *buzzer* politik berkedok relawan yang marak belakangan ini, tentu membutuhkan analisis dan pembacaan yang berbeda.

Jika kita *scale-up* pada fenomena yang lebih teoretik, maka kita akan lebih mudah mengidentifikasi dua gejala ketidakpercayaan intra dan ekstra personal tersebut. Salah satu yang bisa kita bahas antara lain, dalam bidang keilmuan penulis yaitu politik dan pemerintahan, soal konsep demokrasi sosial dan demokrasi permusyawaratan. Proses seputar perumusan Pancasila oleh para pendiri negara dapat kita jadikan refleksi untuk membaca itu.

Satu dari Trisila yang diabstraksi Sukarno dari Pancasila adalah sosio-demokrasi, demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan, kemakmuran bersama dan keadilan sosial. Sayangnya, dalam perkembangan keilmuan di Indonesia, ilmuwan politik tidak banyak mengeksplorasi gagasan tersebut untuk diinstrumentasi menjadi sistem politik yang diturunkan dari nilai Pancasila dan selanjutnya diadopsi di negara Pancasila ini. Hingga kita terpesona mendapati negara-negara Skandinavia, seperti Islandia dan Norwegia, yang menganut *social democracy* (sering juga disebut *social market*) dalam dekade terakhir mendominasi nomor-nomor buncit dalam Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*), artinya mereka sangat berhasil sebagai negara dalam penyelenggaraan negaranya.

Bahkan, belakangan akademisi politik terkagum-kagum dengan *deliberative democracy* yang umumnya dinisbatkan pada Jurgen Habermas.⁹ Para ilmuwan mulai mendiskusikan dan mendiseminasikannya di kelas-kelas ilmu dan teori politik. Padahal, bukankah demokrasi permusyawaratan sudah menjadi preferensi para pendiri negara-bangsa 71 tahun lalu dan nyata tersurat dalam sila keempat Pancasila?

Di bidang ekonomi, lebih tragis lagi. Prof Mubyarto—guru penulis saat bersama berbagai elemen kaum muda Yogyakarta mengelola Sekolah Ekonomi Rakyat (SER) di Pustep UGM—bekerja keras mengonseptualisasi tema yang digagas Emil Salim, yaitu Ekonomi Pancasila. Pak Muby bersama para ekonom progresif

9 Habermas, Jurgen, (1996), *Between Facts and Norms* (MIT Press, Cambridge, Massachusetts)

lainnya gigih merumuskan Pancasila sebagai panduan moral dalam pembangunan ekonomi dan ekonomika. Sayang, konsep ekonomi Pancasila lebih sering ditertawakan. Para ekonom dan pemangku kebijakan lebih percaya pada fundamentalisme pasar dibandingkan nilai inti Pancasila untuk memandu ekonomi dan ekonomika. Hingga wafat, beliau “kesepian”, bahkan di fakultasnya sendiri. Nama “Pusat Studi Ekonomi Pancasila” pun hilang sepeninggal beliau.

Kedua, secara struktural kendala terbesar hadir dalam bentuk lemahnya politik ilmu pengetahuan dari pemerintah. Lemahnya politik ilmu pengetahuan tersebut dapat dibaca dari acakadutnya politik bahasa. Dibandingkan dengan Jepang, negara Timur yang mampu menyejajarkan diri dengan dominasi ilmu dan teknologi Barat, kita ketinggalan dalam hal politik bahasa. Pemerintah Jepang mengambil inisitif kebijakan untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Dengan demikian, perkara menyerap ilmu, dari Barat melalui buku-buku yang pada mulanya berbahasa Inggris serta mengajukan antitesis dan membangun sintesis bagi para ilmuwan Jepang yang tidak menguasai bahasa Inggris jauh lebih mudah dibandingkan disini. Bagi mereka, pengembangan ilmu pengetahuan berbasis apa-apa yang mereka punya dan tuntutan pergaulan global adalah dua hal yang berbeda.

Di sisi lain, juga tidak tampak *political will* pemerintah untuk mengembangkan apa yang sejatinya sudah ditemukan oleh para intelektual pendiri negara. Salah satu misal yang membuat kita miris adalah di bidang pendidikan. Gagasan-gagasan besar yang telah dihasilkan oleh, utamanya Ki Hadjar Dewantara, tidak pernah secara serius digali oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan pendidikan nasional. Kita lebih sering melakukan studi banding ke negara-negara maju setiap akan merumuskan kebijakan pengembangan kurikulum baru, dibandingkan dengan membuka arsip-arsip lama yang memuat gagasan-gagasan besar Ki Hadjar. Bahkan, untuk strategi pembelajaran yang sangat teknis sekalipun, kita sering *kulakan* dari negara lain seperti Australia, Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa. Padahal seorang intelektual petualang yang sangat kritikal terhadap hegemoni Barat (baca; negara-negara maju) bernama Andre

Gunder Frank mengingatkan negara-negara non Barat dengan adagium *the underdevelopment of development*.¹⁰

Ilmuwan Jerman itu kurang lebih mengingatkan bahwa jika negara-negara berkembang (*developing countries*) dan negara-negara dunia ketiga (*underdeveloping countries*) ingin maju, janganlah mengikuti jalan negara-negara maju (*developed countries*). Jika mereka mengikuti jalan negara-negara maju tersebut, yakinlah bahwa yang akan semakin maju adalah negara-negara maju itu, sedangkan pembangunan di negara-negara-negara yang mengikuti akan semakin mundur belaka.

KONTRIBUSI FAKULTAS ILMU SOSIAL

Di tengah situasi yang kurang menggembirakan itu, Di usianya yang menginjak tahun ke-51, FIS UNY telah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pengembangan ilmu dan pembangunan nasional. Sebelas gagasan para guru besar yang saat ini berada di tangan pembaca hanya salah satu dari sekian artefak dan bukti konkrit dari kontribusi dimaksud.

Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa seluruh pemikiran yang disampaikan para guru besar FIS dalam pengukuhan masing-masing sebagai guru besar merupakan salah satu puncak tertinggi dalam karir akademik beliau-beliau. Secara objektif kita harus katakan bahwa hampir seluruhnya sangat bagus.

Beberapa tulisan secara substantif sangat inspiratif sesuai dengan konteks jamannya, bahkan beberapa di antaranya melampaui jamannya. Salah satu yang patut dicatat tentu pemikiran Prof. Drs. Lafran Pane. Membaca judulnya saja kita tahu bahwa pemikiran beliau sangat progresif. Sebagaimana jamak dimafhumi, rezim Orde Baru yang bertahta secara formal sejak 1967 selalu mengglorifikasi kemurnian Pancasila dan UUD 1945 dengan 'tagline' "melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen".

10 Melihat terma yang digunakan, tentulah optik yang digunakan Frank adalah studi ekonomi politik. Frank, Andre Gunder, (1996), *The Underdevelopment of development*. Versi booklet tulisan Frank tersebut tersedia di alamat: <https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/download/6716/6151>, diakses pada 31 Agustus 2016

Lebih jauh dari itu, mari kita cermati kutipan berikut.

“...kalau kita...ingin menganut sistem presidentiil secara tegas, lebih baik diubah saja cara pemilihan presiden. Tidak dipilih lagi oleh MPR tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian presiden tidak harus bertanggungjawab lagi kepada MPR dalam arti luas. Dan dengan demikian ada jaminan kestabilan pemerintah.”

Membaca kutipan tersebut, kita seperti membaca opini pakar hukum tata negara pasca reformasi. Padahal, gagasan tersebut disampaikan dalam pengukuhan beliau sebagai guru besar pada tanggal 16 Juli 1970. Sejarah mencatat, akhirnya kita mulai mengimplementasikan gagasan pemilihan presiden secara langsung tersebut pada tahun 2004, tentu sebagai implikasi amandemen UUD 1945—atau dalam frasa Prof Lafran; perubahan konstitusional.

Kontribusi beliau sangat besar bagi perjalanan negara-bangsa. Sumbangsih pemikiran beliau dilengkapi dengan “*urun*” dalam bentuk gerakan sosial kemahasiswaan dalam mengisi kemerdekaan dengan mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang alumninya silih berganti menjadi penyelenggara negara. Jadi kita akan heran dan sangat apresiatif jika pada saatnya Pemerintah menganugerahi beliau gelar “Pahlawan Nasional”. Jika takdir mencatat begitu, maka seluruh civitas akademika FIS UNY sangat layak berbangga atas anugerah tersebut.

Selain itu, kita tidak bisa tidak harus secara objektif menyebut pemikiran Prof. Ahmad Syafii Maarif. Kita ditakdirkan Allah untuk menapak sejarah besar dimana salah satu intelektualnya mendapat pengakuan luar biasa atas kiprah dan pemikirannya bagi, tidak hanya bagi bangsa dan negara, akan tetapi juga bagi dunia global dan kemanusiaan universal.¹¹ Kita tidak perlu mencari dengan bantuan *google* untuk membuat *list* kiprah dan pemikiran beliau. Kalaupun itu kita lakukan, impresi kita sebagai intelektual atas kapasitas dan kiprah intelektual beliau pasti berlipatganda.

11 Bahwa beliau tidak mendapat peran-peran sentral untuk menata (terutama struktur) kampus beliau sendiri, menurut saya, itu harus kita akui sebagai sebuah “kekhilafan historis” yang tidak boleh terulang.

Berpijak pada apa yang Buya sampaikan sebagai pidato pengukuhan guru besar beliau, kita akan dengan mudah menyimpulkan bahwa pemikiran beliau tetap sangat relevan jika pun diceramahkan hari ini. Penulis ingin mencuplik sebagian sangat kecil saja dari pidato beliau.

“...untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana yang sering diucapkan memang bukan pekerjaan gampang. Inilah di antara tantangan mendasar yang harus dicarikan jalan keluarnya oleh para pengambil kebijakan, pemikir, ulama sejarawan, atau siapa saja yang memiliki kepekaan nurani, demi menjaga bangsa ini agar tidak jauh terpuruk secara moral. ... Menurut pandangan saya, sejarawan bersama dengan kekuatan intelektual yang lain adalah *avant-garde*, penjaga gawang moral bangsa. Bila penjaga gawangnya juga kebobolan, lalu kepada siapa lagi bangsa ini mengadukan persoalannya?

Tulisan sederhana ini sama sekali tidak berpretensi untuk mengulas seluruh pemikiran sebelas guru besar Fakultas Ilmu Sosial yang akan segera pembaca nikmati pada bagian-bagian inti buku ini. Seluruh pemikiran guru besar yang tertuang dalam buku ini, mulai dari Prof. Drs. Lafran Pane, guru besar pertama di Fakultas Ilmu Sosial ini hingga guru besar termuda di fakultas ini—sayangnya kini satu-satunya, Prof. Dr. Ajat Sudarajat, M.Ag., tentu merupakan gagasan-gagasan puncak dalam keilmuan, spektrum dan *coverage* masing-masing yang seluruhnya patut kita banggakan sebagai kontribusi civitas akademika bagi bangsa dan negara, dalam bentuk pengembangan ilmu dan praksis pembangunan bangsa.

Yang justru ingin disampaikan adalah catatan bahwa kita memiliki modal retrospektif, aktual, dan prospektif yang sangat besar untuk berkontribusi lebih besar lagi bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu-ilmu sosial—termasuk pendidikan—dan pembangunan bangsa. Persoalannya sekarang, apa dan bagaimana agenda-agenda pokok (*main*) dan pendukung (*auxiliary*) yang akan kita lakukan untuk melipatgandakan kontribusi yang sudah diberikan oleh para guru besar kita.

Terkait dengan gagasan inti yang ingin ditekankan penulis dalam prolog ini, kita tentunya harus memproyeksikan langkah-

langkah untuk mengindonesiakan pengembangan ilmu-ilmu sosial dalam maknanya yang pertama dan kedua yang telah penulis bahas pada bagian awal tulisan ini. Langkah utama yang perlu dipikirkan dan diambil segera adalah bagaimana dengan sekuat tenaga mengatasi kendala-kendala kultural dan struktural yang juga sudah penulis ulas.

Di tingkatan operasional, alat (*tool*) yang paling memungkinkan adalah kebijakan. Diperlukan *road map* kebijakan untuk memastikan agenda-agenda pengindonesiaan ilmu-ilmu sosial melalui intelektual-intelektual fakultas dan universitas melalui massifikasi (sekaligus substansiasi) *grounded research*, publikasi, dan *network*. Di sisi lain, penataan kelembagaan dan kultur akademik serta transformasi manajemen fakultas dan universitas harus berada dalam satu tarikan nafas dengan agenda-agenda tersebut.

Melihat potensi sumber daya manusia yang ada dan lingkungan sosio-kultural yang *challenging*, penulis sangat yakin kontribusi intelektual-intelektual kita untuk mengindonesiakan ilmu-ilmu sosial sangat bisa kita harapkan. Kebijakan yang kondusif dan suportif tentu akan lebih memungkinkan harapan tersebut menjadi nyata.[*]

REFERENSI

- Adamson, Walter L. (1980). *Hegemony and Revolution: Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory*. (California dan London: University of California Press ltd).
- Frank, Andre Gunder. (1996). *The Underdevelopment of Development*. <https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/download/6716/6151>, diakses pada 31 Agustus 2016.
- Habermas, Jurgen. (1996). *Between Facts and Norms* (MIT Press, Cambridge, Massachuset).
- <http://kbbi.web.id/Indonesia>, diakses pada 1 September 2016.
- Muchtar Lubis, (2001) *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siti Maimunah (ed), (2006), *Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa Menjajah Indonesia*. (Jakarta: WALHI dan JATAM).
- Syed Hussein Alatas. (1996). *Intelektual Masyarakat Membangun* (Malaysia: Dewan Pustaka dan Bahasa Malaysia).

DAFTAR ISI

Sambutan Dekan FIS _____ *iii*

Prof. Dr. Ajat Sudrajat M.Ag.

PROLOG _____ *v*

Halili, S.Pd., M.A.

1 *PERUBAHAN KONSTITUSIONIL* _____ *1*

Prof. Drs. Lafran Pane

2 *PERANAN GURU DALAM MEMBINA MANUSIA INDONESIA YANG BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEADAAN SEHAT DAN BAHAGIA* _____ *25*

Prof. Dr. Saidiharjo

3 *PERANAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA* _____ *61*

Prof. Drs. Haditono

4 *PENDIDIKAN GEOGRAFI, TUJUAN, FUNGSI, TANTANGAN, DAN PELUANGNYA DALAM MENYONGSONG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DI INDONESIA* _____ *85*

Prof. Drs. Sumantri Wardoyo

5 *MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN* _____ *109*

Prof. Dr. Sunarto Hadisupadmo, MS.

6 *SUMBANGAN PENDIDIKAN GEOGRAFI DALAM PEMBENTUKAN MANUSIA BERWAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA* _____ *127*

Prof. Drs. R. Iman Sujagad Saleh

- 7** KETERKAITAN ANTARA SEJARAH, FILSAFAT DAN AGAMA 153
Ahmad Syafii Maarif
- 8** PARADIGMA BARAT DAN ISLAM DALAM DINAMIKA BANGSA 177
Prof. Dr. Husain Haikal, MA.
- 9** HARMONISASI HUBUNGAN NASIONALISME, NEGARA, DAN AGAMA
DALAM PERSPEKTIF PLURALISME MENUJU INDONESIA BARU, SUATU
ANALISIS KRITIS 211
Prof. Drs. Daliman, M.Pd
- 10** PERANAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DALAM PROSES BELAJAR-
MENGAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 241
Prof. Dr. Abdul Gafur Daniamiseno
- 11** PENDIDIKAN AGAMA ISLAM yang ILMIAH dan AMALIAH 271
Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
- EPILOG 308
Dr. Suharno, S.Pd., M.Si.

Dari Karangmalang

Untuk

Pengembangan Ilmu

Dari Karangmalang

dan Pembangunan

Untuk Pengembangan Ilmu dan

Bahasa: Pemikiran

Pembangunan Bangsa;

Para Guru Besar

Pemikiran Para Guru Besar

Fakultas Ilmu Sosial

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri

Universitas Negeri Yogyakarta

Yogyakarta

PERUBAHAN KONSTITUSIONAL

Pidato Guru Besar dalam mata pelajaran Ilmu Tata
Negara pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta
Yogyakarta, Kamis, 16 Juli 1970.

PROF. DRS. LAFRAN PANE

Fakultas Keguruan Ilmu Sosial
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta



PERUBAHAN KONSTITUSIONIL

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur susunan negara yang tertentu. Hukum Tata Negara Republik Indonesia mengatur susunan negara Republik Indonesia. Hukum adalah himpunan norma-norma, himpunan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, yang diterapkan atau yang diakui oleh Pemerintah, tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum Tata Negara adalah himpunan norma-norma, himpunan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya mengenai susunan Negara.

Negara adalah satu organisasi, yaitu satu sistem kerjasama yang teratur untuk mencapai tujuan bersama yang tertentu. Dengan demikian Hukum Tata Negara tergantung pada orang-orang yang membentuk sistem kerja sama itu. Dalam negara yang menganut ajaran kedaulatan rakyat, rakyatlah yang membentuk sistem kerja sama itu. Dengan demikian, materi (isi) dari pada Hukum Tata Negara itu tergantung pada rakyat. Apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya tergantung pada penilaian rakyat. Dan penilaian itu tergantung pada keyakinan rakyat. Dan keyakinan rakyat ini ditetapkan oleh bermacam-macam faktor psikologi, faktor kultur, dan lain-lain. Faktor mana yang paling menentukan, tergantung pada waktu. Dengan demikian, keyakinan rakyat senantiasa berubah-ubah sesuai dengan berubahnya faktor-faktor yang menetapkannya. Dengan demikian, penilaian apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya berubah pula sesuai dengan berubahnya keyakinan itu. Dan dengan demikian materi (isi) dari pada Hukum Tata Negara berubah pula.

Isi dari pada Hukum Tata Negara dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah, dan peraturan-peraturan tertulis lainnya, serta pada peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Berubahnya isi dari pada Hukum Tata Negara berarti berubahnya peraturan-peraturan tersebut. Lepas dari pada isinya, kita dapat mengatakan dengan berubahnya Hukum Tata Negara berarti harus berubah pula peraturan-peraturan tersebut. Walaupun redaksi peraturan-peraturan

tersebut tidak berubah, peraturan-peraturan tersebut tidak memuat lagi Hukum Tata Negara seperti yang berlaku semula. Atau dengan perkataan lain, peraturan-peraturan tersebut tidak lagi menggambarkan Hukum Tata Negara yang berlaku.

Penjelasan tentang UUD Negara Indonesia pada Bagian Umum Nomor 1 alinea ke-2 menyebut bahwa hukum dasar adalah sama dengan *droit constitutionelle* dalam bahasa Perancis. Dan tentunya sama dengan *constitutional law* dalam bahasa Inggeris dan Hukum Tata Negara dalam bahasa Indonesia. Tetapi pada bagian lain (alinea 1 Bagian Umum Nomor 1) disebut bahwa hukum dasar tertulis sama dengan UUD. Dan selanjutnya pada Bagian Umum Nomor IV dijelaskan bahwa bukan dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok dan selanjutnya penyelenggaraan aturan-aturan pokok ini diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, saya mengambil kesimpulan bahwa Penjelasan tentang UUD mengenal dua pengertian terhadap perkataan hukum dasar.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam Rencana Pembukaan mempergunakan perkataan Hukum Dasar yang diganti oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan perkataan UUD. Andaikata tidak diganti maka kita akan mengalami kesulitan dalam menyusun Negara Republik Indonesia selanjutnya. Karena dengan demikian kita akan menyamakan UUD dengan Hukum Dasar. Dan dengan mempergunakan pengertian pertama mengenai Hukum Dasar, maka seolah-olah susunan Negara Republik Indonesia kita akan bertemu hanya pada Hukum Dasar.

Saya tidak sependapat dengan orang-orang yang menyamakan undang-undang dengan hukum dan UUD dengan Hukum Dasar. Bagi saya, undang-undang pada waktu yang tertentu memuat hukum, tetapi beberapa waktu sesudah itu dapat tidak memuat hukum lagi. Begitupun UUD pada waktu tertentu memuat hukum dasar (aturan-aturan pokok), tetapi beberapa waktu sesudah itu dapat tidak memuat hukum dasar lagi. Tegasnya, pada waktu tertentu, suatu undang-undang menggambarkan hukum, tetapi kalau keadaan berubah mungkin undang-undang itu tidak menggambarkan hukum lagi. Mungkin satu peraturan yang tidak

tertulis telah menggantikannya, menggambarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, undang-undang maupun UUD harus senantiasa diubah sesuai dengan berubahnya hukum, sesuai dengan berubahnya penilaian mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Jangan sekali-sekali sesuatu yang menggambarkan sesuatu kita samakan sesuatu yang digambarkan itu. Jangan kita samakan gambar seseorang dengan orangnya. Gambar seseorang 50 tahun yang lalu sudah pasti berbeda dengan gambarnya hari ini. Dalam bahasa Inggris dibedakan antara *a law* dengan *law*, atau antara *Law* dengan huruf besar "L", dengan *law* dengan huruf kecil "l". dalam bahasa Jerman antara *Gesets* dengan *Recht*, di Uni Soviet antara *zakon* dengan *pravo*, serta di Negeri Belanda antara *wet* dengan *recht*.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. yang dimaksud dengan rakyat dalam pasal ini tentu adalah rakyat yang hidup pada masa jabatan MPR yang bersangkutan. Walaupun dalam UUD 1945 tidak disebut masa jabatan MPR tetapi analog dengan interpretasi otentik mengenai Pasal 3 UUD 1945 tentang penetapan garis-garis besar haluan Negara yang harus dilakukan tiap lima tahun dan masa jabatan Presiden maupun Wakil Presiden adalah lima tahun, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa masa jabatan MPR adalah lima tahun. Dengan demikian MPR yang bersangkutan hanya mempunyai mandat dari rakyat yang hidup pada masa jabatan lima tahun itu. Ia harus dapat menggambarkan keinginan rakyat dan kepentingan rakyat yang ia wakili. Ia harus dapat mengetahui keyakinan rakyat mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya pada waktu itu dan menilai segala sesuatu berdasarkan keyakinan itu.

Dengan demikian keputusan MPR yang bermasa jabatan mulai tahun 1971 sampai dengan 1976, mungkin lain dengan keputusan MPR bermasa jabatan 1976 sampai dengan 1981 mengenai materi yang sama. MPR bermasa jabatan 1971 sampai dengan 1976 tidak mempunyai hak untuk mendikte MPR bermasa jabatan 1976 sampai dengan 1981. Tegasnya, rakyat yang hidup pada tahun 1971 sampai dengan 1976 tidak punya hak untuk mendikte

rakyat yang hidup pada tahun 1976 sampai dengan 1981 dan tahun-tahun selanjutnya. Kalau berlaku yang sebaliknya, maka akan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ini akan merupakan *diktatuur* yang dilakukan oleh rakyat terhadap rakyat yang masa hidupnya berbeda. Dan dapat dikatakan rakyat yang diwakili oleh MPR bermasa jabatan tahun 1971 sampai dengan 1976 itu ingin agar rakyat sesudah masa jabatan MPR ini menjadi konservatif. Dan terutama MPR yang sekarang ini sekali-kali tidak boleh mendikte MPR yang akan datang.

Sampai sekarang ini pendirian saya mengenai wewenang MPR masih tetap seperti yang saya ajukan pada bulan Januari 1960 (lihat tulisan kedua di buku ini, "Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat", Pidato Dies Natalis XV Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 26 Januari 1960 –*ed*), yaitu:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar,
2. Mengubah Undang-Undang Dasar,
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4. Menetapkan garis-garis besar haluan Negara.

Wewenang/kekuasaan melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya adalah wewenang yang bersifat umum (*genus*) dan empat wewenang yang saya sebut tadi adalah wewenang yang bersifat khusus (*specie*). Sesuai dengan yang disebut pada Penjelasan tentang UUD Negara Indonesia akibat dengan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dan ditetapkannya garis-garis besar haluan negara oleh MPR dan harus dilaksanakan oleh Presiden maka adalah logis kalau Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR dalam arti yang luas. Dan selanjutnya dengan adanya wewenang MPR untuk menetapkan/mengubah UUD mengakibatkan ia mempunyai wewenang untuk menafsirkan UUD. Ialah yang mengetahui apakah suatu keputusan Presiden bertentangan dengan UUD atau tidak. Dan ia pulalah yang paling mengetahui apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD atau tidak.

Baru-baru ini dalam DPR-GR ada anggota-anggota yang mengatakan bahwa beberapa pasal dalam RUU Pemilihan Umum bertentangan dengan konstitusi. Benar atau tidaknya pendapat ini tentu tergantung pada MPRS yang sekarang melakukan tugas MPR.

Saya termasuk pada orang-orang yang tidak menyetujui pendapat bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji sesuatu undang-undang secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Sesuai dengan pendapat saya tadi bahwa MPR-lah yang paling mengetahui apakah sesuatu undang-undang konstitusional atau tidak, maka saya berpendapat MPR-lah yang mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang secara materiil. MPR dapat membentuk satu Panitia Penguji Hukum yang ditugaskan untuk tujuan ini. Panitia ini dengan sendirinya memerlukan bantuan dari ahli-ahli hukum. Panitia ini bertanggungjawab sepenuhnya kepada MPR.

Janganlah disamakan *Supreme Court of Justice* Amerika Serikat dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Walaupun sistem pemerintahan kita sama, yaitu sistem presidentiil, Amerika Serikat adalah satu negara federal di mana diadakan pembagian kekuasaan antara pusat dengan negara-negara bagian secara konstitusional dan pusat tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi kekuasaan negara-negara bagian.

Dapat kita menerima kalau *Supreme Court* mempunyai wewenang menguji suatu keputusan Presiden maupun menguji suatu *act* secara materiil. Di Amerika Serikat tidak ada satu badan seperti MPR kita yang dapat bersidang setiap waktu untuk menilai tindakan Presiden maupun tindakan Presiden bersama-sama DPR. Dan juga tidak dapat kita contoh negara Perancis dengan Dewan Konstitusinya yang antara lain mempunyai tugas untuk menguji suatu undang-undang maupun suatu keputusan pemerintah pada konstitusi, mengingat sistem pemerintahan kita berbeda dengan Perancis.

Apakah suatu keputusan MPR sesuai dengan keyakinan rakyat atau tidak, secara formil dapat kita dengan mudah mengetahui. Tiap keputusan MPR adalah sesuai dengan keyakinan rakyat karena badan ini anggota-anggotanya adalah wakil-wakil rakyat. Secara materiil adalah sukar, karena keputusan itu harus kita uji dulu dengan keyakinan tiap-tiap warga Negara Republik Indonesia. Atau diuji dengan satu ukuran yang menggambarkan keyakinan rakyat. Dalam hal ini harus kita bersyukur kepada Tuhan Yang

Maha Esa yang kita sudah memiliki satu kriterium hukum, satu *rechtsidee*, satu cita hukum (berbeda dengan Penjelasan tentang UUD Negara Indonesia Bagian Umum nomor III yang menyalin *rechtsidee* ini dengan cita-cita hukum). Saya mengambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran yang dimaksud Penjelasan tentang UUD Negara Indonesia Bagian Umum nomor III yang merupakan perwujudan dari pada *rechtsidee* itu adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis senantiasa harus dinilai, sesuaikah ini dengan Pancasila atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka hukum itu tidak sesuai dengan keyakinan rakyat dan harus diganti/diubah.

Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau Pemerintah atau MPR mengadakan interpretasi yang tegas mengenai Pancasila ini, karena dengan demikian akan terikatlah Pancasila ini dengan waktu. Biarkan saja tiap golongan mempunyai interpretasi sendiri-sendiri mengenai Pancasila ini. Dan interpretasi golongan-golongan ini mungkin pula akan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya perbedaan-perbedaan interpretasi ini menunjukkan kemampuan hidup Pancasila ini untuk selamanya sebagai dasar (filsafat) Negara.

Antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 sudah berkali-kali UUD 1945 diubah, yaitu dengan Maklumat Wakil Presiden Nomor X, yaitu perubahan Aturan Peralihan Pasal IV mengenai tugas Komite Nasional Pusat (KNP). Dengan Pengumuman Badan Pekerja Nomor 5 Tahun 1945 yaitu perubahan Pasal 4 dan Pasal 17, biarpun perubahan ini dicabut kembali dengan terbentuknya Kabinet Presidentiil pada tahun 1948 yang sehari-hari dipimpin oleh Wakil Presiden. Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1948 menambah ketentuan dalam Pasal 8, yaitu mengenai penunjukan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia. Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1949 diubah Pasal 37 dan Aturan Peralihan Pasal IV yaitu pemberian wewenang kepada KNP untuk mengubah UUD bersama-sama dengan Pemerintah dengan ketentuan sidang-sidang KNP untuk tujuan ini cukup dihadiri oleh separuh dari jumlah seluruh anggota ditambah satu serta keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak. Dan

pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1949 dengan sendirinya mencakup pengertian bahwa UUD 1945 dengan demikian diubah. Segala ketentuan dalam UUD 1945 yang tidak sesuai dengan Konstitusi RIS tidak berlaku lagi sejak tanggal 14 Desember 1949 yaitu sejak diumumkannya undang-undang tersebut. Artinya segala pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hal-hal yang tidak merupakan urusan Negara Bagian Republik Indonesia tidak berlaku lagi, antara lain Pasal 10 dan Pasal 30 mengenai Pertahanan, Pasal 11 dan Pasal 13 mengenai Hubungan Luar Negeri, dan Pasal 26 mengenai Warga Negara.

Tentunya perubahan-perubahan dilakukan melihat keadaan pada waktu itu dan dengan sendirinya keyakinan rakyat senantiasa dipergunakan sebagai ukuran. Perubahan-perubahan tidak dilakukan pada tubuh UUD 1945, tapi dapat kita anggap sebagai lampiran dari pada UUD itu. Dan seperti kita lihat tadi, perubahan-perubahan itu tidak dilakukan dalam bentuk peraturan yang tertentu, tetapi dalam tiga macam bentuk yaitu Maklumat Wakil Presiden, Pengumuman Badan Pekerja KNP, dan undang-undang. Memang, seperti pernah saya katakan bentuk peraturan yang memuat realisasi wewenang MPR seperti perubahan UUD dan penetapan garis-garis besar haluan negara, tidak ada kesatuan. Garis-garis besar haluan negara ditetapkan dalam Maklumat Politik yang diumumkan pada tanggal 1 November 1945. Barulah pada tahun 1960 kita mengenal Ketetapan-ketetapan MPRS.

Seperti saya katakan tadi, lampiran-lampiran yang merupakan perubahan UUD dapat pula sewaktu-waktu dicabut kembali atau diubah, sama dengan yang berlaku pada Konstitusi Amerika Serikat. Kita mengenal umpamanya Amandemen Nomor 18 yang dicabut dengan Amandemen Nomor 21.

Konstitusi RIS pun pernah diubah dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan dalam Konstitusi itu, yaitu dengan ditunjuknya empat orang pembentuk kabinet, sedangkan dalam Konstitusi disebut harus tiga orang. Karena tindakan Presiden ini dianggap syah, berarti dasar hukum yang dipergunakan bagi penunjukan itu sudah berubah.

Begitu pun ketentuan Konstitusi RIS mengenai penggabungan satu daerah bagian atau bagian dari pada satu daerah bagian pada daerah bagian lain harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Tetapi pada tahun 1950, penggabungan dilakukan berdasarkan Undang-undang Darurat. Sedangkan menurut Pasal 139 Konstitusi RIS, yang dapat diatur dalam Undang-undang Darurat adalah penyelenggaraan pemerintahan. Karena penggabungan semua daerah bagian kepada daerah bagian Republik Indonesia pada tahun 1950 adalah syah, berarti Pasal 139 Konstitusi RIS dianggap sudah berubah. Seperti kita ketahui, perubahan pada Konstitusi RIS harus dilakukan dengan satu undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat RIS. Rapat DPR dan Senat RIS dapat mengambil keputusan mengenai perubahan Konstitusi kalau dihadiri oleh masing-masing paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota-anggotanya. Dan usul perubahan ini harus disetujui oleh paling sedikit dua pertiga dari pada yang hadir. Dan selanjutnya harus diundangkan dengan ke-luhuran.

Biarpun perubahan-perubahan mengenai UUD 1945 yang dilakukan antara 1945 sampai dengan 1949 seperti saya katakan tadi dilakukan dalam bentuk peraturan yang berbeda-beda, perubahan-perubahan itu dilakukan sesuai dengan UUD 1945. Perubahan-perubahan itu senantiasa dilakukan atas dasar Aturan Peralihan Pasal IV yaitu dasar wewenang Presiden dengan bantuan Komite Nasional mengubah UUD sebelum MPR terbentuk. Hanya dalam bentuk peraturan apa dituangkan perubahan itu, tidak ada ketentuannya dalam UUD 1945. Tetapi seperti saya katakan tadi, dalam Konstitusi RIS bentuk peraturan ini tegas disebut. Saya berpendapat bahwa perubahan pada Konstitusi RIS pun tidak dapat dilakukan dalam batang tubuh Konstitusi ini, tetapi merupakan lampiran dari pada Konstitusi ini. Seperti saya katakan tadi, perubahan pada UUD 1945 seperti juga pada perubahan Konstitusi Amerika Serikat dapat diubah lagi sesuai dengan keadaan, berlaku pula terhadap perubahan pada Konstitusi RIS. Hal ini secara khusus dicantumkan pula dalam UUD 1950 pada Pasal 140, tetapi dengan prosedur yang sulit. Rencana perubahan UUD Sementara 1950 harus disetujui lebih dahulu dengan undang-undang. Sesudah itu

dibawa ke dalam Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar yang anggota-anggotanya terdiri dari pada seluruh anggota-anggota DPR Sementara dan semua anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang tidak menjadi anggota DPR Sementara.

Waktu DPR Sementara dibentuk yang anggota-anggotanya sesuai dengan Pasal 77 UUD Sementara 1950 terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota-anggota DPR RIS; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Senat RIS; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; dan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung; Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar tidak dibentuk. Dan sampai UUD Sementara 1950 tidak berlaku lagi yaitu sejak 5 Juli 1959 tidak pernah Majelis ini terbentuk. Mengingat sejak 17 Agustus 1950 Komite Nasional Pusat sudah tidak ada lagi, maka timbullah persoalan apakah masih mungkin dibentuk Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, kalau tidak dibentuk segera sesudah terbentuk Negara Kesatuan, seperti dilakukan mengenai DPR Sementara, mengingat dengan tidak adanya lagi Komite Nasional Pusat dengan sendirinya tidak ada lagi anggota-anggota KNP. Dan tambah sukar lagi kalau dibentuk sesudah terbentuknya DPR berdasarkan pemilihan umum. Karena dalam pasal itu disebut sebagian anggota-anggotanya adalah anggota-anggota DPR Sementara. Tegasnya, akan timbullah persoalan apakah anggota-anggota DPR yang tidak bersifat sementara lagi boleh menjadi anggota-anggota Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar ini?

Mungkin karena sukarnya untuk membentuk Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar ini, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR tiap kali hendak mengubah UUD Sementara 1950 merasa cukup dengan undang-undang saja. Apalagi dengan adanya ketentuan Pasal 95 yang mengatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat lagi.

Kita mengingat Undang-undang Nomor 37 Tahun 1953 yang memuat perubahan Pasal 77 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1957 yang merupakan tambahan terhadap Pasal 45 UUD Sementara 1950.

Sebetulnya di samping dengan melalui Dekrit Presiden ma-

sih ada lagi jalan yang dapat ditempuh untuk kembali ke UUD 1945. Andaikata Pemerintah sesudah melihat keadaan pada Konstituante bulan Mei 1959 mengajukan kepada DPR satu rencana undang-undang mengenai perubahan Pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, menurut perhitungan pasti akan mendapat persetujuan. Mengingat mayoritas anggota-anggota DPR pada waktu itu pada pihak Pemerintah.

Perubahan-perubahan itu adalah mengenai *quorum* Sidang Konstituante dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota sidang menjadi sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota sidang dan rancangan disetujui kalau sekurang-kurangnya separuh jumlah suara anggota yang hadir menerimanya. Kalau Pasal 45 dan Pasal 77 boleh diubah, kenapa pula Pasal 137 tidak boleh diubah? Dan seperti saya sebut tadi, berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1949 rapat-rapat Komite Nasional Pusat boleh mengambil keputusan mengenai perubahan UUD 1945 kalau dihadiri oleh separuh dari seluruh anggota-anggotanya ditambah satu dan segala keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak. Dengan diubahnya Pasal 137 itu, anjuran Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen, pasti akan diterima oleh Konstituante mengingat yang setuju dengan anjuran Pemerintah itu dalam Konstituante merupakan mayoritas mutlak.

Jalan lain yang dapat ditempuh untuk mengubah UUD adalah dengan Peraturan Penguasa Militer. Kita mengingat pada waktu itu Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya.

Pada tahun 1957 sesudah negara ditetapkan dalam keadaan bahaya, Penguasa Militer Pusat untuk kepentingan keamanan mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/09/1957 mengenai Kewarganegaraan. Sedangkan sesuai dengan UUD Sementara 1950 hal ini harus diatur dengan undang-undang. Pada tahun 1958 Penguasa Militer Pusat membentuk satu panitia untuk merancang mengenai satu peraturan mengenai pemerintahan daerah. Hasil Panitia ini tidak jadi dituangkan dalam satu Peraturan Penguasa Militer. Yang penting bagi kita di sini adalah Penguasa Militer demi keamanan mempunyai hak un-

tuk mengatur hal yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Seperti kita ketahui, pemerintahan daerah menurut Pasal 131 UUD Sementara 1950 harus diatur dengan undang-undang. Kalau Pasal 137 UUD Sementara 1950 dapat diubah dengan undang-undang, dengan melihat contoh-contoh yang saya sebut tadi, pasal tersebut dapat pula diubah dengan Peraturan Penguasa Militer demi keamanan Negara.

Sidang Umum IV MPRS yang diadakan mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 5 Juli 1966 menurut saya juga mengadakan perubahan pada UUD 1945, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XV yang pada Pasal 9 menentukan kalau Presiden berhalangan maka Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden (sebutan Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 sebetulnya tidak tepat, mengingat Surat Perintah itu sudah ditingkatkan menjadi Ketetapan MPRS Nomor IX). Pada Pasal 3 ditentukan jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPRS segera memilih Pejabat Presiden yang bertugas sampai dengan terbentuknya MPRS hasil Pemilihan Umum.

Menurut saya, Ketetapan MPRS Nomor XV ini merupakan tambahan pada Pasal 8 UUD 1945. Tambahan pada UUD adalah perubahan pada UUD.

Mengenai sebutan Pejabat Presiden berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XV ini, pada kuliah umum yang diadakan oleh Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS) pada tahun 1967, saya tidak menyetujui. Menurut saya, sebutan itu seharusnya Presiden. Dan alasan saya waktu itu dapat diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa perkataan pejabat pada Pasal 3 (Ketetapan MPRS Nomor XV *—ed*) itu ditulis tidak dengan huruf besar. Memang, Presiden adalah satu jabatan. Bukan orang. Memilih pejabat Presiden berarti memilih orang yang akan menjabat Presiden. Kalau pendapat saya ini dianut oleh MPRS, tentu tidak perlu ada Ketetapan MPRS Nomor XLIV yang menetapkan Jenderal Soeharto, Pengembang Ketetapan MPRS Nomor IX, menjadi Presiden Republik Indonesia sejak 27 Maret 1968.

Dan dengan adanya Ketetapan MPRS Nomor XLIV ini dapat

kita mengambil kesimpulan bahwa Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor XV sudah berubah. Begitu pun Pasal 2 sudah pasti berubah, karena tidak mungkin Presiden Soeharto kalau berhalangan dapat menyerahkan kekuasaan untuk sementara kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966. Dengan ditunjuknya Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) melakukan jabatan Presiden, waktu Presiden Soeharto baru-baru ini pergi ke luar negeri, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa dalam praktik (menurut hukum yang tidak tertulis) Pasal 2 (Ketetapan MPRS Nomor XV –ed) ini sudah berubah.

Mungkin sekarang ini dianggap tidak tepat untuk mengatur hal ini dalam satu undang-undang atau satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) seperti terjadi dengan Perppu Nomor 10 Tahun 1960 yang menentukan Menteri Pertama melakukan jabatan Presiden kalau Presiden berhalangan. Andaikata hal ini diatur dengan yang dilakukan pada tahun 1960 itu, tentu kita akan mengatakan karena ini merupakan perubahan (tambahan) pada UUD 1945, maka harus dilakukan dengan satu Ketetapan MPRS.

Begitupun andaikata Komisi yang dibentuk dalam Sidang Umum V MPRS untuk merumuskan hak-hak asasi manusia berhasil dengan tugasnya dan disahkan oleh rapat pleno MPRS, dengan demikian menjadi Ketetapan MPRS, maka hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam beberapa Pasal UUD 1945 bertambah. Tegasnya, dengan adanya pengesahan itu, berubahlah UUD 1945.

Seperti kita mengetahui, hasil Panitia Penyusun Perincian Hak-hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XIV sudah disetujui oleh Badan Pekerja MPRS. Dan selanjutnya harus disahkan oleh sidang MPRS/MPR. Pada sidang MPRS yang baru lalu, sesuai dengan prosedur persidangan, harus diputuskan dulu oleh Komisi, sesudah itu baru dibawa ke rapat Pleno.

Begitupun pendapat yang mengatakan sejak 5 Juli 1959 UUD 1945 adalah UUD yang bersifat tetap, mencakup pengertian bahwa UUD 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 sudah berubah, yaitu Pasal 3. Tegasnya MPR tidak mempunyai hak lagi menetapkan UUD. Seperti kita mengetahui, UUD 1945 hasil penetapan PPKI itu adalah UUD yang bersifat sementara. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 3, Aturan Tambahan, dan notulen rapat PPKI.

Saya tidak sependapat dengan MPRS yang mengatakan bahwa MPR nanti berhak menetapkan UUD sesuai Pasal 3 itu. Pendapat MPRS itu dapat kita lihat pada Keputusan MPRS Nomor 8/MPRS/1968 tentang Peraturan Tata Tertib MPRS. Penjelasan resmi mengenai Pasal 1 pada alinea ke-2 berbunyi seperti berikut: "MPRS sebagai lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, berhak dan berwenang pula menentukan garis-garis besar daripada segala kegiatan kenegaraan, kecuali penetapan serta perubahan Undang-Undang Dasar." Dengan *argumentum a contrario* saya mengambil kesimpulan bahwa MPR yang bersifat tidak sementara mempunyai hak untuk menetapkan UUD, menggantikan UUD1945.

Hal yang serupa pernah kita bertemu dalam Konstitusi RIS yaitu Pasal 122 yang mengatakan bahwa DPR RIS yang bersifat sementara tidak berhak memaksa kabinet atau masing-masing menteri meletakkan jabatan. Dengan *argumentum a contrario* kita mengambil kesimpulan bahwa DPR RIS yang tidak bersifat sementara mempunyai hak untuk memaksa kabinet atau masing-masing menteri meletakkan jabatan.

Saya berpendapat bahwa UUD yang sekarang ini tidak dapat diganti lagi. Tegasnya MPR tidak mempunyai hak untuk menetapkan UUD seperti disebut dalam Pasal 3. Kita menganut mengenai hal ini seperti yang dianut oleh Amerika Serikat. Perubahan dapat saja sewaktu-waktu diadakan yang merupakan lampiran daripada UUD ini. Perubahan-perubahan (amandemen) yang secara formal dilakukan oleh Kongres Amerika Serikat sejak tahun 1789 sampai dengan tahun 1962 ada 24 buah, tetapi bukan berarti yang Konstitusi Amerika Serikat berubah hanya dalam 24 amandemen itu, mengingat adanya wewenang *Supreme Court* (Mahkamah Agung --ed) untuk menginterpretasikan Konstitusi yang dapat

menimbulkan perubahan pada Konstitusi. Umpamanya dengan ajaran *implied power* Hamilton, *Supreme Court* dapat menambah wewenang Pemerintah Federal seperti tersebut dalam *Article 1 section 8* Konstitusi Amerika Serikat. Penambahan pada Konstitusi adalah perubahan Konstitusi.

Kita tidak menganut cara negara Perancis. Antara tahun 1789 sampai dengan tahun 1970, Konstitusi Perancis berganti sebanyak 16 kali. Zaman Republik Perancis I (1792-1804) mengenal tiga konstitusi. Zaman Republik Perancis II (1848-1852) satu konstitusi. Zaman Republik Perancis III (1875-1940) satu konstitusi. Zaman Republik Perancis IV (1945-1958) satu konstitusi sementara dan satu konstitusi tetap. Dan zaman Republik Perancis V (1958-sekarang) satu konstitusi. Konstitusi Republik Perancis ini sesuai dengan keadaan mengalami perubahan, antara lain Konstitusi zaman Republik IV telah diubah pada tanggal 9 Desember 1954. Begitupun Konstitusi sekarang ini sudah mengalami perubahan. Menurut Konstitusi, Presiden dipilih oleh satu Badan Pemilih (*electoral college*). Setelah diadakan perubahan, yaitu dengan referendum tanggal 25 Oktober 1962, Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum.

Uni Soviet sudah mengenal tiga UUD, yaitu UUD Tahun 1918, UUD Tahun 1924, dan UUD yang berlaku sekarang ini yaitu UUD Tahun 1936.

Kalau kita teliti secara mendalam, masih ada beberapa Ketetapan MPRS yang memuat perubahan pada UUD 1945, biarpun dalam Peraturan Tata Tertib yang saya kutip tadi MPRS tidak mempunyai hak untuk mengubah UUD.

Kenyataan ini menunjukkan, bagaimanapun juga UUD 1945 adalah sama dengan UUD negara-negara lain. Sesuai dengan keadaan harus mengalami perubahan. Dan ini memang diperkenankan oleh UUD 1945 pada Pasal 37 yang melalui *argumentum a contrario* dianut pula oleh MPRS seperti tersebut dalam Peraturan Tata Tertib MPRS. Begitupun semua Negara di dunia se-tahu saya menentukan di dalam UUD cara mengubah UUD-nya. Prosedur mengubah UUD termasuk yang tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu sulit.

Konstitusi Inggris (*unwritten constitution*) dapat diubah dengan satu *Parliament Act*, sama dengan mengubah satu *Parliament Act* yang lain. UUD Uni Soeviet menurut Pasal 146 dapat diubah oleh Soviet Tertinggi dengan persetujuan paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota. Di Negeri Belanda, perubahan harus ditetapkan lebih dahulu dalam *wet* segala usul untuk mengubah UUD, dan dengan tegas harus menunjuk perubahan yang diusulkan. Dan selanjutnya harus dinyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu ada dasarnya. Sesudah *wet* ini diundangkan, *Staten-Generaal* (Parlemen Belanda) dibubarkan. Seperti kita mengetahui, *wet* ditetapkan oleh *Kroon* bersama-sama dengan *Staten-Generaal*.

Staten-Generaal yang baru, mengambil keputusan menyetujui usul perubahan itu kalau paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggotanya menyetujui.

UUD Italia diubah dengan satu undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Italia pada dua rapat berturut-turut. Dan rapat ini berantara waktu paling sedikit tiga bulan serta disetujui oleh paling sedikit separuh dari seluruh anggota. Perubahan UUD dapat diajukan kepada referendum rakyat.

Di Amerika Serikat, usul perubahan harus disetujui oleh dua pertiga dari seluruh anggota *Senate* dan *House of Representatives* dan harus diratifikasikan oleh Dewan-dewan Legislatif/konvensi-konvensi dari tiga perempat Negara-negara Bagian. Atau dengan cara lain, yaitu *Congress* mengadakan satu konvensi untuk mengusulkan perubahan konstitusi atas permintaan dua pertiga dari seluruh Dewan-dewan Legislatif Negara-negara Bagian. Dan keputusan konvensi ini harus diratifikasikan oleh Dewan-dewan Legislatif/konvensi-konvensi dari tiga perempat Negara-negara Bagian.

Usul pada UUD negara Jepang dilakukan oleh *Diet* (Parlemen Jepang) dengan suara paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota masing-masing kamar menyetujui. Usul ini disampaikan untuk disahkan oleh rakyat pada suatu referendum atau pada satu pemilihan yang diatur oleh *Diet*.

UUD Republik Federal Jerman menganut ketentuan perubah-

an dapat dilakukan dengan satu undang-undang yang disetujui oleh paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota *Bundesrat* dan *Bundestag*. Perubahan ini dapat merupakan perubahan pada batang tubuh UUD, dan dapat pula sebagai *supplement* dari pada UUD.

Beberapa negara mengadakan ketentuan dalam UUD mengenai hal-hal yang tidak boleh diubah, seperti kita lihat pada UUD Turki, UUD Perancis, dan UUD Italia, yaitu adanya ketentuan bahwa sekali-kali tidak boleh diubah bentuk negara republik. Begitupun Konstitusi Amerika Serikat menentukan dalam *Article V* bahwa tidak boleh diadakan amandemen sebelum tahun 1808 mengenai *Article 1 section 9* ayat (1) dan ayat (4), dan tidak boleh diadakan perubahan pada konstitusi sehingga satu negara tanpa persetujuannya kehilangan haknya untuk mempunyai perwakilan yang sama dalam senat.

Biarpun dalam UUD 1945 tidak ada ketentuan mengenai adanya larangan untuk mengubah beberapa hal dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945, saya berpendapat mengingat sejarah terbentuknya UUD ini dan adanya konsensus nasional yang dapat kita anggap berlaku sekarang ini, memang ada hal-hal yang tidak boleh diubah.

Yang pertama-tama adalah *dasar (filsafat) negara* yaitu Pancasila. Seperti kita mengetahui, dasar negara ini adalah hasil persetujuan antara semua golongan dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menetapkan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945.

Yang kedua adalah *tujuan negara*. Seperti saya katakan tadi, negara adalah satu organisasi. Organisasi ini diadakan untuk mencapai tujuan yang tertentu. Negara Republik Indonesia didirikan oleh rakyat untuk mencapai tujuan seperti tercantum dalam Pembukaan UUD.

Yang ketiga adalah *asas negara hukum*. Asas ini dapat kita lihat pada Pembukaan UUD dan lebih tegas lagi dalam Penjelasan UUD. Pada tahun 1945 kita mendirikan negara hukum. Bukan negara kekuasaan.

Yang keempat adalah *asas kedaulatan rakyat*. Asas ini tercantum dalam Pembukaan UUD. Kita membentuk negara di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. Pendapat dan keinginan rakyatlah yang harus menjadi pedoman penguasa dalam melakukan tugasnya.

Yang kelima adalah *asas kesatuan*. Pada tahun 1945, sebelum Proklamasi Kemerdekaan, pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan maupun dalam masyarakat ramai dipersoalkan apakah negara yang akan kita bentuk itu Negara Kesatuan atau Negara Federal? Akhirnya dicapai satu persetujuan bahwa yang diinginkan adalah Negara Kesatuan.

Yang keenam adalah *asas republik*. Dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan maupun dalam masyarakat pada waktu merupakan persoalan, karena adanya orang—orang yang menginginkan bentuk negara kerajaan. Dan soal ini sudah selesai pada waktu itu. Andaikata sekarang ini maupun kemudian hari ada orang-orang yang menginginkan negara kerajaan, akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan seorang calon raja. Saya kira lama kelamaan di seluruh dunia ini akan hilang bentuk negara kerajaan. Yang sudah pasti, tidak akan bertambah lagi negara-negara kerajaan yang sekarang ada.

Menurut pendapat saya, kalau salah satu hal yang saya sebut tadi diubah, maka negara ini tidak sesuai lagi dengan negara yang kita inginkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau dasar (filsafat) negara dan tujuan negara diubah dapat kita malahan mengatakan bahwa negara ini bukan lagi negara yang kita proklamirkan pada 17 Agustus 1945. Dan hal ini berlaku juga terhadap organisasi manapun juga. Tujuan dan dasar satu organisasi merupakan eksistensi organisasi itu.

Apakah Negara Republik Indonesia harus menganut sistem presidentiil atau sistem parlementer, menurut pendapat saya merupakan persoalan yang tidak prinsipiil. Kita mengingat sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia antara tanggal 14 November 1945 sampai 17 Agustus 1950. Memang kita kembali ke UUD 1945 antara lain adalah karena UUD Sementara 1950 menganut sistem parlementer yang menimbulkan tiap kali pergantian kabinet. Kita

menginginkan suatu pemerintahan yang stabil. Berdasarkan UUD Sementara 1950 menteri-menteri sendiri-sendiri atau pun bersama-sama (kabinet) bertanggungjawab kepada DPR, dalam arti kalau pertanggungjawaban itu ditolak, maka menteri yang bersangkutan atau kabinet harus meletakkan jabatan. Pertanggungjawaban ini adalah mengenai kebijaksanaan menteri atau kabinet yang berhubungan dengan tugasnya (pertanggungjawaban politik).

Apakah sungguh-sungguh UUD 1945 menganut sistem presidensial? Menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar, Presiden adalah mandataris MPR dan harus bertanggungjawab kepada MPR. Bertanggungjawab di sini dalam arti yang luas. Artinya kalau pertanggungjawaban Presiden ini ditolak, maka ia harus meletakkan jabatan. Dengan demikian, biarpun menurut UUD 1945 masa jabatan Presiden adalah lima tahun, bukan berarti yang ia akan memegang jabatan selama lima tahun. Karena mungkin ia baru memegang jabatan satu tahun, sudah mendapat mosi tidak percaya dari MPR. Dengan demikian ia harus meletakkan jabatan.

Seperti kita mengetahui, selama UUD Sementara 1950 yang menganut dengan tegas sistem parlementer itu berlaku yaitu sejak 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 belum pernah ada menteri atau kabinet yang jatuh karena mosi tidak percaya DPR (parlemen). Baru sejak UUD 1945 berlaku yaitu tanggal 5 Juli 1959 pernah Pemerintah jatuh atas keputusan MPRS. Kita mengingat jatuhnya Presiden Sukarno dengan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967. Berdasarkan UUD Sementara 1950, Kabinet (Pemerintah) dapat dijatuhkan oleh DPR (Parlemen); sedangkan berdasarkan UUD 1945, Presiden (Pemerintah) dapat dijatuhkan oleh MPR. Memang DPR berdasarkan UUD 1945 tidak mempunyai hak untuk menuntut agar Presiden meletakkan jabatan. Tetapi yang pokok di sini bukan mana yang punya wewenang. Yang pokok adalah menurut sistem yang dianut oleh UUD 1945, Presiden harus bertanggungjawab dalam arti luas kepada MPR.

Di Amerika Serikat yang menganut dengan tegas sistem presidensial, tidak mungkin seorang Presiden jatuh karena kebijaksanaan politiknya. Senat Amerika Serikat memang dapat menjatuhkan

kan hukuman kepada Presiden berupa pemecatan (jika Presiden) melakukan kejahatan yang tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Konstitusi Amerika Serikat *Article II section 4*. Tuduhan dilakukan oleh *House of Representatives*.

Menurut pendapat saya, dengan berpegang teguh kepada enam hal yang saya sebut tadi, yaitu hal-hal yang tidak dapat diubah, kita dapat mengadakan perubahan pada tata Negara kita.

Kedaulatan rakyat haruskah yang melakukannya satu majelis yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau oleh satu majelis dengan nama lain, menurut pendapat saya tidak merupakan hal yang prinsipial. Dan kenapa hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat, dapat dipersoalkan. Melihat dari namanya dan cara pembentukannya, apakah Dewan Perwakilan Rakyat tidak pantas pula disebut satu majelis yang melakukan kedaulatan rakyat.

Sampai sekarang, menurut saya pengertian "MPR melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya" masih menjadi persoalan. Bagi saya, seperti saya katakan tadi, pengertian tugas melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya adalah tugas yang bersifat umum yang diperinci dalam 4 tugas dan ditambah dengan tugas-tugas lain sebagai akibat logis dari empat tugas tadi. Yang terang sesuai dengan UUD 1945, MPR tidak berhak menetapkan berapa anggota-anggota MPR selain anggota-anggota DPR yang dengan sendirinya menjadi anggota MPR. Hal ini harus ditetapkan dalam undang-undang. Jadi oleh Presiden bersama-sama dengan DPR.

Memang ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa ini adalah atas kehendak MPR, karena yang menetapkan UUD adalah MPR. Jadi, MPR mengikatkan dirinya dengan sukarela (*selbstbindung*) pada keputusan Presiden dan DPR. Begitupun mengadili adalah wewenang Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan lainnya. MPR tidak mempunyai hak. Ini pun tentu mereka katakan karena adanya *selbstbindung* dari MPR. Dengan demikian, andai-kata MPR pada satu waktu tidak mau terikat kepada keputusan Presiden dan DPR, atau kepada putusan Mahkamah Agung, MPR dapat mengubah keputusan tersebut. Ini mencakup pengertian bahwa Presiden dan DPR, maupun Mahkamah Agung bertang-

gungjawab kepada MPR.

Kalau pengertian mengenai melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya adalah demikian, menurut saya lebih baik yang dipilih oleh rakyat secara langsung adalah anggota-anggota MPR. Dewan Perwakilan Rakyat lebih baik ditiadakan dan diganti dengan Badan Pekerja MPR yang mempunyai tugas seperti Badan Pekerja MPRS ditambah dengan tugas membuat undang-undang bersama-sama dengan Presiden, dan tugas-tugas yang lain yang dimiliki oleh DPR sekarang ini.

Dalam UUD Sementara 1950 kita kenal pada Pasal 133 Badan Pekerja Konstituante yang melakukan tugas DPR sebelum badan ini terbentuk. Memang Badan Pekerja Konstituante seperti yang dimaksud oleh pasal itu tidak pernah terbentuk karena DPR lebih dahulu dibentuk daripada Konstituante. Banyaknya anggota-anggota Badan Pekerja MPR ditetapkan umpamanya dua perlima dari seluruh anggota MPR yang dipilih dari dan oleh MPR.

Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan MPR. Begitupun Dewan Pertimbangan Agung lebih baik ditiadakan dan diganti dengan satu Panitia yang dipilih dari dan oleh MPR. Dengan demikian nasihat yang diberikan oleh Panitia ini kepada Pemerintah akan mempunyai kewibawaan mengingat Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR. Tentu saja sama dengan Panitia Penguji Hukum yang saya sebut tadi, senantiasa harus didampingi oleh ahli-ahli yang sesuai dengan bidangnya.

Selanjutnya kalau kita tokoh ingin menganut sistem presiden-tial secara tegas, lebih baik diubah saja cara pemilihan presiden. Tidak dipilih lagi oleh MPR tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian presiden tidak harus bertanggungjawab lagi kepada MPR dalam arti luas. Dan dengan demikian ada jaminan kestabilan pemerintah. Seperti kita mengetahui, sistem pemilihan presiden Amerika Serikat pun sedang direncanakan untuk diubah dari bertingkat ke sistem langsung dipilih oleh rakyat. Dengan demikian akan mengubah konstitusi.

PENUTUP

Pada peristiwa yang bagi saya sangat besar ini, izinkanlah saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan pengangkatan saya sebagai Guru Besar Ilmu Tata Negara pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.

Terima kasih saya ucapkan pula kepada Rektor IKIP Yogyakarta yang mengusulkan pengangkatan saya menjadi Guru Besar.

Dan kepada Senat IKIP Yogyakarta juga saya ucapkan terima kasih akan keputusannya yang bijaksana menyetujui pengangkatan saya menjadi Guru Besar. Dan pada tempatnya pula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya sekerja pada FKIS yang selama ini memberikan bantuan kepada saya sehingga saya dapat melakukan tugas saya dengan baik sehingga dapat diangkat menjadi Guru Besar.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru saya yang telah mendidik dan mengajar saya. Mudah-mudahan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada mereka senantiasa.

Pada kesempatan ini saya memohon kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* agar mengampuni dosa Almarhumah Ibu dan almarhum Ayah saya, Sutan Pangurabaan. Dan bersama ini pula saya memohon agar Allah *subhanahu wa ta'ala* mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi saya waktu saya masih kecil.

Kepada kakak-kakak saya, bersama ini pula saya mengucapkan terima kasih akan bantuan dan bimbingan yang mereka berikan kepada saya sejak kecil sampai sekarang ini. Dan khusus kepada kakak-kakak saya yang sudah meninggal dunia, Almarhum Sanusi Pane dan Almarhum Armijn Pane, saya memohon kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* agar segala dosa mereka diampuni dan agar mereka dimasukkan ke dalam sorga.

Dan selanjutnya terima kasih saya kepada isteri saya yang mendampingi saya selama ini.

Terima kasih.

DAFTAR BACAAN

- Apeldoorn, Prof. Mr. R., *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954.
- Baharudin, Z, *Menjongsong Lahirnja Undang-Undang Dasar dengan Konstitusi Tudjuh Negara sebagai Bahan Perbandingan*, Tinta Mas, Jakarta, 1957.
- Bolter, Albert, *The Soviet Legal System Studies on The Soviet Union*, Volume VII, No. 2, 1967, Institute for the Study of the USSR, Munich, 1967.
- Gouw Giok Siong, Prof. Mr. Dr., *Warga Negara dan Orang2 Asing*, Penerbit Keng Po, Jakarta, 1958.
- Kementerian Penerangan, *Res Publica Sekali Lagi Res Publica! Amanat Presiden kepada Sidang Pleno Konstituante di Bandung 22 April 1959*, Jakarta, 1959.
- Kirichenko, SA. Denisof M., *Soviet State Law*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1960.
- Koesnoprodjo, *Himpunan Undang2 Penetapan2 Peraturan2 Pemerintah Republik Indonesia 1945*, S.K. Seno, Jakarta, 1951.
- _____, *Himpunan Undang2 Penetapan2 Peraturan2 Pemerintah Republik Indonesia 1949*, Cetakan Pertama.
- Kranenburg Prof. Mr. R., *Infleiding in de vergelijkende Staatrechtswetenschap*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarler, 1950.
- Logeman Dr. J.H.A., *Over de theory van een stellig staatsrecht*, Saksama, Jakarta, 1954.
- Pane, Lafran, *Wewenang MPR*, Penerbit UII, Yogyakarta, 1960.
- Pantjuran Tudjuh, *Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS disertai Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, 1969.
- Polak Mr. M. V., *Schets van het Amerikaansche*, Uniestaatresht Universitaire Pers, Leidep, 1946.
- Pot Prof. Mr. C.W. van der, *Handboek van het Nederlandse Staatsrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1953.
- Sayre, Wallace S, *American Government*, Baners & Noble Inc, New York, 1966.
- Wede E.C.S and Philips G. Govrey, *Constitutional Government*, Littlefield Adams & Co, Paterson, 1963.
- Witman, Shepherd R, and Wuest, John J., *Comparative Government*, Littlefield, Adams & Co, Paterson, 1963.

Yamin, Mr. Muhammad, *Konstituante Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1950.

Zevenbergen, Mr. Willem, *Formeele Encyclopaedie der Rechwetwenschap*, Gerb. Belinfante, 's Gravenhage, 1925.

Sumber tulisan: Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam mata pelajaran Ilmu Tata Negara pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIS- IKIP) Yogyakarta, di Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 1970. Lafran Pane diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Guru Besar dalam Ilmu Tata Negara pada FKIS- IKIP Yogyakarta mulai tanggal 1 Desember 1966.

PERANAN GURU DALAM MEMBINA MANUSIA INDONESIA YANG BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEADAAN SEHAT DAN BAHAGIA

Pidato Pengukuhan dalam Bidang Ilmu Pendidikan
pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Yogyakarta. Diucapkan di
Depan Rapat Terbuka Senat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta
Yogyakarta, 18 Februari 1989

PROF. DR. SAIDIHARJO



*Yang terhormat,
Bapak Rektor Ketua Senat IKIP Yogyakarta
Para guru besar
Para Pimpinan Institut
Para Pimpinan Fakultas
Para tamu dan hadirin yang saya muliakan*

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridlonya sehingga kita dapat hadir pada rapat senat terbuka IKIP Yogyakarta dalam upacara pidato pengukuhan guru besar di bidang Ilmu Pendidikan dengan judul Peranan Guru dalam Membina Manusia Indonesia yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup dalam keadaan sehat dan bahagia.

PENGANTAR

Pada awal tahun 1975 dalam buku Pendidikan Kependudukan yang saya susun, saya mengawali rangkaian kalimat sebagai berikut:

Pada suatu tempat di bumi ini kita dilahirkan. Pertama kali menyentuh dan menghirup udara di bumi. Kita belum sadar dan sampai saat ini kita semua yang sudah melampaui masa kanak-kanak tidak dapat mengenang kembali kapan dan bagaimana waktu kita dilahirkan dan proses apa yang terjadi pada diri kita masing-masing sampai saat mulai dapat berjalan.

Setelah kita mengalami masa kanak-kanak dan ingatan kita sudah mulai baik, barulah kita melihat di kanan kiri kita bahwa disitu ada manusia lain disamping saya. Ada ibu, ayah, nenek, kakek bahkan adik atau kakak serta teman-teman dari tetangga dan lain-lain.

Kehidupan kita makin lama makin dewasa, kata orang. Dewasa jasmaninya dan dewasa rokhaninya. Mula-mula tuntutan kita terhadap pakaian dan makanan tidak sebanyak ibu dan ayahnya, tetapi setelah jasmani tumbuh, makan dan pakaian menuntut berganti yang lebih banyak dan lebih besar daripada satu atau

dua tahun yang lampau.

Setelah bertambah dewasa sudah mempunyai perasaan senang, sedih dan perasaan kasihan terhadap sesama umat dan kawan. Sesudah itu menuntut pendidikan secara formal di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah karena dalam hatinya sudah merasakan bahwa belajar dan sekolah mempunyai faedah kelak dalam hidupnya.

Proses kehidupan sejauh ini rupa-rupanya tidak jauh berbeda diantara manusia-manusia satu dengan tempat yang lain di bumi, di desa dan di kota.

Setelah kita dewasa dalam arti ada pertumbuhan fisik yang memadai dengan pertumbuhan perasaan serta intelegensinya, kita dihadapkan kepada naluri untuk memproses keadaan dan kejadian sebagaimana 20 atau 25 tahun yang lampau sewaktu kita dilahirkan dari kandungan ibu kita di bumi ini. Teman-teman atau orang sebaya hampir berbarengan mengalaminya karena adanya proses pernikahan dan perkawinan dari manusia itu sendiri. Kalau di tempat itu mula-mula sepertinya ada anak-anak dan ayah serta ibu, tetapi kalau sekarang kita kembali ke tempat itu keadaan sudah berubah menjadi sekelompok manusia yang disebutkan sebagai cucu, anak dan kakek serta nenek. Padahal bila teman-teman sebaya juga dalam proses yang sama, berarti sekumpulan manusia yang terdiri dari berkelompok-kelompok. Begitu seterusnya.

Kalau seorang pemuda atau pemudi kampung sejak kanak-kanak mengembara mengadu nasib ke kota atau belajar di kota bertahun-bertahun dan pada suatu saat kembali menegok ke kampung halamannya, maka apa yang ia saksikan adalah bahwa teman-temannya yang lalu, baik keadaan fisik maupun keadaan sikap dan cara bergurunya. Apa yang ia lihat adalah orang-orang atau anak-anak yang dulu belum lahir sekarang sudah lahir, temannya yang sewaktu dia pergi baru beradik satu atau belum beradik sekarang sudah menjadi lima atau enam. Teman yang lain yang dulu lebih tua atau sedikit lebih muda dan masih biasa menolong pekerjaan ibunya mencarikan kayu bakar, atau mencari rumput sudah punya teman hidup wanita dan seorang anak bah-

kan ada dua orang anak.

Jumlah anak yang semula masih jarang dan pekarangan yang masih kosong dengan tanaman palawija saja. Sekarang sudah berdiri rumah-rumah tempat tinggal baru. Tanah-tanah kosong yang dulu penuh rumput dan ilalang sekarang sudah menjadi tanaman ketela pohon dan lain-lain tanaman lagi.

Juga keadaan di kota terasa keadaan bangunan perumahan, pabrik-pabrik, pertokoan bertambah banyak. Keadaan kota yang semula bersih dan teratur, terasa sekarang ini di sana sini bergerombol orang-orang yang tak punya rumah, pakaiannya compang-camping, tuna karya sehingga menyebabkan pemandangan yang tidak sedap dipandang mata.

Kantor sensus mencatat masuknya penduduk ke kota makin bertambah banyak, urbanisasi meningkat setiap tahunnya. Jalan-jalan raya yang sepuluh tahun yang lampau masih cukup lebar, sekarang ini sudah terasa sangat sempit. Keadaan pencurian yang semula tidak begitu dirasakan sekarang meningkat menjadi bentuk terang-terangan seperti pencopetan, penjambretan, penggedoran dan penodongan.

Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa keadaan menjadi berubah sedemikian rupa, yang apabila kita tidak menyadarinya benar-benar tidak merasakan perubahan itu. Orang-orang tua akan berkata dengan merengut, kami ini sangat heran, waktu kecil saya, anak-anak kecil tidak sebanyak ini, tempat sana belum ada apa-apa, di sana dulu kuburan, gedung-gedung sekolah bisa dihitung, dan sebagainya. Marilah kita sadari bahwa bila demikian, segalanya bertambah jumlahnya. Rumah-rumah, bangunan-bangunan, jalan-jalan, gedung-gedung sekolah, tanah-tanah pertanian, pabrik-pabrik semuanya bertambah atau bahkan yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada.

Mengapa lingkungan itu berubah, karena manusianya bertambah. Pertambahan ini baru disadari setelah di sana sini sulit didirikan bangunan perumahan, serta tanah-tanah untuk pertanian terasa semakin sempit. Akibat pertambahan yang mengejutkan itu menyebabkan semua kebutuhan hidup terutama pangan, papan dan sandang terasa sulit dicari, terutama di desa-desa yang

tanah pertaniannya semakin berkurang, sedang penduduknya setiap tahun bertambah tidak sedikit. Di kota-kota akibat banyaknya pabrik dan padatnya rumah menyebabkan adanya pengotoran udara di atas kota tersebut, yang dapat mengganggu kesehatan penduduk kota itu sendiri.

Makin banyak penduduknya makin banyak kebutuhan hidup dan makin banyak gerakan penduduk satu tempat ke tempat lain untuk memelihara hidupnya. Untuk pergi ke tempat lain perlu angkutan agar lebih cepat dan lancar. Akibatnya sangat ramai dan kecelakaan lalu-lintas pun banyak terjadi (Saidihardjo, 1975, 1-4).

Ilustrasi tersebut di atas dapat diamati dimana-mana, dan kita merasakannya. Pertengahan tahun 1987 Badan Dana Perserikatan Bangsa-bangsa untuk kegiatan Kependudukan (UNFPA) mengumumkan telah lahir bayi yang ke lima milyar di dunia (Denda S. 1987, 1). Penduduk Indonesia tahun 1988 berjumlah 176 juta orang dan diperkirakan akan menjadi 216 juta orang pada tahun 2000.

Kabinet Pembangunan Republik Indonesia memunculkan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan III) dan berubah menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) pada kabinet Pembangunan VI dan V. kemudian menyusul munculnya Biro-biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) di tiap propinsi, serta munculnya pusat studi (penelitian) di bidang kependudukan dan lingkungan hidup di berbagai perguruan tinggi di Indonesia (Saidihardjo, 1980, 3).

Produk hukum yang berkaitan dengan kependudukan dan lingkungan hidup telah lahir berupa antara lain telah dimasukkannya masalah kependudukan dan lingkungan hidup dalam GBHN (1978, 1983, 19881), lahirnya Undang-undang no.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup dan bertepatan dengan hari Lingkungan Hidup sedunia tanggal 5 Juni 1987 pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1986 tentang analisa mengenai dampak lingkungan.

Rentetan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masalah

kependudukan dan lingkungan hidup di negeri kita ini memerlukan perhatian yang serius, dalam hubungannya dengan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan hidup bangsa.

Ini berarti kita harus mengusahakan agar jumlah penduduk Indonesia yang menduduki urutan besar ke lima di dunia ini keberadaannya diimbangi oleh daya dukung lingkungannya. Daya dukung lingkungan yang dimaksud adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Emil Salim, 1984, 1). Masa kini, ungkapan banyak anak banyak rejeki yang cenderung mendorong terbentuknya keluarga besar sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan keluarga besar dapat menyulitkan tercapainya kesejahteraan keluarga maupun terbitnya lingkungan yang utuh fungsinya.

Masalahnya adalah bagaimana kita dapat menciptakan iklim bagi manusia Indonesia untuk dapat menyadari perlunya mengantisipasi permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup yang ada yang akan menghadang di depan bangsa Indonesia. Jawabannya adalah pendidikan sebagai salah satu pendekatannya, yaitu bidang pendidikan yang menggarap pembinaan dan pengembangan sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup, yang dikenal sebagai Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat dengan PKLH).

Pendidikan di suatu negara adalah realisasi kebijaksanaan negara yang bersangkutan untuk meningkatkan masyarakat sebagai keseluruhan ke taraf kesejahteraan yang dicita-citakan (Imam Bernadib, 1982, 2). PKLH dikembangkan dikembangkan di Indonesia tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional Indonesia dalam rangka menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Indonesia membangun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Oleh karena itu usaha peningkatan pengetahuan aspek kependudukan dan lingkungan hidup serta pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup bangsa yang secara khusus dinamakan PKLH, adalah bagian yang tak terpisahkan dari pro-

gam pendidikan nasional Indonesia.

Kehadiran PKLH sebagai komponen baru dalam sistem pendidikan di Indonesia merupakan suatu inovasi dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Inovasi adalah usaha untuk mengadakan perubahan dan perkembangan terhadap terhadap sesuatu yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dalam arti kualitatif lebih baik daripada apa yang telah tercapai sebelumnya. (Imam Bernadib, 1982, 30).

PKLH adalah inovasi dari perkembangan pendidikan di Indonesia. Sebab program pendidikan ini suatu realisasi dari tanggapan dan tanggungjawab pendidikan terhadap salah satu dari sekian masalah nasional yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk yang tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata serta berbagai dampak perusakan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia adalah beberapa diantara masalah-masalah yang memerlukan penanganan melalui program PKLH.

Dunia pendidikan sesuai dengan fungsinya berusaha untuk memberikan sumbangan dalam memecahkan masalah-masalah yang berat dan kompleks berupa masalah kependudukan dan lingkungan hidup melalui usaha-usaha pendidikan, karena menganggap bahwa perubahan sikap dan tingkah laku adalah persoalan pendidikan. (Maftuchah Jusuf, 1981, 5).

Ini berarti bahwa lembaga pendidikan khususnya pendidikan formal sejak sekolah dasar sampai ke pendidikan tinggi merupakan tumpuan harapan untuk mengembangkan wawasan kependudukan dan lingkungan hidup sesuai dengan tuntutan zaman.

TUNTUTAN ZAMAN

Menurut Emil Salim (1987, 2) tuntutan zaman untuk meminita perubahan sikap yang mendasar untuk generasi akan datang adalah:

Faktor pertambahan penduduk cukup besar di masa kini dan akan datang yang membawa penduduk Indonesia dari 176 juta orang (1988) menjadi 216 juta orang (2000). Pertambahan penduduk ini disertai mobilitas penduduk yang meningkat berkat

kelancaran fasilitas angkutan.

Struktur ekonomi Indonesia yang berubah dari struktur yang semulanya berat sebelah pertanian dan pertambangan menjadi struktur ekonomi yang lebih berimbang, sehingga efektifitas baru akan muncul, seperti manufaktur, jasa asuransi, jasa komputer, dan lain-lain.

Perubahan struktur ekonomi juga memberi dampaknya pada struktur politik, akibat tumbuhnya kelompok-kelompok sosial baru seperti industriawan, karyawan, bukan pertanian dan lain-lain.

Dengan perubahan sistem ekonomi ini lebih banyak penduduk akan tinggal di kota. diperkirakan sepertiga penduduk Indonesia akan tinggal hidup di kota-kota. hal ini membawa masalah sosial yang lain lagi.

Sementara itu keadaan dunia internasional mengalami perubahan penting baik di bidang ekonomi maupun bidang politik. Persebaran pusat-pusat ekonomi di Jepang dan Eropa Barat, di samping Amerika serikat yang disertai tumbuhnya negara-negara industri baru di Asia dan Amerika Latin merubah perimbangan kekuasaan ekonomi dan politik dunia. Persaingan menjadi semakin keras. Negara-negara nasional perlu memperkuat diri dalam kesatuan kelompok kesatuan regional. Saling keterkaitan antar ekonomi dan politik negara di dunia internasional menjadi semakin kuat. Semua ini menandakan perubahan tuntutan zaman.

Jadi beban terberat yang harus didukung lingkungan hidup adalah penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Ini berarti bahwa kebutuhan akan sumber alam serta hasilnya terus akan meningkat baik untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun fasilitas hidup lainnya.

Beban ini akan semakin berat pula karena adanya perubahan gaya hidup serta meningkatkan jenis dan mutu kebutuhan sumber alam seperti air untuk berbagai macam keperluan baru. Gizi yang lebih berkualitas dan energi untuk berbagai peralatan konsumtif kehidupan modern.

Tantangan yang dihadapi seperti dikemukakan oleh Alwi Dah-

lan (1988, 6) adalah kemampuan sumber alam dan lingkungan akan makin terbatas, bahkan ada yang mulai tidak mencukupi.

Berbagai contoh diberikan misalnya:

Perkiraan mengenai kebutuhan air tanah dari berbagai sektor menunjukkan, bahwa pulau Jawa akan kekurangan persediaan air sebanyak 22 milyar M³ pada tahun 1990. Banyak lahan pertanian yang baik telah dikonversikan untuk keperluan non pertanian. Di daerah tidak ada tata ruang yang baik, sehingga penggunaan lahan tidak memerhatikan potensinya. Menurut taksiran sampai tahun 2000 diperlukan lagi lahan baru apabila cara penggunaan lahan untuk pembangunan masih terus dilakukan seperti sekarang. Padahal luas tanah air kita tidak bertambah. Masalah ini masih diperberat lagi oleh perusakan kemampuan yang ada, baik secara sengaja atau karena terpaksa oleh rakyat setempat untuk mempertahankan kehidupan mereka yang minimal.

Berbagai cuplikan laporan menunjukkan bahwa erosi meningkat di seluruh daerah aliran sungai terutama di Jawa. akibatnya luas tanah kritis yang pada tahun 1975 berjumlah 20 juta hektare diperkirakan setiap tahunnya akan meningkat sebanyak 200.000 hektare. Pencemaran berat ditemukan di Jawa, Bali, dan Sumatra. Kebutuhan oksigen biologis (KOB) dan kebutuhan oksigen kimiawi (KOK) sudah begitu menurun sehingga sungai di tempat tersebut tidak lagi menjalankan fungsinya dan membersihkan dirinya sendiri. Dibeberapa lokasi mulai ditemukan kasus-kasus pencemaran logam berat dan bahan beracun berbahaya (B3), serta pencemaran udara. Semua keadaan ini akan bertambah serius di masa depan dengan peningkatan industrialisasi dan kegiatan sektor energi. Indonesia sekaligus harus menghadapi dua permasalahan lingkungan dalam membangun yaitu:

Resiko lingkungan yang timbul dari kegiatan, perilaku, sikap, dan kebiasaan masyarakat tradisional.

Resiko modern yang tumbuh dari kebiasaan dan cara hidup datang bersama modernisasi. Potensi resiko modern ini akan meningkat karena kita mulai memasuki era industrialisasi untuk memperbaiki struktur ekonomi.

Di Negara berkembang resiko tradisional (ladang berpindah,

penyakit lingkungan tradisional muntaber, dan sebagainya) terjadi bersamaan dengan berkembangnya resiko modern.

Kendala lain yang memperberat beban lingkungan adalah kekurangan pengetahuan, keahlian dan kemampuan sumberdaya manusia. Banyak orang melakukan sesuatu tindakan yang berdampak negatif meskipun berikhtihar baik, karena kekurangan pemahaman. Sebagai contoh pendekatan hama wereng yang disebabkan oleh penggunaan pestisida /insektisida (obat-obatan) yang boros, tidak tepat lingkungan, dan kurang hati-hati, didorong pula oleh kampanye menjual yang sebanyak-banyaknya serta informasi yang tidak tepat. Akibatnya hama yang resisten muncul dan musuh hama yang alami musnah, sehingga kerugian yang tidak sedikit bagi petani, dan kerugian kemampuan lingkungan dan pembangunan.

Demikianlah beberapa hal tantangan kependudukan dan lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia dewasa ini dan proyeksinya di masa yang akan datang seperti diutarakan oleh tokoh-tokoh formula dari kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Indonesia. Berbagai perubahan ini berlangsung dalam luas tanah dan air ini, yang tidak bertambah banyak.

Perubahan dan perkembangan ini memerlukan daya tanggap manusia terhadap kependudukan dan lingkungan. PKLH diharap memberi kerangka sistematis, pengetahuan dasar, dan metode mengenai tata cara manusia melihat lingkungan yang mencerminkan tuntutan zaman.

Melalui pendidikan anak khususnya dan generasi muda umumnya diharapkan dapat pula ditularkan wawasan lingkungan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya. Paling tidak dapat ditangkal persepsi orang tua yang keliru mengenai kependudukan dan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman (Emil Salim, 1987, 3).

PERKEMBANGAN PKLH PADA PROGAM SEKOLAH

Pada tahun 1970 diselenggarakan seminar nasional Pendidikan Kependudukan oleh Badan Pengembangan Pendidikan (BPP) Depdikbud bekerja sama dengan Colombo Plan dan UNESCO.

Pada saat itulah sebenarnya awal mula dikenalkannya pendidikan kependudukan di Indonesia. Rekomendasi dari seminar tersebut telah berhasil memasukan pendidikan kependudukan sebagai salah satu komponen baru dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Selanjutnya program pendidikan kependudukan ini secara resmi masuk kurikulum sekolah 1975 bagi pendidikan dasar dan menengah dan masuk kurikulum 1976 bagi pendidikan kejuruan melalui integratif (terpadu) pada bidang studi.

Oleh karena pendidikan kependudukan ini sesuatu yang baru khususnya bagi para guru maka dilakukanlah penataran-penataran bagi para guru yang ada. Dana yang dikeluarkan untuk program ini tentu saja cukup besar dan kemampuannya terbatas.

Apabila pengadaan guru pendidikan kependudukan ini hanya mengandalkan penataran, waktu yang diperlukan cukup lama, sebab guru harus memperoleh penataran pendidikan kependudukan.

Untuk menetralsir masalah pengadaan guru ini maka lembaga pendidikan guru sebaiknya diberikan mata kuliah pendidikan kependudukan, agar kelak bila siswa lembaga tersebut menjadi guru tidak harus memperoleh penataran pendidikan kependudukan lagi.

Kemudian keluarlah surat keputusan Mendikbud No. 0193/U/1976 yang menyatakan:

- Pendidikan kependudukan dimasukkan dalam kurikulum IKIP, FKG, dan FIP sebagai suatu mata kuliah umum.
- Pendidikan kependudukan diberikan pada tingkat sarjana muda semester pertama tahun ke tiga paling sedikit 2 (dua) kredit.
- Pelaksanaan program pendidikan kependudukan sudah dapat dimulai pada tanggal 1 Januari 1977.

IKIP Yogyakarta pada mulanya menempatkan pendidikan kependudukan sebagai mata kuliah pilihan dalam rangkaian proyek perintis pendidikan kependudukan di IKIP Yogyakarta, IKIP Malang, IKIP Jakarta dan IKIP Bandung. Karena menyadari betapa pentingnya program pendidikan kependudukan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi calon guru, maka IKIP Yogyakarta menem-

patkan mata kuliah pendidikan kependudukan pada kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU).

Secara material mata kuliah Pendidikan Kependudukan ini telah memasukkan materi pendidikan lingkungan hidup di dalamnya. Sejak awalnya perumusan yang dihasilkan dalam seminar nasional pendidikan kependudukan 1970 memang telah memasukkan komponen lingkungan hidup dalam materi pendidikan kependudukan ini.

Setelah disadari bahwa banyak permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat ulah manusia dan kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dalam pengelolaan lingkungan hidup yang kurang bertanggung jawab, maka masalah lingkungan hidup ini menjadi penting untuk dikaji secara khusus.

Sejalan dengan perkembangan tersebut maka muncul suatu konsep bahwa sungguhpun dapat dibedakan, antara kependudukan dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu sistem yang utuh lingkaran hidup mempunyai pengaruh pada kependudukan. Sebaliknya sebagai komponen yang dominan kependudukan dapat membawa pengaruh kuat pada lingkungan hidup, karena itu pembinaannya harus dilakukan secara bersamaan dan menyatu.

Sasaran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup melihatnya berbeda namun obyek kajiannya banyak mempunyai persamaan. Pendidikan kependudukan mempunyai sasaran utama pada perubahan sikap dan perilaku manusia yang berkaitan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, persebaran serta aspek dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk. Pendidikan lingkungan hidup sasaran utamanya perubahan sikap dan perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup fisik dan sosial.

Mengingat pengembangan kependudukan dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan, maka pengembangan harus dilihat sebagai konsep yang menyatu. Pelaksanaan dan prosesnya berjalan secara bersamaan dengan konsep dasar yaitu melihat kependudukan dan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan gejala yang

berhubungan timbal balik.

Oleh karena ruang lingkup pendidikan kependudukan dan pendidikan lingkungan hidup mencakup pengembangan hubungan timbal balik antara dinamika kependudukan dan lingkungan hidup maka istilahnya ditegaskan menjadi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH). IKIP Yogyakarta dalam kurikulum 1986 juga telah secara tegas mencantumkan mata kuliah PKLH sebagai salah satu mata kuliah dasar umum, yang pada kurikulum sebelumnya hanya tercantum Pendidikan Kependudukan.

Ruang lingkup pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup mencakup pengembangan konsep hubungan timbal balik antara dinamika kependudukan dan lingkungan hidup dalam rangka keserasian dan keselarasan antara kependudukan dan lingkungan hidup.

Secara operasional PKLH dirumuskan sebagai: usaha untuk meningkatkan pengetahuan, membina sikap mental dan perilaku yang rasional dalam menghadapi dinamika dan masalah-masalah lingkungan hidup, baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup (acuan Pendidikan KLH, 1986).

Secara garis besar ruang lingkup PKLH mencakup beberapa aspek yaitu, (1) konsep dasar kependudukan dan lingkungan hidup; (2) pengaruh timbal balik antara dinamika penduduk dengan lingkungan fisik maupun sosial; (3) pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi pada kualitas penduduk dan lingkungan hidup.

Sejak awal diprogramkan Pendidikan Kependudukan (termasuk di dalamnya pendidikan lingkungan hidup) ditegaskan bahwa mata pelajaran ini diberikan di sekolah dengan cara memadukan (mengintegrasikan) ke dalam bidang studi yang relevan.

Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup melalui jalur pendidikan umum mempunyai ruang lingkup yang mendasar. Sasarannya lebih kepada pengembangan wawasan yang dapat menjadikan dasar perilaku pada semua aspek kehidupan. Penekanan materinya bukan pengetahuan praktis melainkan pengenalan konsep-konsep dasar kependudukan dan lingkungan hidup yang dikaitkan pada setiap ilmu pengetahuan yang relevan.

Melalui pendekatan ini diharapkan setiap perilaku generasi mendatang yang menekuni bidang pertanian, kedokteran, permesinan, kehutanan, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi maupun bidang lainnya melekat wawasan yang menjunjung tinggi azas keserasian dan keselarasan kependudukan dan lingkungan hidup. Jadi sasarannya bukan kepada keahlian ataupun keterampilan tetapi lebih kepada upaya membina wawasan dan pembinaan sikap mental.

Pada pendidikan dasar dan menengah ditekankan pada pengembangan fungsi kognitif, afektif individu dan keterampilan psikomotoriknya, sedangkan pada pendidikan tinggi lebih kepada pengembangan keilmuannya.

Cakupan materi PKLH pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah diawali dengan pengenalan konsep yang dipadukan pada setiap mata pelajaran, sedangkan pada tahap berikutnya diperkaya dengan pengetahuan dasar kependudukan dan lingkungan hidup. PKLH mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah sejalan dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, khususnya TAP MPR No. II/MPR/1983 di bidang kependudukan dan keluarga berencana yang menyatakan.

Penerangan dan pendidikan mengenai masalah kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat baik wanita maupun pria, terutama generasi muda perlu ditingkatkan dan lebih diperluas agar makin disadari mendesaknya masalah kependudukan serta pentingnya keluarga kecil sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab.

Sedangkan mengenai masalah lingkungan hidup, Presiden Suharto dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 1984 antara lain menyatakan:

Pelestarian sumber-sumber alam dan peningkatan serta pembinaan kualitas lingkungan hidup akan tetap merupakan masalah yang harus dihadapi dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut telah dipersiapkan dan dilaksanakan berbagai program pembinaan pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup seperti rehabilitasi lahan kritis, pelestarian lingkungan, pengembangan meteorologi dan geofisika dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Tujuan utama dari program-program pembangunan tersebut di atas adalah melestarikan dan meningkatkan mutu lingkungan hidup. Dalam rangka program-program tersebut maka telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan penyelamat hutan, tanah dan air, reklamasi tanah kritis, penanggulangan dan pencegahan kerusakan wilayah pesisir, pencegahan perusakan hutan dan ekosistem, pengembangan meteorologi dan geofisika, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup, dan pelestarian alam serta perlindungan margasatwa.

Pengembangan PKLH sebenarnya merupakan sebagian dari kegiatan pembangunan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Masalah (problem) utama dalam pembangunan sumber daya manusia dipusatkan pada tiga hal yaitu kesempatan kerja dan pengembangan tenaga kerja, ilmu dan teknologi serta kuantitas hidup ini adalah usaha pengendalian kelahiran dan kematian, khususnya kematian bayi. Penurunan angka kelahiran dicapai melalui intervensi langsung yaitu penggunaan kontrasepsi serta upaya tidak langsung melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup.

Pengembangan sumber daya manusia yang mendapat prioritas dalam Repelita V menekankan pada peningkatan gizi, kesehatan, pendidikan dan latihan serta pengembangan sikap dan kelembagaan (Kartomo, W, 1988, 12).

Kebijaksanaan kependudukan di Indonesia meliputi pengendalian pertumbuhan, persebaran, dan pengembangan kualitas penduduk. Terwujudnya usaha ini PKLH diharapkan ikut berperan melalui proses bekerjanya sistem pendidikan di sekolah.

PERANAN GURU PKLH

Konsep yang dikenalkan tahun 1970 bernama Pendidikan Kependudukan telah berkembang menjadi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) dengan sendirinya memerlukan peninjauan ulang materi Pendidikan dan Kependidikan yang selama ini diberlakukan di IKIP dan Fakultas Keguruan (sekarang FKIP). Suatu GBPP PKLH yang memenuhi ketentuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 20/DJ/1983 telah disusun dan

telah ditulis dua naskah buku pegangan dosen dan mahasiswa oleh para ahli yang berkompeten.

Penelaahan dan penyepakatan dokumen tersebut serta konsensus untuk pelaksanaannya sudah disepakati oleh Rektor IKIP dan Dekan FKIP se-Indonesia pada lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 6-9 Desember 1987 di Jakarta (Hasan Walindo, 1988, 4).

IKIP dan FKIP dalam universitas merupakan lembaga penghasil tenaga kependidikan khususnya calon-calon guru yang diharapkan dapat mengembangkan profesionalismenya dengan baik, termasuk di dalamnya mengajarkan PKLH di sekolah ataupun di lingkungannya. Oleh karena itu keberadaan PKLH pada kurikulum IKIP dan FKIP mempunyai tujuan ganda. Pertama, para mahasiswa memperoleh pengetahuan PKLH berguna bagi dirinya, dan kedua, merupakan bekal keterampilan mengajarkan PKLH di sekolah bila kelak mereka menjadi guru. Kebijakan yang ditempuh pemerintah (Depdikbud) dalam mengajarkan PKLH di sekolah melalui pendekatan terpadu (integratif) pada bidang studi. Ini berarti bahwa keterlibatan para guru untuk mengajarkan PKLH yang diintegrasikan di sekolah cukup besar, meskipun daya serap tiap bidang studi terhadap materi PKLH tidak sama.

Oleh karena itu kurikulum PKLH bagi mahasiswa IKIP dan FKIP (calon guru) haruslah melengkapi dengan pendekatan pengajaran PKLH yang memuat pendekatan monolitik dan pendekatan integratif serta implemetasinya dalam pengajaran di kelas. Porsi metode mengajar PKLH yang diintegrasikan ini akan sangat membantu keberhasilan dan keterlibatan para guru yang mengajarkan PKLH di sekolah. Dengan demikian usaha penataran pada saatnya ditekankan hanya sampai pada tingkat penyegaran saja.

Untuk mempersiapkan tenaga pengajar PKLH di Perguruan Tinggi (termasuk IKIP dan FKIP) Fakultas Pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi telah menghasilkan lulusan S2 (Magister) dan Doktor (S3) Program Studi PKLH, Kependudukan dan Ilmu Lingkungan. Merekalah yang diharapkan mengembangkan mata kuliah PKLH di perguruan tingginya masing-masing, dan bagi mereka yang mengajarkan PKLH di IKIP dan FKIP, di samping memperkaya materi-materi kependudukan dan lingkungan hidup pada para calon

guru, harus mempersiapkannya mampu mengajarkan PKLH yang diintegrasikan (dipadukan) pada bidang studi yang dibinanya. Pembangunan kependudukan dan lingkungan hidup saling terkait dan pengaruh mempengaruhi dalam satu dinamika hubungan secara sangat erat. Saling keterkaitan ketiga bidang ini tidak hanya relevan dari segi kajian ilmiah, tetapi juga segi wawasan masyarakat serta pembangunan nasional yang konkret.

Saling interaksi ini akan makin penting di masa depan, pada waktu generasi muda, siswa, murid sekarang berangkat dewasa yang dihadapkan pada:

- Strategi pembangunan berkelanjutan, mendorong kegiatan dan langkah yang memperbesar keterkaitan (GBHN 1988).
- Sasaran pembangunan jangka panjang tahun II adalah kualitas manusia dan masyarakat.
- Kecenderungan perkembangan keadaan lingkungan hidup.

Karena akan sangat mempengaruhi segala segi kehidupan generasi yang akan datang, interaksi ini perlu dipahami oleh anak didik semenjak sekarang. Sasaran yang dituju adalah pemahaman mengenai esensi interaksi tersebut, sehingga anak didik dapat mengenali masalah interaksi dalam kehidupan nyata di lingkungan/kediamannya sendiri. Untuk dapat mengajarkannya, pendidik tentu memerlukan pemahaman yang lebih mengenai lingkungan hidup dalam arti kata luas (M. Alwi Dahlan, 1988, 2) Tugas ini perlu kesungguhan sebab diharapkan menghasilkan guru yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup.

PKLH diharapkan dapat menjadi wahana dalam memberikan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan bangsa dan negara melalui tujuan pendidikan nasional yang sudah digariskan dalam GBHN 1988.

Manusia Indonesia Pancasila seutuhnya ini hidup dalam dua suasana eksistensi psikologis, yaitu pada suatu pihak ia adalah makhluk sosial yang dituntut menyesuaikan diri pada berbagai situasi berkenaan dengan kepentingan bangsanya (orang lain), lingkungannya dan alamnya, dan pada pihak lain dituntut daripadanya kemandirian dan kemampuan mencipta. Kedua dorongan untuk mempertahankan diri dan dorongan untuk berkem-

bang. Sebagai makhluk sosial ia berupaya mempertahankan apa yang sudah ia miliki dan mencari pengakuan dan penghargaan tentang prestasinya serta memiliki “a sense of belonging”. Pada pihak lain ia sebagai makhluk individu terus menerus ingin mewujudkan diri, memiliki ambisi dan arah. Menurut Piaget dua kecenderungan ini adalah “self sustaining dan self generating”.

Selain ingin mempertahankan apa yang dimilikinya (*self sustaining*), dan untuk itu ia harus memiliki kepekaan terhadap ke-cenderungan dan kepentingan lingkungan; ia juga mencipta dan mengusahakan dirinya (*self generating*). Ada *self starter* yang *inherent* dalam dirinya yang menjadikan dorongan untuk tumbuh dan berkembang berlangsung. Kedua kecenderungan ini menyatu dalam dirinya dan Pancasila menghendaki keseimbangan dan keselaran antara dua kecenderungan ini, suatu monodualitas yang harus ditumbuhkan di sekolah kita (Conny Semiawan, 1985, 5).

Selanjutnya Conny Semiawan menyatakan bahwa teori tentang ilmu pengetahuan (tercakup di dalamnya Ilmu Sosial dan PKLH), dapat dianggap sebagai interpretasi manusia daripada sifat yang terinteraktif dunia fisik maupun non fisik untuk diteliti terus menerus dalam menemukan informasi ilmiah baru. Sifat obyektif dalam usaha ilmiah ini menjadikan informasi ini dasar yang berguna bagi dasar perkembangan teknologi yang operasional. Sebaliknya umpan balik yang diperoleh dari teknologi ini dengan berbagai inovasi esensial bermakna bagi perkembangan ilmu. Untuk mewujudkan semua itu dalam rangka pengajaran di sekolah para calon guru mempunyai peranan penting.

Kependudukan dan Lingkungan Hidup dua hal yang dapat dibedakan namun tak dapat dipisahkan. Oleh karena itu seorang guru PKLH tentu mempunyai perilaku yang berwawasan pada keduanya. Artinya ia seharusnya membawa para siswanya untuk berwawasan lingkungan hidup dalam perilakunya.

Perilaku kependudukan dapat diberi pengertian sebagai tingkah laku tentang reproduksi, perkawinan dan perceraian, migrasi dan urbanisasi, perencanaan keluarga, pembinaan keluarga bertanggung jawab. Dalam kajian kependudukan, seluruh perilaku tersebut selalu dikaitkan dengan peningkatan kualitas penduduk,

situasi kependudukan dalam mana setiap orang dalam keadaan sehat, sejahtera, terdidik, berproduktivitas tinggi, memiliki harapan hidup panjang, dan dalam hubungan yang serasi dengan sesamanya.

Perilaku manusia yang berwawasan pada lingkungan hidup adalah perlakuan dan pengelolaan manusia terhadap sumber daya yang tersedia. Misalnya pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang dapat menimbulkan dampak baik yang positif maupun negatif. Perilaku yang mempunyai dampak positif misalnya pengelolaan lahan, hutan, daerah deposit benda-benda tambang dan mineral, secara nasional, hemat dan bertanggung jawab, perlakuan sumber daya air, secara proposional, penggunaan teknologi untuk memberikan kesempatan sumber daya hayati dapat memperbaharui diri, baik melalui hukum alam yang berlaku, maupun melalui usaha/budidaya: menciptakan bibit unggul, membuang limbah pada tempat yang tidak mengganggu kesehatan dan kelestarian sumber daya. Menjaga keserasian hubungan antara penduduk (jumlah dan perilakunya) dengan lingkungan fisiknya, sehingga lingkungan hidup mempunyai daya dukung yang tinggi dan lestari dalam waktu relatif lama serta meningkatkan rasa senang, tenang dan nyaman pada penduduknya.

Tegasnya para guru PKLH seharusnya berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup (KLH). Ini berarti wawasannya (orientasinya dalam pendekatannya, landasannya, pikirannya, perhubungannya) dalam mengajarkan PKLH haruslah membawa siswa berperilaku yang berorientasi kepada dampak positif bagi terbinanya keserasian hubungan antar kependudukan dan lingkungan hidup. Seseorang yang dalam tingkah lakunya berorientasi terhadap keserasian KLH akan berpikir dua kali jika perbuatan itu dipertimbangkan akan membawa akibat negatif terhadap keserasian KLH. Dalam pengertian ini orang tersebut akan berbuat rasional dan bertanggungjawab, baik dalam tingkah laku reproduksi dan mobilitasnya maupun dalam hal perlakuannya terhadap sumber daya yang tersedia. Sehingga ketimpangan hubungan antara KLH yang akhirnya akan merosotkan kualitas penduduk dan lingkungan dihindarkan.

Dalam kenyataannya lingkungan hidup dimana manusia bertempat tinggal tidak sama. Ini berarti bahwa wawasan manusia tentang kependudukan dan lingkungan hidup akan berbeda tergantung dari mana ia tinggal. Antara manusia dengan lingkungannya dapat dilihat manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan manusia yang membina dan mencipta lingkungannya. Ini berarti bahwa setiap manusia perilaku merupakan respon baik terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Emil Salim (1986, 12-13) melihat bahwa manusia adalah penyebab utama bencana gangguan lingkungan.

Masalahnya sekarang ialah bagaimana menumbuhkan kesadaran lingkungan manusia supaya pengelolaan sumber alam bagi pembangunan dapat dilakukan sejalan dengan pengembangan lingkungan. Bagaimana menyebarluaskan penghayatan dan penglibatan manusia pada proses pembangunan tanpa kerusakan lingkungan. Bagaimana menumbuhkan di kalangan masyarakat luas penglibatan dan orientasi pembangunan dengan pengembangan lingkungan.

Sehubungan dengan ini kebijaksanaan lingkungan seperti diucapkan Presiden Soeharto dalam Amanat Lingkungan, 5 Juli 1982, memuat lima pokok penting:

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah, antar negara dan antar generasi.
2. Kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola pembangunan sumber daya alam secara bijaksana.
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mau menanggapi tentang pembangunan tanpa merusak lingkungan. Mampu mengembangkan teknologi tanpa limbah yang banyak dan menghemat sumber alam. Mampu mencegah terulangnya pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti dialami negara-negara maju.

4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari lima pokok kebijaksanaan lingkungan ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan ciri-ciri perilaku kreatif seperti mempunyai daya imajinasi, prakarsa, jiwa wiraswasta, kemandirian, kepekaan dalam pengamatan, dan dapat mengantisipasi masalah.

Pengetahuan kesadaran seperti diuraikan di atas perlu dimiliki oleh para guru (calon guru) sebagai perwujudan guru PKLH yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup. Hal ini mengingat Indonesia melihat peningkatan kualitas penduduk melalui perbaikan kualitas fisik dan non-fisik. Kualitas fisik dikembangkan melalui perbaikan gizi dan kesehatan, sedang yang non-fisik menekankan pada sikap-sikap kemandirian, solidaritas, sosial dan sejenisnya (Kartomo W, 1988, 6).

MATERI PKLH DAN PENDEKATAN INTEGRATIF (TERPADU)

PKLH diharapkan mewujudkan sesuai dengan yang diharapkan kepada para siswa di sekolah. Ini berarti peran dan keterlibatan guru PKLH sangat penting. Guru dihasilkan oleh Lembaga pendidikan guru (IKIP dan FKIP). Oleh karena itu para calon guru yang akan mengajarkan PKLH yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup menurut hemat saya harus dibekali pengetahuan (materi) PKLH yang berwawasan (berorientasi) pada dampak (positif dan negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia (penduduk), keadaan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup oleh manusia itu sendiri.

Para guru (calon guru) harus menyadari bahwa yang perlu dikembangkan adalah kebijaksanaan kependudukan dan lingkungan hidup yang memuat pokok-pokok sebagai berikut:

Pertama, sasaran pokok bidang kependudukan adalah

mengembangkan segi-segi yang mempengaruhi kuantitas, mobilitas dan kualitas kependudukan. Inti kebijaksanaan ini adalah meningkatkan kualitas penduduk, meningkatkan keterlibatannya dalam pembangunan dan merubah penduduk dari beban menjadi penggerak pembangunan.

Kedua, sasaran pokok lingkungan hidup adalah mengusahakan keutuhan kemampuan fungsi lingkungan menopang pembangunan secara berkelanjutan generasi demi generasi. Keutuhan fungsi lingkungan dapat dipelihara apabila prinsip-prinsip tatanan lingkungan dapat ditegakkan dalam ikhtiar mengelola lingkungan.

Ketiga, mengusahakan keselarasan antara kependudukan dan lingkungan agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa dampak negatif bagi kependudukan dan lingkungan, sedangkan dampak positifnya meningkatkan hubungan keselarasan lingkungan dan kependudukan.

Pendekatan integratif (terpadu) merupakan cara yang dipandang tepat sesuai dengan kondisi kurikulum sekolah yang berlaku di Indonesia dewasa ini dan sifat dari komponen kependudukan dan lingkungan yang ekosistemik, semua unsur kependudukan dan lingkungan sebenarnya merupakan obyek dari mata ajaran lain. Oleh karena itu untuk wawasan kependudukan dan lingkungan hidup khususnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah lebih tepat memasukkan PKLH secara integratif (dipadukan, disisipkan) ke dalam mata pelajaran (bidang studi) yang ada.

Seperti halnya tubuh kita memerlukan gula, garam, vitamin. Bahwa gula, garam, vitamin kita perlukan, memang ya. Namun untuk sampai pada kita, tidak selalu harus diminum secara utuh berupa gula, garam dan vitamin tersebut, tetapi dapat berintegrasi (terpadu) melalui sayur, kue, buah-buahan, air the dan lain-lain. Itulah sebenarnya prinsip integrasi (keterpaduan) materi PKLH ke dalam bidang studi lain yang ada. Cara pendekatan integratif pada dasarnya adalah pendidikan berwawasan lingkungan yaitu menanamkan wawasan dan cara dalam memandang berbagai segi kehidupan atau pengetahuan.

Karena alasan itulah, maka KLH sebaiknya integratif yang memang lebih nalar (logis) dan juga lebih efisien dan lebih efektif.

Itulah sebabnya untuk tingkat pendidikan dasar menengah praktis diterapkan kepada banyak mata pelajaran seperti Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Agama, Olahraga dan Kesehatan, bahasa, kesenian, dan lain-lain.

Pandangan integratif ini telah menjadi pandangan bersama antara penentu kebijaksanaan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup termasuk BKKBN, para ahli ilmu KLH, Bappenas dan sebagainya. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, khususnya bagi IKIP dan FKIP PKLH diberikan sebagai mata kuliah tersendiri (monopolitik) dengan menambahkan pokok bahasan implementasi pengembangan metode dan teknik pengajaran PKLH melalui pendekatan integratif pada program sekolah. Penambahan pokok bahasan ini dimaksudkan agar para calon guru kelak dalam profesinya sebagai guru mampu mengajar PKLH yang kreatif dalam mengintegrasikan (memadukan) pada bidang-bidang studi yang dipegangnya.

Pokok bahasan pendekatan integratif dalam pengajaran PKLH di sekolah diperlukan dalam kurikulum PKLH di IKIP dan FKIP mengingat kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita sudah sepakati untuk dilaksanakan melalui pendekatan integratif ke dalam bidang studi.

Integrasi bukan sekedar menyisipkan bahan atau materi pengajaran PKLH ke dalam bidang studi yang diajarkan oleh guru. Bukan pula sekedar membicarakan masalah kependudukan dan lingkungan hidup pada setiap kali guru mengajar pokok bahasan suatu bidang studi. Integrasi yang diharapkan adalah integrasi konseptual yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kurikulumnya sehingga baik tujuan maupun materi kedua pokok bahasan (dari bidang studi dan PKLH) benar-benar menyatu, saling mengisi dan menunjang serta mempercayai pengetahuan dan pemahaman para siswa.

Oleh sebab itu integrasi (paduan) sekurang-kurangnya harus tercermin dalam empat hal yaitu:

Integrasi dalam kurikulum khususnya garis-garis besar program pengajaran (GBPP). Dilihat dari pokok bahasan yang ada dalam

GBPP, materi PKLH telah dimasukkan dalam GBPP berbagai bidang studi pada pendidikan dasar dan menengah baik kurikulum 1975 yang disempurnakan maupun kurikulum 1984 untuk SMA. Integrasi dalam GBPP bidang studi, pengembangan PKLH mengikuti bidang studi yang menyerapnya khususnya dalam hal materi, alokasi waktu maupun distribusinya dalam kelas, semester ataupun catur wulan.

Integrasi dalam satuan pelajaran berdasarkan GBPP bidang studi yang telah diintegrasikan. Ini berarti dalam proses belajar mengajar hanya ada satu satuan pelajaran, tujuan, materi, kegiatan belajar mengajar, metode dan alat serta penilaian yang mencakup integrasi bidang studi PKLH.

Integrasi dalam proses belajar mengajar, artinya belajar mengajar harus merupakan satu kesatuan yang bulat sehingga para siswa tidak mempunyai PKLH terpisah dari berbagai bidang studi yang menyerapnya. Kesan yang ada pada siswa adalah bahwa mereka sedang belajar bidang studi tertentu dari guru yang mengajarnya atau buku bidang studi yang dipelajarinya.

Integrasi dalam penilaian formatif ataupun penilaian sumatif. Ini berarti penilaian hasil belajar siswa dalam PKLH ada atau tercermin pada saat melakukan penilaian bidang studi yang menyerap (berintegrasi) dengan PKLH.

Apabila paduan (integrasi) telah tercermin dalam empat bidang diatas, berarti PKLH telah dapat berintegrasi dalam bidang studi yang relevan. Secara teknis pengajaran PKLH yang diintegrasikan lebih sulit dibandingkan dengan pengajaran PKLH sebagai mata pelajaran tersendiri (monopolitik). Pendekatan integratif melibatkan sebagian besar guru bidang studi di sekolah. Mereka diharapkan mengintegrasikan materi PKLH pada saat mengajarkan pokok bahasan dari bidang studi yang dibinanya yang dianggap ada kaitan pembahasannya.

Hasil penelitian di sekolah dasar yang menggunakan buku bidang studi terpadu dengan materi pendidikan kependudukan (termasuk di dalamnya pendidikan lingkungan hidup) oleh Saidi-hardjo (1985) menunjukkan bahwa:

Penggunaan buku-buku bidang studi terpadu dengan materi

pendidikan kependudukan menghasilkan prestasi belajar pendidikan kependudukan (dan lingkungan hidup) yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan buku-buku bidang studi bukan terpadu materi pendidikan kependudukan (dan lingkungan hidup).

Murid-murid sekolah dasar di daerah perkotaan memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan murid-murid sekolah dasar di pedesaan dalam mata pelajaran pendidikan kependudukan (dan lingkungan hidup).

Prestasi belajar pendidikan kependudukan (dan lingkungan hidup) yang lebih tercermin pada pandangan murid-murid yang bersikap positif terhadap aspek pengaruh pertambahan penduduk terhadap kehidupan manusia.

Penggunaan buku-buku bidang studi terpadu materi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar mengajar murid di sekolah maupun di luar sekolah dibandingkan dengan pengajarannya yang hanya bertumpu pada guru.

Penggunaan buku-buku studi terpadu materi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup memberikan kemudahan bagi para guru dalam pelaksanaan pengajaran PKLH yang diintegrasikan pada bidang studi di sekolah dasar.

Bahwa pendidikan kependudukan mempunyai dampak terhadap sikap dan persepsi seseorang ditunjukkan oleh penelitian Saidihardjo (1986) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penundaan masa kawin menunjukkan bahwa mahasiswa yang memperoleh mata kuliah pendidikan kependudukan lebih positif persepinya tentang penundaan masa kawin dibandingkan dengan mahasiswa yang belum memperoleh mata kuliah pendidikan kependudukan.

Demikian upaya membentuk manusia Indonesia yang berkeadilan kependudukan dan lingkungan hidup melalui pendekatan pendidikan yang berpaling kepada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (IKIP dan FKIP) sebagai tumpuan harapannya.

Marilah kita bersyukur bahwa salah satu usaha pembangun-

an di bidang kependudukan melalui keluarga berencana keberhasilannya telah mengundang kekaguman dunia sehingga banyak negara-negara berkembang belajar tentang pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan gerakan keluarga berencana di negara kita. Kita sambut dengan rasa syukur bahwa baru-baru ini Bapak Presiden Soeharto telah menerima Global Population Statesman Award yang untuk pertama kalinya diberikan kepada seorang kepala negara oleh *Population Institute* di Washington, Amerika Serikat. (Haryono Suyono, 1988, 7).

Penghargaan ini tentunya harus menjadi motivasi kuat untuk melanjutkan perjuangan kita, karena sesungguhnya masalah yang kita hadapi masih sangat besar. Selanjutnya Haryono Suyono mengatakan (1988) bahwa untuk mendapatkan perubahan tingkah laku yang rasional diperlukan proses yang panjang. Ia merupakan perubahan sikap manusia dalam lingkungannya atau masyarakatnya. Pengetahuan teknis tentang keluarga berencana tahun 1968-1969 itu sangat rendah, sehingga kita kemudian menentukan bahwa program KB ini harus dimulai dengan pendidikan serta penyuluhan yang gencar, agar perbedaan antara sikap dan tingkah laku makin lama makin dekat, dan bisa berakibat pada perubahan tingkah laku. Setelah diselenggarakan pendidikan tahun 1970 telah berhasil mendapatkan peserta KB 50 ribu setahun.

Disinilah komponen PKLH yang diberikan oleh para guru melalui program sekolah khususnya dan generasi muda umumnya diharapkan berperan besar dalam memberikan sumbangannya.

Dengan bekal yang berupa pemahaman sasaran pokok bidang kependudukan, lingkungan hidup dan usaha menciptakan keselarasan antara kependudukan dan lingkungan hidup serta bagaimana mengintegrasikan PKLH ke dalam bidang studi yang dibina oleh para guru, diharapkan dapat diwujudkan situasi dan kondisi keselarasan dalam berinteraksi antara komponen kependudukan dan lingkungan hidupnya. Untuk mewujudkan harapan itu menurut hemat saya, struktur kurikulum PKLH lembaga pendidikan tenaga kependidikan (IKIP dan FKIP) dengan bobot 2 sks, sekurang-kurangnya memuat pokok-pokok materi sebagai berikut:

1. Pengantar Pengajaran Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
 - a. Latar belakang
 - b. Kedudukan
 - c. Tujuan
2. Konsep Dasar Kependudukan dan Lingkungan Hidup
 - a. Konsep dasar kependudukan
 - b. Konsep dasar lingkungan hidup
 - c. Permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup
3. Interaksi Kependudukan dan Lingkungan Hidup
 - a. Interaksi kependudukan dan lingkungan hidup
 - b. Interaksi kependudukan dengan pembangunan
 - c. Interaksi lingkungan hidup dengan pembangunan
4. Parameter Kependudukan, Lingkungan Hidup dan Pembangunan
 - a. Parameter Kependudukan
 - b. Parameter Lingkungan Hidup
 - c. Parameter Pembangunan
5. Kependudukan
 - a. Perkembangan penduduk Indonesia dan dunia
 - b. Pengukuran dinamika kependudukan
 - c. Beberapa teori kependudukan
 - d. Konsep ketenagakerjaan di Indonesia
 - e. Sistem kependudukan di Indonesia
 - f. Prospek kependudukan di Indonesia
6. Lingkungan Hidup
 - I. Lingkungan Hidup Alam
 - a. Konsep ekosistem
 - b. Dinamika dan stabilitas ekosistem
 - c. Energi dan kehidupan
 - d. Faktor pembatas
 - e. Dinamika populasi dan komunitas
 - f. Perkembangan dan evaluasi ekosistem
 - g. Biografi
 - II. Lingkungan Hidup Binaan
 - a. Sumber daya
 - b. Tata ruang dan wilayah

- c. Ekonomi sumber daya
 - d. Ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. Konsep limbah
- III. Lingkungan Hidup Sosial
- a. Konsep lingkungan hidup sosial
 - b. Sistem sosial
 - c. Dinamika dan perubahan sosial
 - d. Sistem sosial di Indonesia
7. Pengelolaan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- I. Prinsip Pengelolaan dan Kebijakan Kependudukan
 - a. Keluarga berencana
 - b. Transmigrasi
 - II. Prinsip-prinsip Pengelolaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup
 - a. Komponen yang terkait
 - b. Keanekaragaman masalah
 - c. Prinsip keseimbangan dan keserasian
8. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pesisir
- a. Pengelolaan daerah aliran sungai dan
 - b. Pengelolaan daerah hutan
 - c. Pelestarian hutan dan pantai
 - d. Pengelolaan bahan buangan laut
 - e. Pengendalian pencemaran laut
9. Pembinaan Mutu Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam
- I. Pembinaan dan Pelestarian Alam
 - a. Pengembangan suaka alam, taman nasional dan kawasan lindung
 - b. Kelestarian tanah, air dan hutan
 - II. Pembinaan Mutu Lingkungan
 - a. Pengembangan kriteria mutu lingkungan
 - b. Pemantauan mutu lingkungan hidup
10. Pengembangan Pemukiman dan Pengelolaan Tata Ruang
- a. Wilayah perkotaan
 - b. Wilayah pedesaan
11. Dasar-dasar Analisis Dampak Lingkungan
- a. Kegunaan
 - b. Metode pelaksanaan dan penyusunan andal

- c. Metodologi andal
 - d. Peraturan perundangan kependudukan dan lingkungan hidup
 - e. Lembaga swadaya masyarakat
12. Implementasi Pengajaran PKLH pada Program Sekolah dan Luar Sekolah
- a. Pendekatan pengajaran
 - b. Program sekolah
 - c. Program luar sekolah
 - d. Konsekuensi pendekatan terpadu materi PKLH pada bidang studi
 - e. Evaluasi belajar PKLH

EVALUASI BELAJAR PKLH

Untuk program studi satu semester dengan bobot 2 sks, pokok-pokok bahasan materi tersebut di atas saya anggap memadai dalam rangka mempersiapkan calon guru di sekolah yang membawa misi mengintegrasikan PKLH dalam usaha membentuk manusia Indonesia yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:

Pokok Bahasan	Frekuensi tatap muka 100 menit
1.	1 kali
2.	1 kali
3.	1 kali
4.	1 kali
5.	2 kali
6.	3 kali
7.	1 kali
8.	1 kali
9.	1 kali
10.	1 kali
11.	2 kali
12.	1 kali
Ujian hasil belajar	2 kali
Jumlah	18 kali

PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya mengucapkan beberapa kata penghargaan dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang memungkinkan saya memperoleh kepercayaan memangku jabatan Guru Besar ini.

Pertama, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan yang sangat mulia ini kepada saya untuk memangku jabatan sebagai Guru Besar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan menganugerahkan kemampuan kepada saya untuk berbuat lebih banyak bagi pendidikan di Indonesia dalam batas-batas kemampuan saya sebagai manusia.

Kedua, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Bapak Rektor IKIP Yogyakarta dan saudara-saudara anggota Senat Guru Besar IKIP Yogyakarta yang telah berkenan menerima kehadiran saya dalam kelompok profesi ilmiah yang terhormat ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan bimbingannya agar saya dapat berpartisipasi aktif dalam lembaga terhormat ini.

Ketiga, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada para mantan promotor saya yaitu ibu Prof. Dr. Ny Maftuchah Jusuf, Bapak Prof. Imam Bernadib MA, dan Bapak Prof. Drs. Sutrisno Hadi MA. Dari beliau-beliau itulah semangat, ambisi dan inspirasi saya terdorong untuk meraih jabatan tertinggi di bidang pendidikan ini, dan saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ambisi itu telah menjadi kenyataan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya.

Keempat, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada segenap sivitas akademika dalam lingkup Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Yogyakarta yang telah memungkinkan saya menduduki jabatan Guru Besar ini. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa 20 tahun saya telah menekuni profesi keguruan dan kependidikan ini bersama saudara-saudara dengan segala suka dan rasa dan diberi kesempatan pertama menduduki jabatan tertinggi sebagai Guru Besar di dalam lingkungan FPIPS IKIP Yogyakarta. saya berdoa semoga jabatan ini akan segera disusul oleh saudara-saudara yang lain.

Kelima, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada mahasiswa dalam lingkungan IKIP Yogyakarta khususnya. Mahasiswa adalah komponen dalam civitas akademika. Tanpa saudara mahasiswa maka jabatan dan gelar Guru Besar ini tak mungkin ada. Bahkan proses belajar mengajar dan pendidikan di lembaga ini akan tiada. Dalam proses pengejaran pendidikan inilah saya dapat belajar dari saudara. Harapan saya agar saudara kelak menjadi guru dan pendidik yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup. Saudara-saudara mahasiswa memikul beban tanggung jawab bagi generasi mendatang untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya sebagai bangsa yang berbudaya, kokoh dan tegar di bawah panji-panji Pancasila dan UUD 1945.

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam suasana yang berbahagia dan bersejarah bagi saya ini terkenanglah saya pada seluruh figur yang telah turut membesarkan saya, mendidik, mendampingi, dan membantu saya sehingga sampai ke jenjang yang sekarang ini. Mereka adalah para guru saya dari sekolah dasar sampai sekolah dasar sampai Pascasarjana, ayah dan ibu saya (almarhumah), mertua saya (almarhum), semua paman dan bibi saya, adik-adik saya, istri dan anak-anak saya. Berkat bimbingan dan dorongan dari semuanya itu maka akhirnya mengantarkan saya ke jenjang yang sekarang ini. Atas semua ini saya sampaikan rasa hormat dan terimakasihku yang tulus.

Khususnya kepada isteri dan anak-anak saya yang tercinta saya sampaikan terimakasihku yang tulus, karena mereka telah dapat menciptakan suasana yang memungkinkan saya mencapai ke jenjang karier tertinggi yang sekarang ini.

Akhirnya kepada segenap hadirin dan undangan terhormat, yang telah berkenan menghadiri upacara ini, saya ucapkan terimakasih banyak. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu menunjukkan jalan yang benar, jalan dari orang-orang yang diridhoinya.

Sekian.

Wassalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

Yogyakarta, 18 Februari 1989.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Prof. Dr. Saidihardjo, M.Pd
Lahir di : Purwokerto, Jawa Tengah, 1 Agustus 1941
NIP : 130 321 363
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Partomihardjo
Status Perkawinan : Kawin pada tanggal 26 September 1966
Nama Istri : Ny. Supartinah
Jumlah Anak : 4 orang
Dyah Suryaningsih (1967)
Dyah Dwi Rahayu (1970)
Bagus Wahyu Hartono (1978)
Bagus Kurnia Putra (1980)
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Madya/IV d
Jabatan : Guru Besar/Dekan pada Fakultas Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Yogyakarta
Alamat Rumah : Kalangan UH V/684 Yogyakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

1955, tamat sekolah Rakyat di Jatilawang, Purwokerto
1959, lulus Sekolah Guru B (SGB) 3 tahun di Purwokerto
1962, lulus Sekolah Guru A (SGA) di Purwokerto
1965, lulus Sarjana Muda Pendidikan Geografi pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP Yogyakarta
1968, lulus Sarjana Pendidikan Geografi pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP Yogyakarta
1983, lulus Magister Pendidikan (M.Pd) program studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pasca Sarjana IKIP Jakarta
1985, lulus Doktor Pendidikan pada IKIP Yogyakarta

RIWAYAT PEKERJAAN

- Guru beberapa SMP, SMA, dan SGA swasta di Yogyakarta, 1963-1975
- Asisten Perguruan Tinggi, 1967-1968 (gol. E/II dan II/C)
- Asisten Ahli (1968) dan selanjutnya berdasarkan SK Presiden RI No. 9/K Tahun 1988 terhitung mulai 1 April 1988 diangkat sebagai Guru Besar Gol. IV/d pada FPIPS- IKIP Yogyakarta
- Ketua Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS Yogyakarta, 1985-1988
- Pembantu Dekan I FPIPS- IKIP Yogyakarta, 1985-1988
- Dekan FPIPS- IKIP Yogyakarta, 1988-sekarang

PENGALAMAN LAIN

- Peserta Seminar Nasional Pendidikan Kependudukan, Dedikbud, Ciloto, 1970
- Anggota Tim Penyusun buku-buku pelajaran Pendidikan Kependudukan SD, SMP, SMA dan sekolah Kejuruan, PNPk Depdikbud-BKKBN, Jakarta 1974-1982
- Kursus Intensif Pendidikan Kependudukan, PNPk Depdikbud, 1974
- Penataran Dosen IKIP dan FKg seluruh Indonesia dalam rangka mendukung program doctor (memperoleh rekomendasi untuk promosi Doktor), 1979
- Penataran penyusunan bahan instruksional jarak jauh IKIP Bandung dan Pusat TKPK, 1980
- Studi Banding pelaksanaan pengajaran pendidikan kependudukan di Malaysia, Srilanka, India, Thailand, Korea Selatan dan philipina, dengan beaya UNESCO, 1977
- Latihan Metode Penelitian Survey, PPSK UGM, 1979
- Penataran IPS P3G Depdikbud di Semarang, 1979
- Penataran Manajemen dan Administrasi Perguruan Tinggi Depdikbud di Cipayung, 1986
- Penataran pengawasan Melekat Tingkat Pusat (TARWASKAT) angkatan IX, Jakarta, 1988

KEGIATAN LAIN

- Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan (LP2K) IKIP Yogyakarta 1972-1986
- Anggota Dewan redaksi Cakrawala Pendidikan dan Jurnal Kependidikan IKIP Yogyakarta, 1971-1979 dan 1984 sampai sekarang
- Ketua Umum Himpunan Peminat dan Ahli Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (HIPA PKLHI) cabang Yogyakarta, 1984-sekarang
- Konsultasi Kursus Tertulis Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, 1980-1986
- Konsultasi Proyek Pembinaan Pendidikan Dasar (P3D) Derah Istimewa Yogyakarta bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 1974-1978
- Konsultasi proyek pendidikan Kependudukan lewat Pengajian, Muhammadiyah, 1975-1976
- Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni FPIPS (IKAPIS) IKIP Yogyakarta, 1987-sekarang

MAJALAH DAN JURNAL

- Membangun Desa, DERMAHA, Th. III, No. 4, 1968, p. 13-16
- Apakah Pendidikan Kependudukan itu?, Jurnal IKIP Yogyakarta, No. I, Th. 1, 1971, p. 2-9
- Peranan Kaum Pendidik dalam Berpartisipasi Mensukseskan Progam Kependudukan di Indonesia, INFORMASI No. 3 Th. II, 1972, p. 13-18
- Masalah Pendekatan dalam Pelaksanaan Pengajaran pendidikan Kependudukan dalam Progam Sekolah, PUSARA, No. 1, th. 51, 1983, p.10-16
- Mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan ke dalam Social Studies, BULETIN SEKOLAH PEMBANGUNAN, No. 7, 1973, p. 50-55
- Perkembangan Pendidikan Kependudukan di Indonesia Dewasa ini, INFORMASI, No. 2, th. IV, 1974, p. 4-13
- Melibatkan lembaga Pendidikan Guru dalam Pendidikan Kependudukan, JURNAL IKIP YOGYAKARTA, No. 8, Th. IV, 1974, p. 1-12
- Mengapa Ilmu-ilmu Sosial Dianggap Lemah di Indonesia, INFORMASI, No. 2, Th. VII 1977, p. 13-16
- Implikasi Pendidikan Kependudukan di Sekolah dalam Pelaksanaann Kurikulum 1975, INFORMASI, No. 2, Th. IX, 1979, p. 12-19
- Masalah Kependidikan Sekitar Penyediaan Guru Geografi dalam Lingkungan IKIP Yogyakarta, No. 13, Th. IX, 1979, p. 16-14
- Guru dalam ikut ambil bagian Pendidikan Lingkungan, JURNAL IKIP YOGYAKARTA, No. 13, Th. IX, 1979, p. 21-37
- Pendidikan terbuka, kuliah terbuka dan kemungkinan memanfaatkannya di lembaga tenaga kependidikan, CAKRAWALA PENDIDIKAN, No. 1, Th. XII, 1982, p. 57-64
- Gotong Royong dalam berbagai bentuknya di Indonesia serta pengaruhnya terhadap pengaruhnya terhadap nilai anak, INFORMASI, No. 1, Th. XII, 1982, p. 26-37
- Refleksi Prestasi Belajar Murid Sekolah Dasar dalam mata Pelajaran Pendidikan Kependudukan terhadap sikap tentang pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap segi kehidupan mmanusia. Jurnal Kependidikan No.I Volume 15 tahun 1985.
- Strategi menciptakan iklim yang menunjang terjadinya Transmigrasi Swakarya, Cakrawala pendidikan, No. I Volume V 1986
- Pengaruh Progam KB Nasioanal terhadap pergeseran Nilai anak dalam masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Kependidikan No. 2 Volume XVII, 1987
- Sentuhan Pendidikan bagi anak kurang beruntung di Indonesia, Cakrawala Pendidikan No. 3 tahun VII, 1988.
- Penelitian dan Kertas Kerja
- Kerjina Batik, Gerabah dan Pendidikan di Daerah Bayat, Informasi No. 1 Th. III, 1973 p. 31-46
- Progam Pendidikan Lingkungan dengan pendekatan terpadu, 1978 (kertas kerja Dies Natalis XIV, IKIP Yogyakarta)
- Korelasi antara frekuwensi Penggunaan buku-buku literature dalam hubungannya dengan prestasi belajar mahasiswa jurusan Geografi FKIS IKIP Yogyakarta, 1979 (anggota peneliti)

Peranan guru dalam membina manusia Indonesia

- Penjajagan tentang persepsi pengetahuan bidang studi IPS bagi mahasiswa tingkat pertama FKIS IKIP Yogyakarta, 1979/1980 (laporan penelitian)
- Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pendidikan kependudukan yang diintegrasikan pada murid-murid SMP, di Kotamadya Yogyakarta, 1980 (anggota peneliti)
- Evaluasi keberhasilan pengajaran bidang studi IPS di Sekolah Lanjutan, 1981 (laporan penelitian)
- Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penundaan masa kawin, 1986 (laporan penelitian)
- Pengaruh Program KB Nasional terhadap pergeseran nilai anak dalam masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1987 (laporan penelitian)
- Pengetahuan dan sikap tentang Pendidikan KB dan KB mandiri, bagi generasi muda di Kotamadya Yogyakarta, 1987 (laporan penelitian)
- Pengembangan kurikulum PKLH yang berwawasan Lingkungan, (kertas kerja Seminar Pendidikan dan Kependudukan IKIP Yogyakarta 1988)
Buku-Buku Pelajaran
- Guru dalam masa pembangunan di Indonesia, Karya Tulis dalam rangka menyambut Dies Natalis XIII IKIP Yogyakarta, 1977 p. 61-65
- Pedoman pengembangan kurikulum Pendidikan Kependudukan, (kontributor) PNPB-BKKBN 1976
- Bidang Studi IPS dalam Pelaksanaan Kurikulum 1975, IKIP Yogyakarta (Seri Inovasi Pendidikan)
- Team Teaching IKIP Yogyakarta, 1978 (Seri Inovasi Pendidikan)
- Penduduk dan Pendidikan Kependudukan, BURSA BUKU Yogyakarta 1979
- Dasar-dasar Kependudukan, BURSA BUKU Yogyakarta 1979
- Pengantar Bidang Studi IPS di sekolah Lanjutan, TIGA SERANGKAI Solo, 1982
- Penduduk, Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, TIGA SERANGKAI Solo, 1983
- Diktat Bahan Kuliah Pendidikan Kependudukan, FPIPS IKIP Yogyakarta, 1984
- Belajar Aktif dalam IPS untuk Sekolah Dasar, TIGA SERANGKAI Solo, 1987
- IPS Sejarah untuk Sekolah Dasar (Ditulis bersama Drs. Sardiman AM), TIGA SERANGKAI Solo, 1988
- IPS Geografi dan Kependudukan untuk SMP, TIGA SERANGKAI Solo, 1988
- IPS Sejarah untuk SMP (Ditulis bersama Drs. Sardiman AM), TIGA SERANGKAI Solo, 1988
- IPS Ekonomi Koperasi untuk SMPP, TIGA SERANGKAI Solo, 1988
- Geografi untuk SMA, TIGA SERANGKAI Solo, 1986

TESIS SARJANA

Masalah Pertanian dan akibat-akibatnya di Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, 1986

TESIS MAGISTER

Pengaruh Sistem Penyampaian Team Teaching (Pengajaran Beregu) pada Prestasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kependudukan yang diintegrasikan di SMP Laboratori IKIP Yogyakarta, 1983

DISERTASI

Pengaruh Penggunaan Buku studi terpadu dengan materi Pendidikan Kependudukan pada Prestasi belajar murid dalam mata Pelajaran Pendidikan Kependidikan di sekolah dasar, 1985

MATA PELAJARAN YANG DIBINA

1. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH)
2. Geografi sosial
3. Ilmu kependudukan
4. Seminar geografi
5. Penilaian Pencapaian Belajar Geografi
6. Metode Penelitian Pendidikan
7. *Filsafat Ilmu Sosial*

PERANAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA

Diucapkan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Terbatas IKIP YOGYAKARTA pada
Tanggal 21 Juli 1990

PROF. DRS. HADITONO

Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Madya dalam
Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pada
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.



*Saudara Ketua Senat,
Saudara Sekretaris Senat,
Saudara Anggota Senat,
Hadirin sekalian yang mulia,*

Saya merasa bahagia, bahwa pada hari ini mendapat kesempatan menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial ini menarik perhatian karena peranannya yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan manusia dan masyarakat. Tetapi di samping peranannya yang menarik perhatian, juga terdapatnya keraguan ontologis dalam dirinya, yang timbul sebagai akibat dari interpretasi ganda dari padanya, antara lain:

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial diartikan sebagai pendidikan yang bertujuan membuat peserta didik/si terdidik memiliki kesadaran dan pemikiran (*mindedness*) akan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial diartikan sebagai pro-ses kegiatan mendewasakan peserta didik/di terdidik melalui ilmu pengetahuan sosial.

Perbedaan interpretasi ini konsekuensinya terjadi perbedaan konsepsi dan konsep ganda pada pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial itu. Dalam keadaan keraguan ontologis, keraguan konsepsi, sulit akan menangani dan mengembangkannya. Maka masalah keraguan itu harus dipecahkan untuk memungkinkan penanganan dan pengembangan dengan baik. Tetapi karena tidak adanya konsep resmi dan pedoman resmi untuk menentukan konsep pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu, maka konsep itu ditentukan sendiri dengan dasar pemikiran yang dicari dalam semangat kehidupan pendidikan itu sendiri. Pada era orde baru ini semangat pendidikan pada umumnya mengarah kepada menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Konsep pembangunan nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam GBHN mencakup pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangun-

an seluruh masyarakat Indonesia. Manusia Indonesia seutuhnya dididik ditingkatkan ketakwaannya kepada Tuhan YME, ditingkatkan kecerdasan dan ketrampilannya, dipertinggi budi pekertinya, diperkuat kepribadiannya dipertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah airnya agar dengan demikian manusia Indonesia dapat membangun dirinya sendiri dan membangun masyarakat. Atau singkatnya, manusia Indonesia dididik untuk menjadi manusia pembangunan sedangkan masyarakat Indonesia dibangun untuk mewujudkan kondisi adil dan makmur, yang memungkinkan manusia Indonesia dapat hidup bahagia.

Dalam konsep pembangunan itu mengandung arti memberi kesempatan yang cukup leluasa kepada manusia Indonesia yang bersifat multi dimensional dan menempatkan pada posisi sentral dalam berperan melaksanakan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manusia Indonesia di satu pihak menjadi objek yang dididik dan dibangun, tetapi di lain Pihak sekaligus menjadi subjek yang mendidik dan membangun dirinya sendiri yang produknya berupa manusia seutuhnya dan membangun masyarakat yang produknya berupa kondisi adil dan makmur.

Berdasar atas pemikiran tentang semangat kehidupan pendidikan ini, tepat kiranya jika ditentukan konsep pendidikan ilmu pengetahuan sosial sebagai proses pendewasaan peserta didik melalui peran ilmu pengetahuan sosial.

Hadirin yang mulia,

Jika dipikirkan, pelaksanaan pembangunan Indonesia itu pada dasarnya berupa suatu proses kegiatan yang membuat perubahan atau /mengubah situasi kehidupan orang dan masyarakat yang lama menjadi situasi kehidupan baru. Dengan istilah yang populer yang lama itu disebut kolot, sedang yang baru disebut modern. Jadi pelaksanaan pembangunan berarti proses kegiatan mengubah kehidupan masyarakat kolot menjadi kehidupan masyarakat modern. Bertolak dari pengertian masyarakat kolot dan masyarakat modern itu, pelaksanaan pembangunan juga di pahami sebagai proses modernisasi. Namun dalam hal hubungan antara pembangunan dan modernisasi itu tak ada kesatuan pendapat,

terdapat banyak variasi.

Di antara pendapat-pendapat itu yang ekstrim di satu pihak menyatakan bahwa pembangunan itu sendiri adalah modernisasi. Di lain pihak menyatakan bahwa pembangunan tidak identik dengan modernisasi. Masing-masing mempunyai identitasnya sendiri; namun keduanya ada hubungan fungsional yang penting, ialah bahwa pembangunan akan terwujud baik apabila pelaksanaannya dilakukan dengan modernisasi. Terlepas dari persoalan kebenaran dari pendapat ekstrim itu, pada umumnya orang sependapat bahwa modernisasi tepat dipergunakan sebagai landasan berpikir pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian perlu diketahui apa modernisasi itu.

Para ilmuwan banyak mengkaji modernisasi itu; pada umumnya menyatakan bahwa modernisasi itu mencakup masalah yang kompleks, karenanya sukar didefinisikan secara tepat. Dr. J.W. Schoorl, memandang modernisasi itu dan segi operasional yang diambil dari pengalaman negara-negara maju, memberi definisi modernisasi itu secara umum: "Modernisasi adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau kepada semua aspek-aspek masyarakat". Definisi muncul dari pengamatannya bahwa bertambahnya pengetahuan ilmiah itu merupakan faktor terpenting dalam proses modernisasi. Maka besar atau kecilnya modernitas sesuatu masyarakat akan tergantung pada besar atau kecilnya penerapan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dr. Sudjatmoko, dalam makalahnya berjudul *Modernisasi, Sekularisme dan Kekuasaan*, menjelaskan arti modernisasi untuk masyarakat Indonesia sebagai berikut: Modernisasi masyarakat dan budaya Indonesia merupakan keharusan bagi bangsa Indonesia, agar mampu bertahan di dunia modern sebagai suatu bangsa yang merdeka dan otonom. Usaha pembangunan masyarakat Indonesia mau tak mau harus dapat mempertinggi kemampuan itu. Modernisasi meliputi penguasaan serta kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi suatu bangsa. Tanpa kemampuan menerapkan dan mengembangkan pengetahuan

modern, pengetahuan berdasar ilmu pengetahuan, suatu bangsa akan terdesak dari lingkaran kekuasaan tempat diambil keputusan-keputusan yang akan menentukan masa depan bangsa-bangsa di dunia.

Penjelasan modernisasi Dr. Sudjatmoko itu didasarkan atas pandangan dan pemikirannya perkembangan masyarakat dan bangsa untuk masa depan. Dua ungkapan modernisasi itu, baik dari Dr. J.W. Schoolt maupun dari Dr. Sudjatmoko menunjukkan hakekat modernisasi yaitu penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah pada segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat untuk mengubah pandangan hidup, sikap hidup, dan gaya hidup yang terkait oleh adat atau tradisi kolot menjadi modern.

Bagi Indonesia, apa yang dimaksud masyarakat tradisional kolot dan apa yang dimaksud masyarakat modern belum tegas secara terinci. Banyak konsep yang berbeda-beda. Namun jika diamati, ada penegasan di dalam GBHN yang menyatakan bahwa feodalis me-kolonialisme harus dikikis habis. Penegasan dapat dipakai sebagai patokan untuk memahami masyarakat tradisional kolot, bahwa yang dimaksud, masyarakat tradisional kolot oleh GBHN tak lain dari pada masyarakat feodal-kolonial. "Masyarakat ini adalah masyarakat yang dijiwai oleh mental feodalisme-kolonialisme. Gejala yang muncul di permukaan masyarakat feodal-kolonial ini antara lain.

1. Struktur sosial yang berkesenjangan tinggi antara kelompok elite dan kelompok bawah.
2. Posisi sosial ditentukan dengan sistem warisan.
3. Pelaksanaan kekuasaan secara otoriter; demokrasi tidak ada. Penguasa menekan, sedang rakyat berkewajiban harus melayani kepentingan penguasa/atasan.
4. Rakyat bersikap takut terhadap atasan; menerima nasib, apatis.
5. Rakyat pada umumnya bodoh; aktivitas, kreativitas dan dinamikanya rendah.
6. Penghasilan rakyat rendah, kehidupannya miskin.
7. Sebaliknya masyarakat modern yang kita maksudkan adalah

masyarakat yang gejalanya berlawanan dari gejala masyarakat feodal-kolonial tersebut, atau secara singkatnya masyarakat yang gejalanya adil, makmur dan stabil.

Hadirin yang mulia,

Pelaksanaan pembangunan, baik perkembangan manusia maupun pembangunan masyarakat Indonesia melalui proses modernisasi seperti tersebut di atas, nampak jelas peran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mutlak diperlukan. Adapun bentuk perannya, sejajar dengan ide yang terkandung dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Setiap ilmu pengetahuan meyakini bahwa realitas adalah perwujudan hubungan gejala-gejala baik simultan maupun sekuensial. Ilmu menjelaskan hubungan kausal/fungsional antara gejala-gejala itu secara logis dan rasional. Secara singkat dikatakan bahwa ide ilmu adalah pemikiran secara kausalitas yang logis dan rasional. Dalam pelaksanaan pembangunan dengan proses modernisasi, menerapkan ilmu pengetahuan untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia berarti mendidik manusia Indonesia mampu berpikir secara kausalitas yang logis dan rasional. Berpikir semacam ini disebut juga berpikir ilmiah berarti bebas dari ikatan tradisi kolot dan menjadikan manusia dan masyarakat Indonesia modern. Adapun peran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam hubungan ini, secara umum sama seperti ilmu pengetahuan pada umumnya yaitu mendidik berpikir kausalitas yang logis dan rasional; secara khusus Ilmu Pengetahuan Sosial berhubungan dengan kehidupan sosial kehidupan yang langsung dihadapi dan dihayati oleh manusia dan masyarakat setiap saat.

Menurut teori Talcott Parsons (seorang teoretikus sosial ulung), bahwa seluruh kehidupan manusia dilaksanakan/diwujudkan dalam bentuk tindak-tindakan (*actions*). Agar dapat dicapainya tujuan hidup dengan baik orang menyusun urutan tujuan-tujuannya menjadi satu sistem tujuan, sehingga tindakan untuk mencapai tujuan itupun tersusun menjadi satu sistem tindakan. Dalam masyarakat kehidupan sosial yang diwujudkan dengan tindakan sosial (*social actions*) itu tersusun rapi yang keseluruhannya disebut sistem sosial. Sistem sosial itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan sosial; sedang tujuan sosial tersusun menjadi,

empat sub tujuan sosial yaitu: ekonomi, politik, sosialisasi dan kultural. Tindakan sosial untuk mencapai sub-sub tujuan sosial itu disebut sub sistem sosial. Jadi dalam sistem sosial terdapat empat sub sistem sosial, yaitu: sub sistem ekonomi, sub sistem politik, sub sistem sosialisasi dan sub sistem kultural.

Dari teori Talcott Parsons ini dapat kita pahami bahwa sub sistem ekonomi, politik, sosialisasi dan kultural itu merupakan tujuan atau saran hidup yang disadari dan dihayati langsung oleh setiap orang dan masyarakat. Jika dibandingkan dengan sasaran-sasaran pembangunan Indonesia, saran pembangunan itu sama dengan sub-sub sistem sosial Parsons, ditambah dengan sub sistem hankam.

Dalam praktek, setiap sub sistem sosial itu telah dipelajari dan dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan: ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu kebudayaan dan ilmu kewiraan. Dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan untuk pelaksanaan pembangunan itu, Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial itu diajarkan dan dipelajari oleh manusia masyarakat Indonesia, yang hasilnya akan tercerna menjadi nilai-nilai yang, dipakai sebagai landasan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan kehidupan sosialnya.

Dari uraian di atas jelas bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai posisi/peran yang sangat sentral dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia yang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar Pancasila.

Hadirin yang mulia,

Pelaksanaan peran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam pembangunan Indonesia perlu kita ketahui sampai dimana keberhasilannya. Keberhasilan itu diukur dari produk yang dihasilkan oleh pelaksanaan pendidikan/pengajaran ilmu pengetahuan sosial selama proses pembangunan Indonesia berjalan. Tetapi produk yang langsung mengena pada sasaran manusia Indonesia seutuhnya yang berupa peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan, peningkatan kecerdasan dan ketrampilan, peningkatan kebangsaan dan

cinta tanah air terlalu sukar diukur karena kita memang belum mempunyai alat ukur yang akurat untuk itu. Yang mungkin dapat diukur adalah produk yang dihasilkan oleh manusia pembangunan itu sendiri, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila.

Cita masyarakat adil dan makmur yang dimaksud oleh GBHN dalam pelaksanaannya jelas tertuang dalam trilogi pembangunan, yaitu: pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Tentang keadilan, yang dimaksud adalah situasi perasaan puas sebagai ungkapan dari pemerataan. Ada delapan sasaran yang harus diratakan, yang penjabaran dalam pencapaiannya melalui delapan jalur pemerataan, yaitu:

1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh pengadilan.

Delapan sasaran pemerataan itu pada hakekatnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan terkait sama lain merupakan satu kesatuan. Pengukuran produk pemerataan ini sukar dikerjakan, karena kita belum mempunyai metode pengukuran dan alat ukur yang tepat. Untuk dapat melakukan pengukuran pada umumnya orang mengambil salah satu dari delapan sasaran pemerataan yang dipandang punya peran dominan sebagai tolok ukur. Biasanya pemerataan pembagian pendapatan yang dipakai sebagai tolok ukur yang tepat. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan di Indonesia yang meletakkan titik berat pembangun-

an pada pembangunan ekonomi, karena dianggap kehidupan ekonomi mempunyai peran dominan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Sedangkan pembagian pendapatan di dalam ekonomi memang sudah biasa dipakai sebagai tolok ukur pemerataan kemakmuran, bahkan juga dipakai sebagai indikator sistem ekonomi itu sendiri.

Selanjutnya tentang masyarakat makmur yang dimaksud oleh GBHN tertuang dalam logi kedua yaitu: pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai pertumbuhan produksi dan hasil produksi, berupa tersedianya benda dan jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup. Masyarakat makmur akan terwujud jika penyediaan benda dan jasa cukup banyak sehingga banyak kebutuhan hidup yang dapat dipuaskan. Dalam masyarakat modern hasil produksi suatu negara biasanya dinyatakan dengan perhitungan uang, yang disebut pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini akan menentukan besarnya kemakmuran masyarakat negara itu. Untuk cepat memperoleh gambaran berapa besar kemakmuran masyarakat biasa juga digunakan konsep pendapatan perkapita. Dalam ekonomi telah ada metode dan instrumen menghitung pendapatan nasional dan pendapatan perkapita itu yang akurat.

Hadirin yang mulia,

Sejak awal pelaksanaan pembangunan Indonesia selalu dipantau oleh lembaga-lembaga kajian baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pemantauan juga menggunakan kriteria konsep pemerataan pembagian pendapatan dan pendapatan perkapita sebagai pencerminan wujud masyarakat adil dan makmur. Pada tahun 1976 Prof . Dr. Sumitro Djojohadikusuno dari Central Policy Study (CPS) mempelajari situasi masyarakat adil dan makmur Indonesia, dengan mengolah data-data dari Biro Pusat Statistik (BPS). Masyarakat Indonesia dibedakan menjadi tiga lapisan: lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah. Kemudian diperbandingkan besarnya jumlah penduduk dan besarnya pendapatan antara lapisan-lapisan itu. Untuk pembagian pendapatan besar penduduk 20% dari jumlah penduduk, memiliki pendapatan 56% . dari pendapatan nasional. lapisan

menengah, besar penduduk 40% dari jumlah penduduk, memiliki pendapatan 33% dari pendapatan nasional. Lapisan bawah, besar penduduk 40% dari jumlah penduduk, memiliki pendapatan 11% dari pendapatan nasional. Untuk kemakmuran ditunjukkan dengan besarnya pendapatan perkapita; pada waktu itu besarnya US \$ 150 setahun.

Dari perumusan ini dapat kita menginterpretasi: Mengenai situasi kemakmuran, pendapatan perkapita. US & 150 setahun itu termasuk pendapatan yang rendah. Jika dibanding dengan pendapatan sesama negara Asia, pendapatan Indonesia itu yang paling rendah, tetapi tidak yang terendah dalam bandingan dengan pendapatan negara-negara di dunia. Pada waktu itu pendapatan Indonesia masih termasuk nomor tiga dari bawah. Jadi dapat dikatakan pada waktu itu bangsa Indonesia masih miskin.

Mengenai pembagian pendapatan yang mencerminkan keadilan, rumus Sumitro tersebut menunjukkan bahwa tidak ada keseimbangan pemerataan. Bahkan pakar-pakar sosial ekonomi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, terutama Bank Dunia: menyebut/menyatakan bahwa pembagian pendapatan; Indonesia itu sebagai kesenjangan tinggi atau terkenal dengan istilah *high inequality*. Dalam rumus pembagian pendapatan Dr. Sumitro itu nampak menyolok perbedaan pendapatan antara, lapisan atas dan lapisan bawah. Menurut ahli-ahli sosial ekonomi lapisan bawah yang besarnya 40% dari jumlah penduduk itu dikategorikan sebagai lapisan miskin mutlak, atau juga disebut lapisan yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu hidup yang hanya mampu mempertahankan hidup saja tanpa, pengembangan. Dengan adanya kesenjangan tinggi itu, berarti bahwa cita-cita keadilan sosial atau masyarakat adil belum terwujud.

Sebelas tahun kemudian atau tepatnya tahun 1987 Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo kembali memaparkan pendapatan perkapita dan pembagian pendapatan Indonesia. Pendapatan perkapita telah mencapai US \$ 500 setahun. Sedang pembagian pendapatan: Lapisan atas, 20% dari jumlah penduduk, memiliki pendapatan 43% dari pendapatan nasional. Lapisan menengah,

40% dari jumlah penduduk, memiliki pendapatan 37,4% dari pendapatan nasional. Lapisan bawah, 40% dari jumlah penduduk, memiliki pendapatan 19,6% dari pendapatan nasional. Angka-angka dan susunannya di atas menunjukkan adanya perubahan situasi hasil pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu sebelas tahun. Kemakmuran meningkat lebih dari tiga kali. Penyediaan benda dan jasa, pemuas kebutuhan cukup melimpah di mana-mana. Ini adalah suatu prestasi pembangunan yang luar biasa. Inipun berarti juga keberhasilan penerapan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk mendidik/mengajar manusia menjadi manusia pembangunan. Pada pembagian pendapatan telah terjadi perubahan juga. Dengan stratifikasi yang sama lapisan atas turun 13%, lapisan menengah naik 4,4%, dan lapisan bawah naik 8,6%. Yang menyolok, naiknya pendapatan lapisan bawah, dengan 8,6% itu. Di negara-negara berkembang pendapatan lapisan bawah 19% itu sudah termasuk baik sekali. Kita boleh bangga dengan perubahan itu, yang menunjukkan menciutnya kesenjangan sosial dan bahwa proses terwujudnya cita-cita masyarakat adil berjalan lancar. Tetapi di samping bangga, dapat pula kita curiga, apakah perubahan pembagian pendapatan itu merata atau tidak.

Nampaknya di dalam setiap strata itu juga terjadi pergeseran bahkan pergeseran itu mungkin tajam. Kalau kita melihat masih adanya kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan pada strata bawah, meskipun jumlahnya hanya' 30 juta orang; menunjukkan bahwa perubahan pembagian pendapatan dalam strata ini tidak merata, sehingga terdapat kesenjangan yang jumlahnya menciut, tetapi tingginya meruncing. Jika di lapisan bawah terjadi pergeseran kesenjangan menciut dan meruncing, lapisan atas pun terjadi pergeseran semacam itu. Pergeseran menciut dan meruncingnya kesenjangan lapisan atas dapat diketahui dari data angka-angka pembayaran pajak.

Sampai sekarang penduduk yang terdaftar sebagai wajib pajak perseorangan hanya 783.422 orang. Wajib pajak yang sudah dikomputer baru 250.000 orang. Dari wajib pajak yang dikomputer ini dapat diketahui bahwa.

- Yang berpenghasilan Rp 1 milyar ke atas setahun 162 orang.

- Yang berpenghasilan Rp 100 juta - Rp 1 milyar setahun 7950 orang.
- Yang berpenghasilan Rp 30 juta - Rp 100 juta setahun 88073 orang.

Menurut penjelasan seorang pejabat pajak, tercatat 10% wajib pajak membayar 90% dari seluruh hasil pajak. Dari angka-angka ini dapat diketahui betapa meruncingnya kesenjangan sosial, walaupun jumlahnya menciut. Meskipun kenyataan kesenjangan tinggi itu terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan, namun tanggapan para ahli tentang itu berbeda-beda:

1. Kesenjangan sosial itu bersifat struktural, dalam arti merupakan komponen yang harus ada di dalam setiap struktur sosial. Karena itu kesenjangan sosial bukanlah masalah sosial. Kesenjangan sosial itu akan membentuk keharmonisannya sendiri di dalam proses perkembangan sosial itu.

Pendapat ini benar: tetapi kesenjangan sosial itu dapat menjadi masalah sosial jika membawa internalisasi-sosial-ekonomi yang menggebu sekarang ini mendorong timbulnya transformasi sosial ekonomi di Indonesia; dari transformasi ini nampak bahwa kesenjangan sosial makin meruncing. Meruncingnya kesenjangan sosial memperlihatkan gejala kecenderungan terbentuknya dualisme sosial-ekonomi antara lapisan elite dan lapisan bawah. Dualisme sosial ekonomi ini akan menghambat/menghalangi proses pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan Indonesia.

2. Pendapat lain mengatakan bahwa kesenjangan sosial itu merupakan masalah yang bersifat struktural. Tetapi struktur sosial itu tidak mutlak. Struktur sosial itu dapat berubah dan dapat diubah. Maka masalah kesenjangan sosial dapat diselesaikan dengan mengubah atau memperbaiki struktur sosial.
3. Dr. Mubyarto ahli administrasi pembangunan menyoroti kesenjangan dari segi administrasi berpendapat bahwa kesenjangan sosial itu merupakan masalah yang cukup serius, karena kesenjangan itu pencerminan dari ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Dikatakan bahwa bagaimanapun baiknya suatu konsep pembangunan, pelaksanaannya sangat

tergantung pada kualitas birokrasi. Mudah dilihat bahwa, dalam wilayah kerja birokrasi terjadi perbentur fungsi memobilisasi berbagai sumber, mengalokasikan dan mengkonversikan sumber-sumber menjadi output yang direncanakan, baik dalam pertumbuhan, pemerataan distribusi hasil pembangunan ataupun nilai-nilai lain yang dikehendaki. Dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerataan, mudah ditemukan masih adanya ambivalensi kebijaksanaan, yang tertuang pula dalam sikap dan perilaku aparat birokrasi. Di satu pihak ada kehendak melaksanakan kebijaksanaan pemerataan, di lain pihak pada waktu yang bersamaan ijin-ijin yang dikeluarkan kurang mendukung pemerataan (8 sasaran pemerataan). Yang memprihatinkan ialah bahwa perbuatan penyimpangan dilaksanakan tanpa perasaan bersalah. Keadaan semikian sudah menyebar di hampir seluruh wilayah kerja birokrasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial itu sumbernya terletak pada tingkah laku orang-orang aparat birokrasi, bukan pada sistem birokrasinya sendiri.

Dalam menanggapi masalah kesenjangan sosial ini, saya sependapat bahwa kesenjangan sosial itu pencerminan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan atau belum tercapainya cita-cita masyarakat adil dan dari pembangunan Indonesia. Karena kenyataan itu biasanya kesenjangan sosial diidentikkan dengan ketidakadilan, yang pada hakekatnya menjadi rasa kebencian dan kecemburuan sosial, yang akhirnya menjadi sumber dan instabilitas sosial. Meskipun sering juga diungkapkan bahwa faktor yang mendorong timbulnya keresahan dan instabilitas sosial itu kemiskinan, tetapi jika kemiskinan itu tidak disertai oleh rasa kebencian dan kecemburuan sosial tidak akan ada pengaruhnya terhadap instabilitas sosial itu.

Saya juga sependapat bahwa sumber kesenjangan sosial itu terletak pada sikap dan perilaku orang-orang pelaksana pembangunan; orang-orang pelaksana pembangunan itu bukan hanya aparat birokrasi saja, melainkan semua orang yang berpartisipasi dalam: pelaksanaan pembangunan, atau secara umum disebut

manusia-manusia pembangunan Indonesia.

Persoalannya sekarang, mengapa manusia-manusia pelaksana pembangunan itu dapat menjadi sumber; kesenjangan sosial? Jaksa Agung Sukarton Marmosujono menjelaskan bahwa latar belakang titik tolak orang-orang pelaksana pembangunan itu memang berbeda-beda; jadi hasil perkembangannya pun berbeda-beda. Namun demikian dalam proses pembangunan ini harus diupayakan agar perbedaan/kesenjangan sosial itu menyempit.

Dalam suatu kesempatan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo menerangkan bahwa sistem nilai masyarakat sekarang ini cenderung materialistis dan konsumeristis. Kalangan kelas -menengah semakin ingin kemanusiaan seperti nilai etika, nilai moral, ailai demokrasi, nilai kebebasan. Selanjutnya dikemukakan bahwa fungsi kaum intelektual sebagai pemikir selalu ikut bertanggungjawab moril dan sosial pada situasi dan perkembangan masyarakat. Jika dikaitkan dengan pembangunan, pembangunan sebagai totalitas usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, tidak lepas dari salah satu unsur pokok dewasa ini yaitu *Science* dan fungsi ilmu pengetahuan.

Hadirin yang mulia,

Dengan melihat kepada kenyataan dan memperhatikan pendapat serta keterangan-keterangan para ahli tentang kesenjangan sosial tersebut di atas, dapat diketahui bahwa selama pelaksanaan pembangunan terdapat kesenjangan sosial yang cenderung makin meruncing, kesenjangan sosial itu mencerminkan belum terwujudnya cita-cita masyarakat adil. Sumber kesenjangan sosial terletak pada sikap dan tingkah laku manusia-manusia pelaksana pembangunan tidak dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai moral, nilai etika, nilai demokrasi, nilai kebebasan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penerapan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk men-didik/mengajar manusia-manusia pembangunan Indonesia masih belum berhasil seperti yang diharapkan. Perlu dipikirkan dimana letak kelemahan penerapan itu. Jika diperhatikan bahwa di bidang kemakmuran penerapan Ilmu Pengetahuan Sosial itu berhasil baik, maka ketidakberhasi-

lan di bidang keadilan tentu bukan cara penerapannya yang lemah, melainkan kualitas Ilmu Pengetahuan Sosial itu belum/tidak sesuai dengan hasil keadilan yang diharapkan. Kualitas yang dimaksud bukan yang bersangkutan dengan ontologisnya, melainkan semata-mata hanya epistemologinya.

Hadirin yang mulia.

Jika ditelusuri ke belakang akan nampak jelas bahwa Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial yang berkembang di Indonesia sekarang ini bukan hasil ciptaan ilmuwan Indonesia sendiri, melainkan berasal dari Eropa, dibawa masuk ke Indonesia langsung oleh orang-orang Belanda zaman penjajahan dulu, dan sebagian dibawa masuk oleh orang-orang Indonesia sendiri lewat Amerika Serikat. Ilmu ini disebut Ilmu Pengetahuan Sosial baru atau modern, yang dibangun oleh Auguste Comte dengan dasar pemikiran/falsafah positivisme-empirisme. Pada Ilmu Pengetahuan Sosial baru ini terdapat tuntutan (*claim*) "validitas universal". Tuntutan ini mula-mula diperkenalkan oleh ahli ilmu alam, ternyata mempengaruhi besar kepada para ahli ilmu sosial, yang kemudian diambil alih sebagai keyakinannya sendiri, dan kenyataannya dianggap berlaku juga untuk bidang Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial.

Pemikiran baru ini muncul disebabkan oleh terjadinya proses perkembangan masyarakat dengan perubahan-perubahan besar di dunia Barat. Dalam menghadapi perubahan yang begitu besar itu masyarakat Barat membutuhkan penjelasan-penjelasan baru yang diharapkan datang dari pemikir-pemikir sosial dan ilmuwan sosial, yang melalui salah satu cara dapat melegitimasi perkembangan baru itu. Pada umumnya terdapat dua penjelasan yang kuat, yang biasanya kebenarannya diterima begitu saja: Pertama, masyarakat baru yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan dan industri/teknologi lebih baik daripada masyarakat lama yang dibangun atas dasar kekuatan agama dan militer; karenanya masyarakat baru itu harus didukung kemenangannya. Kedua, cara berpikir ilmiah diambil sebagai model universal dari segala jenis sistem kognitif, yang dapat diterima tiap bangsa dari kebudayaan apapun, dan harus menjadi metode satu-satunya dalam menangani setiap jenis masalah.

Masyarakat industri diambil oleh Auguste Comte sebagai model universal untuk segala jenis masyarakat di dunia. Masyarakat industri dibangun atas dasar pemikiran positif, yaitu bentuk pemikiran manusia setelah melampaui tahap pemikiran teologis dan metafisis. Karenanya mempelajari masyarakat hanya akan tepat jika pendekatannya menggunakan Pemikiran positif. Ini berarti bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial harus bebas dari nilai-nilai agama dan kemanusiaan termasuk etika, moral kebebasan, demokrasi dan seterusnya.

Dalam bentuk epistemologinya ilmu positif untuk kebenaran formalnya meneruskan ilmu empiris yang lahir dari falsafat Aristoteles. Ilmu empiris berkembang melalui penelitian-penelitian. Yang melalui penelitian murni langkah-langkah metodologisnya adalah: pengumpulan data, klasifikasi data deskripsi data, uraian tentang hubungan fungsional antar data, dan berdasarkan itu membangun suatu keterangan sebab-akibat yang umum sifatnya. Secara teknis metodologis langkah-langkah itu dinyatakan: deskripsi-analisa-konseptualisasi/generalisasi. Dalam penelitian terapan, ilmu empiris tetap mempertahankan langkah-langkah yang sama, tetapi tekanannya untuk menjelaskan data-data yang dikumpul menggunakan hukum umum.

Inti hukum ilmiah adalah kausalitas yang dibentuk dengan menerapkan salah satu prosedur logika Aristoteles, yang menegaskan asas: kebenaran konklusi dideduksi dari kebenaran premis.: Rumus dasarnya: jika A maka B. Rumus ini umum sifatnya, dapat diterapkan pada segala tingkat kebenaran: metafisis, etis, empiris (Positivisme hanya menerapkan pada tingkat kebenaran empiris). Penerapan asas ini menjadi hukum kausalitas asasnya: Jika ada sebab tentu akan timbul akibat. Jika sebabnya diketahui akan diketahui juga akibatnya. Sebab diusahakan diketahui untuk memprediksi munculnya akibat. Lebih lanjut, jika sebab itu diciptakan dengan sengaja, maka dapat dengan sengaja pula memunculkan akibat yang dikehendaki.

Untuk kebenaran materialnya ilmu positif banyak dipengaruhi oleh ajaran rasionalisme Descartes. Falsafah Descartes dibangun atas dasar adagium: *Cogito Ergo Sum* (aku berpikir, karena itu aku

ada): *Cogito* berarti menempatkan peran berpikir menjadi peran yang menentukan bagi manusia. Dalam falsafah Descartes sebenarnya dibedakan antara psikologi yang disebut *res cogitans* dan kosmologi yang disebut *res extensa*. Tetapi dalam hubungan dengan manusia, peran *res extensa* ditempatkan lebih rendah daripada *res cogitans*. Menurut ajarannya, bahwa segala sesuatu yang lain yang berada di luar diri manusia baru ada jika sudah diketahui oleh manusia atas cara jelas dan pasti (*clear and distinct*). *Ergo sum* membuat peran ego menjadi menonjol dalam hidup manusia. Maka dampak falsafah Descartes terhadap manusia adalah bahwa seluruh usaha berpikir itu seolah-olah bukan untuk membuktikan ada banyak hal yang lain, tetapi hanya untuk membuktikan selalu ditentukan oleh sang ego atau ada saya. Berpikir selalu ditentukan oleh sang ego itu.

Jika dihubungkan logika Aristoteles dan rasionalisme Cartesian yang diterapkan dalam Ilmu Pengetahuan Sosial, logika Aristoteles memberi pengetahuan manusia sifat penguasaan atas masyarakat, sedangkan rasionalisme Cartesian membuat akal manusia menjadi sangat egosentris. Jadi dari keduanya itu mendorong semangat orang untuk dapat mengetahui dan menguasai masyarakat untuk tujuan kepentingan sendiri.

Demikian itulah hakekat epistemologi Ilmu Pengetahuan Sosial modern yang dibangun oleh Auguste Comte atas dasar falsafah positivisme-empirisme-rasionalisme. Dalam perkembangannya, sampai sekarang dan yang di Indonesia berlaku dominan, Ilmu Pengetahuan Sosial itu berciri positif-logis-rasionalistis-obyektif-murni-verifiable-empiris. Inti hukum ilmunya berupa hukum kausal, hukum sebab-akibat dari kausa efisien.

Ternyata pemikiran ilmu yang berpasal pada hukum kausal, ilmu itu hanya mengajarkan cara menarik kesimpulan atau cara memprediksi akibat; ilmu ini tidak mengajarkan menemukan nilai (nilai justru ditolak), yang penting artinya bagi kehidupan manusia, terutama yang dapat mencegah pretensi dan kecenderungan manusia akan penguasaan yang berlebihan. Pemikiran kausal memang melatih berpikir logis tetapi tidak melatih berpikir etis, orang dilatih menjadi lebih pintar, tetapi tidak dilatih bertanggung

jawab; orang mendapat metode stok mengetahui lebih banyak, tetapi tidak diberi stode untuk memutuskan lebih baik. Prof. Dr. Daud Yusuf mengatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial positif ini sering dan hampa akan nilai-nilai kemanusiaan.

Ilmu Pengetahuan Sosial positif/modern ini senang berperan sangat menopang perkembangan revolusi industri dan kapitalisme. Ilmu ini sangat efektif diterapkan untuk membangun manusia dan masyarakat industri dan kapitalis yang semangat hidupnya mengejar kemakmuran.

Bagi manusia dan masyarakat Indonesia yang bersifat multi-dimensional, yang semangat hidupnya di samping mengejar kemakmuran juga mengejar keadilan dan ketenteraman/kestabilan, ternyata tidak cukup dibangun dengan menerapkan Ilmu Pengetahuan Sosial modern itu secara murni. Semangat mengejar kemakmuran dapat terpenuhi dengan baik, tetapi semangat mengejar keadilan dan kestabilan/ketentraman yang bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan tak mungkin terpenuhi, karena ilmu itu memang membersihkan diri dan nilai kemanusiaan. Dalam usaha mengimbangi ketimpangan membangun manusia adil Indonesia juga menerapkan ilmu-ilmu humaniora yang sesuai dengan falsafah Pancasila dalam proses modernisasi pendidikannya. Tetapi karena penerapan ilmu itu secara monolitik terpisah satu sama lain, hasilnya tak dapat luluh dalam diri masing-masing. Ternyata dalam praktek kehidupan sehari-hari orang seolah-olah membuat demarkasi bidang perbuatannya menurut ajaran: masing-masing ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Pada kesempatan berkegiatan beragama misalnya orang semangat dan tekun melaksanakan kegiatan menurut ajaran agama yang mereka peroleh; sebaliknya pada kesempatan berkegiatan berdagang/berekonomi, ajaran agama yang diperoleh itu tak nampak tak disadari sehingga kegiatannya murni: berdagang/berekonomi saja.

Hadirin yang mulia ,

Situasi yang dialami bangsa Indonesia tersebut, dialami pula oleh negara-negara berkembang lainnya. Pemikir-pemikir dan ilmuwan sosial senior negara-negara berkembang itu kemudian

menyadari akan, kelemahan penerapan Ilmu Pengetahuan Sosial positif-empiris dalam proses modernisasinya. Tetapi pada awalnya mereka tak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki kelemahannya itu, karena mereka tidak mempunyai epistemologi Ilmu Sosial lain yang dipandang lebih baik.

Munculnya epistemologi Ilmu Pengetahuan Sosial dari mazhab Frankfurt khususnya dari tokoh Jurgen Habermas yang kemudian menjadi populer, nampaknya mempengaruhi cakrawala pemikir dan ilmuwan sosial negara-negara berkembang tadi. Menurut Habermas, kehidupan masyarakat selalu dilatar-belakangi oleh dorongan-dorongan kepentingan hidup. Ada 3 kepentingan hidup, yaitu kepentingan teknis yang melahirkan kesadaran ekonomi, kepentingan praktis yang melahirkan kesadaran kemanusiaan/ budaya dan kepentingan emansipatoris yang melahirkan kesadaran politik. Ketiga kepentingan/kesadaran itu dalam praktek kehidupan sosial selalu berkaitan satu sama lain, tidak terpisah berdiri sendiri, masing-masing memainkan perannya dalam satu bentuk bersama untuk mewujudkan kehidupan sosial itu.

Atas pengaruh epistemologis Habermas ini, pemikir dan ilmuwan sosial negara-negara berkembang tadi bangkit berusaha memperbaharui epistemologi Ilmu Pengetahuan Sosialnya melalui kegiatan/gerakan yang disebut indigenisasi. Di Indonesiapun tidak ketinggalan, pemikir dan ilmuwan sosial senior (yang saya kenal lewat Karya-karyanya misalnya: Dr. Mubiyarta, Dr. Sartono Kartodirdjo, Dr. Sudjatmoko, Dr. Umar Senoadji, dan lain-lain) bangkit dan sadar melakukan usaha indigenisasi itu. Lalu apa yang diindigenisasikan itu? Yang diindigenisasikan adalah dimensi utama Ilmu Pengetahuan Sosial yang terkandung dalam epistemologi, yaitu dimensi ideologi, dimensi teori dan dimensi metodologi.

Tentang dimensi ideologi, yang dimaksud ideologi Ilmu Pengetahuan Sosial ialah preferensi nilai yang menentukan asumsi-asumsi dasar sebuah teori sosial. Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial positif empiris nilai itu ditolak karena keyakinannya bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial memang hanya berurusan dengan *reality judgement*, bukan dengan *value judgement*. Ilmu Pengetahuan Sosial harus objektif, netral, bebas dari nilai (*value free*), bebas

dari kepentingan (*interest free*) dan bebas dari kekuasaan (*power free*). Bagaimanapun juga sebenarnya orang tak dapat menolak nilai dalam ilmu pengetahuan, karena peranannya sebagai basis suatu teori dan implikasi-implikasi yang timbul dari penerapan teori itu. Nilai menunjukkan pengaruh status budaya atas terbentuknya asumsi, dasar suatu teori kepentingan menunjukkan pengaruh status ekonomi dan kekuasaan menunjukkan pengaruh status politik, semuanya ini harus ada dalam kehidupan masyarakat karena itu bilamana status budaya berubah, status ekonomi berubah, status politik pun harus berubah. Masyarakat Indonesia yang mempunyai status budaya status ekonomi dan status politik yang berbeda dari masyarakat model yang dipakai dasar menyusun Ilmu Pengetahuan Sosial positif-empiris, maka untuk menyusun Ilmu Pengetahuan Sosial yang cocok kita harus menyusun/menentukan ideologi ilmu pengetahuan yang tepat. Tentu saja untuk ini dibutuhkan banyak penelitian-penelitian. Ideologi merupakan dimensi yang sangat dominan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Tentang dimensi teori, asumsi dasar suatu teori sosial selalu tergantung pada suatu sistem nilai budaya; ini berarti bahwa isi teori sosial itu pun tergantung pada sistem kognitif dalam suatu kebudayaan. Karena itu teori Ilmu Pengetahuan Sosial tidak dapat lepas, dari sifatnya sebagai pencerminan pola berpikir tertentu. Dalam hubungan dengan sistem kognitif tadi, suatu teori Ilmu Pengetahuan Sosial dapat berperan ganda, yaitu melegitimasi atau menentang sistem kognitif dari mana asal teori sosial itu lahir. Maka indigenisasi teori sosial itu berarti menyesuaikan asumsi dasar teori pengetahuan sosial dengan sistem nilai nasional Indonesia serta merekonstruksi isi teori atas dasar sistem kognitif nasional.

Tentang dimensi metodologi, metodologi diartikan sebagai seperangkat peraturan formal yang membantu seseorang membuat keputusan tentang apa dan mengapa pendapatnya benar dan tepat. Metodologi dibangun berdasar atas logika formal. Sebenarnya banyak jenis logika formal itu. Tetapi yang umumnya dipakai adalah logika Aristoteles, sebagaimana yang dipakai

membangun metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial positif empiris. Dalam rangka indigenisasi itu dapat dipilih jenis logika yang dipandang lebih relevan/tepat, misalnya logika dialektis. Tetapi banyak ilmuwan sosial yang menyarankan, bahwa dalam memilih metodologi hendaknya jangan gegabah. Sebaiknya dipilih metodologi yang sudah terbukti diterima secara luas dan teruji kebenarannya; karena metodologi merupakan kriteria yang dapat menjamin validitas pengetahuan, apakah sistem pengetahuan itu dapat diterima atau harus ditolak.

Hadirin yang mulia,

Segala yang diuraikan di atas, sebenarnya hanya suatu manifestasi dari keinginan saya untuk menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial kita yang memainkan peran sangat sentral dalam proses modernisasi membangun manusia dan masyarakat Indonesia baru dapat memenuhi tuntutan membangun manusia dan masyarakat makmur. Tuntutan manusia dan masyarakat adil belum terpenuhi, karena Ilmu Pengetahuan Sosial yang diterapkan dalam proses modernisasi adalah Ilmu Pengetahuan Sosial, positif-empiris yang tidak memiliki/ mengandung ideologi sistem nilai budaya Indonesia (sedangkan sistem nilai itu menjadi tumpuan rasa keadilan sosial), dan dengan sendirinya teori-teori sosialnya tak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Didorong oleh rasa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab akademisnya, sementara pemikir dan ilmuwan sosial (senior) kita telah sadar dan berusaha memperbaiki atau memperbarui epistemologis ilmu pengetahuan sosial kita itu melalui kegiatan/ gerakan indigenisasi, untuk menemukan kesesuaian model kehidupan sosial dan model pembangunan Indonesia dengan ilmu pengetahuan sosial dipakai sebagai landasannya.

Sehubungan dengan itu, saya percaya bahwa teman-teman pemikir dan ilmuwan sosial di IKIP ini juga, menyadari akan tanggung jawab sosial dan akademis dalam menerapkan Ilmu Pengetahuan Sosial-nya, untuk mendidik/membangun manusia dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita menghimbau bahkan mengajak mendukung dan mengikuti jejak mereka yang

melakukan kegiatan indigenisasi ilmu pengetahuan sosial, untuk membantu mempercepat proses modernisasi membangun manusia dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Demikian sekelumit uraian saya, semoga ada manfaatnya. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan.

Hadirin yang mulia

Perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan kepada saya memangku jabatan Guru Besar. Juga terima kasih, saya sampaikan kepada Senat IKIP Yogyakarta atas kesediaan mengusulkan saya memangku jabatan ini. Saya sampaikan pula terima kasih kepada teman-teman sivitas akademika FPIPS yang banyak membantu saya menyiapkan pengusulan jabatan ini.

Banyak terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru saya dari SD, SMTP, SMTA dan Perguruan Tinggi yang berjasa besar mendewasakan saya.

Kepada bapak almarhum dan ibu tercinta saya sampaikan sembah sungkem sebagai tanda terima kasih atas jasa-jasanya membesarkan saya, kepada saudara-saudara saya yang selalu membantu usaha-usaha saya.

Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada keluarga saya sendiri, isteri dan anak-anak saya terutama kepada isteri yang banyak sekali mendorong semangat dan membantu segala usaha saya sehingga dapat mencapai jenjang ini.

Akhirnya kepada hadirin yang mulia saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

DAFTAR SUMBER BACAAN

- Cassira Ernst, Nugroho A. Alois, 1987. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esai tentang manusia*. PT. Gramedia Jakarta.
- Craib, Ian, Baut S. Paul, Effendi T, 1986. *Teori-Teori Sosial Modern, dari Parsons sampai Habermas*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Daoed Joesoef, 1973. *Dua pemikiran tentang pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional*. Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta.
- Haditono, 1689. *Dasar Pemikiran yang Mendukung Pembinaan Lingkungan Hidup*. FPIPS IKIP, Yogyakarta.
- Kedaulatan Rakyat; Tahun XLV No. 206, 3 April 1990. *Untuk mengubah Sistem Nilai Perlu ditempuh Jalan Panjang*.
- Kleden, Ignas, 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. LP3ES, Jakarta.
- Sentjaringanrat, 1982. *Masalah-Masalah Pembangunan, Bunga rampai antropologi Terapan*. LP3ES, Jakarta.
- Acelyarto, T. 1987. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Febyarto, 1987. *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*. LP3ES, Jakarta.
- Parsons Talcott, 1951. *The Social System The Tree Press, New York*.
- Feursen van C.A., Dick Hartoko, 1980. *Orientasi di Alam Filsafat, Sebuah Pengantar dalam permasalahan filsafat*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Qodir C.A, Basco Carvalo, Sonny Keraf, Andre Ataujan, 1988. *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- School J.W., Soekadijo R.G. *Modernisasi Pengantar sosiologi Pembangunan negara-negara sedang berkembang*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Soedjatmiko, 1989. *Modernisasi, Sekularisme dan Kekuasaan, suatu makalah*. Tempo, No. 7 Tahun XX 14 April 1990.
- To Thi Anh, 1984, *Nilai Budaya Timur dan Barat, konflik atau harmoni*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Veeger K. J., 1986. *Realitas Sosial, Refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*. PT. Gramedia, Jakarta.

PENDIDIKAN GEOGRAFI, TUJUAN, FUNGSI, TANTANGAN, DAN PELUANGNYA DALAM MENYONGSONG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DI INDONESIA

Pidato Pengukuhan Guru Besar Sebagai Guru Besar Madya Dalam Bidang
Pendidikan Geografi Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
IKIP YOGYAKARTA 5 September 1994

**PROF. DRS. SUMANTRI
WARDOYO**



“Dunia adalah tempat aku lahir, hidup, dan bekerja. Dari Pagi sampai malam dunia ini terbentang di hadapan mata Dan bila pada malam hari aku tidur dapat dipastikan oleh Orang lain bahwa akutetap berada di dunia di tengah-tengah makhluk dunia lainnya”.

Huybers, 1985

*Yang terhormat rektor/Ketua Senat, Sekertaris Senat,
Senat Guru Besar, dan seluruh anggota Senat*

IKIP YOGYAKARTA,

*Yang terhormat Pimpinan Institut dan Staf,
Yang terhormat Pimpinan Fakultas dan Staf,
Yang terhormat segenap sivitas akademika
IKIP YOGYAKARTA*

*Yang terhormat para tamu undangan,
Handai taulan, dan hadirin sekalian,
Para mahasiswa yang saya cintai.*

Kiranya damai sejahtera menyertai kita

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat kasih karunia Nya maka pada pagi hari ini saya dapat berdiri di mimbar yang terhormat untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Madya pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP YOGYAKARTA.

Sebagai Guru Besar Madya yang mendapat tugas untuk membina Pendidikan Geografi , pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan tentang: “PENDIDIKAN GEOGRAFI, TUJUAN, FUNGSI, TANTANGAN, DAN PELUANGNYA DALAM MENYONGSONG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DI INDONESIA”.

PENDAHULUAN

Indonesia yang sedang membangun, memprioritaskan pembangunannya pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Di samping itu pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengejar ketinggalan dari negara lain yang maju, yang telah berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam membangun bangsa, kemampuan mengidentifikasi potensi sendiri, dan pelu-

ang dukungan luar menjadi amat penting. Untuk menumbuhkan kemampuan mengidentifikasi, peran ilmu pengetahuan dan teknologi menempati posisi strategis, sedang untuk memperoleh dukungan luar, kemampuan menghargai keberadaan bangsa lain sangat di perlukan.

Kemampuan mengidentifikasi potensi sendiri dan menghargai keberadaan bangsa lain, dapat ditempuh melalui usaha pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang secara eksplisit mempunyai kedudukan yang strategis adalah Pendidikan Geografi. Hal itu tampak dalam rumusan tujuan Pendidikan Geografi, yaitu :

Agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengembangkan kemampuan berfikir analitis geografis dalam memahami gejala geosfer, memupuk rasa cinta tanah air, menghargai keberadaan negara lain, dan dalam menghadapi permasalahan yang timbul sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya (Depdikbud, 1933: 1)

Saya tidak bermaksud menempatkan Pendidikan Geografi sebagai komponen satu-satunya (menentukan) yang mengemban tugas tersebut. Tetapi di kandung maksud untuk mengajak kita semua meletakkan fungsi berbagai disiplin ilmu sebagai bahan ajar secara proporsional. Geografi sebagai bahan ajar, merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), terutama pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Umum. Dewasa ini, Geografi dianggap kurang dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kurang penting sumbangannya terhadap pembangunan bangsa.

Masyarakat modern yang akan dihasilkan melalui pembangunan jangka panjang pertama maupun kedua, adalah masyarakat industri salah satu upaya untuk mencapai kondisi tersebut adalah melalui jalur pendidikan formal. Fungsi jalur pendidikan formal atau lembaga pendidikan adalah mewariskan nilai kepribadian bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada generasi muda bangsa. Untuk mengkondisikan masyarakat industri modern melalui jalur pendidikan, kepada generasi muda peserta didik harus diajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan dan

penghidupan masa depan, yang cenderung makin ketat dalam persaingan.

Pendidikan sebagai wahana untuk mewariskan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak ber-ajar menjadi ber-ajar. Pendidikan IPS, termasuk didalamnya Geografi, menjelaskan gambaran tentang perilaku kehidupan sosial, bagaimana berperilaku, bagaimana merekonstruksi kehidupan sosial secara keilmuan. Geografi, menjelaskan status dan peran anggota masyarakat dalam hidup bersama dalam lingkungannya. Sebagai wujud dari pengertian dasar Geografi sebagai ilmu yang memberikan deskripsi tentang bumi, dan hubungan antara manusia dan lingkungannya (Freeman dan Raup, 1949 : 1; Hagget, 1972 : 2; Getis/Getis/Fellmann, 1988 : 4). Lebih lanjut Bintarto menyatakan bahwa Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta-fakta yang berasosiasi dalam ruang (Bintarto, 1979 : 4). Dengan demikian, pemahaman atas konsep esensial ke-Geografian menjadikan peserta didik berangsur-angsur menjadi insan pembangunan yang arif, mengenal dirinya sendiri di tengah-tengah orang lain.

PERKEMBANGAN GEOGRAFI

Geografi sebagai bahan ajar, dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami pergeseran yang penting. Isi substansi, tujuan, fungsi, terus menerus mengalami pembaruan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di luar. Hal ini sesuai dengan sifat Geografi sebagai ilmu yang dinamis, sebab hubungan antara manusia dengan lingkungan alam itu selalu berubah, bahkan Freeman menyatakan bahwa yang tetapi itu adalah adanya perubahan tersebut (Freeman, 1949, v). Sejalan dengan itu, yang terjadi di Indonesia pun secara berangsur-angsur mengikuti tuntunan adanya dinamika dan pergeseran dalam menempatkan substansi, tujuan, fungsi, dan metode pembelajaran Geografi di sekolah.

Perang dunia kedua merupakan awal pergeseran Geografi sebagai sarana untuk menemukan, mengenali, dan selanjutnya memanfaatkannya untuk kesejahteraan manusia, termasuk di Indonesia. Geografi Kolonial (Dickenson, 1990 : xvii) menempatkan

Geografi sebagai sarana untuk mendeskripsikan daerah jajahan, yang selanjutnya dapat dikuasai demi kemakmuran penjajah. Sejalan dengan itu, bahan ajar Geografi didominasi kepentingan penjajah, yaitu upaya untuk mengetahui (deskripsi) kekayaan alam yang ada di suatu tempat.

Peserta didik diajar menghafal fakta-fakta di muka bumi. Pola ajar demikian cenderung membosankan, kurang menarik (kering). Pada saatnya, bahan ajar kurang diminati, bahkan diremehkan. Pada saat ini, Geografi sebagai bahan ajar seharusnya sudah mengurangi tahap pertama yaitu Geografi deskriptif dan tahap kedua Geografi klasifikatoris, tetapi menambah porsi Geografi produktif (Abdulrachman, 1988: 18; Haring 1983: 5), sedang Bintarto, menyebut urutan itu deskriptif, penjelasan, analisis, dan penerapan (Bintarto, 1968 : 11). Jelas kiranya bahwa sebagai bahan ajar, Geografi mengantarkan peserta didik berkemampuan melakukan tindakan mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, dan akhirnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali saya boleh menambahkan sehubungan dengan keadaan sekarang, adalah tahap pengendalian setelah analisis dan prediktif. Hal ini saya pandang penting mengingat sifat kandungan bumi yang bermanfaat bagi manusia terbatas dan dapat habis.

Di samping itu, kehidupan sekarang cenderung boros terhadap sumber alam; sedangkan pembangunan yang dilaksanakan menganut pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan (Emil Salim, 1988 : xxi), pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan (GBHN 1993). Pentahapan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tahapan terpisah, dan ditinggalkan, tetapi hingga sekarang pun masih difungsikan. Fungsi pentahapan itu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Proporsi penyajian fakta (deskripsi dan klasifikatoris) amat bermanfaat untuk jenjang pendidikan dasar, makin tinggi tingkatnya tentu harus makin berat pada analisis prediktif dan pengadilan. Rasanya rambu-rambu proporsi muatan unsur keilmuan Pendidikan IPS, termasuk Geografi yang ditawarkan oleh Damayanti berikut, dapat dipakai sebagai referensi: Geografi sebagai ilmu memang berangkat dari fakta yang memerlukan observasi lapang dengan

mata telanjang sekalipun (Briault and Shave dalam Walford, 1976: 108). Hal ini Pendidikan jalur sekolah disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, bahan ajar, dan tujuan yang hendak dicapai. Rumusan fungsi dan tujuan pembelajaran geografi dalam kadar yang berjenjang pula.

Fungsi Pendidikan Geografi mengembangkan kemampuan siswa dalam mengenali dan memahami gejala alam dan kehidupan dalam kaitannya dengan keruangan dan kewilayahan. Di samping itu juga mengembangkan sikap positif dan rasional dalam menghadapi permasalahan yang timbul.

TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN GEOGRAFI

Tujuan Pendidikan Geografi, sebagaimana dikutip pada bagian terdahulu, secara harfiah menunjuk adanya tugas yang demikian penting, yang dibebankan kepada Geografi; yakni menumbuhkan rasa cinta tanah air, sekaligus menghargai keberadaan bangsa lain. Dengan demikian pembelajaran Geografi mempunyai nilai lebih, dalam dimensi ke dalam dan ke luar.

Sementara itu, tugas lain sebagai tujuan pendidikan seperti menumbuhkan kemampuan berfikir rasional, analisis tetap melekat padanya. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan menjadikan insan Indonesia sebagai bangsa yang maju, tidak kerdil, tidak merasa rendah diri. Atau boleh saya sebut berhasil membangun keseimbangan diri. Hal ini tidak berarti melemahkan kontribusi substansi tersebut. Menurut hemat saya, semua bahan ajar yang diprogramkan untuk pembekalan generasi muda bangsa mencapai karakter yang diinginkan mempunyai dukungan yang setara.

Di kalangan masyarakat modern, dalam tatanan hidup industri, timbul anggapan bahwa yang penting untuk itu adalah Matematika, Ilmu Alam, Kimia, dan Biologi. Cabang ilmu lain kurang perlu (Dimiyati, 1988 : viii). Karena itu pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dianggap lebih penting dibanding dengan yang lain. pemikiran dikotomis yang bernada memojokkan, berkembang menjadi persepsi yang salah terhadap fungsi cabang ilmu lain. Gejala ini rasanya sudah berkembang dalam masyarakat Indonesia, termasuk

masyarakat ilmu. Orang tua (tidak seluruhnya) memonitor prestasi belajar anaknya berdasar prestasi IPA. Apabila nilai IPA rendah, dengan wajah muram, ia mengatakan bahwa anaknya “bodoh”. Tindakan selanjutnya adalah, upaya mencari terobosan melalui pemberian pelajaran tambahan (les) atau perlakuan lain agar prestasi anaknya meningkat. Keluhan hampir tidak pernah ada, apabila nilai lainnya rendah. Dalam praktik keseharian, timbul anggapan bahwa jurusan IPA lebih unggul dibanding IPS, bahkan lahir anggapan bahwa apabila IPA-nya baik dengan sendirinya IPS-nya juga baik. Hal itu nampak pada kesempatan yang diberikan kepada kelompok IPA; mereka boleh memilih IPS dalam sistem penerimaan mahasiswa baru, sedang kelompok IPS tidak boleh memilih IPA. Mungkin pemikiran ini ada betulnya, tetapi perlu diingat bahwa memberikan hak istimewa kepada salah satu kelompok ilmu merupakan suatu tindakan yang kurang tepat. Tidakan seperti tersebut di atas melupakan esensi keberadaan alam dan manusia, yang menurut kenyataannya menunjukkan keanekaragaman, yang di dalamnya masing-masing komponen menempati posisi dan peran yang mapan pada saatnya

Hal itu dapat saya analogikan dengan lima jari tangan yang saya miliki. Pada saat saya akan memberikan pujian kepada seseorang, maka ibu jarilah yang tampil, lainnya tunduk. Pada saat telinga kita terasa gatal, jari kelingking memperoleh tugas berat, bisa mengangkat badan, atau terpaksa memukul dengan tangan, semuanya bersatu menghasilkan tenaga yang ampuh.

Alam ini memang beragam, masing-masing menempati posisi dan peran yang sama pentingnya, walaupun tidak dalam waktu yang bersamaan. Adi, meniadakan salah satu sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya.

Firman Tuhan pun mengajarkan kepada saya:

Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota yang tidak mulia diberi penghormatan khusus, supaya tidak terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan (Anonim, 1983 : 219).

Hal serupa juga dinyatakan oleh Todaro, dunia ini sama dengan tubuh manusia. Jika sebagian tubuh ada yang sakit, yang lain pun akan merasakannya. Jika sebagian tubuh ada yang luka, maka seluruh/sekujur tubuh akan menderita (Todaro, 1983 : 53).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tugas membangun kepribadian peserta didik, perilaku sosio civics dan intelektual. Ke semua aspek tersebut dibangun hingga terintegrasi dengan kehidupan peserta didik. Sekolah mengajarkan ilmu pengetahuan sebagai tindakan yang berorientasi pada tujuan. Setelah mengikuti aktivitas belajar, diharapkan siswa tumbuh menjadi insan yang utuh, yang berkemampuan memperoleh kebenaran, berpengetahuan, mampu menjelaskan, memprediksi, mengendalikan, dan merupakan pengetahuan yang benar (Dimiyanti, 1988:64).

Geografi sebagai bahan ajar, dalam perjalanan panjangnya telah mengalami pasang surut. Sebagai ilmu pengetahuan modern, Geografi memberikan kontribusi pada bidang pemerintahan, industri, tata kota, militer, pembangunan wilayah, pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan (Dimiyati, 1988 : 32; Bintarto, 1989 : 10; Boyce,1982: 21; GBHN 1993).

Dalam struktur kurikulum sekolah di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini, mata pelajaran Geografi belum pernah lepas dari keanggotaan mata ajar di sekolah. Walaupun demikian, posisinya sangat lemah. Hal ini terbukti, pada Kurikulum 1984, mata pelajaran Geografi dengan nama Geografi dan Kependudukan, merupakan mata pelajaran inti, tetapi tidak merupakan bahan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Sedang pada kurikulum 1994 khusus untuk Sekolah Menengah Umum hanya diberikan pada kelas satu dan dua, dan terjadi pengurangan jam belajar dalam tiap minggunya. Dengan demikian keberadaan mata ajar Geografi sebenarnya ada pada posisi yang kurang menguntungkan, bila dibandingkan dengan tuntunan yang dibebankan kepadanya.

Apabila diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dilacak dari ketentuan konstitusi, posisi Geografi sebagai bahan ajar selayaknya mendapat tempat yang terhormat. Undang Undang Dasar

1945 pasal 33 butir 3 mengisyaratkan fungsi penguasaan unsur Geografi bagi kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas dalam GBNH 1968/1973 – 1993/1988 yang menempatkan unsur Geografi sebagai modal dasar dan faktor dominan dalam pembangunan bangsa. Sembilan unsur modal dasar, tiga diantaranya adalah unsur Geografi yaitu: kedudukan Indonesia, kekayaan alam, dan penduduk. Selanjutnya, dalam melaksanakan pembangunan terdapat delapan faktor yang harus diperhatikan/faktor dominan, lima diantaranya adalah unsur Geografi yaitu: kependudukan, kepulauan, sumber daya alam, kualitas manusia, dan perkembangan regional/kewilayahan. Selanjutnya dalam Undang Undang No. 2 tahun 1989, pasal 39, butir 3h, menempatkan ilmu bumi sebagai anggota kurikulum pada jenjang pendidikan dasar.

Fenomena yang berkembang akhir-akhir ini mendorong penguasaan konsep-konsep esensial Geografi harus semakin mantap. Beberapa fenomena yang setiap hari dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk peserta didik yang relevan dengan unsur kegeografian terdiri sebagai berikut.

1. Perubahan arus informasi yang cepat, dalam percakapan sehari-hari berdampak pada penyebutan dunia makin sempit, jarak makin dekat, kejadian di negara lain dapat disaksikan dalam waktu yang bersamaan.
2. Makin transparannya hubungan antarnegara.
3. Makin terasa ketergantungan kehidupan antarbangsa, oleh sebab distribusi sumber daya alam yang tidak merata dan terbatas.
4. Fenomena Geografi setempat berakibat sangat luas. Kerusakan hutan mengakibatkan banjir, kerusakan hutan tropis sebagai paru-paru dunia, akan mengancam kehidupan keseluruhan.
5. Timbulnya polarisasi kekuatan dunia, dalam keseharian menyebabkan timbulnya penyebutan negara Adidaya dan Adikuasa.
6. Perubahan peta politik, ekonomi dunia, dalam keseharian memunculkan penyebutan: Utara-Selatan, Dunia Ketiga (Gambar 1,2).
7. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang berpengaruh penting terhadap pergeseran arus manusia dan barang.

Contoh: Cekung Pasifik, yaitu negara-negara pantai timur Asia dan Amerika Barat, Australia, sebagai kekuatan baru dunia disamping eropa. Negara –negara Cekung Pasifik yang berjumlah lebih dari 27 negara besar kecil, pada tahun 1991 berpendudukan lebih dari 2,5 milyar atau 47 persen penduduk dunia.

Fenomena tersebut berdampak pula terhadap dunia pendidikan, dalam hal ini tugas mata ajar untuk membekali peserta didik menjadi terbuka, kritis daya penalarannya dalam menyimak dunia sekitarnya. Rupanya isyarat dan ajakan Ruslan Abdulgani menjadi relevan dengan situasi yang sedang berkembang saat ini:

Posisi Indonesia sebagai bagian dari wilayah Asia Tenggara, Asia maupun dunia perlu waspada dengan gejolak yang sedang terjadi di muka bumi ini, dan bukannya semakin mereda, tetapi bahkan akan berlanjut, apabila tidak dalam wujud gejolak fisik, akan muncul dalam wajah lain misal dalam bentuk perang dagang (Abdulgani, 1994 : 10).

Prediksi tersebut perlu dicermati. Tampak bahwa mata ajar Geografi di sekolah mempunyai kontribusi yang penting. Daya nalar yang kritis analitis menumbuhkan saling pengertian diantara daerah yang berbeda, menghindarkan diri dari sikap kepicikan (Barley, 1974 : 23).

RUANG LINGKUP GEOGRAFI

Geografi mampu merespon tantangan melalui upaya terus menerus dari para pakar, pengembang, pengampu mata ajar Geografi. Pembinaan dan pemantapan konsep esensial, karakteristik, metode, dan teknologi pembelajaran berangsur-angsur dimantapkan. Seminar, lokakarya, sarasehan dilakukan untuk menemukan dan menentukan konsep esensial meliputi: aglomerasi, jarak, letak, keterjangkauan, interaksi, distribusi/diferensiasi keruangan, dan keterpaduan (Sutanto, 1990 : 10). Catatan yang diusulkan oleh tim kerja penyusunan draf GBPP Geografi SMU 1994 menambahkan beberapa butir, disamping butir yang sudah disebut tadi. Tambahan konsep esensial itu adalah: pola, morfologi, gerak, pertumbuhan/kesinambungan, dan nilai kegunaan (Depdikbud, 1991 : 3-4).

Konsep esensial yang sudah disebutkan, memberikan keyakinan kepada kita, bahwa Geografi sebagai bahan dari IPS yang diprogramkan pada setiap jenjang pendidikan; selain mempunyai nilai akademis juga nilai praktis bahkan moral. Aktivitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, dalam keseharian berkaitan langsung dengan konsep esensial Geografi. Hal ini dirasakan oleh siswa SMA DIY, bahwa Geografi itu berhubungan dengan kejadian sehari-hari (Soemantri, dkk.:1990 : 28). Sadar atau tidak, aktivitas manusia dalam keseharian memanfaatkan konsep Geografi. Contoh: Harga tanah akan makin tinggi bila jaraknya makin dekat dengan pusat kota atau jalan besar. Contoh lain, jarak fisiknya sangat dekat, keterjangkauannya amat rendah, misal seorang pimpinan universitas/institut lain, barang kali jarak relatif ini sesuai dengan ungkapan lama “adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan”.

Geografi sebagai bahan ajar, substansinya sudah demikian luas. Hal ini nampak pada luasnya cabang-cabang Geografi hingga saat ini; dari Geografi ortodok hingga Geografi terpadu.

Skema tersebut memberikan penjelasan kepada kita, betapa luas dan kompleksnya substansi Geografi hingga saat ini. Unsur-unsur di dalamnya amat dekat dan dibutuhkan bagi kehidupan dan penghidupan manusia sekarang dan yang akan datang. Geografi sebagai bahan ajar anggota IPS, substansinya demikian luas kompleks. Karena itu, sangat mungkin terjadi topik pembahasan Geografi berimpitan dengan disiplin ilmu lain. namun demikian, sebagai disiplin ilmu yang sudah berkembang, Geografi mempunyai sifat khas.

Sifat khas yang dimaksud adalah penggunaan tradisi dalam pembelajaran, meliputi: (1) tradisi ilmu kebumihan, (2) tradisi lingkungan alam dan budaya, (3) tradisi keruangan, dan (4) tradisi analisis kewilayahan (Getis/Getis/Fellman, 1988:15).

Selanjutnya, praktik pembelajaran yang terkait dengan tradisi tersebut, sekaligus memperkuat sifat khas Geografi, yang meliputi:

1. Tradisi keruangan, merefleksikan kepentingan para ahli Geografi tentang pola-pola keruangan, dengan menggunakan peta sebagai alat penjas,
2. Tradisi penelahan wilayah, memperhatikan sifat-sifat khas

tempat-tempat di muka bumi, dalam rangka pendekatan regional,

3. Tradisi manusia-daratan, menekankan pada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya,
4. Tradisi ilmu pengetahuan tentang bumi, untuk kepentingan deskripsi, penjelasan sifat-sifat jenis muka bumi. (Abdurachman, 1988 : 13).

Tradisi pembelajaran demikian mengisyaratkan bahwa dalam praktik pun menuntut penanganan sebagaimana lazimnya mata ajar lain, ditambah dengan penggunaan peta sebagai alat bantu vital, dan observasi lapang langsung, sebagai upaya pengenalan dan pematapan konsep esensial Geografi (Depdikbud, 1993 : 5; Piaget dalam Bailey, 1974:26; John Everson dalam Walford, 1976: 106; Tharlls, 1958 : 19).

TANTANGAN DAN PELUANG

Posisi pembelajaran Geografi dilihat dari tujuan dan fungsi amatlah strategis. Dapat dikatakan sarat dengan muatan, baik dilihat dari cakupan wilayah maupun tujuan dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Namun demikian tantangan yang di hadapi masih cukup besar. Kalangan yang kurang menaruh perhatian terhadap Geografi, mengalami kesulitan memahami Geografi itu. Geografi sendiri dalam upaya mempertajam pemahaman membagi substansi Geografi menjadi dua kelompok utama, yaitu Geografi fisik dan Geografi manusia. Pembagian ini semata-mata sebagai alat untuk memahami fenomena khas apa yang ada di muka bumi (Haring, 1983 : 7; Clark, 1972 : 1). Dualisme tersebut mengundang pertanyaan, terutama di kalangan pengamat sistematika keilmuan. Geografi masuk kelompok ilmu alam ataukah ilmu kelompok ilmu sosial?

Hal lain turut memperberat tantangan pemahaman terhadap Geografi adalah, kerancuan menggunakan konsep esensial. Beberapa contoh dapat disebut disini yakni: (1) Penggunaan konsep jarak titik. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah jarak digunakan untuk menunjukkan dekat jauh. pembicaraan yang berkonotasi jarak yang membingungkan: penyebutan Timur Tengah, Timur

Dekat untuk Jazirah Arab; Timur Jauh untuk Jepang. Penyebutan semacam ini menandakan adanya kekurangan pemahaman dalam pemakaian konsep esensial geografi bagi orang Indonesia.

(2) Konsep arah. Dewasa ini makin marak dengan penyebutan: belahan bumi utara selatan. Tetapi penggunaan konsep arah tersebut, ternyata tidak mengacu pada arah, yang dimaksud dalam geografi. Yang dipakai adalah kemajuan ekonomi dan budaya negara yang bersangkutan. Sedang dalam geografi, yang dimaksud dengan belahan bumi utara atau selatan menggunakan garis khatulistiwa sebagai batas. Demikian pula penggunaan istilah dunia ketiga, negara maju, dan non blok dapat menimbulkan kesulitan.

(3) Kedudukan dalam kurikulum sekolah, porsi jam tatap muka perminggu dalam kurikulum 1994 kurang menguntungkan. Kondisi yang seperti itu, ternyata membawa dampak terhadap pengadaaan bahan ajar (sampai sekarang belum ada buku paket sebagaimana mata ajar yang lain).

Dalam hal pengadaan pengangkatan guru pun mengalami hambatan. (4) Isu penghapusan jurusan Geografi, keberadaan jurusan Geografi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) akhir-akhir ini disanksi kan jam tatap muka di SMU hanya delapan jam per minggu, dan hanya untuk kelas I dan II.

(5) Kualifikasi guru pengampu Geografi. Pengampu mata ajar Geografi untuk jenjang SMP/MTs lebih dari 33% berlatarbelakang bukan program studi bukan jurusan Geografi (hasil pantauan seminar alumni jurusan Pendidikan Geografi 1994 di Jogjakarta). Pada jenjang SMA/MA terdapat 20% diampu oleh guru berlatarbelakang pendidikan bukan Geografi (Soemantri, 1990 : 16)

Gambaran tersebut dapat ditafsirkan dalam dua dimensi, yakni ada anggapan bahwa Geografi sebagai bahan ajar hafalan yang mudah, atau kurang penting kedudukannya dalam struktur kurikulum sekolah, sehingga dapat diberikan oleh siapa saja yang mau. Akibat lebih lanjut adalah penguasaan konsep Geografi pada pengampunya kurang, seterusnya berlanjut pada rendahnya mutu pembelajaran Geografi (Hasan, 1990 : 2; Berita IGI, 1988 : 2).

Sebagai bahan ilustrasi, bagaimana rendahnya penguasaan konsep esensial Geografi oleh peserta didik, dapat dikatakan bahwa mereka umumnya tahu nama, tetapi dimana menempatkannya dalam peta dengan tepat belum tepat.

Saya menduga bahwa kesempatan untuk menggunakan peta saat berlangsungnya proses pembelajaran kurang mendapat perhatian. Hal itu terkait dengan sedikitnya kesempatan tatap muka sebagai akibat terbatasnya jam yang tersedia (Soemantri, 1990 : 24). Tantangan yang bersumber pada substansi, institusi, praktek lapangan, maupun anggapan masyarakat dan siswa akan semakin dalam dan luas, akhirnya akan memojokkan fungsi bahan ajar Geografi. Upaya mencari solusi dalam rangka menempatkan Geografi pada posisi yang sebenarnya, sesuai dengan fungsinya perlu terus menerus dilakukan. Kalangan pengembang dan pengampu mata ajar Geografi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melakukan kegiatan nyata, bukan sebaliknya menerima kenyataan seperti yang sekarang ada sebagaimana hal yang wajar.

Sampailah sekarang pada pembahasan mengenai peluang yang dapat dikerjakan untuk menempatkan mata ajar Geografi sesuai dengan fungsinya, dan mencapai tujuan sebagaimana sudah disinggung pada awal paparan ini Kondisi obyektif yang merupakan peluang untuk kegiatan tersebut dapat disebutkan disini sebagai berikut:

1. Landasan idiil dan kostitusional.

Landasan ini diketemukan pada pembukaan UUD 1945 alenia 4; UUD 1945 pasal 33 butir 3; dan Undang-Undang no.2 tahun 1989 pasal 39 butir 3h.

2. Landasan operasional

Landasan ini ditemukan pada GBHN yang menyangkut modal dasar dan faktor dominan dalam pembangunan nasional, dan GBPP Geografi kurikulum 1994.

Dengan landasan tersebut, upaya untuk menempatkan mata ajar Geografi pada posisi yang mapan dalam struktur kurikulum sekolah, bukanlah tindakan yang mengada-ada, tetapi sebagai perwujudan dari amanat konstitusi. Karena itu, kewajiban para

pengembang dan pengampu mata ajar Geografi adalah terus menerus mengusahakan agar Geografi mapan dan sepadan dengan tujuan, fungsi dan tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi.

Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai peluang untuk mencari jalan keluar. Peluang yang tersedia dapat disebut:

1. Persepsi dan tanggapan masyarakat yang kurang tepat, merupakan peluang untuk memasyarakatkan Geografi sebagai ilmu yang bernilai praktis dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kemampuan guru yang masih belum optimal, merupakan peluang untuk melakukan pemantapan penguasaan dan tugas melalui penataran, temu wicara, seminar yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan ke-Geografian.
3. Belum adanya buku teks/paket, merupakan peluang bagi para pakar penulis/guru untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengadakannya, melalui lomba karya tulis penulisan buku.
4. Terbatas alat bantu mengajar seperti peta, peta tematik, grafik, diagram merupakan peluang untuk menyalurkan kreatifitas guru dan siswa untuk membuat, sekaligus peluang pasar bagi pengusaha yang tertarik pada pengadaan alat bantu belajar.
5. Terbatasnya waktu tatap muka (Kurikulum 1994 SMU) merupakan tantangan sekaligus peluang untuk menumbuhkan kejelian dan kreatifitas guru dalam pembelajaran.

Tantangan dan peluang itu, akan tetap sebagai tantangan dan peluang, apabila tidak ada usaha untuk mengatasi dan memanfaatkannya. Masalah itu tidak dapat diserahkan perbaikannya kepada pihak lain. tetapi para pengembang dan pengampulah yang harus mengambil prakarsa untuk perbaikan kontribusi pengembang adalah merumuskan konsep esensial Geografi dan memilihnya, hingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta menemukan metode dan teknologi pembelajaran yang mempunyai nilai guna tinggi. Selain itu para pengembang dan pengampu harus berusaha menemukan teknik evaluasi sesuai dengan sifat khas Geografi. Seperti sudah disinggung pada bagian paparan ini, mata ajar Geografi tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi tahu.

Tetapi berdasarkan apa yang diketahui tersebut dapat diman-

faatkannya dalam tindakan nyata. Pengampu pendidikan Geografi di sekolah semestinya mempunyai keyakinan, bahwa apa yang diajarkan merupakan mata ajar yang mempunyai nilai lebih.

KONTRIBUSI PENDIDIKAN GEOGRAFI PADA PJP II

Pembangunan Indonesia pada PJP II bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diprioritaskan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan muatan kurikulum sekolah. Berbagai disiplin ilmu secara serentak dipilih sebagai muatan kurikulum jenjang pendidikan tertentu.

Sejak awal pembangunan berencana dan seterusnya selalu usahakan bagaimana menemukan kesesuaian antara pendidikan dan pembangunan. Dalam pembicaraan yang sedang hangat dewasa ini, adalah istilah *link and match* sebagaimana dilansir oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan VI. Keterkaitan dan keselarasan, dapat diberi makna dalam artian luas (*marko*) maupun sempit (*mikro*). Dalam artian luas, setiap usaha mencerdaskan putra bangsa harus berorientasi pada fungsi manusia sebagai subjek pembangunan.

Hal ini tampak jelas dalam jenis-jenis pendidikan jalur sekolah. Undang-Undang no. 2 tahun 1989 pasal 11 menyebut jenis pendidikan meliputi: Pendidikan Umum, Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Kedinasan, Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesional. Produk pendidikan ini diharapkan mempunyai keterkaitan dengan fungsi peserta didik pada kemudian hari. Sedang artian sempit, dapat diberi makna hal-hal yang berkaitan dengan isi program pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis. Isi program pendidikan, tampak dalam struktur kurikulum sekolah. Bidang studi/mata ajar muatan kurikulum, merupakan perangkat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang bersama-sama, dukung mendukung dalam keseimbangan menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Kesemuannya secara akademis mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan secara moral mengembangkan ketakwaan, budi pekerti luhur dan berkeprib-

adian indonesia. Dalam artian patriotisme semuanya menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Perincian ciri manusia hasil pembangunan pendidikan seperti dirumuskan dalam GBHN 1993 mencakup 20 butir. Ciri yang menggambarkan kualitas manusia Indonesia, yaitu beriman, berbudi luhur, berkepribadian indonesia, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, profesional, tanggung jawab, produktif, sehat jasmani, patriotik, cinta tanah air, setia kawan, menghargai jasa pahlawan, dan orientalis (GBHN 1993 : 129).

Ciri-ciri tersebut sangat di perlukan untuk menyukseskan pembangunan nasional dewasa ini, maupun pada masa datang. Dalam kaitan ini, Presiden Soeharto dalam kesempatan pembukaan KTT X Gerakan Non Blok di jakarta tahun 1992, menyatakan sebagai berikut.

Pembangunan suatu bangsa adalah tanggung jawab bangsa itu sendiri, karena itu harus meningkatkan secara maksimal sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber pembiayaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Sudirdjo, 1993 : 29).

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dewasa ini, bertumpu pada kekuatan sendiri, baik dalam pengadaan sumber daya manusia, bahan mentah maupun pembiayaannya artinya pembangunan yang dilaksanakan tetap mengandalkan pada modal dasar dan faktor dominan yang ada di bumi indonesia. Tahapan dalam proses pembangunan meliputi: perencanaan, telaah kelayakan pelaksanaan dan hasil yang akan dicapai, yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Apabila tekanan pembangunan ada pada peningkatan kualitas manusia ternyata tidak akan lepas dari pengadaan prasarana dan sarana. Pembangunan fisik seperti: jalan, jembatan, bendungan, perumahan, perkantoran, pertokoan jelas membutuhkan sumber daya alam, dalam hal ini lahan.

Sebaliknya pembangunan non fisik seperti: pendidikan, kesehatan, gizi, keagamaan ternyata juga tidak akan terlepas dari kebutuhan akan lahan. Karena itu, sumber daya alam dan manusia yang disebut-sebut sebagai modal dasar dan faktor dominan dalam pelaksanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk diketa-

hui. Adanya kekhawatiran sementara pihak terhadap cadangan sumber alam memang beralasan. Minyak bumi dikhawatirkan dalam waktu dekat akan habis, lahan pertanian sumber produksi pangan, makin berkurang dan telah mendekati batas kritis.

Timbulnya kekhawatiran itu mengisyaratkan bahwa tindakan yang tetap perlu segera diambil. Pengetahuan yang memadai tentang sifat-sifat dan kandungan sumber alam nasional harus diketahui. Kondisi ini tidak akan lahir dengan sendirinya, dalam hal ini Pendidikan Geografi sangat relevan.

Melalui pendidikan dan pengajaran yang terarah, dapat dipastikan bahwa kondisi itu akan terwujud. Pendidikan disekolah bertugas menghasilkan insan yang berkemampuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, memprediksi, dan mengendalikan fakta-fakta muka bumi.

Manusia yang berkualitas rumusan GBHN 1993, melalui pengajaran geografi dapat diberi makna operasional, terutama dilihat dari kemampuan yang dihasilkan, setelah mengikuti pembelajaran yang bermutu.

Demikian berat, tugas yang bebankan kepada mata ajar Geografi, bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar peserta didik mampu memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Namun demikian, tantangan yang dihadapi cukup besar, sehingga akhirnya para pengembang, pengampunya dituntut untuk meyakini perannya yang demikian besar, supaya terhindar dari keputusasaan.

PENUTUP

Sebelum mengakhiri pembacaan naskah pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada guru-guru saya di Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Guru Atas, Dosen-dosen yang saat ini hadir, yang telah mengantarkan saya hingga mencapai derajat seperti sekarang ini.

Kepada teman sejawat pada FPIPS IKIP YOGYAKARTA, khususnya kepada kepada jurusan Pendidikan Geografi yang memberi

dorongan dan kerja sama yang baik selama ini.

Secara khusus saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Prof.DR. H. Saidihardjo. M.Pd yang telah menilai karya-karya saya sebagai bahan pengusulan jabatan Guru Besar Madya.

Kepada Rektor/Ketua Senior, Sekertaris Senat, Senat Guru Besar, dan Anggota Senat Institut yang telah memproses usulan pengangkatan sebagai Guru Besar Madya, saya ucapkan terima kasih.

Kepada Presiden Republik Indonesia, yang telah memberi kepercayaan dan mengangkat saya menduduki jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Pendidikan Geografi pada FPIPS IKIP YOGYA-KARTA, saya ucapkan terima kasih.

Pada hari yang berbahagia ini saya terkenang akan ayah dan ibu yang telah almarhum. Ayah dan ibu petani kecil, buta huruf, mantan kuli kontrak di Suriname, tetapi mempunyai cita-cita dan harapan yang sangat tinggi terhadap pendidikan saya. Rasa hormat dan terima kasih yang tiada terhingga tidak dapat saya lukiskan dengan kata-kata. Kepada keluarga mertua dan saudara semua yang telah memberikan dukungan moral dalam mencapai cita-cita ini, saya ucapkan terima kasih.

Kepada istri dan 3 anak saya: Eko, Anto,dan Budi yang dengan kerelaan dan kesetiannya memberikan dorongan dan mendampingi saya dalam suka dan duka saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa, ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Kepala Desa, responden yang ada di pedesaan, mahasiswa asisten lapangan yang telah memberikan banyak dukungan pada saat saya melakukan berbagai penelitian. Dari padanya saya memperoleh banyak pengalaman tentang kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Akhirnya kepada seluruh undangan dan hadirin yang dengan penuh kesabaran mengikuti pembacaan naskah pidato ini, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan beserta kita.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulgani, Ruslan (1994), ed. "Indonesia Perlu Tentukan Posisi di Dunia Secara Tepat", dalam *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 3 Januari 1994. Yogyakarta: PB Kedaulatan Rakyat. Abdulrachman, Maman. (1988). *Geografi Perilaku*. Jakarta: DIRJEN DIKTI. Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Anonim. (1983). Alkitab. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Bailey, Patrick. (1974). *Teaching Geography*. London: David & Charles.
- Bintarto, R. 1965. *Geografi Sosial*. Yogyakarta: UP Spring.
- (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto, R., Surastopo. (1979). *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES.
- Eloyce, R.R. (1982) *Geographic Perspectives on Global Problems*. New York: John Wiley & Sons.
- Carke, John I. (1972) *Population Geography*. New York: Pergarnon Press.
- Degeng, Sudana I.N. (1989). *Ilmu Pengajaran Taksonomi Variable*. Jakarta: Dirjen Dikti P2LPTK.
- DEPDIKBUD. (1993). UUD 1945, P4, GBHN 1993. Jakarta: Percetakan UIP.
- , (1993). *Kurikulum Pendidikan Dasar (GBPP) Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta.
- , (1993). *Kurikulum Sekolah Menengah Umum (GBPP) Mata Pelajaran Geografi*. Jakarta.
- De Blij, Harrn, J., Muller P.O. (1985). *Geography, Regions and Concepts*. New York: John Wiley & Sons.
- Dickenson, J.P.et all. (1992). *Geografi Negara Berkembang (terjemahan)*. Judul asli "A Geography Third World". Semarang: IKIP Semarang Press.
- Dimiyati, M. (1988). *Pengajaran Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial/ di Sekolah: Bagian Integral Sistem Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Dirjen DIKTI, P2LPTK.
- Freeman, Otis W. and Raup, H.F. (1949). *Essentials of Geography*. London: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Getis, /Getis/Feltmann. 1988). *Introduction to Geography*. Iowa: Win. C. Brown Publishers.
- Hasar,, Zaini. (1990). Mencari Terobosan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Geografi di Sekolah (*Makalah*). Malang: Jurusan Pendidikan Geografi IKIP Malang.
- P. (1972). *Geography: A Modern Synthesis*. New York: Harper & Rovv, Publishers.
- I laring, L.J.F. Lounsbury, (1983). *Introduction to Scientific Geography Research..* Brown Publishers.
- Huybers Theo. (1985). *Manusia Memikirkan Dunianya*. Yogyakarta: Percetakan Kan'sius.
- IGI Pusat. (1988). Berita IGI No.2 Tahun 1988. Jakarta.
- Iskandar, N. (-). *Demographic Dimensions of Population Problems During The Seventies in The Pacific Countries*. Jakarta: Lembaga Demografi Fak. Ekonomi UI.
- Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Th. 1989 Tentang Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- inalis, Z.A. (1958). *The Teeching of Geography*. New Vork: App(etonCentury Crofts, inc.
- Huybers Theo. (1985). *Manusia Memikirkan Dunianya*. Yogyakarta: Percetakan

- Kanisius.
IGI Pusat. (1988). Berita IGI No.2 Tahun 1988. Jakarta.
Iskandar, N. (-). *Demographic Dimensions of Population Problems During The Seventies in The Pacific Countries*. Jakarta: Lembaga Demografi Fak. Ekonorni UI.
Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Th. 1989 Tentang Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
Safim, Ernil. (1 985). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta. LP3ES, PT Midas Surya Grafindo.
Sudirdja, R.U. (1993). *KTT X Gerakan Non Blok*. Jakarta: Caraka Bhuana.
Soemantri dkk. (1990). *Identifikasi Hambatan dan Kesulitan Pengajaran Geografi di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas di D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta: P2 IKIP Yogyakarta.
Sutanto. (1990). *Konsep-konsep Esensial Geografi dan Penerapannya dalam Pendidikan Geografi (Makalah)*. Malang: Jurusan Pendidikan Geografi IKIP Malang.
Sumoatmodjo, N. (1988). *Geografi Pembangunan*. Jakarta. P2LPTK.
Todaro, M.P. (1983). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga (terjernahan)*, judul asli: "Economic Development in The Third World". Jakarta: Ghalia Indonesia.
Walford, Rex. (1976). *New Perfections in Geography Teaching*. London: Longman Group Limited.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Prof. Drs. Soemantri Wardoyo
2. Tempat/Tgl. Lahir : Kulon Progo, 5 September 1941
3. Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Madya/Guru Besar Madya/IV/d.

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|---|------|
| 1. Sekolah Rakjat 6 Tahun Kalipenten | 1953 |
| 2. SMP Bagian B Sentolo | 1956 |
| 3. SGA BOPKRI Yogyakarta | 1959 |
| 4. Sarjana Muda Ilmu Bumi FKIP-LIGM | 1964 |
| 5. Sarjana Pendidikan Geografi FKIS-IKIP YOGYAKARTA | 1966 |

B. RIWAYAT PEKERJAAN

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Asisten Perguruan Tinggi | 1964 |
| 2. Lektor pada FKIS IKIP YOGYAKARTA | 1977 |
| 3 Guru Besar Madya | 1991 |
| Sekretaris Jurusan Geografi | 1969-1970 |
| Sekretaris Jurusan Geografi | 1973-1975 |
| Ketua Jurusan Geografi | 1978-1981 |
| Pembantu Dekan III FKIS | 1982-1985 |
| Sekretaris Pengelola BJJ Kependidikan | |

Universitas Terbuka

1983-1986

C. PENGALAMAN LAIN

1. Latihan Metoda Survai PPSK UGM 1975
2. Latihan Demografi, Lembaga Demografi UI 1976
3. Latihan Metode Penelitian Sosial UGM 1977
4. Latihan Pendidikan Kependudukan PNPk 1979
5. Latihan Penelitian Anthropologi UI 1980
6. Penataran IPS 1981
7. Latihan Penulisan Naskah Siaran Radio Pendidikan Kependudukan PNPk 1979
8. Penataran Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup IKIP JAKARTA 1980
9. Penataran Analisa Dampak Lingkungan 1981
1986

D. KEGIATAN LAIN

1. Anggota Tim BINAP IKIP YOGYAKARTA 1983 – 1985
2. Anggota Staf Ahli Kopertis Wilayah V DIY 1985 – 1988
3. Tim Penyusun Kriteria Laboratorium/
Studio LPTK bidang Geografi BP₃K Dikbud 1984 – 1985
4. Anggota Jaringan Informasi dan Dokumentasi Kependudukan Propinsi DIY 1985 - 1986
5. Anggota Badan Pertimbangan Penelitian Pendidikan IKIP YOGYAKARTA 1981 - 1985
6. Anggota Tim Pembina Pendidikan Kependudukan Kanwil Depdikbud DIY 1980
7. Sekretaris Kelompok Pengkajian dan Pengembangan PKLH IKIP YOGYAKARTA 1987 - 1988
8. Ketua Forum Komunikasi Kependudukan Propinsi DIY 1993 – 1994
9. Instruktur PKG Geografi SMP/SMA Kanwil Depdikbud Propinsi DIY 1990 - 1993

E. MAJALAH & MAKALAH

1. Hal Ihtwal Tenaga Kerja di Indonesia, dalam Majalah Informasi, 1985.
2. Unsur-unsur Pendukung Pengembangan Sumber Daya.
3. Manusia dalam Mengelola Lingkungan, dalam Majalah
4. Cakrawala Pendidikan IKIP YOGYAKARTA, 1986
5. Mobilitas Manusia dalam Rangka Pengembangan Kepariwisata di Indonesia, dalam Majalah Cakrawala Pendidikan IKIP YOGYAKARTA, 1987

6. Identifikasi Kesalahan Data Umur dan Upaya Perbaikannya, dalam *Majalah Informasi*, 1989
7. Pilihan Alat Kontrasepsi Mantap Alternatif yang Perlu Diperhatikan, dalam *Majalah Informasi*, 1991
8. Indeks Prestasi Lulusan Bahan Renungan bagi Sivitas Akademika IKIP YOGYAKARTA, dalam *Majalah Informasi*, 1992
9. Pemakalah dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian Pendidikan Kependudukan 8 IKIP di Indonesia BKKBN Pusat 1983
10. Pemakalah dalam Pengembangan Pengajaran Geografi di SMA di IKIP YOGYAKARTA, 1986
11. Pemakalah dalam RAKORDA BKKBN Propinsi DIY, 1986
12. Pemakalah dalam Seminar Proposal Penelitian oleh BKKBN Propinsi DIY, 1987
13. Pernakalah dalam Seminar Nasional PKLH di KLH Jakarta, 1989
14. Pemakalah dalam Seminar Nasional Mencari Standar Pendidikan Geografi Menyongsong Era Tenggol Landas IKIP Malang 1989
15. Pemakalah dalam Seminar Pengembangan Kurikulum PKLH IKIP YOGYAKARTA, 1990.
16. Pemakalah dalam Seminar Nasional Alumni Pendidikan Geografi: Pendidikan Geografi dan Perannya dalam Pembangunan. ikatan Alumni Jurusan Pendidikan Geografi, 1991
17. Pemakalah dalam Seminar. Sehari Rangkaian Dies Natalis XXVII IKIP YOGYAKARTA, 1991
18. Pemakalah dalam Semiloka Pengembangan Pengajaran Geografi di SMP/SMA di DIY, 1992
19. Karya tulis: Pasangan Usia Subur Posisi Strategis Penurunan Kelahiran, disampaikan dalam Sidang Senat IKIP Yogyakarta 1987.
20. Pemakalah dalam Seminar Nasional IMAHAGI: Kontrol Budaya Terhadap Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
21. Ketua Peneliti: Tanggapan Masyarakat Terhadap KB Mandiri. (opp, 1988.
22. Ketua Peneliti: Identifikasi Potensi Desa dalam Rangka Penataan dan Pengelolaan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. (OPF, 1989
23. Anggota Peneliti: Kesiapan Mahasiswa dalam Mengikuti Kuliah PKLH. (OPF, 1989)
24. Anggota Peneliti: Peranan PLKB dalam Penyebarluasan Program KB Mandiri. (OPF, 1989)
25. Anggota Peneliti: Peran Serta Kaum Pria dalam Program KB di DIY. (OPF, 1989)
26. Ketua Peneliti: Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Pedesaan (DPPM, 1990)

27. Peneliti tunggal: Bimbingan Pemilihan Metode Kontrasepsi Mantap Menuju KB Mandiri. (DPP, 1990)
28. Peneliti tunggal: Penduduk.
29. Peneliti tunggal: Keliling

MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Geografi Penduduk
Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Yogyakarta.
Diucapkan di depan Rapat Terbuka IKIP Yogyakarta Pada Tanggal 22 Juli 1995

**PROF.DR. SUNARTO
HADISUPADMO, MS.**



Yang Terhormat Rektor/Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan para anggota Senat, serta Para Tamu Undangan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kehadiran Illahi, pada pagi hari ini mendapat limpahan rahmat sehingga saya dapat mengucapkan pidato Pengukuhan Guru Besar. Tema yang saya pilih adalah **Mobilitas Penduduk Dan Pembangunan Pedesaan**, sesuai dengan mimbar saya.

PENDAHULUAN

Dalam kitab suci Al Qur'an surah Thahaa ayat 123 Tuhan Allah berfirman kepada Nabi a.s. "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagaimana kamu menjadi musuh sebagian yang lain. maka jika datang petunjuk-Ku mereka tidak akan sesat dan tidak akan celaka'. Demikianlah kemarahan Tuhan Allah kepada Nabi Adam a.s yang tidak tahan terhadap godaan syaitan sehingga makan buah pohon kuldi larangan Allah (Q; 20 : 120).

Dari sekelumit kisah di atas, menjadi jelas bahwa mobilitas penduduk permanen telah terjadi sejak manusia pertama Adam menghuni bumi. Sejak itu mobilitas Geografis makin berkembang seiring dengan makin banyaknya anak keturunan Adam a.s. yang sampai sekarang telah mencapai lebih dari 5 milyar jiwa. Manusia pertama Adam diturunkan oleh Allah menurut hadits Bukhari Muslim di Padang Arafah, termasuk daerah Saudi Arabia sekarang ini. Dari sini anak-cucu Adam a.s. mulai mengembara terutama ke arah Barat menuju lembah sungai Nil dan ke arah Timur menuju Asia Tengah.

Pengembaraan mereka makin lama makin jauh untuk mencari dan memilih daerah-daerah yang mempunyai nilai kefaedahan tempat (*place utility*) yang tinggi. Fenomena ini diperkuat oleh pendapat Koentjaraningrat (1989) bahwa orang-orang Asia Tenggara, Asia Timur bahkan orang-orang Indian di Amerika Selatan mempunyai kampung yang sama yaitu Asia Tengah. Mereka bermukim, menata masyarakat, mengatur ekonomi, menetapkan nilai, mengangkat pemimpin dalam struktur yang hierarkhis. Dari sinilah

konsep awal terbentuknya sebuah pemerintahan yang dikemudian hari berkembang menjadi daerah perkotaan. Sementara itu di luar pemukiman ini berkembang pemukiman lain yang lebih mengandalkan pada potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Daerah yang dikemudian hari disebut sebagai daerah pedesaan, mempunyai ciri-ciri khusus seperti irama kehidupan yang lamban, tradisional, agraris, kolektif, rukun dan bersistem paguyuban. Ciri-ciri ini berbeda dengan wilayah perkotaan yang modern, dinamis, non agraris, individualistik, dan bersistem patembayan.

PEMUDA DESA MAKIN JAUH DARI KULTUR TANI

Adanya perbedaan sifat, kondisi dan kesempatan antara desa dengan kota terutama dalam peluang pekerjaan, timbullah mobilitas penduduk. Beberapa ahli Geografi dan demografi (Titus, 1978; Gould & Prothero, 1974; Pryor 1975) mengatakan bahwa mobilitas penduduk disebabkan oleh perbedaan antara dua daerah. Hubungan kausalistik ini bersifat positif, yaitu makin besar kesenjangan antara dua tempat, makin besar pula arus pelaku mobilitas. Keanekaragaman yang dimiliki oleh suatu daerah menurut Ravenstein (dalam Lee, 1966) akan memperbesar arus mobilitas. Karena itu besarnya arus pelaku mobilitas penduduk ke Jakarta misalnya, erat kaitannya dengan atribut yang disandangnya sebagai pusat administrasi, pemerintahan, perdagangan, industri, peredaran uang, lembaga pendidikan, rekreasi maupun pusat pelayanan jasa. Berbagai atribut yang dimiliki oleh Jakarta memberikan kesan terhadap banyaknya kesempatan kerja yang dapat ditawarkan tidak sebanding dengan volume pelaku mobilitas, akibatnya timbullah pengangguran.

Menurut Biro Pusat Statistik jumlah pengangguran di kota pada tahun 1993 lebih dari 1.386.000 orang, sedangkan di desa kurang dari 923.000, (Biro Pusat Statistik, 1994:101-102). Padahal, jumlah angkatan kerja di kota jauh lebih kecil dari angkatan kerja di desa (48,7 juta berbanding 93,9 juta). Walaupun tingkat pengangguran di kota lebih tinggi dari pada di desa, namun mereka tetap saja pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Masalahnya terletak pada tuntutan aspirasi, mencari pengalaman di kota dan

harga diri. Mereka bangga menjadi orang Jakarta, sekalipun kenyataannya sebagai *grass root*. Padahal, tenaga mereka sangat dibutuhkan di desa. Dewasa ini telah dirasakan betapa sulitnya mencari tenaga kerja untuk bekerja di lahan pertanian. Para pemuda desa mengetahui bahwa upah yang bakal di terima kalau mereka bekerja di lahan pertanian lebih tinggi dibandingkan di kota. Dengan demikian jelaslah, bahwa para pemuda yang lahir dan dibesarkan di desa akhirnya menjauhi kultur petani, dan bahwa motif pergi ke kota bukan semata-mata ekonomi.

Motif utama pelaku mobilitas pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu inovatif dan konservatif (Petersen, 1958:275). Inovatif dalam arti bahwa ada niat dari pelaku mobilitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Atas kesadaran sendiri secara spontan mereka meninggalkan kampung halamannya merantau ke daerah lain. migrasi dari desa ke kota, transmigrasi spontan dan mencari pekerjaan ke negara-negara lain adalah bersifat inovatif. Di lain pihak, berpindahnya ke daerah lain kalau untuk mempertahankan kualitas kehidupan yang pernah dicapai adalah tipe konservatif. Mudah diduga bahwa hal ini berkaitan dengan besarnya motivasi, etos kerja yang tinggi, dan berjiwa spontan untuk meraih sesuatu yang belum pernah dicapai. Karena itu pelaku mobilitas inovatif mempunyai peran yang lebih penting bagi pembangunan baik untuk diri sendiri, keluarga, daerah tujuan maupun daerah asal.

PERKEMBANGAN MODERNISASI, TRANSISI DEMOGRAFI DAN MOBILITAS PENDUDUK

Zelinsky (1971) mengatakan bahwa ada hubungan antara tingkat perkembangan modernisasi pembangunan, transisi demografi, dan transisi mobilitas penduduk. Makin modern suatu masyarakat makin meninggalkan tipe mobilitas permanen, sedangkan tipe *beboru* makin berkembang. Dalam tahap modernisasi berikutnya tipe *beboru* makin surut, namun tipe *nglaju* makin berkembang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makin modern suatu masyarakat, referensi waktu dalam mobilitas penduduk makin pendek. Secara garis besar Zelinsky meng-

ajukan empat hipotesis.

Fase pertama, dalam kehidupan penduduk yang tradisional, ditandai oleh tingginya fertilitas dan mortalitas, sehingga pertumbuhan penduduk sangat rendah. Dalam fase ini semua jenis mobilitas penduduk belum berkembang.

Fase kedua, merupakan permulaan difusi modernisasi ke dalam kehidupan tradisional, ditandai oleh mulai menurunnya tingkat mortalitas, namun tingkat fertilitas masih tinggi sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam fase ini mobilitas permanen dari desa ke kota berjalan intensif, sedangkan *bebor* baru memasuki tahap awal.

Fase ketiga, ditandai oleh meluasnya difusi modernisasi yang diikuti oleh menurunnya tingkat fertilitas maupun mortalitas sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam fase ini mobilitas permanen dari desa ke kota mulai surut, sedangkan *bebor* makin intensif.

Fase keempat, dimana difusi modernisasi keruangan telah mencapai titik optimal yang ditandai oleh keseimbangan antara fertilitas dan mortalitas sehingga jumlah penduduk dalam keadaan stasioner. Dalam fase ini mobilitas dari desa ke kota menurun secara drastis sedangkan *nglaju* mulai berkembang.

Hipotesis Zelinsky di atas nampaknya juga berlaku untuk Indonesia yang dewasa ini diperkirakan berada dalam fase kedua. Difusi teknologi modern mulai memasuki kehidupan masyarakat tradisional. Namun karena gencarnya program Keluarga Berencana mengakibatkan menurunnya tingkat fertilitas secara tajam. Pada tahun 1993 tercatat tingkat kelahiran kasar (CBR) sebesar 12 orang perseribu penduduk, sedangkan tingkat kematian kasar (CDR) sebesar 9 per seribu (World Population Data Sheet, 1994). Derasnya arus mobilitas penduduk dari desa ke kota, serta munculnya gejala *bebor* terutama di Jawa dan Bali sekarang ini merupakan ciri utama fase kedua.

Simon (dalam United Nations, 1984: 156) memperkuat hipotesis Zelinsky yang mengatakan bahwa migrasi merupakan bagian integral dari perubahan sosial ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi di antara

kedua variabel tersebut.

Skema di atas memberi gambaran bahwa pertumbuhan dan pembagian kesempatan ekonomi akan berpengaruh terhadap pola dan tingkat mobilitas, namun sebaliknya arus tenaga kerja, modal dan transfer teknologi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembagian kesempatan ekonomi suatu daerah. Perumusan strategi dan kebijaksanaan pembangunan dapat diarahkan pada salah satu dari pertumbuhan dan pembagian kesempatan ekonomi atau arus tenaga kerja, modal dan transfer teknologi.

MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI

Kita mengenal beberapa model pembangunan ekonomi dalam kaitannya dengan mobilitas penduduk, seperti model neo klasik, model kelebihan tenaga kerja, model pembangunan desa, dan model agropolitan. Arthur Lewis pernah menawarkan resep pembangunan ekonomi sekaligus untuk mengatasi masalah urbanisasi kepada negara-negara berkembang (Arthur Lewis dalam Todaro, 1980). Atas dasar-pengalaman di Eropa Barat pada abad 18, disarankan agar negara-negara berkembang membangun kawasan industri di daerah perkotaan yang fasilitas pendukungnya telah tersedia. Kawasan industri ini diharapkan berfungsi sebagai kutub pertumbuhan yang akan memacu perkembangan di daerah periphery, sekaligus akan menyerap kelebihan tenaga kerja di kota. Namun resep yang ditawarkan oleh Lewis ternyata gagal untuk menyembuhkan penyakit urbanisasi, terbukti pengangguran di kota tetap tinggi di samping dampak positif terhadap daerah periphery tidak seperti yang diharapkan.

Kondisi di Eropa Barat pada waktu revolusi industri yang menjadi dasar resepnya Lewis, ternyata berbeda dengan kondisi di negara-negara sedang berkembang sekarang ini. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada kondisi demografis, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, tetapi juga belum mapannya kondisi ekonomi. Di samping itu sekalipun industri di daerah perkotaan dapat berkembang karena penggunaan teknologi canggih, namun akibatnya penyerapan tenaga kerja makin kecil. Berdirinya industri semula diharapkan bersifat padat karya, namun akhirnya menjadi

padat modal karena timbulnya motivasi untuk memperoleh keuntungan secara optimal.

Untuk mengatasi masalah pengangguran di kota, Todaro menyarankan jangan diciptakan lapangan pekerjaan di kota. Hal ini justru akan merangsang datangnya tenaga kerja dari desa lebih banyak lagi. Dengan demikian kemungkinan mendapatkan pekerjaan di kota makin kecil bagaikan *urban employment lottery game*. Untuk mengatasi masalah pengangguran di kota sebagai akibat dari *overurbanisation* seharusnya dilacak di daerah pengirim. Bertolak dari teori bahwa migrasi terjadi karena perbedaan kondisi antara dua daerah, maka untuk mengurangi arus migrasi dari desa ke kota kesenjangan kondisi antara kedua wilayah ini harus diusahakan seminimal mungkin. Pembangunan model agropolitan merupakan alternatif yang dapat ditawarkan sebagai pengganti model neo klasik.

Pada dasarnya pembangunan model agropolitan merupakan konsep untuk menciptakan kota di ladang (*city in the field*). Realisasi dari konsep ini adalah pembangunan sarana dan fasilitas kota di daerah pedesaan. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi, listrik, perbankan, pusat pembelanjaan, lembaga pendidikan, hiburan, biro jasa, poliklinik, dan pengembangan potensi wilayah untuk penciptakan lapangan kerja di desa seharusnya mendapat prioritas. Pembangunan model agropolitan yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan model pembangunan masyarakat desa (PMD), selain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, juga dapat mengurangi derasnya arus tenaga kerja ke kota. Namun perlu disadari bahwa mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota tidak mungkin dapat dihentikan sama sekali, walaupun daerah pedesaan telah berubah menjadi perkotaan. Masalahnya terletak pada tuntutan aspirasi pelaku mobilitas, di samping itu perbedaan kondisi antara dua wilayah akan tetap ada, selama kondisi dasarnya berbeda. Karena itu kalau berpikir secara nasional, kota tetap harus disiapkan untuk menerima tamu-tamu dari desa.

TIPE MOBILITAS PENDUDUK

Berdasar pada referensi waktu, mobilitas penduduk dapat dibedakan ke dalam tiga tipe, yaitu mobilitas permanen, *beboru* (*circulating*), dan *nglaju* (*commuting*). *Beboro* dan *nglaju* dua buah terminologi Jawa yang pas benar dalam studi tentang mobilitas penduduk. Mobilitas permanen atau migrasi, (orang Jawa menyebutnya: pindahan) merupakan perpindahan tempat tinggal secara permanen, yang diikuti dengan pindahnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan *beboru* adalah pergi bekerja di daerah lain, namun tidak pulang pada hari yang sama. Referensi waktu inilah yang membedakan *beboru* dari pelaku *nglaju*, yaitu mereka pulang pada hari yang sama.

Ketiga tipe mobilitas penduduk tersebut mempunyai bobot sumbangan terhadap pembangunan pedesaan berbeda-beda lewat remitan (*remittance*). Remitan merupakan medium utama antara pelaku mobilitas dengan pembangunan pedesaan, karena itu pada kesempatan ini akan dibahas lebih rinci.

Mengikuti pendapat Curson (1981: 2) yang dimaksud dengan remitan adalah pemberian atau pengiriman uang, barang, gagasan, atau jasa dari pelaku mobilitas ke daerah asalnya. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa syarat adanya remitan adalah mobilitas penduduk. Bahkan dapat dikatakan mobilitas penduduk dan remitan ibarat sekeping mata uang yang keduanya sisinya tidak dapat muncul pada waktu yang sama, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Remitan dari ketiga pelaku mobilitas mempunyai sifat yang berbeda baik dalam hal volume, keteraturan maupun frekuensinya. Bagi masyarakat daerah asal, remitan dari ketiga pelaku mobilitas walaupun berbeda, namun dirasakan sama nikmatnya, ibarat daun sirih yang berbeda warna kedua sisinya, namun kalau dikunyah sama rasanya.

Imigran menetap sekalipun telah lama menetap di daerah lain, namun tetap mempunyai hubungan emosional yang erat dengan daerah asalnya. Ikatan yang bersifat kultural ini disebabkan karena famili dekat terutama ayah dan ibu masih berada di daerah asal, di samping masih adanya ikatan lain seperti kebiasaan *nyadran*, lebaran dan pemilikan lahan. Selagi aset ini masih dimiliki

iki oleh migran, maka intensitas hubungan migran dengan daerah asal sangat tinggi. Hal ini berarti remitan baik dalam bentuk uang, barang dan jasa juga besar. Eksistensi orang tua di daerah asal memegang peran yang penting dalam hubungan antara migran dengan daerah asal. Tetapi kalau orang tuanya telah tiada, maka intensitas hubungan antara migran dengan daerah asal menjadi surut. Hal ini berarti bahwa remitan yang menyertainya juga mengalami penurunan. Turunnya remitan ini menjadi nol, kalau migran sendiri telah meninggal dunia. Anak keturunan migran di daerah tujuan (-menurut konsep demografi mereka bukan lagi disebut migran-) jarang berhubungan dengan daerah asal. Pada saat ini tidak ada remitan lagi.

Bantuan migran kepada masyarakat daerah asal tidak hanya berhenti remitan, tetapi juga dalam bentuk yang lain. Migran di daerah tujuan amat sering menjadi tempat *jujukan*, tidak hanya terbatas pada kerabatnya tetapi juga tetangga bahkan masyarakat luas di desa asalnya untuk mencari pekerjaan. Lebih-lebih pada waktu migran pulang ke desa, akan mengajak beberapa orang pada waktu kembali ke kota. Mereka tinggal di rumah migran untuk beberapa hari sampai memperoleh pekerjaan yang diharapkan. Bantuan migran menanggung makan, minum, tempat tinggal, dan mencarikan pekerjaan merupakan bantuan yang amat besar bagi masyarakat di daerah asal. Fenomena ini juga terjadi pada penduduk yang *beboro*.

Hasil pengamatan kami menunjukkan bahwa, perilaku penduduk yang *beboro* tidak ubahnya seekor semut yang keluar dari liangnya untuk mencari makan. Apabila makanan telah diperoleh, maka akan diseret masuk ke dalam liangnya. Namun apabila makanan yang ditemukan begitu banyak, ia akan kembali lagi masuk ke dalam liangnya memanggil semut-semut lain. Mereka berbaris secara teratur mengikuti semut pemandu menuju pusat makanan. Semut-semut itu secara heramai-ramai mengangkut makanan masuk ke dalam liang kemhali.

Remitan yang di bawa ke daerah asal dapat diduga lebih besar dari migran menetap. Hal ini disebabkan seluruh pendapatan mereka di daerah tujuan dibawa pulang, dipergunakan untuk

memenuhi keperluan hidup bersama keluarga. Di samping itu remitan yang dibawa atau dikirim pulang lebih teratur daripada migran menetap. Sedangkan remitan dari migran menetap bersifat insidental yaitu pada saat keluarga di desa mempunyai kerja, menerima musibah, membayar SPP dan waktu mudik pada hari raya.

Para penglaju mempunyai karakteristik remitan yang berbeda dibanding dengan kedua jenis pelaku mobilitas di atas. Pada dasarnya mereka adalah penduduk suatu daerah yang pada pagi hari pergi mencari nafkah ke daerah lain dan kembali pulang pada hari itu juga. Perilaku para *penglaju* mirip seekor burung yang terbang keluar dari sarangnya untuk mencari biji-bijian atau serangga. Apabila telah diperoleh, akan diterbangkan pulang kesarangnya untuk menyuapi anak-anaknya. Para *penglaju*, umumnya adalah para pedagang, buruh bangunan, karyawan perusahaan atau pegawai negeri, baik sipil atau militer. Pendapatan yang diperoleh bersifat harian, mingguan atau bulanan, bergantung kepada jenis dan sifat pekerjaan. Dewasa ini kecenderungan *penglaju* semakin tinggi karena kelancaran transportasi.

Sudibia (1985) pernah mengadakan penelitian terhadap perilaku pengiriman uang oleh migran menetap, *beboro* dan *penglaju*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada besarnya pengiriman uang antara ketiga pelaku mobilitas tersebut. Jumlah pengiriman uang dari migran menetap dalam waktu tertentu paling rendah, kemudian diikuti oleh pelaku *beboro* dan *penglaju* yang tertinggi. Walaupun penelitian Sudibia dilaksanakan di Bali, namun mudah diduga bahwa hal ini juga berlaku untuk daerah lain termasuk di Jawa.

KEPUTUSAN BERMIGRASI

Besarnya remitan yang dikirim ke daerah asal menurut Stahl (1981: 899) bergantung kepada pendapatan migran, porsi pendapatan yang dikirim dan banyaknya penduduk yang meninggalkan daerahnya. Yang terakhir ini selain berkorelasi positif dengan remitan, juga menurut Standing (1981: 6) berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan suatu daerah. Makin miskin suatu daerah, makin banyak penduduk yang meninggalkan daerahnya

makin besar pula uang yang dikirim ke daerah asal.

Keputusan seseorang untuk melakukan mobilitas menetap, *beboro* atau *nglaju*, lebih berdasar pada pertimbangan ekonomi, yaitu perbandingan besarnya pendapatan yang diperoleh di desa dengan kemungkinan besarnya pendapatan yang bakal diperoleh kalau mereka bekerja di kota. Sebuah keluarga dapat memaksimalkan pendapatannya dengan menga-lokasikan sejumlah tenaga kerja di kota sebesar $A - X$, dan di desa sebesar $B - X$. Dengan demikian total_pendapatan keluarga sebesar SZVAB. Dalam keadaan seperti ini sejumlah tenaga kerja sebanyak $B - X$ akan melakukan *beboro*. Namun kalau harapan untuk mendapatkan tambahan pendapatan di kota sangat kecil bahkan nihil, maka pendapatan keluarga hanya sebesar ABWT.

Dalam keadaan seperti ini tidak ada tenaga kerja keluarga yang ditugasi untuk bekerja di kota. Sebaliknya kalau pendapatan di desa sangat kecil sedangkan harapan memperoleh penghasilan di kota sangat besar, maka pendapatan keluarga tersebut sebesar BCVA. Dalam keadaan seperti kemungkinan keluarga tersebut akan meninggalkan desanya untuk menetap di kota. Namun dalam aplikasinya masih banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan salah satu dari empat pilihan: tetap tinggal di desa, menjadi *penglaju*, *beboro*, atau pindah di kota.

REMITAN KE DAERAH ASAL

Besarnya uang yang dikirim ke daerah asal kalau dilihat dari waktu pengiriman sepanjang tahun sangat bervariasi. Hasil penelitian kami (Sunarto, 1991) di daerah Gunung Kidul menunjukkan bahwa puncak pengiriman uang ke daerah asal pada Idul Fitri dan paling rendah pada saat panen *rendhengan* sekitar bulan Maret-April. Pengiriman uang baik lewat Bank maupun Kantor Pos mulai naik pada awal bulan Puasa dan mencapai puncaknya beberapa hari menjelang lebaran. Pada saat itu volume peredaran uang di daerah asal migran naik dengan pesat, dan mencapai puncaknya pada Idul Fitri saat para migran mudik.

Sebagai gambaran kasar untuk Kabupaten Gunung Kidul tiap Idul Fitri paling tidak kurang lebih 50.000 orang yang mudik. Ka-

lau masing-masing membawa uang Rp 250.000,- berarti ada Rp 12,5 milyar masuk ke Gunung Kidul. Selain itu menurut penelitian kami pada tahun 1990, rata-rata tiap 8 keluarga ada seorang yang *beboru*. Kalau gambaran ini masih berlaku pada saat ini berarti pelaku *beboru* dari Gunung Kidul tidak kurang dari 17.400 orang. Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan mereka sebesar Rp 40.500,-/bulan atau Rp 486.000,-/tahun. Hal ini berarti bahwa uang masuk ke Gunung Kidul dari pelaku *beboru* sebesar Rp 8,5 milyar per tahun. Di samping itu, menurut catatan BAPPEDA Kabupaten Gunung Kidul wesel yang masuk dari luar daerah tahun 1994 sebesar Rp 2,2 milyar, sedangkan wesel keluar sebesar Rp 422 juta. Dengan demikian terdapat saldo positif sebesar Rp 1,8 milyar. Nilai transfer uang bersih (uang masuk dikurangi uang keluar) sebesar Rp 12,4 milyar pada tahun yang sama. Kalau setengah nilai transfer ini berasal dari migran, berarti sebesar Rp 6,2 milyar. Hal ini berarti jumlah uang masuk ke Gunung Kidul dari pemudik, pelaku *beboru*, transfer dan wesel akan mencapai lebih dari Rp 29 milyar per tahun. Jumlah ini tentu amat besar bagi daerah Gunung Kidul yang dikenal. Jumlah ini belum diperhitungkan kiriman uang lewat kawan atau famili yang sedang pulang, remitan berupa barang dan uang yang dibawa migran pada waktu berkunjung secara insidental. Padahal APBD tahun 1994/1995 ditargetkan hanya sebesar Rp 19,6 milyar. Hal ini berarti bahwa uang yang masuk ke Gunung Kidul jauh lebih besar dari target APBD. Dengan demikian jelaslah bahwa ketiga pelaku mobilitas penduduk mempunyai dampak positif yaitu memperbesar volume peredaran uang di daerah asal. Remitan ibarat air kehidupan yang mengalir membasahi tanah kering dan tidak pernah berhenti sepanjang tahun.

DAMPAK MOBILITAS PENDUDUK TERHADAP DAERAH ASAL

Amin Samir menulis bahwa tidak ada satu daerahpun yang dapat berkembang dengan adanya transfer uang dari migran. Yang terjadi justru sebaliknya yaitu pemberian dari daerah miskin kepada daerah kaya, karena orang-orang yang terpilih dari daerah miskin meninggalkan daerahnya menuju ke daerah yang sudah

maju. (Amin Samir, dalam Connell, et.al., 1980). Pendapat Samir yang berdasar pada hasil penelitiannya di Afrika ini, untuk Indonesia tidaklah benar. Naim (1979) misalnya mengatakan, bahwa peran perantau terhadap pembangunan Sumatera Barat sangat besar.

Bahkan dengan tegas dikatakan bahwa ranah Minang dibangun oleh para perantau. Begitu pula di Wonogiri, pemilik perusahaan bus antar kota dan antar propinsi didominasi oleh putra daerah yang semula *beboro* di Jakarta. Penelitian Mantra di Ngawi juga menunjukkan hal yang sama, yaitu besarnya peran migran terhadap pembangunan desa asal (Mantra, 1988).

Hasil penelitian kami juga memperkuat hasil penelitian terdahulu yaitu besarnya peran remitan terhadap keluarga dan daerah asal (Sunarto, 1991) :

1. Remitan memperkecil tekanan penduduk terhadap lahan.
2. Tekanan penduduk terhadap lahan = 1, berarti lahan tersebut tepat tidak ada tekanan; kalau kurang dari 1, berarti di lahan tersebut masih dapat menerima sejumlah penduduk baru, dan kalau lebih dari 1 berarti bahwa di lahan tersebut sudah melebihi kapasitas. Sebelum remitan diperhitungkan besarnya tekanan penduduk terhadap lahan di kecamatan Paliyan, Gunung Kidul adalah 6,31. Namun setelah remitan diperhitungkan angka ini turun menjadi 2,43.
3. Remitan memperbaiki kesenjangan pembagian pendapatan masyarakat daerah asal. Pembagian pendapatan dicerminkan oleh besarnya nilai Gini. Nilai Gini = 0 berarti terdapat pemerataan pendapatan secara sempurna. Besarnya nilai Gini untuk masyarakat non migran = 0,39 sedangkan setelah remitan diperhitungkan turun menjadi 0,21.
4. Remitan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.
5. Remitan tidak hanya dipergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi juga keperluan yang lain seperti alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga, alat transportasi, kebutuhan sosial, keagamaan, bahkan alat kosmetika. Di samping itu juga untuk tabungan jangka panjang seperti membeli ternak, lahan pertanian dan biaya pendidikan.

6. Remitan membantu pembangunan fisik desa

Organisasi kedaerahan yang berkembang di kota-kota besar sekarang ini, sekalipun mengandung unsur primordialisme, tetapi merupakan medium yang baik untuk menjembatani masyarakat daerah asal dengan migran di kota. Lewat organisasi kedaerahan pengumpulan dana untuk membiayai suatu program desa, misalnya mendirikan balai dusun atau balai desa, masjid, pengerasan jalan, dapat berjalan lebih efektif. Bahkan di suatu desa di Gunung Kidul telah berdiri koperasi simpan pinjam yang seluruh modalnya berasal dari beberapa migran di Jakarta. Syarat peminjaman adalah untuk usaha yang bersifat produktif. Hal ini berarti bahwa migran secara tidak langsung membantu menciptakan lapangan pekerjaan di desa asalnya.

SARAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH ASAL MIGRAN

Tidak diragukan lagi bahwa pelaku mobilitas penduduk mempunyai sumbangan yang besar terhadap pembangunan di desa asalnya. Lewat remitan volume peredaran uang di desa meningkat, serta dapat dipergunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Sebenarnya jumlah uang yang dikirimkan ke kampung halaman dapat ditingkatkan serta penggunaannya dapat diarahkan pada usaha yang produktif. Untuk mengoptimalkan pengiriman uang ke daerah asal perlu pendekatan sosiokultural. Pejabat teras tingkat kabupaten, kecamatan, atau kepala desa perlu sering mengadakan kunjungan kepada tokoh-tokoh migran yang terbukti telah berhasil menjadi "orang" di kota-kota besar, atau berkunjung kepada pengurus organisasi kedaerahan untuk bersilaturahmi. Kegiatan ini perlu ditindaklanjuti dengan pertemuan di daerah asal migran yang dilaksanakan oleh Bupati, Camat atau Kepala Desa. Kiranya waktu yang paling tepat adalah saat migran mudik pada Idul Fitri, sekaligus untuk melestarikan tradisi halal-bihalal. Pada saat ini perlu ditekankan pentingnya memelihara hubungan dengan masyarakat daerah asal, terutama bantuan keuangan untuk biaya pendidikan dan penciptaan lapangan kerja baru. Seandainya tiap desa dapat dirintis berdirinya sebuah koperasi simpan pinjam yang seluruh modal-

nya berasal dari para migran, berarti mereka telah berjasa turut membangun desanya sendiri.

PENUTUP

Sebagai penutup pidato ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor/Ketua Senat IKIP Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengucapkan pidato pengukuhan Guru Besar. Saya memohon maaf atas keterlambatan mengucapkan pidato ini.

Kepada Presiden Republik Indonesia saya menghaturkan banyak terima kasih yang telah memberikan kepercayaan dan mengangkat saya dalam jabatan Guru Besar Madya.

Kepada guru-guru saya sejak SD sampai Perguruan Tinggi saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi diri saya.

Kepada Bapak Prof. Drs. RH. Bintarto, Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Bapak Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. yang telah berkenan membimbing penulisan disertasi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, yang telah memberi kesempatan sehingga saya dapat mengikuti program pendidikan S2 dan S3.

Kepada Bapak Prof. Dr. H. Umar Kayam dan Bapak Prof. Dr. Clark E. Cunningham guru saya di Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial di Ujung Pandang saya mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Koentiaraningrat dan Bapak Prof Dr. Selo Sumardjan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti program Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial angkatan pertama di Ujung Pandang.

Kepada Bapak Prof. Dr. Masri Singarimbun dan Bapak Prof. Dr. H. Sofian Effendi, mantan Direktur Pusat Penelitian Kependudukan saya mengucapkan terima kasih atas semua fasilitas dan bantuan finansial selama saya menyusun disertasi.

Kepada Bapak Prof. Drs. St. Vembriarto almarhum, mantan Rektor IKIP Yogyakarta, saya mengucapkan banyak terima kasih

yang telah memberikan ijin kepada saya untuk melanjutkan pendidikan ke program S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada .

Kepada kawan-kawan di Jurusan Pendidikan Geografi khususnya dan FPIPS IKIP Yogyakarta pada umumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini.

Kepada Bapak Harjosupadmo, ayah saya almarhum, dan Ibu saya Hj. Surati Harjosupadmo, saya menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga yang dengan gigih menjadikan anaknya, seorang penggembala kerbau dan pencari rumput menjadi Guru Besar yang bergelar Doktor.

Kepada keempat putri saya tersayang, Nunung, Rita, Dhani, Nana dan isteri saya tercinta saya mengucapkan terima kasih yang dengan penuh pengertian mendampingi saya dalam suka dan duka. Begitu pula kepada Bapak Wongsoutomo, ayah mertua almarhum, dan Ibu mertua, saya mengucapkan banyak terima kasih atas nasehat dan bimbingannya. Pada akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Senat, para anggota senat dan para hadirin yang telah sudi meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk menghadiri dan menden-garkan pidato pengukuhan Guru Besar saya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Juli 1995

REFERENSI

- Connell, J., Biplab Dasgupta, Ray Laishley, Michael Lipton. 1976. *Migrasiotz From Rura! Areas, Studies of Internal Migration*, London: Methuen.
- Curson, P. 1981. Remittances and Migration: the Commerce of Movement, *Journal of Population Geography*, Vol. 3, Number 1 and 2, June-December 1981.
- Gould W.T.S. & R.M. Prothero. 1974. Space and Time in African Population Mobility dalam *People on the Mov*, Great Britain: Methuen & Co Ltd.
- Gunung Kidul, Kabupaten Dati II 1994. Beberapa Informasi Pembangunan, BAPPEDA.
- Indonesia. 1994. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia* Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Junus, M. 1967. *Quran Karim dan Terjernahan Maknanya*, Bandung: PT. Al Maarief.
- Koentjaraningrat. 1989. Keluarga Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, *KOMPAS*, 10 September.

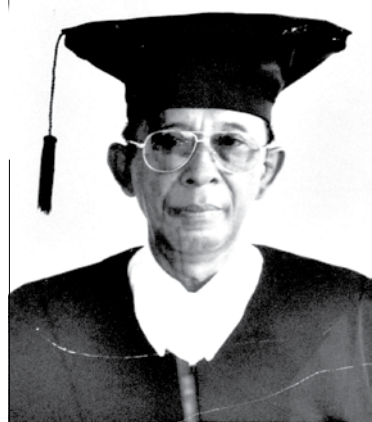
- Lee, E.S. 1966. A Theory of Migration, *Demography*, Volume 3, Number 1.
- Mantra. I.B. 1988. Population Mobility and the Link Between Migrants and the Family Back Home in Ngawis Village, Gunung Kidul Regency. Yogyakarta Special Region, *the Indonesian Journal of Geography*, vol. 18, Number 55, June 1988.
- Naim, M. 1979. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau* Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Petersen, W. 1958. A General Typology of Migration *AM, Social Review*.
- Prior, R.J. 1974. Migration and the Process of Modernization, dalam *People on the Move*, Great Britain: Methuen & Co Ltd.
- Standing, G. 1981. *Migration and the Labour Process for Migration Survey*, Geneva : International Labour Office.
- Stahl, C. W., Fred Arnold. 1988. Overseas Workers Remittances in Asian. Development, *International Migration Review*, Volume XX No. 4, Honolulu: East-West Center.
- Sudibia, I.K. 1985. *Mobilitas Penduduk dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Rumah Hingga Migran di Daerah Asal: Sebuah Studi Kasus di Desa Mengwi, Kabupaten Badung, Bali*, Tesis Sarjana Utama, Yogyakarta : Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Sunarto Hs. 1991. *Dampak Migrasi Sirkuler terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Migran dan Daerah Asal*, Disertasi Universitas Gadjah Mada.
- Titus, M.J. 1978. *Interregional Migration in Indonesia As A Reflection Social and Regional Inequalities*, Utrecht: Royal Dutch Geographical Society.
- Today, M.P. 1980. *Ecotonic for a Developing World, an Introduction to Principles, Problems, and Policies*, Hongkong: Longman.
- United Nations. 1984. *Population Distribution, Migration, and Development*, Department of International Economic and Social Affairs.
- World Population Data Sheet*. 1994. Washington: Population Reference Bureau Inc.
- Zelinsky, W. 1971. The Hypothesis of the Mobility Transition, *Geographical Review*, Number 2.

SUMBANGAN PENDIDIKAN GEOGRAFI DALAM PEMBENTUKAN MANUSIA BERWAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

Disampaikan di depan Rapat Senat Terbuka IKIP YOGYAKARTA
pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 1996

**PROF. DRs. R. IMAN SUJAGAD
SALEH**

Guru Besar Pendidikan Geografi
Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
IKIP YOGYAKARTA



SUMBANGAN PENDIDIKAN GEOGRAFI DALAM PEMBENTUKAN MANUSIA BERWAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam rumusan GBHN adalah : (1) bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dan (2) mewujudkan “*er*nmanusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Oleh karena itu rumusan tujuan pendidikan pada jenjang institusional, kurikuler, dan instruksional harus mengacu dan pada gilirannya harus bermuara pada tujuan pendidikan nasional tersebut.

Pendidikan Geografi bersama-sama pendidikan lainnya, berkedudukan dan berperan menciptakan serta membina warga negara Indonesia yang berwatak, berkepribadian, cerdas dan berkemampuan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini merupakan tugas yang utama dan mulia bagi pendidikan Geografi dan juga merupakan tantangan yang harus dan mampu melaksanakannya. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya dengan sikap yang terbuka untuk menjawab tantangan tersebut.

KONDISI OBJEKTIF GEOGRAFI INDONESIA

1. Letak

Kepulauan Indonesia terletak antara dua benua, yaitu Asia dan benua Australia, dan antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Indonesia. Posisi silang ini tentu saja sangat mempengaruhi iklim dan sifat-sifat oseanologi lautan Indonesia (Apriliani Soegiarto, 1982). Secara geografis kepulauan Indonesia terletak pada 94° - 141° bujur timur dan 6° lintang utara sampai 11° lintang selatan, jadi membujur di sepanjang katulistiwa (tropik). Karena perairan Indonesia terletak di daerah tropik maka hampir sepanjang tahun suhu lapisan permukaan tinggi, berkisar antara 26° dan 30° C. Sifat ini biasanya juga bersamaan dengan adanya sifat yang lain. Sifat ini mengakibatkan terjadinya pemisahan yang bersifat kekal antara lapisan air permukaan dengan lapisan

di bawahnya. Karena adanya pemisahan lapisan yang kekal tadi maka pada umumnya perairan tropik kurang subur bila dibandingkan dengan perairan daerah sub tropik atau daerah dingin.

Karena letak Indonesia dipisahkan oleh suatu perairan maka Indonesia sangat dipengaruhi oleh iklim muson sehingga dapat kita kenali adanya :

- a. musim barat (Desember - Maret),
- b. musim timur (Juni - Agustus), dan
- c. dua musim pancaroba/peralihan (April - Juni dan September - November)

Musim-musim ini mempengaruhi sifat-sifat laut secara nyata, misalnya pada musim barat :

- a. arus mengalir dari barat ke arah timur;
- b. bagian barat Indonesia curah hujan tinggi, sehingga kadar garam menjadi rendah, angin kencang, ombak besar;
- c. Ikan-ikan yang suka pada kadar garam tinggi bermuara ke timur atau ke lapisan bawah dan sebaliknya pada musim timur.

Dari prinsip ekologi sudah dapat diduga bahwa kita tidak dapat meniru sistem pengembangan dan pengelolaan sumber daya perairan seperti yang biasa terdapat di perairan dingin, tetapi memang memerlukan pengetahuan biologi dan faktor-faktor kimia serta fisik yang lebih banyak. Justru kelemahan kita pada waktu ini adalah belum tersedianya data yang cukup untuk mendasari sistem pengembangan dan pengelolaan ekosistem tropis semacam ini (Apriliani Soegiarto, 1982).

Apabila hal ini dilihat dari sudut pandangan strategi ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia terutama dalam menghadapi abad ke 21, hal tersebut dapat merupakan salah satu kajian strategis yang akan memegang peranan dalam kegiatan pembinaan wilayah. Satu kesadaran maritime hendaknya dapat ditumbuhkan dalam pendidikan awal setiap warga negara Indonesia, dalam rangka menumbuhkan kesadaran Wawasan Nusantara (Mattulada, 1982).

BENTUK

Negara Indonesia merupakan negara maritim kepulauan begitu luas lautnya dan begitu banyak pulaunya, tentu mengandalkan kegiatan dan perkembangan ekonominya pada perhubungan laut dalam bidang angkutan maupun komunikasi. Berkembangnya ekonomi Indonesia mengakibatkan meningkatnya tuntutan service perhubungan laut. Walaupun perhubungan udara semakin meningkat dalam jumlah maupun mutu, tetapi perhubungan laut akan tetap mempunyai peranan dan pengaruh penting dalam menunjang pembangunan Indonesia.

Dari survei geologi yang dilakukan di dasar laut dan di laut dalam, laut diduga banyak mengandung endapan hidrokarbon yang cukup luas di mana pada daerah-daerah tertentu diduga terdapat ladang-ladang minyak dan gas, dan hasil mineral lainnya seperti emas, nikel, timah, pasir besi, dan lain-lainnya.

Peranan laut dalam bidang keamanan dan pertahanan bagi Indonesia tidak hanya merupakan garis terdepan menghadapi ancaman dari luar, akan tetapi juga merupakan penghubung dalam menjalin kekuatan dan kesatuan bangsa. Lebih-lebih letak Indonesia dalam rangkaian Asia-Australia serta samudera Indonesia-Pasifik, akan banyak memberi arti bagi Indonesia dalam peredaran ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan.

Akhirnya aspek penting yang merupakan kebutuhan akan pengembangan dan pengelolaan laut adalah penyediaan man power dan skill, kebutuhan bidang-bidang penelitian dan pengembangan serta penyediaan tenaga kerja yang mampu memberikan partisipasi ekonomis bagi perluasan kesempatan kerja.

Dari hal di atas dapat diketahui, betapa besarnya pengaruh pendidikan, antara lain pendidikan Geografi dan pendidikan tehnik kelautan terhadap kebutuhan pengembangan industri maritim.

3. Kebijakan Pemerintah

Dilihat dari segi Geografis, maka Indonesia yang memiliki 13.667 buah pulau yang terbentang dari barat ke timur, berada pada lintasan garis ekuator dengan posisi silang antara benua Asia dan Australia, dan antara samudera Indonesia dan Pasifik.

Posisi demikian menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki sifat yang khas dan yang sangat menguntungkan. Iklim yang sejuk, fauna dan flora yang beraneka ragam, laut yang terbentang luas, dan sepanjang pantai bertebaran desa-desa yang dihuni oleh penduduk Indonesia yang hidup sebagai pelaut maupun sebagai petani. Semuanya ini merupakan modal dasar bagi bangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menyadari akan kenyataan-kenyataan ini, dipandang perlu pemerintah mengambil kebijakan tertentu antara lain berupa:

a. Pembinaan dan pengembangan desa pantai

Diperkirakan masih banyak desa pantai yang belum sempat terjamah pembangunan dan masih sulit dicapai, baik darat maupun dari laut. Sudah sewajarnya demi pemerataan usaha pembangunan, bahwa desa-desa tersebut mulai dapat dibina dan dikembangkan. Di dalam usaha pembinaan dan pengembangan desa pantai ini, perlu dititipkan beberapa peranan tambahan, disamping peranan utama mereka masing-masing. Peranan tambahan ini antara.

- 1) sebagai pengamanan pantai, baik dari segi ekonomi (penyelundupan) maupun politik, dan hankamnas (subversi, infiltrasi, dan lain-lain).
- 2) sebagai pelindung dan pengelola pantai, misalnya dari kerusakan-kerusakan baik secara alami (menyampaikan laporan bila ada gelombang pasang, gempa bumi, dan lain-lain) ataupun sebagai akibat ulah manusia.

Untuk melaksanakan peranan tambahan tersebut diperlukan suatu perangkat/piranti yaitu komunikasi modern (Apriliani Soegiarto, 1982).

b. Pemanfaatan tanah untuk perluasan areal pertanian

Telah kita ketahui bersama bahwa pemilikan tanah untuk usaha pertanian, harus didasarkan pada kelas, kesesuaian tanah yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan suatu kriteria yang telah ditentukan. Keadaan lereng dan topografi merupakan kriteria utama memilih tanah kering untuk dijadikan usaha pertanian. Berdasarkan kelas kemiringan tersebut, maka daerah yang

diprioritaskan untuk budidaya pertanian pangan adalah daerah datar (0-3%), sedangkan daerah berombak (3-8%) pada dasarnya untuk tanaman pangan dan atau peternakan, atau *mixed farming* dengan memperhatikan pencegahan erosi dan prinsip-prinsip konservasi tanah.

Di Jawa dan Madura tanah yang sesuai untuk usaha pertanian, luasnya hanya 5 juta hektar, padahal yang sudah dikerjakan telah mencapai sekitar 8 juta hektar. Hal ini berarti bahwa ada tanah seluas 3 juta hektar yang sebenarnya tidak sesuai untuk usaha pertanian tetapi telah digunakan.

Perluasan ini tentunya dengan mengorbankan luasan areal kehutanan di wilayah yang bersangkutan. Mengapa hal demikian dapat terjadi, yaitu karena masalah peledakan penduduk di Jawa yang haus akan tanah garapan.

Dengan demikian usaha-usaha perluasan areal pertanian atau ekstensifikasi pertanian harus menuju ke luar Jawa. Masalah perluasan areal pertanian dalam peningkatan produksi pangan dan yang dikaitkan pula dengan program transmigrasi atau pemukiman jelas merupakan kancah permasalahan karena bukan saja menyangkut masalah- masalah teknik saja, tetapi dan biasanya juga yang paling rumit adalah masalah sosio-ekonomis (Koswara, 1982).

c. Pengarahan kurikulum

Pengarahan kurikulum pendidikan Geografi untuk penguasaan ilmu Geografi dan pengarahan untuk lebih rasa cinta tanah air yaitu dengan mengetahui dan memahami aspek-aspek Geografi di Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal Taman Mini Indonesia Indah? Siapa saja bangsa Indonesia yang telah mengunjungi pasti akan menyadari betapa besar, luas, dan kayanya budaya Indonesia. Pengaruh yang positif pada setiap insan Indonesia adalah timbulnya kebanggaan terhadap negaranya, kemudian rasa ingin mengabdikan, memelihara, mempelajarinya lebih dalam lagi, atau mungkin dapat kita rumuskan dalam bahasa yang lebih umum yaitu timbulnya kecintaan terhadap tanah air, Indonesia. Seseorang akan dapat

menekuni dan mempelajari sesuatu dengan sungguh-sungguh apabila dilandasi oleh rasa cinta terhadap apa yang sedang ia pelajari. Motivasi dan semangat saja nampaknya belum cukup untuk menjamin tercapainya dengan optimal sesuatu yang dipelajari apabila tidak disertai dengan rasa menyenangkan dan mencintai.

Demikian pula untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan alam (Geografi), seperti bahan-bahan yang membentuk bumi, proses-proses yang bekerja serta sejarah perkembangan bumi, dimana kita berada, memerlukan atau harus dilandasi dengan cinta terhadap alam. Rasa cinta terhadap alam sekitar, sebenarnya telah dirintis dan dipupuk sejak anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui rekreasi atau kerja lapangan, berdarmawisata ke luar kota, ke pegunungan dengan kegiatan-kegiatan yang berupa lintas alam, kepramukaan, dan sebagainya. Apabila kita kaitkan dengan kehadiran Taman Mini Indonesia Indah, maka yang penting adalah untuk menanamkan cinta itu perlu tersedianya sarana Dalam hal ini seseorang tidak perlu berkeliling keseluruhan Indonesia, tetapi sudah cukup terwakili oleh hadirnya, Taman Mini Indonesia Indah tersebut berikut segala perangkat sarana yang ada di dalamnya, meskipun tidak akan selengkap kenyataannya.

Demikian pula dengan bumi dan alam sekitarnya, yang jauh lebih luas dan kompleks daripada Indonesia. Untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air diperlukan suatu sarana, meskipun jelas tidak mungkin lengkap dan mewakili seluruhnya, tetapi sudah cukup baik untuk meningkatkan rasa cintanya terhadap alam, yang benih-benihnya telah ditanamkan sejak kanak-kanak (Sukendar Asikin, 1989).

Batuan-batuan yang hanya terbentuk dan dijumpai pada dasar-dasar samudera, seperti batuan beku basalt dengan endapan-endapan laut dalam, tersingkap atau terlihat di daerah Luk Ulo, sebagai akibat terjadinya tumbukan dengan kerak bumi. Batuan yang termasuk langka di atas muka bumi, dapat diamati dan dipelajari. Komposisi dan tatanan struktur geologi akibat tumbukan lempeng, yang sekarang hanya dapat dijumpai dalam palung-palung laut yang dalam, dapat dilihat dan dipelajari di daerah Luk Ulo.

SUMBANGAN PENDIDIKAN GEOGRAFI

1. Sejarah singkat perkembangan Geografi

Istilah untuk pengertian Geografi pada zaman kolonial disesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda ketika itu, yaitu dengan sebutan *aardrijkskunde* di sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda dan Ilmu Bumi di sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia (Bahasa Melayu).

Dari kurikulum sekolah sejak masa kemerdekaan sebutan Geografi baru mulai dipakai pada Kurikulum 1975. Selain peristilahan, lingkup telaah Geografi di sekolah masa lalu juga pada mulanya disesuaikan dengan yang biasa dikenal di negeri Belanda pada khususnya dan di Eropa pada umumnya. Di negeri Belanda pada awal abad 19, Geografi masih kurang mendapat tempat, meskipun di benua baru Amerika sejak abad 17 konon Geografi telah diajarkan di sekolah dan menjadi pengetahuan prasyarat untuk masuk perguruan tinggi. Kemudian hampir semua sekolah memberikan pengetahuan umum tentang letak tempat-tempat di dalam negeri dan di luar negeri. Hal yang demikian ini ada kaitan dengan perkembangan kekuasaan negara-negara penjajah yang menaklukkan daerah-daerah di seberang lautan.

Perhatian pada Geografi yang makin meluas telah menjadikan Geografi secara umum sebagai mata ajaran di sekolah-sekolah, bahkan kemudian juga sebagai mata kuliah di perguruan tinggi di Eropa. Universitas Oxford termasuk salah satu perintis yang mulai memberikan Geografi sebagai mata pelajaran di perguruan tinggi (Suharyono, 1994). Di Indonesia program pendidikan Geografi di perguruan tinggi mulai diselenggarakan pada Universitas Gadjah Mada pada awal tahun 1950-an, disusul kemudian juga di Jakarta. Sementara itu juga diselenggarakan program pendidikan guru Geografi pada tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk Kursus B-I Ilmu Bumi dan Kursus B-II Ilmu Bumi.

Dalam hal keterampilan pendidikan Geografi sangat besar pengaruhnya termasuk pengamatan (*observasi*) baik langsung maupun tidak langsung, yang diikuti dengan pencatatan yang hasilnya menjadikan dasar untuk membuat penafsiran atau interpretasi.

2. Geografi sebagai bahan ajaran di sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi.

Materi Geografi dan pengajaran Geografi dengan segala perangkatnya dirumuskan dalam kurikulum pengajaran Geografi. Secara wajar, kurikulum pengajaran Geografi, seyogyanya disusun secara integral-berkesinambungan mulai dari tingkat Prasekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai ke Perguruan Tinggi. Melalui perancangan, perhatian, dan kesinambungan berfikir tidak terputus, pengulangan serta tumpang tindih materi yang tidak perlu, dapat dihindarkan.

Sebagai awalan, di tingkat TK ditentukan konsep esensial apa yang akan dikembangkan. Selanjutnya konsep tersebut dikembangkan, diperkaya dan ditambah oleh konsep esensial baru ditingkat SD. Demikian seterusnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

3. Fungsi dan tujuan pengajaran Geografi di sekolah

Fungsi program pengajaran Geografi ialah mengembangkan sikap rasional dan bertanggung jawab dalam menghadapi gejala geosfer dan permasalahan yang timbul sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya.

Tujuan pengajaran Geografi adalah agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan berfikir analitis Geografis dalam memahami gejala geosfer, memupuk rasa cinta pada tanah air, menghargai keberadaan negara lain, dan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya.

Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia dewasa ini hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tersebut menyangkut aspek mental-spiritual, fisik-material, dan bahkan kewilayahan nusantara. Geografi dan pengajaran Geografi dengan nilai-nilainya memiliki kemampuan pembangunan mental spiritual anak didik yang mempelajari. Geografi dan pengajaran Geografi yang membahas tata ruang di permukaan bumi mampu mengembangkan citra or-

ganisasi keruangan bagi yang mempelajarinya. Citra keruangan ini memberikan landasan pemikiran tentang bagaimana pembangunan fisik seharusnya ditata sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan (UU No 4 1982).

Ungkapan pembangunan seluruh masyarakat, berarti pembangunan yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah nusantara. Sesuai dengan asas pemerataan dan keadilan, pada pelaksanaan tersebut harus menerapkan pendekatan regional. Geografi dan pengajaran Geografi berperan mengembangkan citra regional dan ketidak-merataan regional. Dengan demikian menanamkan kesadaran pembangunan kepada semua warga masyarakat termasuk anak didik di sekolah-sekolah, harus ditanamkan juga citra regional dan ketidakmerataan regional yang menjadi landasan bagaimana pembangunan itu harus dilaksanakan di nusantara yang luas ini.

Melalui proses ini, warga masyarakat, khususnya anak didik di sekolah-sekolah akan memahami hakikat pembangunan dan bagaimana pembangunan itu wajib dilaksanakan sesuai dengan hakikatnya. Dengan memperhatikan peranan dan pengaruh pengajaran Geografi dalam pendidikan kependudukan, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan pembangunan, dan pencapaian tujuan pengajaran Geografi sendiri, kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang kedudukan serta peranan dan pengaruh pengajaran Geografi dalam Pendidikan Nasional.

4. Posisi Geografi dalam ilmu-ilmu pengetahuan lain yang berkaitan.

Dalam Geografi terdapat tiga sistem yang utama yaitu: a) sistem keruangan, b) sistem ekologi, dan c) sistem kompleks kawasan. Sistem ini sangat erat dan besar pengaruhnya terhadap gerakan penduduk, kegiatan penduduk, dan pemukiman. Perpindahan penduduk dan interaksi sosial mempunyai kaitan dengan kepadatan, dispersi, dan pola dalam ruang dimuka bumi. Persediaan ruang yang cukup dimuka bumi ini dapat memenuhi keinginan manusia dalam pengaturan penggunaan tanahnya dan sebaliknya, apabila persediaan ruang tidak mencukupi ataupun bila keadaan fisiografinya tidak memungkinkan, maka manusia

dapat dikecewakan karenanya.

Kegiatan penduduk dan kegiatan ekonomi dapat dipengaruhi oleh ekologi setempat. Pemukiman penduduk di desa-desa dan di kota-kota merupakan hasil dari jalinan kekuatan dan unsur-unsur kawasan setempat yang saling bekerja sama. Oleh karena itu dalam Geografi, keruangan, ekologi dan kompleks kawasan merupakan satu kebulatan yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan dan penghidupan (Bintarto, 1975).

Selanjutnya dikatakan oleh Bintarto (1975, 7): Geografi sebagai ilmu dan ilmu *pengetahuan tidak berdiri sendiri, tetapi juga mempunyai hubungan dengan ilmu- ilmu dan ilmu pengetahuan yang lain.*

Geografi melalui analisis keruangan, analisis ekologi, dan analisis kompleks kawasan dapat kerja sama dengan kelompok ilmu ekologi, kelompok ilmu pengetahuan bumi, kelompok pengetahuan kawasan, kelompok studi daerah, dan kelompok studi kotaldesa melalui beberapa teori dan metode yang kualitatif dan kuantitatif. Dari tiga faktor yang ada sebagai konsekuensi perkembangan struktur Geografi *integrated*, faktor keruanganlah yang menjadi ciri khas dalam Geografi.

Penggunaan unsur ruang dalam Geografi dapat diketahui dengan mempelajari beberapa teori analisis keruangan dan penerapan dari padanya. Beberapa penggunaan dan kegunaannya dapat diuraikan sebagai berikut (Bintarto, 1975 : 9).

a. gravitasi dan interaksi sosial

Analisis keruangan dengan menggunakan teori gravitasi diperlukan untuk mengukur besarnya interaksi, sehingga dapat menggambarkan potensi kontak sosial antara satu tempat dengan tempat lainnya. Hasil dari analisis ini dapat dikembangkan untuk mendukung penelitian-penelitian di bidang mobilitas penduduk.

b. *matriks dan migrasi*

Analisis keruangan yang menggunakan teori ini, penting untuk mengetahui persentase migran dan prediksi secara kuantitatif matematis dengan menggunakan *Vector probability* dan *Probability transition* yang dapat menjadi pelengkap penelitian yang

sifatnya kualitatif.

c. sistem jaringan dan konektivitas

Analisis keruangan dengan menggunakan sistem jaringan, penting untuk mengetahui besarnya derajat konektivitas antara satu tempat dengan tempat lainnya dan sifat jaringan tertentu di suatu wilayah.

d. Hal-hal lain

Hal lain yang dapat diperoleh dari analisis keruangan yang menggunakan teori sistem jaringan yaitu untuk menemukan kedudukan atau lokasi sentral dari tempat-tempat yang berada di dalam suatu sistem jaringan di suatu wilayah.

Di dalam Geografi ada dua pengertian pokok mengenai lokasi, yaitu: pertama, lokasi mutlak, yang artinya kurang lebih lokasi yang dapat ditentukan dengan posisi gejala-gejala dalam sebuah sistem grid terpisah dan kedua, lokasi nisbi, yang secara singkat dikatakan sebagai satu posisi atau kedudukan terhadap lokasi-lokasi lainnya. Lokasi ini dapat dinyatakan dalam suatu nilai yang tidak menyangkut ukuran jarak seperti biasanya.

Berbicara selanjutnya mengenai sistem jaringan dan sentralitas, maka jalur-jalur jalan sangat penting bagi kehidupan sekarang. Tempat atau kota satu dengan kota lainnya dihubungkan satu sama lain dengan menghasilkan suatu jaringan (*network*). Daerah-daerah yang memiliki kepadatan jaringan jalan yang kecil tidak akan dapat cepat maju dibandingkan dengan daerah-daerah dengan kepadatan jaringan jalan yang besar. Teori *network* ini sudah banyak diterapkan untuk keperluan pembangunan daerah terutama di negara-negara maju dan waktu ini sedang dikembangkan di negara-negara berkembang.

Sekarang bagaimana dengan mata pelajaran IPS-Geografi? Apakah IPS dengan pengertian sebagai penyederhanaan ilmu-ilmu sosial akan mampu menghadapi perkembangan mendatang dengan masalah-masalah sosial yang makin kompleks. Sementara dari segi konsepsi dan pelaksanaannya di lapangan belum pernah mantap. Dari segi konsepsi sampai sekarang masih ada hal-hal yang kurang pas. Dikatakan bahwa IPS merupakan himpunan il-

mu-ilmu yang termasuk dalam ilmu-ilmu sosial yang diseleksi, disederhanakan, dan diintegrasikan untuk kepentingan pendidikan.

Kalau hal ini rasionalnya, maka konsepsi ini nampak kabur. Karena hal itu sudah merupakan bagian dari segi didaktis dan strategi kita dalam mengajarkan sesuatu ilmu. Ilmu yang kita ajarkan memang harus kita seleksi termasuk disederhanakan, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, jadi sekalipun tidak ada nama IPS, cara mengajarkan ilmu-ilmu yang termasuk ilmu-ilmu sosial mestinya memang harus demikian. Kemudian dari istilah diintegrasikan nampak dipaksakan dan nampak sulit untuk dilaksanakan. Padahal tidak usaha demikian sebenarnya sudah lama dalam pengembangan suatu ilmu dikenal adanya pendekatan interdisipliner dan multidimensional. Ini sebenarnya sudah cukup, tinggal bagaimana pengembangnya (Sardiman, 1996).

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan pengembangan materi dan pengajaran IPS, menghadapi berbagai kendala. Pengembangan materi dan pengajaran IPS yang terpadu, masih jauh dari harapan. Sementara dilihat dari segi maksud dan tujuan dari pengajaran IPS masih cukup memprihatinkan bahkan berdampak mendangkalkan ilmu yang bersangkutan. Agar dapat menghadapi perkembangan masa datang yang serba kompleks, mata pelajaran IPS-Geografi perlu diarahkan kepada masalah-masalah sosial kemanusiaan yang lebih mendalam dan Komprehensif.

5. Kurikulum Sekolah Menengah Umum

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan guru merupakan pelaksana kurikulum di sekolah. Upaya perbaikan dalam rangka penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Umum dilakukan secara terus-menerus untuk disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa, keadaan dan kebutuhan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. Perubahan Kurikulum Sekolah Menengah umum dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berdasarkan tingkatnya, kurikulum dibagi menjadi kurikulum makro (untuk suatu jenjang sekolah), kurikulum mikro (untuk suatu bidang studi) dan kurikulum pengajaran un-

tuk suatu pokok bahasan bidana studi). Setiap kurikulum terdiri atas empat komponen, yaitu tujuan, isi atau bahan, metode atau proses belajar-mengajar, dan penilaian. (Depdikbud, 1993). Yang dimaksud dengan kurikulum dalam naskah ini adalah kurikulum mata pelajaran IPS yaitu Geografi. Berdasarkan tujuan program pengajaran Geografi telah tersusun sedemikian baiknya, namun dalam pelaksanaannya terjadilah ketimpangan. Hal ini nampak sekali bahwa sesama rumpun IPS, Geografi hanya mendapat jumlah jam pelajaran sebanyak 2 yaitu di kelas I dan di kelas II, sedangkan di kelas III tidak ada. Ekonomi mendapatkan 3 jam pelajaran di kelas I dan di kelas III. Tujuan pengajaran Geografi diantaranya adalah memupuk rasa cinta pada tanah air, sehingga dengan demikian kurikulum sekolah menengah umum belum dapat diandalkan sebagai pembentuk manusia berwawasan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya bagaimana peranan guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah?

Materi mata pelajaran IPS Geografi yang harus diberikan di sekolah menengah umum dirasa oleh hampir semua guru sangat banyak dan berat, alokasi waktu yang tersedia selalu dirasa kurang. Dengan dimasukkan pokok bahasan atau sub pokok bahasan baru, menjadikan alokasi waktu makin berkurang. Bagi siswa mata pelajaran Geografi sangat membosankan dan terasa amat kering dan lagi proses penilaian hasil belajar mata pelajaran tidak di EBTANAS kan. Dengan demikian dapat mengundang penafsiran yang kurang tepat terhadap mata pelajaran Geografi. Dengan lain perkataan seolah-olah Geografi itu hanya merupakan suatu knowledge atau pengetahuan, jika diketahui, syukur, jika tidak diketahui, tidak mengapa.

Dalam mengembangkan GBPP mata pelajaran Geografi, guru mempunyai peranan yang besar. Peranan ini berbentuk partisipasi guru dalam mengantarkan siswa, menuju tujuan yang telah ditetapkan. Agar guru dapat berperan besar dalam mencapai tujuan pendidikan, guru harus memenuhi kualitas sebagai guru yang baik. Guru yang baik ialah guru yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus untuk jabatan guru yang disebut kompetensi guru (Tisna Amidjaja, 1980), yaitu:

- 1) kompetensi pribadi, yaitu kemampuan mentransfer nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila,
- 2) kompetensi profesional, yaitu kemampuan mentransfer bidang studi yang menjadi wewenangnya,
- 3) kompetensi kemasyarakatan, yaitu kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Kompetensi profesional guru adalah kemampuan-kemampuan yang dituntut kepada seseorang yang memegang jabatan sebagai guru, yaitu tiga kompetensi tersebut di atas. Kompetensi profesional guru ini berkaitan erat dengan kemampuan guru melaksanakan kurikulum. Peningkatan kompetensi profesional guru akan meningkatkan kemampuan melaksanakan kurikulum, dan pada gilirannya nanti akan meningkatkan mutu hasil pendidikan.

BIDANG-BIDANG GEOGRAFI

Untuk dapat mempelajari Geografi secara rinci, secara garis besar Geografi dapat diklasifikasi menjadi tiga bidang, yaitu pertama Geografi Fisik (*physical geography*), kedua Geografi Manusia (*Human Geography*) dan ketiga Geografi Regional (*regional geography*) (Nursid, 1981).

1 Geografi Fisik

Yang dimaksud dengan Geografi Fisik yaitu cabang Geografi yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi, yang meliputi tanah, air, udara dengan segala prosesnya. Bidang studi Geografi Fisik adalah gejala alamiah permukaan bumi yang menjadi lingkungan hidup manusia. Dengan demikian, Geografi Fisik ini dianggap sebagai pelengkap Geografi Manusia. Kerangka kerja Geografi Fisik ditunjang oleh geologi, geomorfologi, ilmu tanah, meteorologi, dan oceanografi. Ke dalam Geografi Fisik, termasuk juga biogeografi, zoogeography, yang bidang studinya adalah penyebaran alamiah tumbuhan dan binatang sesuai dengan habitatnya.

Karena Geografi Fisik dipandang sebagai pelengkap Geografi manusia, maka pembahasan uraiannya tidak dilepaskan kaitannya dari faktor manusia yang ada di dalam alam lingkungan yang

menjadi objek studinya. Oleh karena itu, apa yang menjadi interpretasi dan analisis Geografi Fisik berbeda dengan apa yang menjadi interpretasi dan analisis geologi. Meskipun materi yang dipelajari kedua bidang tadi sama, yaitu gejala kulit bumi, tetapi penekanan interpretasi dan analisisnya berbeda. Interpretasi dan analisis studi geologi lebih ditekankan kepada gejala dan proses alamiah murni dari kulit bumi, sedangkan studi Geografi Fisik selalu dikaitkan dengan gejala manusia yang ada di dalam lingkungan alam tersebut. Pada studi Geografi Fisik, gejala dan proses alam dari kulit bumi, selalu ditinjau kaitannya dengan manusia dan kepentingan manusia. Kulit bumi ditinjau sebagai sumberdaya bagi kehidupan manusia. Pada studi Geografi Fisik, pengungkapan rahasia alam dari kulit bumi, selalu ditinjau dan dikaitkan dengan kepentingan hidup manusia.

2. Geografi Manusia

Yang dimaksud dengan Geografi Manusia adalah bidang Geografi yang bidangnya yaitu aspek ke ruang gejala di permukaan bumi, yang mengambil manusia sebagai objek studi pokok. dalam gejala manusia sebagai objek studi pokok, termasuk aspek kependudukan, aspek aktivitas yang meliputi aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas sosial, dan aktivitas budayanya.

Konsep Geografi Sosial yang biasanya disebut dengan Geografi Manusia adalah istilah yang digunakan untuk bidang Geografi Manusia yang studinya ditekankan kepada aspek keruangan dari karakteristik kependudukan, organisasi sosial, unsur kebudayaan dan kemasyarakatan. Berdasarkan pendekatan topik dan struktural dalam melakukan studi aspek kemanusiaan, Geografi Manusia terbagi-bagi lagi ke dalam disiplin: Geografi Penduduk, Geografi Ekonomi, Geografi Politik, Geografi Pemukiman dan Geografi Sosial.

a. Geografi Penduduk

Geografi Penduduk adalah disiplin Geografi Manusia yang objek studinya aspek keruangan dari penduduk. Objek studinya meliputi penyebaran, densitas, perbandingan jenis, perbandingan manusia dengan luas tanah dan lain sebagainya. Pada Geografi Penduduk, manusia dipelajari sebagai penghuni suatu wilayah,

dianalisis kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan wilayah yang ditempati, dianalisis perbandingan kuantitas dengan luas tanah yang dihuni, dianalisis penyebaran dan densitasnya dari satu wilayah ke wilayah lain dengan memperhatikan faktor lingkungan Geografi yang mempengaruhinya dan dianalisis pertumbuhannya sesuai dengan wilayah yang ditempati dan seterusnya.

b. Geografi Ekonomi

Geografi Ekonomi adalah disiplin Geografi Manusia yang bidang studinya struktur keruangan aktivitas ekonomi. Titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang termasuk ke dalamnya bidang pertanian - industri – perdagangan - transportasi - komunikasi dan lain-lain sebagainya. Dalam analisis Geografi Ekonomi, faktor lingkungan alam ditinjau sebagai faktor pendukung dan penghambat struktur aktivitas ekonomi penduduk.

Berdasarkan struktur ekonomi yang menjadi objek studinya, Geografi Ekonomi dapat diuraikan lagi menjadi: Geografi Pertanian, Geografi Industri, Geografi Perdagangan, Geografi Transportasi dan komunikasi. Dalam meninjau dan menganalisis struktur ekonominya suatu wilayah, lingkungan Geografi dijadikan dasar yang mempengaruhi perkembangan aktivitas ekonomi penduduk di wilayah yang bersangkutan.

c. Geografi Politik

Geografi Politik adalah cabang Geografi Manusia yang bidang studinya aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Dalam Geografi Politik, lingkungan Geografi dijadikan dasar perkembangan dan hubungan kenegaraan.

Bidang studi Geografi Politik cukup luas, meliputi aspek keruangan, aspek politik, aspek hubungan regional dan internasional. Faktor fisik, sosial, budaya, sejarah dan politik, dipergunakan sebagai dasar analisis Geografi Politik dalam meninjau kekuatan dan hubungan kenegaraan dan pemerintahan suatu wilayah, serta hubungannya dengan wilayah pemerintahan dan kenegaraan lainnya di permukaan bumi. Ruang lingkup Geografi Politik sangat

luas karena meliputi empat bidang penelitian, yaitu bidang Geografi, Sejarah, Politik, dan Hubungan Internasional.

d. Geografi Pemukiman

Geografi Pemukiman adalah suatu studi Geografi mengenai perkembangan pemukiman di suatu wilayah di permukaan bumi. Yang dibahas pada Geografi Pemukiman yaitu bilamana suatu wilayah mulai dihuni manusia, bagaimana perkembangan pemukiman itu selanjutnya, bagaimana bentuk pola pemukiman, dan faktor-faktor Geografi apakah yang mempengaruhi perkembangan dan pola pemukiman tersebut. Pemukiman itu, baik di pedesaan maupun di perkotaan, menjadi objek studi Geografi Pemukiman. Studi Geografi Pemukiman, erat sekali hubungannya dengan sejarah dan perekonomian suatu wilayah. Penyebaran dan relasi keruangan pemukiman, merupakan bidang studi Geografi Pemukiman.

e. Geografi Sosial

Geografi Sosial adalah cabang Geografi Manusia yang bidang studinya aspek keruangan yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, dan unsur kebudayaan dan kemasyarakatan. Geografi Sosial bidang studinya berkenaan dengan unsur-unsur tempat yang merupakan wadah kemasyarakatan manusia, sehingga erat hubungannya dengan studi Sosiologi. Kalau ditinjau dan segi penyebaran dan organisasi sosial pemukiman, bahasa dan kepercayaan, dapat dimasukkan ke dalam bidang studi Geografi Sosial.

3. Geografi Regional

Geografi Regional tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu cabang Geografi seperti yang telah dikemukakan di atas. Geografi Regional merupakan deskripsi yang komprehensif-integratif aspek fisik dengan aspek manusia dalam relasi keruangannya di suatu wilayah. Atau dapat dikatakan bahwa Geografi Regional secara normal dianggap sebagai suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada wilayah tertentu, baik lokal, negara, maupun kontinental. Pada studi Geografi Regional, seluruh aspek dan gejala Geografi ditinjau dan dideskripsikan secara bertautan dalam hubungan integrasi dan interelasi keruangannya. Dengan interpretasi dan analisis Geografi Regional, karakteristik sesuatu

wilayah yang khas dapat ditonjolkan, sehingga perbedaan wilayah menjadi jelas.

4. Geografi Sejarah

Geografi Sejarah tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu bidang Geografi. Geografi Sejarah adalah Suatu studi Geografi tentang masa lampau yang sedikit banyak berurutan waktunya, yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa manusia.

KEMAMPUAN KHUSUS PADA STUDI GEOGRAFI

Orang yang berkecimpung dalam bidang Geografi, harus memiliki kemampuan khusus menggunakan dan membuat peta dan melaksanakan observasi lapangan.

1. Peta

Harus mengetahui bermacam-macam peta berdasarkan jenis, skala dan penggunaannya. Peta merupakan hakikat dasar yang tidak dapat ditinggalkan. Suatu ketika, dalam observasi dan penelitian Geografi di lapangan, tidak selamanya kita berada di tempat itu, melainkan pada saatnya lapangan tersebut harus ditinggalkan. Untuk tetap dapat melihat dan menganalisis gejala tadi, kita harus merekamnya pada peta. Peta inilah yang selanjutnya kita bawa ke kamar kerja.

Penyebaran gejala Geografi yang meliputi penyebaran jenis-jenis tanah, jenis vegetasi, pemukiman, penduduk, jaringan jalan, pola aliran sungai, jenis-jenis pertanian, dan lain sebagainya, bagi kepentingan analisis keruangan harus dipetakan. Dari penyebaran berbagai gejala Geografi pada peta tadi, kita dapat mengadakan interpretasi dan analisis keruangan gejala yang bersangkutan. Dari hasil analisis kita akan dapat mengadakan evaluasi interaksi keruangan, sehingga dapat diketahui hubungan linier dan hubungan kausal gejala-gejala yang bersangkutan. Kecakapan ini dikenal sebagai analisis dan interpretasi peta.

Peta-peta yang digunakan, tidak hanya terbatas kepada peta buatan sendiri di lapangan, melainkan harus pula dilakukan studi perbandingan dengan peta-peta yang telah ada, baik hasil pemetaan biasa oleh ahli-ahli geodesi, maupun hasil pemetaan dari udara. Kecakapan membuat dan mengisi peta di lapangan,

didasarkan atas kemampuan mata kita membaca peta secara terinci. Dengan demikian, hal-hal yang detail tadi harus langsung di kover di lapangan.

Mengadakan interpretasi dan analisis peta di sesuatu wilayah yang sama berdasarkan peta yang berlainan waktu pembuatannya, kita akan dapat mengadakan evaluasi perkembangan gejala Geografi di wilayah yang bersangkutan, berdasarkan urutan waktunya. Dengan cara ini, kita dapat mengadakan evaluasi perkembangan regional wilayah itu, yang selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan regional. Dari interpretasi dan analisis peta secara teliti pula, kita akan dapat membuat deskripsi dan penjelasan berbagai asosiasi dan korelasi antara ketinggian dengan produktivitas pertanian, antara relief permukaan dengan penyebaran dan pola pemukiman, antara jenis perumahan dengan jarak dari jalan utama, dan lain sebagainya.

2. Observasi Lapangan

Untuk dapat melakukan observasi dengan baik di lapangan kita harus memiliki kemampuan mengadakan observasi di lapangan. Kemampuan observasi harus pula dilengkapi dengan keterampilan membuat dan menggunakan alat pengumpul data, keterampilan menentukan sampel dan lokasi penelitian.

Observasi lapangan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan dalam penelitian regional. Gejala-gejala yang terluks secara garis besar pada peta, dapat ditangkap oleh mata kita, sedangkan detail-detailnya yang tidak tergambar jelas pada peta atau pada foto udara, harus diteliti dan diobservasi langsung di lapangan. Observasi lapangan merupakan satu-satunya teknik yang dapat digunakan. Mengisi peta dasar dengan gejala Geografi yang relevan, dan pembuatan peta wilayah tersebut, dilakukan bersama-sama dengan observasi lapangan. Mencatat dan meneliti penggunaan tanah di suatu wilayah berarti bahwa secara bersama-sama diadakan pemetaan daerah tersebut dengan observasi lapangannya.

Pemetaan dan observasi lapangan yang dilakukan secara luas dan mendalam, yang dilakukan oleh sekelompok orang dari berbagai bidang, harus dilaksanakan melalui kerja sama yang terpadu.

Kartograf dan ahli observasi lapangan harus benar-benar kerjasama.

Berdasarkan tujuan dan caranya, observasi lapangan dapat dibedakan antara observasi terkontrol dengan observasi tak terkontrol, sedangkan berdasarkan pelaksanaannya di lapangan, dibedakan pula antara observasi partisipasi dengan observasi non partisipasi. Pada studi Geografi yang lebih ditekankan kepada observasi material dengan segala prosesnya, lebih banyak menggunakan observasi non partisipasi. Observasi lapangan yang direncanakan untuk dapat diolah secara matematik, harus menggunakan teknik observasi terkontrol. Observasi lapangan yang terkontrol untuk mencatat dan mengkover data dan gejala Geografi, perlu menggunakan alat yang disebut check-list. Pada check list ini disusun variabel-variabel penelitian yang relevan dengan penelitian yang bersangkutan. Dengan teknik observasi semacam itu, selain data yang diperoleh dapat dianalisis secara matematik, waktu pelaksanaannya pun dapat diatur seteliti mungkin. Dengan demikian, kita dapat menghemat daya, dana dan waktu.

Kecuali kedua keterampilan dan kemampuan tersebut di atas masih ada beberapa lagi, antara lain yaitu dokumentasi, model, komputer, dan erts (earth resources technolow satelite dan lain sebagainya).

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengajaran Geografi sekolah dewasa ini

Dalam melaksanakan pengajaran Geografi terutama dengan menggunakan Metode Kunjungan Belajar atau Karyawisata terdapat beberapa hambatan, diantaranya adalah:

- a. dalam menggunakan jam pelajaran mengganggu jam mata pelajaran lain;
- b. tidak semua siswa akan memperhatikan objek yang sama sehingga pengetahuan mereka tidak sama;
- c. jika suatu objek dijelaskan oleh petugas di objek, belum tentu semua siswa akan mendengarkan dan belum tentu pula cukup jelas dan cukup lambat menerangkannya;
- d. sukar untuk mempertahankan disiplin dan ketertiban;

- e. kelelahan dalam perjalanan dapat mengurangi gairah melakukan observasi atau tanya jawab;
- f. adanya tambahan pengeluaran uang untuk pembiayaan perjalanan karyawisata bagi siswa;
- g. pada umumnya, dorongan untuk berekreasi lebih besar daripada melakukan observasi, tanya jawab, dan mencatat data yang diperlukan;
- h. kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh sering berarti bahwa para siswa tidak dapat belajar lagi sekembalinya mereka di sekolah.

Untuk SLTA pengajaran Geografi harus diberikan secara Terpadu dan diajarkan oleh seorang guru Geografi yang generalis dengan latar belakang studi Geografi.

PENUTUP

Karena Geografi merupakan ilmu observasional, diperlukan pengamatan lapangan, hendaknya pengetahuan peta ditambahkan agar pemahaman konsep keruangan lebih jelas. Secara keseluruhan pelajaran Geografi dapat berdiri sendiri sebagai pelajaran mandiri tidak bergabung di dalam kelompok IPS. Dengan kemandirian tersebut ilmu Geografi sebagai bidang studi diharapkan lebih memasyarakat dan mendukung pembangunan yang berwawasan kebangsaan Indonesia. Hal ini mengingat dari segi letak bentuk kepulauan, keterjangkauan pemerintah pusat dan daerah memerlukan pembinaan dan pendekatan khusus untuk mengantisipasi masalah rawan terhadap gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Akhirnya pengaruh pendidikan Geografi dalam pembentukan manusia berwawasan kebangsaan Indonesia nampak yaitu dengan pengembangan diri anak didik sebagai warga masyarakat setempat, daerah, nasional, dan dunia dengan kemampuan menyadari dan bersikap simpati terhadap orang dan masyarakat lain mengembangkan rasa bagian dan bertanggung jawab terhadap masyarakat mandiri, memahami dan menghargai masalah sumber-sumber serta mengembangkan konsep kebebasan dan perlunya kerja sama antar penduduk.

Dalam kesempatan yang mulia ini perkenankanlah saya men-

ucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar Madya dalam mata kuliah Pendidikan Geografi.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Rektor selaku Ketua Senat serta seluruh Anggota Senat Yogyakarta yang telah mengabulkan permohonan saya untuk diusulkan sebagai Guru Besar Madya kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Kepada para Dosen baik dari Jurusan Pendidikan Geografi dan Jurusan Pendidikan lainnya di IKIP Yogyakarta, maupun dari Fakultas Geografi UGM, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dalam penyusunan berbagai karya ilmiah sehingga cukup untuk kenaikan jabatan saya sebagai Guru Besar Madya.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada mendiang kedua orang tua saya R. Prawiroprakoso Saleh, serta mertua saya RM Sutarno Surnosutargyo dan Ibu Rr. Rahayu Tirtonoto atas doa restunya dalam mendorong saya mencapai jabatan tertinggi dalam bidang pendidikan ini.

Kepada almarhum kakak Ir. Parewarno Saleh dan adik-adik saya, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya yang tidak henti-hentinya mendorong saya untuk mencapai jabatan tertinggi dalam pendidikan ini.

Kepada saudara-saudara saya lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya untuk segera menyelesaikan karya ilmiah sehingga dapat mencapai jabatan tertinggi dalam bidang pendidikan ini.

Kepada Ketua Dewan, Ketua Umum HKMNS Pusat, Penasihat, dan Ketua Umum Cabang Yogyakarta beserta para kerabat atas bantuan dan perhatiannya saya sampaikan kasih.

Kepada istri dan anak-anak saya, yang dengan tekun serta penuh keprihatinan dalam melampaui hambatan per hambatan dan mendorong semangat untuk mencapai jabatan tertinggi dalam bidang pendidikan ini, saya ucapkan terima kasih

Kepada Bapak-Ibu dan Saudara-saudara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselenggaranya Pi-

dato Pengukuhan ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Semoga amal baik dari semua yang telah memberikan bantuan kepada saya, mendapatkan imbalan yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani Soegiharto. (1982). "Peran Sumber Daya Alam Laut di dalam Usaha Pengembangan Desa Pantai di Indonesia". *Lontara* No. 8 Th. ke XXI. Ujung Pandang, UNHAS.
- Bintarto (1975). *Perkembangan Struktur Geografi*. Yogyakarta: UGM.
- Depdikbud(1993). *Kurikulum Sekolah Menengah Umum*. Jakarta: Depdikbud.
- Koswara (1982). *Dampak Sesuatu Proyek pada Tanah dan Tataguna Tanah*. Bogor: IPB.
- Mattulada. (1982). "Antropologi Maritim". *Lontara* No. 8. Th. ke XXI. Ujung Pandang. UNHAS.
- Nursit Sumaatmadja. (19812). *Studi Geografi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sukendar Asikin. (1989). *Wilayah Karangsambung sebagai tempat yang Ideal dalam Mempelajari Proses Gejala Ilmu Kebumian*. Bandung: ITB.
- Suharyono. (1994) *Pengantar Filsafat Geografi*. Jakarta: Depdikbud.
- Sardiman. (1996). "IPS, Sejarah dan Masa Depan, Sebuah Renungan." *Informasi* No. 1 Th XXIV. Februari Yogyakarta: FPIPS IKIP Yogyakarta.
- Tisna Amidjaja. D.A. (1980) *Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia*. Jakarta: Ditjen Dikti.

BIODATA

A. IDENTITAS

1. Nama : Prof. Drs. R. Iman Sujagad Saleh
2. NIP : 130235623
3. Tempat/tanggal lahir : Manado, 17 Februari 1939
4. Agama : Islam
5. Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Utama Madya/Gol. IVD
6. Jabatan/TMT : Guru Besar Madya/1 April 1994
7. Tugas Pokok : Pendidikan Geografi (Geomorfologi) FPIPS IKIP Yogyakarta Jurusan Pendidikan Geografi
8. Alamat Kantor : Yogyakarta Jurusan Pendidikan Geografi
9. Alamat Rumah : Deresan 1/9 Yogyakarta, telp. 566881
10. Status Perkawinan : Kawin, 20 Juli 1966 dengan Sri Subekti Sutamo
11. Anak Kandung :
 - b. Drs. R. Agung Purwandono Saleh lahir di Sala, 18 September 1967
 - c. Drs. R. Bagus Sarwowidjojo Saleh lahir di Yogyakarta, 20 November 1968
 - d. Drh. R. Chaindraprasto Saleh lahir di Yogyakarta, 28 Juli 1970

- e. Rr. Dhasy Sriwahyu Agadalistiana Saleh lahir di Yogyakarta, 3 Oktober 1982

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. Sarmud FKIP/UGM 1965
2. Sarjana FKIP IKIP Yogyakarta 1966

C. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Ketua Jurusan Pendidikan Geografi IKIP Yogyakarta, 1978
2. Ketua Departemen Geografi IKIP Yogyakarta, 1977

D. KARYA ILMIAH

Geomorfologi daerah Kulon Progo, 1976

Laboratorium alam bagi studi Geografi, 1985

Sikap penduduk desa Parangtritis dalam usaha melestarikan lingkungan hidup.

Pengaruh Pariwisata terhadap pendidikan di desa pantai Parangtritis, 1987

1. Potensi Daerah Parangtritis dan sekitarnya sebagai sumber belajar geografi, 1989.
2. Geomorfologi Jawa Tengah bagian selatan, 1987.
3. Pengembangan evaluasi pengajaran geografi di SMA dalam pelaksanaan kurikulum 1984, 1988.
4. Karangsembung sebagai ajang praktik lapangan geografi, 1988.
5. Usaha meningkatkan peran Dosen Pembimbing dalam program pengalaman lapangan, 1989.
6. Kesiapan guru Geografi SMTA di DIY dalam melaksanakan tugas studi lapangan, 1992.

KETERKAITAN ANTARA SEJARAH, FILSAFAT DAN AGAMA

Pidato Pengukuhan Guru Besar
Diucapkan di Depan Rapat Senat Terbuka IKIP Yogyakarta
pada Hari Sabtu Tanggal 4 Januari 1997

AHMAD SYAFII MAARIF

Guru Besar Madya dalam Bidang Filsafat Sejarah
pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
IKIP Yogyakarta



Di pagi yang bahagia ini dan di tempat yang terhormat ini, rasa syukur yang dalam wajib saya sampaikan ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, atas segala limpahan rahmat yang telah dikurniakan tanpa henti kepada kita semua. Terima kasih yang tak terhingga saya tujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor, Dekan FPIPS dan semua pihak yang langsung atau tidak langsung telah memudahkan jalan bagi saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan ini pada saat batang usia saya telah berada di ambang petang. Kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu pada upacara ini benar-benar merupakan kehormatan tersendiri bagi saya dan keluarga. Untuk itu semua sekali lagi rasa terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada hadirin dan hadirat yang mulia.

PENDAHULUAN

Sejak sekitar seperempat abad yang terakhir, perhatian terhadap sejarah, filsafat dan agama melebihi perhatian saya terhadap cabang-cabang ilmu yang lain. Namun saya sadar sepenuhnya, semakin saya masuki ketiga wilayah itu, semakin tidak tampak tepinya. Tidak jarang saya merasa sebagai seorang asing di kawasan itu, kawasan yang seakan-akan tanpa batas. Terasalah kekecilan diri ini berhadapan dengan luas dan dalamnya lautan jelajah yang hendak dilayari. Nasehat Al-Qur'an kepada setiap pencari berbunyi : "Tidaklah kamu diberi ilmu, kecuali sedikit saja."¹ Nasehat ini dapat meredam ambisi dan rasa ingin tahu seseorang untuk tidak melangkahi kawasan di luar batas kemampuan manusia. Dengan segala keterbatasan saya pidato pengukuhan ini diberi judul: KETERKAITAN ANTARA SEJARAH, FILSAFAT, DAN AGAMA. Akan dilihat keterkaitan fungsional antara ketiganya dengan berpedoman kepada pendapat-pendapat mereka yang dipandang mempunyai otoritas dalam masalah yang dicoba untuk dibicarakan.

SEJARAH DAN FILSAFAT: MASALAH KETERKAITAN

Dalam *Al-Muqaddimah* Ibn Khaldun (1332-1406) melihat dua sisi Sejarah yang perlu diperhatikan: sisi luar dan sisi dalam. Pada

sisi luar sejarah itu tidak lebih dari pada perputaran kekuasaan yang silih berganti di masa lampau. Tetapi pada sisi dalamnya sejarah adalah suatu kritis (*nazar*) dan kerja yang cermat untuk mencari kebenaran; suatu penjelasan yang cerdas tentang sebab-sebab dan asal usul segala suatu; suatu pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi. Oleh sebab itu Sejarah berakar dalam dan dipandang menjadi bagian dari filsafat (*al-hikmah*)². Di mata sejarawan kelahiran Tunisia ini, bila dilihat dalam hierarki ilmu, Sejarah menempati posisi kedua setelah filsafat, khususnya filsafat politik, tetapi berada di atas *'ilm al-'umran* (ilmu sosial dan ilmu kultur) yang berfungsi sebagai pelayan sejarah. Sedangkan sejarah adalah pelayan filsafat politik.³ “Hanya sejarahlah,” simpul Muhsin Mahdi tentang salah satu fungsi sejarah menurut Ibn Khaldun,” yang dapat mengajar *man of action* (manusia pelaku) tentang bagaimana orang lain bertindak dalam keadaan-keadaan khusus, pilihan-pilihan yang dibuatnya, dan tentang keberhasilan dan kegagalan mereka.⁴ Sejarah menjelaskan kondisi dan situasi yang tepat bagi seorang negarawan untuk melaksanakan tugas kenegaraannya secara tepat pula. Tanpa mengenal Sejarah seorang negarawan ataupun siapa saja yang memiliki tanggung jawab umum akan kehilangan arah dan acuan dalam melaksanakan kebijakannya, “....Sejarah adalah jembatan penghubung masa silam dan masa kini, dan sebagai penunjuk arah ke masa depan”,⁵ tulis Allan Nevins.

Jika Sejarah memang dapat menunjuk arah ke masa depan, mengapa umat manusia sering terjebak dalam melakukan kesalahan serupa seperti yang diperbuat orang sebelumnya? Mengapa seorang penguasa misalnya tidak pandai belajar dari kesalahan yang diperbuat para pendahulunya untuk menghindari sebuah kesalahan fatal bagi diri dan bangsanya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini selalu saja muncul, tetapi orang biasa saja tertarung pada batu yang sama berkali-kali. Ini sudah menjadi fakta sejarah di berbagai bagian dunia. Keretakan antara teori dan realitas perilaku manusia bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kolektif kita. Satunya kata dan perbuatan merupakan hal yang mahal dalam sejarah, sekalipun bukan sesuatu yang tidak mungkin.

Dalam kaitannya dengan pembicaraan ini, pernyataan Hegel yang sering dikutip berbunyi: “Apa yang diajarkan, pengalaman dan sejarah ialah bahwa orang dan pemerintah belum pernah belajar dari sejarah, apalagi bertindak menurut ajaran-ajaran yang diberikannya”,⁶ perlu ditafsirkan lebih jauh. Penafsiran ini akan dapat menghilangkan pesimisme kita menatap masa depan. Kalimat berikut kita kutip: “Setiap abad punya kondisinya sendiri sebagai suatu situasi individual; keputusan-keputusan harus dan dapat dibuat hanya dalam dan sesuai dengan abad itu sendiri”⁷. Dengan demikian sekalipun orang dapat belajar dari sinyal masa lampau, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat teruslah disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu tertentu. Kelampauan memang diperlukan untuk berkaca dalam menguak kekinian, tapi perbedaan nuansa ruang dan waktu dengan segala kekhususannya perlu senantiasa dipertimbangkan. Sejarah akan memberikan bahan-bahan pertimbangan itu sebanyak yang kita perlukan.

Kita kembali kepada pendapat Ibn Khaldun: “Sejarah berakar dalam dan dipandang menjadi bagian dari filsafat”. Apa artinya ini bagi analisa kita selanjutnya? Mengapa filsafat menjadi begitu penting bagi sejarah? Kita boleh tidak setuju dengan pernyataan sejarawan Italia Benedetto Croce (1866- 1952) yang mengatakan bahwa Sejarah dalam bentuk *historical judgment* (pertimbangan sejarah) adalah bentuk tertinggi dari filsafat dan bahkan identik dengannya⁸. Keidentikan sejarah dengan filsafat dirumuskan Croce dalam bentuk proposisi: “keseluruhan yang satu adalah keseluruhan yang lain” (*the whole of one is the whole of other*).⁹ Sementara kutipan di bawah ini akan lebih menjelaskan kepada kita tentang hubung kait antara sejarah dan filsafat: “Sejarah tidaklah mungkin tanpa unsur logika, dan unsur logika itu adalah filsafat yang mengkondisikan sejarah; tetapi filsafat juga tidaklah mungkin tanpa unsur intuitif, dan unsur intuitif itu adalah sejarah yang mengkondisikan filsafat”.¹⁰

Bila formula Croce di atas dibaca dalam ungkapan lain, maka kita dapat mengatakan bahwa filsafat memberikan; kekuatan logika kepada Sejarah, sedangkan Sejarah memberikan kekuatan

intuisi kepada filsafat. Dalam perspektif ini, sebuah rekonstruksi masa silam yang menjadi tugas sejarawan profesional sangat memerlukan kekuatan logika dan penalaran, dan kekuatan itu beribu kepada filsafat. Oleh sebab itu historiografi yang kaya sumber tapi tanpa rakitan logika yang kokoh adalah ibarat sarang burung di atas dahan rapuh. Dalam sebuah masyarakat yang semakin cerdas dan kritis, “historiografi sarang burung” ini tidak akan dapat bertahan lama dan pasti segera menghilang dari peredaran karena fondasi struktur penulisannya berupa teori kurang memenuhi syarat yang diperlukan.

Pembicaraan kita selanjutnya masih dalam bingkai teori Croce, tetapi pada dimensi kaitan fakta historis dengan interpretasi filosofis. Baginya : “Semua fakta adalah historikal; semua interpretasi adalah filosofikal”.¹¹ Alur pemikiran ini menjelaskan bahwa hubungan fakta dan interpretasi adalah hubungan Sejarah dan filsafat. Semua masalah Sejarah tidaklah mungkin dipahami tanpa merujuk kepada konsep-konsep rancangan filsafat. Begitu pula masalah filsafat tidak mungkin dipecahkan kecuali melalui keterkaitannya dengan fakta.¹² Bila jalan logika ini diikuti, maka muaranya adalah : seorang sejarawan haruslah filsuf atau setidaknya punya minat terhadap filsafat, sedangkan seorang filsuf haruslah berakar kuat dalam Sejarah. Posisi sejarawan-filsuf jelas sangat ideal, sementara data sosiologis di mana pun di muka bumi ini belum tentu selalu mendukung. Mereka yang berada pada posisi ini tampaknya jumlahnya tidaklah banyak sepanjang Sejarah. Nama-nama seperti Ibn Khaldun, Vico, Hegel, dan Toynbee dapat dikategorikan sebagai sejarawan Filisuf. Mereka mencoba menepi dari perjalanan sejarah dari posisi pengintai yang lebih tinggi. Setidaknya menurut mereka, mereka telah jauh melampaui jendela mikroskopik dan parokialistik dalam membaca fenomena sejarah. Mereka mengamatinya dari jendela panoramik hingga yang terlihat bukan saja pemandangan yang terbatas dan sempit, tapi sebuah panorama yang indah dan luas, hampir tanpa tepi. Mereka tidak risau bila mereka dituduh melakukan pendekatan mistik dan bahkan irasional. Itu bukan urusan mereka. Itu sepenuhnya urusan para pengeritik.

Posisi sebagai sejarawan-filosuf adalah posisi yang mahal yang memang tidak mudah diraih seseorang kecuali dengan kesungguhan. Filsafat akan senantiasa memberikan kepadanya kekuatan penalaran yang tidak mudah digoyahkan oleh perasaan benci atau cinta dalam membaca masa lampau, sekalipun kajian historis bercorak *personal*. Prinsip keadilan dan kejujuran dalam berpikir adalah lentera yang menerangi karier seorang sejarawan. Catatan Philip K. Hitti tentang Ibn Khaldun adalah di antara contoh untuk diungkapkan di sini:

Kekuatannya [Ibn Khaldun] terletak pada pengetahuannya yang langsung dan akrab tentang Afrika Utara-Arab dan Berber-Mesir dan Granada, semuanya itu dia pertimbangkan dengan tingkat kontrol diri dan objektivitas yang luar biasa. Jarang dia melebih-lebihkan seorang teman pribadinya atau mengecilkan seorang musuh, Ibn Khaldun si sejarawan berada dalam situasi yang sangat kontras dengan Ibn Khaldun si politikus.¹³

Memang Ibn Khaldun sebelum memasuki dunia sejarah dikenal sebagai seorang politikus yang sering terlibat dalam berbagai intrik politik yang sangat melelahkan. Tetapi kemudian ternyata bahwa sejarah dan filsafat telah membebaskannya dari tarikan dan godaan oportunisme politik. Contoh tokoh lain dengan integritas moral dan intelektual, sekalipun bukan sejarawan, adalah Bung Hatta, seorang Indonesia. Hatta dikenal sebagai moralis sejati. Dugaan kita adalah bahwa Hatta muncul sebagai yang kita kenal tidak lepas dari buah pengembaraan intelektualnya dalam lautan filsafat dan Sejarah dengan latar belakang spiritualisme Islam yang mantap.¹⁴ Setelah Bung Hatta wafat pada 14 Maret 1980, Mochtar Lubis menuturkan kesannya tentang tokoh ini :

Tidak mengherankan manusia Indonesia Bung Hatta telah berhasil merebut kecintaan demikian banyak anggota masyarakat kita, karena dalam dirinya dia berhasil menghimpun nilai-nilai manusia Indonesia yang banyak telah hilang dalam banyak diri kita; sikap sederhana, hidup sederhana, sopan dan santun yang tinggi, kejujuran, cinta pada kebenaran dan keadilan, keberanian berpikir dan menyatakan pikiran, integritas pribadi dan ilmu, tiada nafsu berkuasa atau mengejar kekayaan. Kekosongan yang ditinggalkannya akan amat sukar terisi kini di tanah air kita.¹⁵

Sekalipun Hatta seorang ekonom, sejarah, filsafat, dan agama telah demikian dalam membentuk dan merekat kepribadiannya yang utuh, kokoh dan tegar. Jika demikian halnya sejarah adalah juga cermin untuk berkaca diri demi meraih tingkat kematangan pribadi. Masa lampau sebagai memori kolektif kaya dengan contoh-contoh, terpuji atau tercela. Yang terpuji untuk diteladani, yang tercela untuk dihindari. Proposisi ini berlaku untuk orang seorang atau untuk suatu bangsa. Untuk Indonesia, pernyataan Mochtar Lubis tentang Hatta yang berbunyi: “Kekosongan yang ditinggalkannya akan sukar terisi kini di tanah air kita”¹⁶ yang ditulis 16 tahun yang lalu masih tetap relevan dengan suasana kita menjelang akhir abad ini. Kita merasakan benar bangsa ini dalam masalah moral sedang dilanda krisis keteladanan yang cukup serius, di sisi pembangunan ekonomi yang relatif berhasil. Pancasila yang telah kita yakini sebagai suatu dasar filsafat negara yang mantap tampaknya masih harus dihadapkan kepada ujian-ujian sejarah yang cukup berat. Antara gagasan dan pelaksanaan prinsip moralnya masih dibatasi oleh jurang yang lebar menganga. Atau dalam bahasa Hatta, pelaksanaan Pancasila yang murni baru pada tingkat bibir,¹⁷ belum membimbing perilaku kolektif kita secara fungsional. Dalam perspektif sistem nilai, kita merasakan ada sesuatu yang hilang dari kehidupan bangsa ini. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah : Apakah filsafat kenegaraan kita tidak lagi *solid*? Saya melihat secara teoretik, ia cukup *solid*, tapi dalam praktik ia sedang digerogoti virus-virus ganas *hedonistik* dan budaya *mumpungisme* yang serba dangkal dengan wawasan sempit yang menyesakkan nafas.

Namun kita pun sadar bahwa untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana yang sering diucapkan memang bukan pekerjaan gampang. Inilah di antara tantangan mendasar yang harus dicarikan jalan keluarnya oleh para pengambil kebijakan, pemikir, ulama sejarawan, atau siapa saja yang memiliki kepekaan nurani, demi menjaga bangsa ini agar tidak jauh terpuruk secara moral. Tema Kongres Nasional Sejarah bulan Nopember 1996 yang berbunyi: “Dialog Kelampauan Menguak Kekinian Untuk Merancang Masa Depan”¹⁸ perlu mendapat perhatian kita semua, sebab dalam dirinya tema itu memuat persoalan besar

yang sedang dihadapi bangsa kita pada periode peralihan ini. Menurut pandangan saya, sejarawan bersama dengan kekuatan intelektual yang lain adalah *avant-garde*, penjaga gawang moral bangsa. Bila penjaga gawangnya juga kebobolan, lalu kepada siapa lagi bangsa ini mengadukan persoalannya?

Setelah hubungan sejarah dan filsafat kita bicarakan seperlunya di atas, berikut ini akan kita tengok sekadarnya apa yang disebut filsafat sejarah itu. Dalam pembacaan saya tidak ada definisi yang disepakati tentang apa itu filsafat sejarah. Bagi Hegel misalnya, filsafat sejarah itu tidak lain dan pada “pertimbangan yang penuh pemikiran tentang sejarah.”¹⁹ Allan Nevins mengatakan bahwa “filsafat sejarah itu berasal dari keseluruhan pandangan penulis: tentang nasib manusia, dan dengan begitu merupakan penjelmaan pandangan hidupnya...”²⁰ Dan masih banyak definisi lain yang tidak perlu dikutip di sini.

Sekalipun Morris R. Cohen benar pada waktu dia mengatakan bahwa teori sejarah merupakan “wilayah filsafat yang teramat diabaikan;”²¹ renungan yang mendalam mengenai sejarah telah dilakukan oleh St. Augustine (354-430) dengan karya monumentalnya *The City of God*²². “Di bawah sinaran *Bible* dalam karya ini Augustine buat pertama kali dalam perjalanan pemikiran sejarah di Barat telah menawarkan teori linear tentang gerak sejarah sebagai antitesa terhadap pola siklus yang dianut Yunani dan Romawi kuno. Bagi Augustine gerak sejarah bercorak teleologis, punya tujuan akhir berupa terciptanya Kerajaan Tuhan di muka bumi. Karya ini sampai dengan munculnya gerakan renaisans abad ke-16 di Eropa begitu dominan mewarnai pandangan sejarah orang Barat. Bahkan sebenarnya dalam satu dan lain bentuk, apa yang dikenal sebagai filsafat sejarah spekulatif sebagai lawan dari filsafat sejarah kritikal pada masa modern, benang merah pemikiran Augustine masih dirasakan. Karya-karya Hegel, Marx, dan Toynbee misalnya, pada saat mereka berbicara tentang gerak sejarah, orang tentu akan ingat pada *The City of God*. Bagi Hegel, gerak sejarah menuju terwujudnya kebebasan (*freedom*) dalam kehidupan umat manusia; bagi Marx, terciptanya sebuah masyarakat tanpa kelas setelah sistem kapitalis ditumbangkan;

bagi Toynbee, terbentuknya suatu agama universal. Semuanya bercorak teleologis. Mungkin bilamana filsafat sejarah model Pancasila dikembangkan, tentu akan terlihat pola linear yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Filsafat sejarah spekulatif ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah pola sejarah itu, apakah mekanisme sejarah itu, apakah ada maksud dan nilai sejarah itu?²³ Sementara filsafat sejarah kritis mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah sejarah itu ilmu, dapatkah orang mengetahui fakta sejarah, dapatkah sejarawan bersikap objektif, apakah hakekat teori-teori dan tafsiran sejarah itu, apakah memang ada yang disebut hukum-hukum sejarah itu?²⁴

Dari sekian pertanyaan di atas, hanya satu saja yang akan dielaborasi pada kesempatan ini, yaitu masalah apakah sejarah itu ilmu sebagai salah satu pertanyaan sentral dalam filsafat sejarah kritis. Menghadapi pertanyaan serupa ini, dua sejarawan Inggris, J. B. Bury dan R. G. Collingwood, telah saling berhadapan dalam memberikan komentar terhadap pertanyaan itu. Bury lantaran kuatnya pengaruh ilmu kealaman dengan segala hukum-hukumnya yang tetap ingin menempatkan sejarah sejajar dengan posisi ilmu kealaman itu. Dalam pidato inaugurasinya di Cambridge pada 1903, pada mulanya Bury masih menentang metode ilmu kealaman untuk dipasangkan pada kajian sejarah. Katanya pemikiran sejarah punya keunikannya sendiri, punya karakternya sendiri, berbeda dengan ilmu kealaman. Tetapi pada saat menjelaskan sejarah itu seperti apa, Bury menjawab; 'History is simply a science, no less and no more'²⁵. Jawaban inilah kemudian yang menimbulkan reaksi keras, antara lain dari Collingwood, pemikir sejarah idealis.

Mengamati jawaban Bury di atas, Collingwood memberikan reaksi sebagai berikut ;

Kuliah itu menyuguhkan pikiran yang tercabik antara dua konsepsi; satu, membingungkan tapi perkasa, dalam menjelaskan perbedaan antara sejarah dan ilmu; yang lain, jelas dan melumpuhkan, tentang identifikasi keduanya yang tidak dapat dibedakan. Bury telah bekerja keras untuk membebaskan dirinya dari konsepsi terakhir ini, dan dia gagal.²⁶

Setahun kemudian setelah menyadari kegagalannya, Bury bertanya lagi: "Apakah sejarah.... hanyalah penyimpanan fakta yang dihimpun bagi kepentingan para sosiolog dan antropolog, atau ia sebuah disiplin yang harus dikaji untuk kepentingannya sendiri?" Bury ternyata mengelak untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan semacam ini sebab itu katanya bercorak filosofis yang berada di luar kompetensinya. Baru pada tahun 1909 Bury kembali kepada posisinya semula yang menentang pendapat bahwa "peristiwa-peristiwa sejarah dapat dijelaskan dengan merujuk kepada hukum-hukum umum. *Uniformities, yes laws, no.*"²⁷ Kegamangan Bury untuk membela martabat sejarah adalah karena dia terjepit antara kepercayaan akan otonomi sejarah dan iklim positivisme pada awal abad ini. Collingwood akhirnya menyimpulkan:

Bury telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya di bawah inspirasi kepercayaan pada otonomi dan dignitas sejarah; tetapi iklim positivisme yang telah membentuk pikirannya sendiri telah menghancurkan kepercayaan ini, dan mengurangi sasaran yang wajar dari pengetahuan sejarah kepada suatu tingkat yang ... tidak dapat dimengerti (*unintelligible*)²⁸

Sejarawan kontemporer lain yang menentang mazhab positivisme sosiologis adalah Croce yang pendapatnya tentang hubungan sejarah dan filsafat telah kita bicarakan sebelumnya. Seperti kita ketahui kaum positivis memandang sosiologi sebagai ilmu yang memuat prinsip-prinsip penjelasan tentang sejarah, sementara Croce berpendapat bahwa filsafatlah yang menduduki posisi itu. Sosiologi dikatakannya sebagai *barbaric* (biadab), suatu tuduhan ekstrem yang sarkastik. Croce melihat ilmu politik lebih pantas digunakan tinimbang sosiologi.²⁹ Namun serangan Croce terhadap sosiologi ternyata tidak mendapat dukungan, dan nama sosiologi bahkan semakin mapan. Latar belakang serangan Croce ini jelas berkaitan dengan usaha sekelompok sejarawan untuk memasukkan sejarah dalam kategori ilmu (*science*) dengan segala hukum-hukumnya. Kecenderungan ini tentu sukar diterima karena sejarah bukanlah organisme biologis sebagaimana dikatakan oleh Oswald Spengler, seorang penulis pesimistik dari Jerman.

Kelemahan Croce mungkin terletak pada sikapnya yang terlalu ekstrem dengan menafikan corak keilmuan pada sejarah. "... sejarah bukanlah dan tidak akan pernah dapat menjadi ilmu",⁰⁰ pendapat Croce seperti disimpulkan oleh Burks. Memang kontroversi tentang apakah sejarah itu ilmu atau seni masih berlanjut sampai hari ini. Mungkin pendirian moderat yang mengatakan bahwa sejarah mengandung kedua dimensi ilmu dan seni lebih pantas untuk dipertahankan. Dari sudut metode pengumpulan dan penafsiran data, sejarah tidak berbeda dengan metode ilmu pada umumnya.³¹ Tetapi dalam teknik penyusunan laporan unsur imajinasi sejarawan memegang peran penting. Tentu saja bukan imajinasi liar. Imajinasi historis adalah imajinasi yang dikontrol oleh hukum-hukum logika berdasarkan fakta. Karena imajinasi inilah karya sejarah dirasakan juga sebagai karya sastra. Sejarah "adalah sebuah proses interaksi tanpa henti antara sejarawan dan fakta-faktanya, sebuah dialog yang tak berujung antara masa sekarang dan masa lampau",³² tulis Edward Carr. Kemudian dalam masalah bahasa, bahasa sejarah lebih dekat kepada bahasa novel tinimbang bahasa teks ilmiah.³³ Hal ini memang diperlukan demikian, sebab bila tidak, siapa yang akan betah membaca karya sejarah? Sekalipun demikian, laporan sejarah senantiasa menuntut akurasi dalam bingkai disiplin historis. Tinggi rendahnya kualitas sebuah karya sejarah akan sangat tergantung kepada akurasi dan disiplin seorang sejarawan dalam membangun laporannya. Dalam historiografi kita memang mengenal istilah sejarah yang baik dan sejarah yang papa (*poor history*). Yang repot adalah "sejarah yang terburuk pun tetaplah ia sejarah,"³⁴ tulis G. J. Ren

SEJARAH DAN AGAMA: MASALAH KEAMANAN ONTOLOGIS

Pada dataran teoretik, kita melihat hubungan yang erat antara sejarah dan filsafat. Pembicaraan selanjutnya ingin melihat hubungan sejarah dan agama pada dataran yang lain, sebuah hubungan yang bercorak ontologis. Kerisauan yang mungkin muncul adalah : apakah dengan menghubungkan sejarah kepada agama tidak akan menjebak kita untuk memaksakan doktrin transendental, *extra-scientific* terhadap perjalanan sejarah, sebagaimana St. Au-

gustine telah melakukannya 15 abad yang lalu? Mari kita tengok fenomena ini di masa kita. Sejarawan Belanda Pieter Geyl pada masa modern telah menuduh A. J. Toynbee memaksakan keimanan Kristennya atas bangunan teori sajarahnya. Sistem Toynbee, tulis Geyl," pada dasarnya tidak kurang irasionalnya dan bersifat aprioristik."³⁵ Menurut alur pemikiran ini, sesuatu yang irasional dan aprioristik akan menghancurkan landasan teori ilmiah kajian sejarah. Yang akan muncul bukan filsafat sejarah, tetapi teologi sejarah. Namun Toynbee, sekalipun diserang dari berbagai penjuru, sampai saat wafatnya pada 1975 tidak beranjak dari paradigma religiusnya dalam membangun teori sejarah. Dalam dialog panjang dengan Profesor Kei Wakaizumi dari Universitas Kyoto Sangyo, Toynbee mengungkapkan tentang tujuan kajian sejarah:

Bagi saya kajian sejarah tidak akan ada artinya jika pada akhirnya tidak memiliki makna dan tujuan keagamaan, dan motif yang menggerakkan saya adalah ... motif-motif yang menggerakkan kajian sejarah yang telah mengilhami para sejarawan di masa silam. Saya berharap bahwa motif itu pula yang akan menjadi motif sejarawan di masa depan.³⁶

Yang sulit dipahami orang adalah tawaran Toynbee berupa visi *transrational* untuk membaca fenomena sejarah.³⁷ Visi ini bila dilihat dari kacamata sekuler memang berarti sama dengan memutar jarum jam ke belakang. Sebuah kemunduran. Tetapi persoalannya adalah : apakah pendekatan ilmiah-rasional dapat dipercaya untuk mengungkapkan fenomena sejarah secara tuntas? Apakah fenomena sejarah tidak menunjuk kepada sesuatu yang berada di luar dirinya? Pendekatan religius terhadap sejarah akan menawarkan suatu keamanan ontologis terhadap bangunan sejarah dan bahkan terhadap bangunan filsafat. A.J. Toynbee adalah di antara sejarawan modern yang banyak belajar dari pendekatan *religio-scientific* Ibn Khaldun terhadap fenomena sejarah. Toynbee menulis :

... persepsi Ibn Khaldun tentang tidak memadainya eksplanasi sosiologis-sekuler terhadap sejarah Afrika Barat Laut pada abad Islam telah mendorongnya untuk menyertakan Tuhan di antara *the dramatic personae* (pelaku dalam drama) sejarah, dan dengan begitu, untuk memberikan sebuah dimensi baru terhadap sejarah itu sendiri.³⁸

Bagi Toynbee kajian sejarah ilmiah memerlukan suatu *supra-mundane dimension*³⁹ untuk melawan arus pemikiran sekuler-materialistik yang begitu dominan di abad modern. Di bawah bayang-bayang filsafat antroposentrisme, kebanyakan sejarawan modern telah begitu lengket dengan tarikan bumi hingga doktrin langit terabaikan sama sekali karena dinilai menghalangi “kemajuan”. Toynbee sebenarnya bukanlah anti kemajuan ilmu dan teknologi; yang dilawannya adalah kecenderungan pendapat modern bahwa ilmu dan teknologi adalah segala-galanya. Kehidupan moral dan spiritual tidak lagi menjadi agenda penting bagi manusia modern. Kecemasan Toynbee ini juga dirasakan oleh banyak pemikir dan pengamat Barat modern. Jack Kemp, bekas menteri perumahan dan pengembangan kota Amerika Serikat, sangat khawatir menyaksikan terjadinya transformasi sosial yang paling dramatis dan destruktif dalam sejarah modern Amerika. Menurut Kemp, anak-anak Amerika sekarang sedang mengalami kemiskinan bentuk lain: mereka tidak saja tergusur dari sumber-sumber penghasilan, mereka pun kehilangan harapan, perlindungan, prinsip-prinsip dan nilai.⁴⁰ Salah satu indikasi transformasi destruktif itu, Kemp menunjukkan gejala keluarga dengan sistem orang tua tunggal (*single-parent homes*). Lalu dikutipnya angka-angka berikut : Seperempat abad yang lalu, seorang di antara 10 anak lahir dengan orang tua tunggal. Sekarang, satu dalam tiga. Di akhir abad ini, angka itu mungkin akan melampaui 40%. Kini Amerika mempunyai 1.200.000 anak yang lahir dalam keluarga orang tua tunggal setiap tahun.⁴¹ Di mata Kemp, gejala ini adalah pertanda dari krisis yang cukup menghantui masa depan Amerika. Kemudian disimpulkannya: “Sebuah masyarakat yang tidak hirau terhadap kehidupan moral dan spiritual berarti tidak hirau terhadap masa depannya.”⁴² Di atas dasar kekhawatiran yang mendalam terhadap hari depan peradaban Barat Toynbee membangun teori sejarahnya dengan mengaitkannya dengan *supra-mundane dimension*, seperti yang telah disinggung di atas.

Filosuf eksistensialis Kari Jaspers menggunakan ungkapan *supra-historical* untuk istilah Toynbee *supra-mundane dimension*. Berbeda dengan Jean-Paul Sartre dan Albert Camus yang ateis, Jaspers adalah seorang ateis, bahkan sebagai pemeluk agama

Protestan.⁴³ Mungkin karena sama-sama beragama, Toynbee dan Jaspers ingin “menggiring” sejarah ke wilayah di seberang fenomena agar kajian sejarah punya fondasi spiritual yang kokoh. Bagi Jaspers, sejarah adalah satu-satunya jalan menuju titik *the supra-historical*.⁴⁴ Dalam ungkapan lain, hanya melalui jembatan sejarah orang dapat memasuki wilayah di seberang sejarah. Kemudian jaspers menulis :

....abad-abad yang panjang pra-sejarah dan tenggang waktu yang singkat masa sejarah mendorong munculnya pertanyaan ini : Bukankah sejarah suatu gejala sementara mengingat ratusan ribu tahun pra- sejarah ? Pada dasarnya, tidak ada jawaban lain kecuali proposisi umum : sesuatu yang punya titik awal juga punya titik akhir sekalipun akan berlangsung jutaan atau milyaran tahun.⁴⁵

Dalam perspektif yang serba *supra* itu, Jaspers selanjutnya mengajukan pertanyaan kepada semua orang : di mana dia akan berdiri, untuk apa dia bekerja.⁴⁶ Dua pertanyaan filosofis yang sangat mendasar ditujukan kepada kita semua, termasuk sejarawan.

Wilayah *supra-historical* adalah wilayah agama (iman). Al-Qur’an menyebutnya sebagai wilayah *ghaib* yang menunjuk kepada semua sektor atau fase-fase realitas yang berada di luar wilayah persepsi manusia. Wilayah ini tidak dapat dibuktikan atau dibuktikan melalui observasi ilmiah.⁴⁷ Ini adalah wilayah *supra-rational*. Menurut Toynbee, diperlukan pengetahuan ekstra-ilmiah untuk memasuki wilayah ini. Ini wilayah iman (agama). Melalui agama orang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang tujuan eksistensi manusia dan tentang makna kematian.⁴⁸ Filsafat tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini apalagi sejarah yang memang bukan teritorialnya.

Puncak dari segala yang *ghaib* itu ialah Allah yang berada di luar seluruh fenomena. Semua ciptaan bergantung kepada-Nya bagi yang mempercayai-Nya. Dia pun berada di luar sejarah, sebab sejarah itu fenomena manusia. Bagi Allah tidak berlaku tiga dimensi waktu : lampau, kini, dan esok yang senantiasa menyibukkan para sejarawan. Apa arti lampau, kini dan esok bagi-Nya karena ilmu-Nya meliputi itu semua. Di atas panggung sejarah,

Dia memberikan kebebasan kehendak dan kebebasan memilih kepada semua manusia dalam batas-batas kemanusiaannya. Pilihan itu adalah pilihan moral. Tergantung kepada manusia untuk memilih yang baik atau yang buruk. Bila yang baik yang dipilihnya, Dia akan menjadi pelindung. Sebaliknya bila yang buruk yang dipilih, resiko ditanggung penumpang. Keberadaan Allah tidak dapat disangkut pautkan dengan probabilitas ilmiah, tapi menjadi keharusan metafisika,⁴⁹ untuk meminjam ungkapan filosof Katolik Perancis Etienne Gilson.

Pertanyaan-pertanyaan sentral lain yang cukup mendesak adalah: mengapa harus Tuhan (Allah) sama sekali? Mengapa alam semesta dengan segala isi dan prosesnya tidak dibiarkan berdiri di atas dirinya sendiri tanpa membawanya kepada ujud yang lebih tinggi, yang mungkin hanya meruwetkan realitas yang ada dan meletakkan beban yang tidak perlu atas pikiran dan jiwa manusia? Mengapa harus percaya kepada sebuah Realitas di luar jangkauan persepsi manusia? Persoalannya adalah karena alam semesta dan seluruh muatannya tidak bisa menjelaskan dirinya, Ia diam seribu bahasa mengenai asal-usul kejadian dan keberadaannya. Kemudian turunlah wahyu untuk menolong otak dan persepsi manusia guna memahami semua fenomena ini. Menurut wahyu, alam semesta punya awal dan punya ujung. Kita kutip kembali Jaspers: "... sesuatu yang punya titik awal juga punya titik akhir sekalipun akan berlangsung jutaan atau milyaran tahun".⁵⁰ Kapan titik akhir itu menjadi kenyataan, tak seorangpun dapat mengatakannya. Al-Qur'an memberitakan : "Segala yang ada di atasnya (bumi dan alam semesta) akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan akan kekal abadi".⁵¹

Selanjutnya dalam peradaban modern yang sekuler gagasan besar tentang Tuhan telah lama tertindas sejak lebih dari 300 tahun yang lalu,⁵² untuk meminjam pengamatan penulis Perancis Maurice Clavel. Implikasi ketertindasan ini pada tatanan global dunia cukup dahsyat, khususnya pada sikap moral manusia. Ukuran baik dan buruk menjadi sangat relatif. Konsep moral bersifat situasional, tergantung kepada kepentingan. Ketidakadilan hubungan antar bangsa, antara kawasan Utara dan Selatan belum

mengalami perbaikan yang berarti. Kawasan Utara yang unggul dalam teknologi tampaknya masih ingin melihat Selatan bergantung kepadanya. Mungkin kondisi inilah yang sering dituduhkan orang sebagai bentuk imperialisme ekonomi. Kawasan Selatan yang sarat dengan beban hutang luar negeri sudah kelelahan hanya dalam membayar angsuran bunga pinjaman, ini jelas merupakan lampu merah bagi keserasian hubungan Utara-Selatan di masa depan.

Pada dataran individual, otak sekuler tidak lagi mampu mengintai dan memantau wajah Tuhan pada pergantian siang dengan malam, pada perputaran musim, pada kicau murai di pagi hari, pada bunyi siamang, pada air serasah yang terjun, pada lambaian padi yang sedang menguning, pada perjalanan sejarah, pada pasang naik dan pasang turunnya peradaban sebuah bangsa. Otak ini hanya menawarkan sebuah jawaban misterius : *by chance*, semuanya karena kebetulan. Semuanya tidak menunjuk kepada sesuatu di seberang fenomena. Suatu jawaban yang sangat kontras dengan jawaban yang diberikan Al-Qur'an: "Kemana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah."⁵³

Dari seluruh perbincangan di atas, sebuah kesimpulan yang dapat diberikan adalah bahwa agama pada tingkatnya yang murni dan agung menawarkan keamanan ontologis dan sebuah fondasi spritual yang kokoh kepada sejarah dan filsafat. Wacana sejarah dan filsafat di atas fondasi religius akan memberikan dimensi baru dalam cara kita memandang dunia dan peradaban. Kita rindu melihat lahirnya sebuah peradaban dengan wajah asri, anggun, dan adil, sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh peradaban yang sekuler. Kerinduan ini adalah kerinduan *perennial*, kerinduan abadi semua umat manusia.

Sekarang sampailah saya kepada saat-saat akhir dari pidato ini. Kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan IKIP Yogyakarta, sekali lagi diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih khusus diucapkan kepada Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian, M.A., guru dan penilai karya-karya tulis saya untuk keperluan jabatan ini. Juga kepada seluruh guru yang pernah mengajar saya sejak dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, baik

dalam maupun luar negeri, rasa terima kasih yang tulus disampaikan pula. Kepada teman-teman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. M. Amien Rais bersama 12 anggota pimpinan yang lain disampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus. Kesibukan mengurus persyarikatan tidaklah menutup peluang untuk berkiprah di lingkungan kampus, berkat kerjasama yang baik selama ini. Hanya Allah saja yang dapat membalas semua kebaikan, ketulusan dan kerjasama kita. Kepada ayah dan bunda, Makrifah-Fathiyah, ayah dan ibu mertua, Halifah- Sarialam, walaupun telah tiada, dari mimbar ini dengan segala ketundukan hati diucapkan rasa hutang budi yang setulus-tulusnya. Tanpa kebaikan dan santunan mereka mungkin tidak jauh perjalanan yang dapat ditempuh dan dilalui. Semoga arwah mereka diterima Allah dan ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan amal-baktinya selama hayat. Kepada isteriku Nurkhalifah dan anakku Mohammad Hafiz yang telah be-tah hidup bersama dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan “perang” dan damai, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terbatas. Semoga perjalanan ini seterusnya akan berujung dengan *husnal khatimah* pada akhirnya. Amien!

PENUTUP

Karena sejarah, filsafat, dan agama bersahabat karib dengan sastra dan puisi, maka izinkanlah saya menyudahi pidato ini dengan membacakan sajak Iqbal di bawah :

Apakah engkau dalam tahap ‘hidup’, ‘mati’, atau ‘mati dalam hidup’?

Panggillah bantuan tiga saksi untuk mentahkikkan ‘stasiun’mu.

Saksi pertama adalah kesadaranmu sendiri

Tengoklah dirimu, kemudian, melalui cahayamu sendiri.

Saksi kedua adalah kesadaran ego lain

Lalu, lihatlah dirimu melalui cahaya ego lain selain darimu.

Saksi ketiga adalah kesadaran Tuhan

Kemudian, tiliklah dirimu melalui cahaya Tuhan.

Sekiranya engkau mampu berdiri tanpa goyang di depan cahaya

ini,

Anggaplah dirimu sendiri sebagai hidup dan abadi penaka Dia!

Hanya manusia sendirilah yang benar-benar berani

Berani berhadapan muka dengan Tuhan!

Apakah 'mikraj itu'? Hanyalah pencarian sebuah saksi

Yang boleh jadi akhirnya memastikan realitasmu

Sebuah saksi penegasan yang membuatmu abadi.

Tak seorang pun mampu berdiri tanpa goyang di hadapan-Nya;

Dan dia yang mampu, sungguh, dia adalah mas murni.

Apakah engkau hanyalah sebutir debu ?

Kuatkanlah ikatan egomu ;

Dan peganglah erat ujudmu yang mungil !

Alangkah agungnya mengilapkan ego seseorang

Dan ujilah kilapan ini di depan Matahari !

Lalu, oraklah lagi bingkaimu yang lama;

Dan bangun ujud yang baru.

Ujud itu adalah ujud yang sebenarnya;

Atau bila tidak, egomu itu hanyalah gumpalan asap belaka!

Jawid Nama⁵⁴

CATATAN BELAKANG

1. Al-Qur'an, s. al-Isra': 85.
2. Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*. Kairo: Mustafa Mahmud, t.t., hlm.4.
3. Lih. Muhsin Mahdi, *Ibn Khaldun's Philosophy of History*. Chicago: the University of Chicago Press, 1971, hlm. 294-295.
4. *Ibid.*
5. Allan Nevins, *The Gateway to History*. Garden City, New York: Doubleday & Company, 1962, hlm. 14.
6. Dikutip dalam George Dennis O'Brien, *Hegel on Reason and History : A Contemporary Interpretation*. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1975, hlm. 159.
7. *Ibid.*
8. Benedetto Croce, *My Philosophy*. selected by R. Kalibansky and translated by E.F. Carritt. London: George Allen & Unwin, 1951, hlm. 198; lih. juga H. Wildon Carr, *The Philosophy of Benedetto Croce*. London: Macmillan & Co., 1971, hlm. 189.
9. Croce, *loocit.*

10. Carr, *op.cit.*, hlm. 200.
11. Lih. Richard V. Burks, "Benedetto Croce (1866-)" dalam Bernadotte E. Schmitt (ed.), *Some Historians of Modern Europe: Essays in Historiography*. New York : Kennikat Press, 1966, hlm. 77.
12. *Ibid.*
13. Philip K. Hitti, *Makers of Arab History*. New York: Harper & Row, 1971, hlm. 251.
14. Biografi Politik Hatta yang cukup komprehensif dapat dibaca dalam Deliar Noer, *Mohammad Hatta : Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1990. Deliar sangat berjasa dalam mengungkap perjalanan politik tokoh proklamator ini berdasarkan penelitian yang luas, termasuk pada perpustakaan pribadi Hatta.
15. Mochtar Lubis, "Bung Hatta Manusia Berdisiplin" dalam Meutia Farida Swasono (ed.), *Bung Hatta : Pribadinya dalam Kenangan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan dan Penerbit Universitas Indonesia, 1980, hlm. 585.
16. *Ibid.*
17. Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press, 1977, hlm. 19.
18. Lih. Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, *Buku Petunjuk Kongres Nasional Sejarah 1966*. Jakarta: 1996, hlm.6.
19. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *The Philosophy of History*, terjemahan J. Sibree. New York: Dover Publications, 1956, hlm. 9.
20. Nevins, *op.cit.*, hlm. 264.
21. Dikutip dari Hans Meyerhoff (ed.), *The Philosophy of History in Our Time*. New York: Doubleday Anchor Books, 1959, hlm. 25.
22. St. Augustine, *The City of God ("De civitate Dei") : An Abridged Versions*, from the translation oleh Gerald G. Walsh, Demetrius B. Zema, Grace Monahan, and Daniel J. Honan, diedit oleh Vernon J. Bourke. New York: Image Books, 1962. Buku ini ditulis Augustine adalah sebagai jawaban teologisnya terhadap tuduhan jatuhnya Kota Roma adalah karena telah dikristenkan. Tuduhan ini dibantah keras oleh Augustine sebab kejatuhan Roma justru karena kurang kekristenannya. (Lih. Buku I hlm. 39-65). Seperti kita ketahui bahwa Kota Roma jatuh ke tangan Alaric pada 410 dengan melakukan perampokan dan penjarahan di kota itu. Kemudian bertebarlah isu bahwa malapetaka ini terjadi adalah karena Kota Rome telah menjadi Kristen. Karya ini dikerjakan selama 13 tahun (413-426).
23. Lih. Ronald H. Nash (ed.) *ideas of History*, 2 vol. New York: E.P Dutton & Co., 1969, I:XV-XVI.
24. Lih. Patrick Gardiner, *The Nature of Historical Explanation*. London- Oxford- New York: Oxford University Press, 1968, hlm. X-XII.
25. R.G. Collingwood, *The Idea of History*. New York: Oxford University Press, 1956, hlm. 148.
26. *Ibid.*
27. *Ibid.* hlm. 149.
28. *Ibid.*, hlm. 151.
29. Angelo A. De Gennaro, *The Philosophy of Benedetto Croce: An Introduction*. New York: Philosophical Library, 1961, hlm. 10-11.

30. Burks, *op.cit.*, hlm. 75.
31. Edward Hallett Carr, *What Is History?* New York: Alfred A Knopf 1965, hlm. 71.
32. *Ibid.*, hlm. 35.
33. Meyerhoff, *op.cit.*, hlm. 19.
34. Lih. G.J. Reiner, *History: Its Purpose and Method*. New York: Harper & Row, 1965, hlm. 22.
35. Pieter Geyl, *Debates with Historians*. New York: Meridian Books, 1960, hlm. 180.
36. A.J. Toynbee, *Surviving the Future*. New York & London: Oxford University Press, 1973, hlm. 57-58.
37. Lih. Marvin Perry, *Arnold Toynbee and the Crisis of the West*. Washington, D.C.: University Press of America, 1982, hlm. 116.
38. A.J. Toynbee, *A Study of History* (a new edition revised and abridged by the author and Jane Caplon). London: Oxford University Press, 1972, hlm. 492.
39. *Ibid.*, hlm. 275-276.
40. Jack Kemp, "Its Time for a Spiritual Renaissance, USA Today, Vol. 123, No. 2600 (May 1995), 34.
41. *Ibid.*
42. *Ibid.*
43. Lih Marjorie Grene, *introduction to Existentialism*. Chicago & London. The University of Chicago Press, 1970, hlm. 122-127; juga lih. James Collin, *God in Modern Philosophy*. Chicago: Henry Regnery Company, 1967, hlm. 370-376.
44. Karl Jaspers, *The Origin and Goal of History*, terj. Michael Bullock. New Haven and London: Yale University Press, 1968, hlm. 275.
45. *Ibid.*, hlm. 275-276.
46. *Ibid.*, hlm. 276.
47. Lih. tafsiran Muhammad Asad tentang *al-ghaib* (al-Baqarah:3) dalam *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980, hlm. 4 catatan no. 3.
48. Perry. *op.cit.* hlm. 23 & 29.
49. Lih. Etienne Gilson, *God and Philosophy*. New Haven & London: Yale University Press, 1969, hlm. 141 catatan no. 20 bawah.
50. Lih. catatan no. 45.
51. Al-Qur'an, s. al-Rahman: 26-27; lih. juga Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*. Minneapolis-Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980, hlm. 1-16. Masalah-masalah filosofis mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta sebagian saya dasarkan pada karya ini.
52. Lih. Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994, hlm. 214.
53. Al-Qur'an, s. al-Baqarah: 115.
54. Dikutip dan diterjemahkan dari Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1971, hlm. 178-179.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Asad, Muhammad, *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar al-Andalus 1980.
- Burks, Richard V, "Benedetto Croce (1866)" dalam Bernadotte E. Schmitt (ed.), *Some Historians of Modern Europe: Essays in Historiography*. New York: Kennikat Press, 1966.
- Carr, Edward Hallett, *What Is History?* New York: Alfred A. Knopf, 1965.
- Carr, H. Wildon, *The Philosophy of Benedetto Croce*. London: Macmillan & Co., 1917.
- Collin, James, *God in Modern Philosophy*. Chicago :Henry Regnery Company, 1967.
- Collingwood, R.G., *The Idea of History*. New York: Oxford University Press 1956.
- Croce, Benedetto, *My Philosophy*. selected by R. Kalibansky and translated by E.F. Carritt. London: George Allan & Unwin, 1951. Dep. Pend. dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, *Buku Petunjuk Kongres Nasional Sejarah 1996*. Jakarta: 1996.
- Gardiner, Patrick, *The Nature of Historical Explanation*. London-Oxford-New York: Oxford University Press, 1968.
- Gennaro, Angelo A. De, *The Philosophy of Benedetto Croce: An Introduction*. New York: Philosophical Library, 1961.
- Geyl, Pieter, *Debates with Historians*. New York: Meridian Books, 1960.
- Gilson, Etienne, *God and Philosophy*. New Haven & London: Yale University Press, 1969.
- Grene, Marjorie, *Introduction to Existentialism*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.
- Hatta, Mohammad, *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press, 1977.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, *The Philosophy of History*. terj. J. Sibre. New York: Dover Publications, 1956 .
- Hitti, Philip K., *Makers of Arab History*. New York: Harper& Row, 1971.
- Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*. Kairo: Mustafa Mahmud, t.t.
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1971.
- Jaspers, Karl, *The Origin and Goal of History*. terj. Michael Bullock. New Haven and London: Yale University Press, 1968.
- Kemp, Jack, "It's Time for a Spiritual Renaissance," *USA Today*. Vol. 123, No. 2600 (May 1955).
- Lubis, Mochtar, "Bung Hatta Manusia Berdisiplin," dalam Meutia Farida Swasono (ed.), *Bung Hatta: Pribadinya dalam Kenangan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan dan Penerbit Universitas Indonesia, 1980.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.
- Mahdi, Muhsin, *Ibn Khaldun's Philosophy of History*. Chicago: The University of Chicago Press, 1971.
- Meyerhoff, Hans (ed.), *The Philosophy of History in Our Time*. New York: Doubleday Anchor Books, 1959.
- Nash, Ronald H. (ed.), *Ideas of History*. 2 vol. New York: E P Dutton & Co., 1969.
- Nevens, Allan, *The Gateway to History*. Garden City, New York; Doubleday & Company, 1962.

- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- O'Brien, George Dennis, *Hegel on Reason and History: A Contemporary Interpretation*. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1975.
- Perry, Marvin, *Arnold Toynbee and the Crisis of the West*. Washington, D.C.: University Press of America, 1982.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*. Minneapolis-Chicago: Biblioteka Islamica, 1980.
- Renier, G.J., *History: Its Purpose and Method*. New York: Harper & Row, 1965.
- St. Augustine, *The City of God: An Abridged Version*. from the translation by Gerald G. Walsh, Demetrius B. Zema, Grace Monahan, and Daniel J. Honan, diedit oleh Vernon J. Bourke. New York: Image Books, 1962.
- Toynbee, A.J., *A Study of History* (new edition revised and abridged by the author and Jane Caplon). London: Oxford University Press, 1972.
-*Surviving the Future*. New York and London: Oxford University Press, 1973

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Syafii Maarif
 Tempat, tanggal lahir : Sumpurkudus (Sumatra Barat) 31 Mei 1935
 NIP : 130321365
 Agama : Islam
 Nama Orang Tua : Makrifah/Fathiyah
 Status Keluarga : Kawin pada 5 Februari 1965
 Nama Istri : Nurkhalifah
 Jumlah/nama anak : Satu/Mohammad Hafiz
 Pangkat/golongan : Pembina Tk. I, IV/b
 Jabatan/TMT : Guru Besar Madya pada FPIPS IKIP Yogyakarta,
 1 September 1996

Pendidikan

Sekolah Rakyat 5 Tahun di Sumpurkudus _____ 1947
 Madrasah Muallimin Lintau dan Yogyakarta _____ 1956
 Sarjana Muda FKIP Univ.Cokroaminoto Solo _____ 1964
 Sarjana Pendidikan Sejarah FKIS IKIP Yogyakarta _____ 1968
 M.A. Departemen Sejarah, Univ. Ohio, A.S _____ 1980
 Ph.D. Departemen Bahasa dan Peradaban Timur Dekat. Chicago, Amerika Serikat _____ 1983

Riwayat Pekerjaan

Asisten Dosen pada FKIS IKIP Yogyakarta. _____ 1967 – 1968
 Dosen FPIPS IKIP Yogyakarta _____ 1968 – sekarang
 Dosen Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga _____ 1983 – 1990
 Dosen Tamu pada Univ. IOWA _____ 1986
 Dosen Pasca Sarjana UNS Surakarta _____ 1987 – 1990
 Pensyarah Kontrak pada Univ.Kebangsaan Malaysia _____ 1990 – 1992
 Profesor Madya Madya Tamu pada Univ. McGill, Kanada _____ 1993 – 1994
 Guru Besar Madya IKIP YOGYAKARTA _____ 1996 –
 Dosen Pasca Sarjana Univ.Muh.Surakarta _____ 1996 –

Keterkaitan antara sejarah, filsafat dan agama

Dosen Pasca Sarjana Univ.Muh.Malang _____ 1996 –

Kegiatan Lain

Pengurus Masyarakat Sejarawan Cabang Yogyakarta _____ 1990- 1996

Wakil Ketua PP Muhammadiyah _____ 1995 – 2000

Pengalaman Administratif

Ketua Jur. Pendidikan Sejarah FKIS IKIP YK _____ 1972- 1975

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam

Univ. Muhammadiyah Yogyakarta _____ 1990 - sekarang

Pengalaman Jurnalistik

Pemimpin Redaksi Suara Muhammadiyah _____ 1988 – 1990

Staf Ahli Jurnal Ulumul Qur'an _____ 1988 – sekarang

Anggota Dewan Redaksi Suara Muhammadiyah _____ 1994 – sekarang

Penasehat Jurnal Inovasi Univ. Muhammadiyah _____ 1995 - sekarang

Basiswa

Fulbright untuk M.A _____ 1976 – 1978

USAID/Ford Foundation untuk Ph.D _____ 1978 - 1983

Publikasi (tidak semua publikasi disertakan dalam daftar).

Buku

Islam, Mengapa Tidak? Yogyakarta. Shalahuddin Press,1984.

Islam di Indonesia: Sebuah Potret. Yogyakarta. Shalahuddin Press 1984.

Al-Qur'an, Realitas Sosial, dan Limbo Sejarah. Bandung: Pustaka. 1985.

Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES, 1987.

Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin, 1959- 1965. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.

Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1994.

Membumikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955.

Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Islam dan Politik: Teori Belah Bambu (Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965) (cet. revisi). Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Islam (Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997 (akan terbit).

Artikel/Esai (dalam buku dan jurnal)

“Islam, Politik, dan Demokrasi di Indonesia” dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (ed.), Aspirasi Islam Indonesia. Jakarta: Leppenas, 1983.

“Dekrit Tuhan dan Jawaban Manusia” dalam Ahmad Syafii Maarif/Mohammad Diponegoro, Percik-Percik Pemikiran Iqbal. Yogyakarta : Shalahuddin Press, 1983.

“Islam dan Konstituaionlisme: Pengalaman Indonesia”. Prisma. No. Ekstra, 1984.

“Islam and Nationalism in Indonesia: A Historical Perspective.” Mizan. Vol. II, No. 1 (1985).

- “Islam Indonesia: Pergumulan antara Cita dan Kenyataan” dalam M. Amien Rais (ed.), *Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri* Jakarta: Rajawali, 1986.
- “Islam dan Cita-Cita Sosial”. *Pesantren*. Vol. VI, No. 3(1989).
- “Islam dan Barat (Menapak Jejak Sejarah yang Panjang dan Berliku” dalam Abdurrahman. Burhanuddin Daya, Djam’annuri (ed.), *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- “Muhammadiyah dalam Konteks Intelektual Muslim” dalam Kelompok Studi Lingkaran (ed.), *Intelektualisme Muhammadiyah. Menyongsong Era Baru*, Bandung: Mizan, 1995.
- “B.J. Habibie: Simbol dari Sebuah Kebangkitan” dalam A. Makmuur Makkah (ed.). *60 Tahun B.J. Habibie*. Jakarta : Pustaka Cidesindo, 1996.
- “Ibn Khaldun: Pemikirannya tentang Sejarah dan ‘Ilm al-‘Umran (Kajian Kritis terhadap Wacana Kontemporer tentang al- Muqaddimah)” *Inovasi*. No.1 Th. VII (1996).

Makalah (yang terbaru)

- “Kemerdekaan dan Masa Depan Indonesia”. Disampaikan dalam Seminar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Kampus Bina Darma. Salatiga. 17-23 Sep. 1995.
- “Keretakan antara Etika dan Kebijakan”. Disampaikan dalam Seminar “Soedjatmoko: Cendekiawan, dan Masa Depan Indonesia”. Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Perubahan Sosial Univ. Gadjah Mada, Yayasan Soedjatmoko, dan Yayasan Prakarsa. Yogyakarta, 10 Jan. 1996.
- “Demokrasi dan Nasionalisme: Pengalaman Indonesia”. Disampaikan pada Seminar Bulan Sejarah. Jurusan Sejarah FPIPS-IKIP YOGYAKARTA, 26-27 Mei 1996.
- “Iqbal’s Philosophy of Action”. Disampaikan dalam Seminar Internasional tentang Islamic Theology and Philosophy. Diselenggarakan oleh Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakultas Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 10-12 Juni 1996.
- “Kajian Nilai-Nilai Dasar Keislaman dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi.” Disampaikan dalam Seminar Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia, diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta dan PPSK Yogyakarta, 3 Agustus 1996.
- “Format Politik Kita: Sebuah Refleksi”. Disampaikan dalam Forum Interfedei di Kampus Universitas Duta Wacana, Yogyakarta, 10 Agustus 1996.
- “Dakwah Bi al-Hai Programme as Implemented in Indonesia (A Rough Description of the Muhammadiyah’s Social Works)”. Disampaikan dalam Seminar Riseap, Kuala Lumpur, 6-10 Sep.1996.
- “Peranan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam Mewujudkan Misi Persyarikatan Muhammadiyah”. Disampaikan di depan Sivitas Akademika Akademi Keuangan dan Perbankan Muhammadiyah (AKPM). Jakarta, 16 Sep. 1996.
- “Demokrasi di Indonesia: Sebuah Latihan”. Disampaikan pada Seminar “Sejarah dan Pembangunan Bangsa”, diselenggarakan oleh MSI Cabang Yogyakarta, Fakultas Sastra Univ. Gadjah Mada, Museum Benteng dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta, Yogyakarta, 5 Okt. 1996.
- “Cita-cita Pergerakan Nasional dan Bangunan Politik Bangsa dalam Perspektif Sejarah Indonesia Modern.” Disampaikan dalam Kongres Nasional Sejarah; Jakarta, 12-15 Nop. 1996.

PARADIGMA BARAT DAN ISLAM DALAM DINAMIKA BANGSA

Pidato Pengukuhan Guru Besar Diucapkan di depan Rapat Terbuka Senat
Universitas Negeri Yogyakarta Pada hari Sabtu, 24 Juni 2000

PROF. DR. HUSAIN HAIKAL, MA.

Guru Besar Madya Ilmu Sejarah Eropa
Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta



PARADIGMA BARAT DAN ISLAM DALAM DINAMIKA BANGSA

Bung Karno:

“... bangsa yang dikoengkoeng oleh kapitalisme yang terpetjah-belah di dalam kelas-kelas yang memoesoehi satoe sama lain, akan menoenjoekkan di dalam onder-wijs [pengajaran]nja semoea terpetjah-belahan, semoea pertikaian dan pertjideraan, semoea nafsoe-nafsoenja penderitaan dan perdjoengan, semoea koeman-koemannya divide et impera [pecah-belah dan kuasai] yang asalnja dari koengkoengan kapitalisme itu”.

D i hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, izinkanlah saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan berbagai rahmat, anugerah, dan kenikmatan yang tak terhingga nilainya. Dengan rahmat-Nya, akhirnya saya berpeluang mengucapkan pidato pengukuhan. yang banyak didambakan siapa saja yang mengemban tugas sebagai tenaga edukatif di perguruan tinggi. Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih setulusnya kepada Mendiknas dan stafnya. Demikian pula kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, sekretaris Senat, semua anggota Senat, Dekan FIS, Ketua Jurusan Sejarah dan semua pihak yang banyak membantu secara langsung ataupun tidak langsung sehingga saya mampu berada di depan yang terhormat Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, teman-teman serta keluarga.

Dengan rahmat-Nya dan bantuan tersebut, saya mampu berada dalam kedudukan sekarang, sekalipun banyak sekali kekurangan dan kelemahan saya. Untuk itu izinkanlah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau pun ada kelebihan adalah berkat rahmat Allah swt. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan anugerah pada kita semua, *amin ya Rabbal alamin*. Saya mengucapkan terima kasih atas ketenangan dan kesabaran para hadirin untuk tetap santai, sambil mendengarkan pidato pengukuhan yang berjudul *Paradigma Barat dan Islam dalam Dinamika Bangsa*.

A. PENDAHULUAN:

Dalam minggu ini umumnya bangsa Indonesia masih dalam suasana *khaul*¹ Bung Karno, salah seorang proklamator² kemerdekaan Indonesia. Suasana penuh keprihatinan ini menyentuh hati, karena akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan pada berbagai bahaya, salah satunya adalah ancaman disintegrasi nasional. Apakah yang susah payah dibangun *founding fathers*, dengan darah dan air mata serta meminta banyak kurban, akan berantakan? Lebih menyedihkan lagi pujian A. J. Toynbee dalam *East to West A Journey around the World* mengenai toleransi sesama umat beragama di Indonesia, makin dipertanyakan keabsahannya. Sudah berbilang tahun, atas nama agama yang penuh cinta kasih sesama anak bangsa saling berbunuhan.

Bercermin pada realita ini, *khaul* Bung Karno makin terasa lebih bermakna. Suasana *khaul* terasa kental di Blitar tempat beliau disemayamkan. Mernbentangkan atau menyajikan soal *khaul* Bung Karno berarti menyajikan Islam yang menjadi anutan mayoritas bangsa Indonesia. Kajian mengenai sejarah Islam di Indonesia relatif kurang mendapatkan perhatian untuk waktu yang lama. Realita yang memprihatinkan ini pernah diketengahkan dalam disertasi cendekiawan mancanegara yang cukup produktif, H. J. Benda, tapi sayangnya dia meninggal dalam usia relatif muda³. Lebih jelasnya tolong direnungkan apa yang diketengahkan

- 1 *Khaul* atau *khol* “... merupakan salah satu bentuk upacara peringatan atas wafatnya seseorang yang sudah dikenal sebagai pemuka agama Islam, baik itu Wali atau Ulama atau orang Islam yang mempunyai jasa besar terhadap masyarakat. Upacara ini lazimnya diadakan pada tiap-tiap setahun sekali yang bertepatan dengan hari-hari wafatnya”. (Lihat I. Abdul Manan (1981), Peringatan Khol Bagaimana Sebenarnya Menurut Hukum Islam, Bangil: Pustaka Abdul Muis, p. 11. C. F. Intran ABA (1980), Peringatan Khaul Bukan dari Ajaran Islam adalah Pendapat Yang Sesat, Kudus: Menara Kudus; dan Imron A. M, Peringatan Khaul Bukan dari Ajaran Islam, Surabaya: Bina Ilmu).
- 2 Proklamator lainnya adalah Bung Hatta yang dilahirkan di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902 dan wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo, pada Jum’at 14 Maret 1980. (Lihat selanjutnya Yayasan Idayu (penyusun) (1982), Bung Hatta Kita dalam Pandangan Masyarakat, Jakarta: Yayasan Idayu)
- 3 Disertasi Benda dinilai berbobot tinggi, sebagai hasil paduan penelitian sejarah yang cermat dan pandangan Sosiologi yang tajam. Apalagi Benda diuntungkan bukan sebagai mantan birokrat Belanda dan bukan pula sebagai cendekiawan hasil didikan Belanda. (Lihat W. F. “Kata Pengantar”, dalam Harry J. Benda (1980), “The Crescent and the Rising Sun, Indonesian Islam under the Japanese Occupation, - 1942-1945 “a. b. Daniel Dhakidae dengan suntingan Alfian, Bulan Sabit dan Matahari Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang, Jakarta: Pustaka Jaya, pp. 9--9.

kannya dalam baris-baris berikut:

Sejarah Islam Indonesia, di pihak lain, relatif tidak mendapat perhatian dalam kebanyakan karya mereka, yang tidak jarang memberikan tempat lebih kecil kepada gerakan-gerakan Islam dalam pertumbuhan nasionalisme Indonesia. Penulisan seperti ini cenderung untuk mengaburkan bukan saja pentingnya Islam Indonesia itu sendiri, akan tetapi juga perbedaan-perbedaan yang mendalam antara para pemimpin Muslim dan kelompok-kelompok sosial dan politik Indonesia lainnya, baik yang tradisional maupun yang modern, di jaman [*sic.*] kolonial⁴.

Dalam kaitan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, hampir semua pakar sejarah sepakat bahwa Islam masuk secara damai. Hanya saja dalam hal waktu masuknya dan pembawa Islam ke Nusantara ini, sekurang-kurangnya terdapat dua pendapat. Snouck Hurgronje menekankan Islam datangnya dari India, dibawa pedagang India, dan masuk ke Indonesia setelah Islam berada dalam titik nadirnya. Antara lain dia telah menuliskan pandangannya dalam beberapa baris berikut:

Hanya kira-kira setengah abad saja sebelum saat yang bersejarah itu agama Islam perlahan-lahan mulai merembes ke kepulauan Hindia Timur. Tidak ada kekuasaan negara yang campur tangan dalam gerakan ini; penyebaran agama yang berlangsung berangsur-angsur ke negara-negara pantai Sumatera, Jawa, dan juga negara-negara pesisir Kalimantan dan Sulawesi, dan pulau-pulau kecil yang demikian banyaknya itu, pertama-tama adalah usaha-usaha saudagar Islam. Juga para penyetap dari negara-negara sebelah barat, dan usaha itu kemudian hingga kini dilanjutkan oleh orang-orang pribumi sendiri yang sudah masuk Islam⁵.

Apa yang disajikan Hurgronje di atas, diikuti umumnya para cendekiawan Barat dan sebagian cendekiawan Indonesia. Hanya saja pada 1963, dalam Seminar Masuknya Islam di Indonesia, Hamka menampilkan pendapat yang menyangkal pandangan Hurgronje yang telah mulai mapan. Sebagai ulama yang melahir-

4 Ibid., p. 19.

5 C. Snouck Hurgronje (1983), "De Islam in Nederlandsch-Indie", a. b. S. Gunawan, Islam di Hindia Belanda, Jakarta: Bhratara, p. 9.

kan berbagai karya dalam berbagai bidang⁶, Hamka menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriyah. Islam telah masuk ke Indonesia pada zaman daulah bani Umayyah. Para pendakwahnya adalah muslim Arab, bukan muslim dari India⁷. Apalagi Islam bertunas dan berkembang dengan pesat, bukan dengan cara “adhesi”⁸, atau “konversi”⁹, tapi secara fitrah, alami. Menurut cendekiawan dari Asia Selatan, Khurshid Ahmad: *“Islam has been an absorbing religion rather than a converting religion.”*

B. PARADIGMA BARAT DAN PARADIGMA ISLAM:

Melihat perbedaan penafsiran sejenis ini, sering seseorang melihat sejarah dengan nada pesimis. Penglihatan sejenis ini senada dengan Gilbert Keith Chesterton yang mengatakan bahwa: *“History is only a confused heap of facts.”* Perbedaan pendapat Hurgronje dengan pendapat Hamka, seperti disajikan di atas, lebih disebabkan perbedaan paradigma. Paradigma Hurgronje erat berkaitan dengan *tabii* atau keadaan alaminya. Sebagai umumnya orang Belanda, apalagi yang menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda, mereka mempunyai sikap kurang, bahkan tidak bersahabat terhadap kaum pribumi. Wajarlah apabila sebagian mereka selama bertahun-tahun berusaha menghancurkan Islam, sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Segala cara akan dilakukan untuk mencapai tujuan ‘mulia’ penjajah Belanda.

Dalam berbagai tulisannya yang bersifat ‘ilmiah’ nampak sekali Hurgronje mempunyai agenda khas, baik secara tersembunyi atau disajikan secara terang-terangan. Dalam berbagai contoh tu-

6 Hamka (1908-1981) mulai menulis sejak tahun 1925, saat beliau masih belia, berusia sekitar 17 tahun. Sebagai ulama beliau antara lain telah menulis *Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, Negara Islam. Revolusi Agama, dan Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi.*

7 Risalah Seminnar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia di Medan, 1963, pp. 87- 92. C. f Ibrahim Boechori (1971), *Sedjarah Masuknja Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia*, Djakarta; Publicita.

8 --;-"Adhesi" mengacu kepada tindakan memeluk agama nonprofetis.

9 "Konversi" mengacu kepada tindakan memeluk agama profetis. Mudah-dipahami bila proses Islamisasi masyarakat di Indonesia biasa dikategorikan "konversi", sekalipun banyak yang membantah, karena Islam adalah sebuah agama profetis yang menuntut komitmen tanpa syarat untuk mencapai keselamatan.

lisannya, arsitek jempolan politik Islam pada zaman penjajahan Belanda, selalu menunjukkan superioritas budaya dan negara Eropa yang akan dapat melumpuhkan Islam dengan kajian ilmiah'. Untuk lebih jelasnya tolong direnungkan salah satu contoh tulisan Hurgronje dalam *Selected Works of C. Snouck Hurgronje*, p. 256 dalam baris-baris berikut:

Therefore it [the Islamic law] remains, and still is for us too, an important subject of study, not only for abstract reasons connected with the history of law, civilization and religion, but also for practical purposes. The more intimate the relations of Europe with the Muslim East become, the more Muslim countries fall under European suzerainty, the more important it is for us Europeans to become acquainted with the intellectual life, the religious law, and the conceptual background of Islam¹⁰.

Wajar dan sukar dibantah apa yang disajikan, tokoh PKB, dan cendekiawan yang *mumpuni*, Alwi Shihab tentang kebijakan politik Islam zaman penjajahan Belanda. Tokoh yang saat sekarang menjadi menteri luar negeri RI ini telah menuliskan sebagai berikut:

Bagi Belanda, Islam adalah ancaman bagi eksistensinya di Indonesia. Suatu hal yang harus selalu diingat bahwa para orientalis masa penjajahan adalah bagian dari mesin pemerintah kolonial yang memiliki agenda yang sama, yakni melestarikan pemerintahan kolonial dan membendung pengaruh Islam. Van den Berg [termasuk Hurgronje dan kawan-kawannya] tentunya bukanlah suatu pengecualian¹¹.

Dalam paradigma Barat, agama merupakan salah satu cabang kegiatan manusia seperti antropologi, budaya, hukum, seni serta sejenisnya. Segala sesuatunnya lebih dilihat sebagai bagian dari konflik.

Sekiranya mampu dikelola dengan bijak lahirlah berbagai kompetisi yang bermakna. Apabila gagal dengan pendekatannya, berarti perang yang cukup dahsyat sebagaimana perang yang bersifat lokal atau antar negara sampar dengan apa yang dike-

10 Edward W. Said (1979), *Orientalism*, New York: Vintage Books, p. 256.

11 Alwi Shihab (1998a), *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, p. 322.

nal sebagai perang dunia. Dalam pengalaman sejarahnya, setelah para penganutnya dikejar-kejar dan banyak dibunuh, agama Nasrani secara mantap setelah Konstantin menjadikannya sebagai agama negara. Hanya saja, sejarah merekam betapa para penguasa agama menggunakan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan, agar agama Nasrani dianut rakyat. Mereka yang beragama lain, mengalami nasib seperti para penganut Nasrani pada tiga abad pertama masehi. Yang lebih menyedihkan lagi, selama agama Nasrani memegang peran utama, seperti pada masa abad tengah, atau abad gelap, terjadi *kemandekan* dalam bidang dan teknologi. Benar-benar Eropa pada masa itu dalam kemunduran. Wajarlah apabila Nasrani dianggap sebagai *part of the problem* dan bukan *part of the solution* dalam dinamika sejarah mereka.

Hampir identik dengan Isa, atau Jesus, beserta para pengikutnya, Muhammad beserta para pengikut setianya mengalami berbagai penyiksaan. Bahkan, banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada. Hanya saja perjalanan sejarah Islam kemudian cukup berbeda dengan Nasrani, karena sejak Muhammad masih hidup, Islam telah *mapan*, bahkan Muhammad telah menjadi “raja” tanpa mahkota. Segala sesuatunya bukan sebagai dikhotomi¹² atau konflik tapi lebih sebagai proses dan bersifat himbuan bukan dengan kekerasan, menghindari konflik kecuali karena terpaksa. Konflik bahkan perang tidak dapat dihindari kalau untuk mempertahankan diri. Wajarlah apabila lahir beberapa tulisan yang mengaguminya. Pada abad-abad berikutnya, kaum muslimin telah tampil sebagai pembawa budaya dan ilmu pengetahuan yang cukup piawai¹³.

Pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai sejarah dan budaya umat Islam, membuat Hamka berupaya membumikan Islam secara utuh di pertwi ini. Baginya, Islam adalah segala-

12 Dikhotomi abangan dan santri; tetap, kalau dilihat sebagai tahapan saja sehingga dengan proses yang ada, sebagian abangan akan menjadi santri, dan seterusnya.

13 Tolong dikaji Hossein Nasr (1984), *Science and Civilization in Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar; A. Baiquni (1983), *Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern*, Bandung: Pustaka; Ahmad As Shauwy [et. al] (1999), *Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press; dan Abdul Majid bin Aziz al-Zindani [et. al] (1999), *Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press; Shahrir M. Zain (1988), *Pengenalan Tamadut; Islam; dalam Sains and Teknologi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

galanya. Tentunya sudut pandangnya tentang Islam selalu bersifat positif sekalipun tetap dalam bingkai yang objektif. Baginya Islam bermakna sejalan dengan uraian Hammudah Abdalati sebagai berikut:

The word Islam is derived from the Arabic root "SLM" which means, among other things, peace, purity, submission and obedience. In the religious sense the word Islam means submission to the Will of God and obedience to His Law. The connection between the original and the religious meanings of the word is strong and obvious. Only through submission to the Will of God and by obedience to His Law can one achieve true and enjoy lasting purity¹⁴.

Sekiranya uraian Abdalati dinilai belum pas, ada baiknya disajikan hasil kajian cendekiawan Barat saja. Untuk ini ada baiknya disajikan kajian populer Hendrik Willem van Loon. Dalam uraiannya, Van Loon menyetengahkan sebab-sebab mudahnya Islam diterima para pemeluknya, dan berkembang pesat setelah bertunas di suatu daerah. Baris-baris uraiannya terasa padat dan dapat menyajikan Islam secara utuh serta mudah dipahami:

... the creed which Mohammad taught to his followers was very simple. The disciples were told that they must love Allah, the Ruler of the World, the Merciful and Compassionate. They must honour and obey their parents. They were warned against dishonesty in dealing with the neighbours and were admonished to be humble and charitable to the poor and to the sick. Finally they were ordered to abstain from strong drink and to be very frugal in what they ate. That was all. There were no priests, who acted as shepherds of their flocks and asked that they be supported at the expense¹⁵.

Berbeda dengan agama yang dipeluk umumnya warga Barat, Islam bukan sekedar agama yang hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan Khaliknya. Islam merupakan teras dari setiap tindakan umat Islam, baik dalam budaya, ekonomi, hukum,

14 Hammudah Abdalati (1977), *Islam in Focus*, Dainascus: The Holy Koran Pub., p. 7; cf Nurcholish Madjid, "Dialog Agama-agama dalam Perspektif Universalisme allIslam," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus A.F. eds. (1998), *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia, p. 7 & 21; dan A. Mukti Ali (1999), *Etika Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional dan Pembrantasan Kemaksiatan dari Segi Agama Islam*, Yogyakarta: Nida, p. 19.

15 Hendrik Willem van Loon (1960), *The Story-trAlankind*, New York: Washington Square Press BLik, p. 133.

serta sejenisnya. Islam adalah agama yang memberikan bingkai bagi para pemeluknya untuk hidup bermasyarakat dan berdialog dengan alam sekitarnya. Dalam kaitan inilah, orientalis piawai H.A.R. Gibb mengatakan: *“Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization.”* Jelaslah, Islam merupakan inti bagi segala niat, tarikan nafas, dan tindakan kaum Muslimin, kapan saja dan di mana saja. Sejalan dengan kalimat Gibb, ada baiknya diketengahkan apa yang ditulis seorang *eminent historian*, Henri Pirenne dalam salah satu karya monumentalnya, *Mohammed and Charlemagne*. Sejarahwan jempolan ini sangat kagum terhadap keberhasilan yang diraih kaum Muslimin dalam bidang ilmu dan budaya serta bersifat demikian toleran sebagaimana yang diajarkan Islam. Dalam bahasa Pirenne dituliskan sebagai berikut:

. . . they assimilated themselves to tizis civilization with astonishing rapidity; they learnt science from the Greeks, and art from the Greeks and the Persians. In the beginning, at all events, they were not even fanatical, and they did not expect to make convert of their subjects. But they required them[selves] to be ohedient to the one God, and His prophet Mahommed¹⁶,

C. BERAGAM PARADIGMA DALAM DINAMIKA BANGSA:

Pada awal abad XX dinamika keragaman paradigma di Indonesia makin mengental. Pada saat yang sama proses pembentukan bangsa tengah berlangsung. Salah satu ciri lain yang cukup menonjol adalah saling berhadapan paradigma Barat dengan paradigma Islam. Keadaan ini sebenarnya telah berlangsung cukup lama dalam sejarah dunia sejalan dengan uraian Stoddard berikut ini:

Pertentangan antara Timur dan Barat-Eropa dan Asia, oleh karena itu [telah] berlangsung berabad-abad. Hal ini telah terjadi sedjak peperangan Persia, duel jang lama dan tak menentu antara kerajaan Romawi dan Parthia Persia] sependjang perbatasan Timur. Syria. Sebagai telah kita katakan, orang-orang Sara-

16 Henri Pirenne (1974), *Mohammed and Charlemagne*, New York: Barnes & Noble, p. 150.

sin telah menghanturkan propinsi-propinsi kekaisaran Timur itu; dan untuk sementara waktu peperangan Salib telah mendesak kembali bangsa Timur, namun kejadian ini tak menentu hingga masuknja orang-orang Seldsjuk [*sic.*] dan Turki Osman kedalam Islam¹⁷.

Perang Salib berlangsung selama beberapa abad, dan telah mewariskan rasa curiga para pemeluk Islam dan Nasrani. Perang ini diawali dengan himbauan Paus Urbanus II, yang ingin menolong kaisar Romawi Timur. Dengan lantang paus menyerukan para pengikutnya agar: “. . . *enter upon the road to the Holy, . . . wrest it from the wicked race and subject it.*”¹⁸ Perang yang menimbulkan banyak bencana ini, juga membawakan rahmat¹⁹ Mengenai perang agama ini Bung Karno menuliskan sebagai berikut:

Tahun 1188 Masehi. Buat kedua kalinja kota Jeruzalem djatuh ketangan orang Islam, kini ketangan Sultan Salahuddin jang gagah perkasa buat kedua kalinja! Sebab ditahun 1099 kota itu dapat direbut oleh kaum Nasrani. Dibasmi habis-habisan, sehingga susah mentjari bandingnja di seluruh sedjarah manusia: Laki-laki, perempuan-perempuan, anak-anak Muslimin dibunuh mati, 70.000 orang Islam dibinasakan, djiwa raganja. Tetapi kini ditahun 1188 . . . Sultan Salahuddin dapat merampas kembali Jeruzalem itu ke dalam tangannja orang Islam. Muslim *orloogsethiek* didjalankan dengan sehalus-halusnja rasa kemanusiaan. Tidak setetes darah dialirkannja buat membalas dendamnja tahun 1099, tidak satupun rumah benda jang dibinasakan²⁰.

Apa yang disajikan Bung Karno dapat dikaji ulang dalam tulisan Hitti, *Makers of Arab History*. Yang lebih penting lagi realita ini memperkuat apa yang diketengahkan sejarawan piawai abad ini, mendiang Toynbee yang menyatakan bahwa: “. . . *in practice the Muslims caine to recognize that the adherents of all other higher religions had a moral claim to be tolerated by the followers of Islam on the implicit ground that they too, in their degree,*

17 L. Stoddard, (1966), “The Rising of Color”, a.b. Pan. Penerbit, Pasang Naik Kulit Berwarna, [tanpa kota dan badan penerbit] pp. 18-19.

18 P.K. Hitti (1951), *History of the Arabs*, New York: Mac Millan Co., p. 636.

19 Lihat H. Haikal, “Perang Salib Perang Pembawa Rahmat,” *Alijamiah*, Vol. XII, 1973, No. 2.

20 Soekarno, op. cit., p. 503.

*had been recipients of the revelation from the One True God*²¹.

Salah satu warisan penjajah yang sukar dilenyapkan, adalah kekaguman pribumi terhadap dunia Barat. Apalagi kekaguman mereka pada zaman penjajahan tentunya tambah hebat²². Sebagian kaum terpelajar terpesona dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dunia Barat. Mereka melihat Barat adalah segala-galanya serta patut dijadikan contoh yang utuh dan sempurna bagi pembangunan negaranya. Apalagi mereka yang beroleh pendidikan langsung dari Belanda, atau pendidikan Barat pada umumnya. Sulit dipisahkan mereka dari kekagumannya terhadap Barat. Salah satu contohnya dapat dilihat dari beberapa bagian sajak yang disajikan Dr. Rivai:

Sembah didjunglah kami
Seru mengundjung berami-rami
Ke-arasj Allah, Tuhan jang sami
Terhampar oetjap alami
Koningin EMMA, Baginda Soeri
Sep'rampat abad tachta di-Puri
Wangi-harumi bagai kasturi
Bani ihatat asoeh-atoeri
Soeri hadlirkan Mustika Bani
Kan jadi radja Nagra insani
Di Insulinda bagai disini
Satu ucapan[sic.]: Soeri Ihsani²³

21 A. J. Toynbec (1988), *A Study of History The One-Volume Edition*, London: Oxford Un. Press, p. 431, c. f pp. 240 dan 340.

22 Tolong dipahami secara jernih baris-baris berikut yang ditulis Romo Mangun: aduhai menerima hadiah dari Sri Ratu; satu ketip atau 10 sen. Bayangkan semua murid di seluruh Nederlandsch-Indie, anak kecil menerima 10 sen dari Sri Ratu, bayangkan! Itu terjadi, sebab kami adalah putra-putri sekolah priyayi Belanda, kendati pribumi. Dan bukan murid Wilde School atau 'pandu berpeci beledu hitam komunis.' (J. B. Mangunwijaya (1994), *Tumbal*, Yogya: Bentang, p. 17.)

23 Mochtar Lubis, "Pengantar", H. Baudet dan I.j. Brugmans (1987), "BaJams van Beleid," a.b. Amir Sutaarga, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta: Y01, p. ix.

Bagi kaum terpelajar yang melihat serta menghayati berbagai perkembangan yang ada, lebih-lebih mereka yang beragama Islam, ada yang merasa cemas. Dalam keadaan yang lebih memprihatinkan, mereka menjadi. 'bingung'. Dalam keadaan seperti ini, mereka melihat apa yang sedang berlaku di Turki. Di bawah pimpinan Mustafa Kemal, Turki secara mengagetkan dapat bangkit dan melepaskan diri dari berbagai serangan Barat yang menggerogoti negerinya. Satu per satu daerah Turki direbut negara-negara Barat. Dari Utara dengan ganasnya mereka mencaplok daerah-daerah Turki. Sementara Inggris secara mantap dan laju menggerogoti kawasan Turki dari Selatan. Sementara Perancis secara gampang menjarah daerah-daerah Turki dari Barat.

Dengan cara yang khas, Mustafa Kemal Attaturk mampu mengkonsolidasikan daerah Turki, serta mengusir kaum imperialis Barat. Dia berhasil melakukan semua itu dengan ideologi²⁴ sekularisasinya. Sejalan dengan paradigma Barat, secara bertahap dan sistematis dia menghapuskan segala sesuatu yang berbau Islam. Yang pertama-tama dilakukannya adalah menghapuskan sistem khilafah, kemudian diikuti dengan penggunaan huruf latin sebagai pengganti huruf Arab. Bahasa Turki juga "dimurnikan" dengan melenyapkan segala pengaruh bahasa Arab dan Persia.

Keberhasilan Attaturk mengalahkan negara-negara Barat, yang telah berhasil menggerogoti sebagian kawasan Turki, lebih disebabkan berkobarnya Perang Dunia I. Perang ini sebenarnya lebih merupakan perang saudara Eropa, karena sesama orang Eropa sendiri saling berperang. Terseretnya Amerika Serikat dalam perang ini lebih disebabkan akibat perang kapal selam tak terbatas yang dilancarkan Jerman. Kemudian Jepang terlibat dalam perang ini karena ingin menguasai beberapa daerah jajahan Jerman. Keadaan yang kemudian melumpuhkan Eropa ini tercermin dalam baris-baris berikut:

24 Ideologi adalah ".kerangka berpikir konsepsional, ia akan mengalami uji coba dalam pengalaman yang kongkret. Sifat dinamis dari ideologi ialah kemampuannya untuk menyerap pengalaman-pengalaman empiris ke dalam sistemnya dan secara terus-menerus berhadapan dengan perubahan dari perkembangan baru melalui sebuah proses dialektika. Dalam hubungan inilah kita dapat mengatakan bahwa ideologi merupakan perpaduan antan teori dan praktek." (Lihat Kuntowijoyo (1994), *Demokrasi dan Budaya Birokrasi, Yog*) :: Bentang, p. 3)

Ketika Perang Besar petjah, di Inggris hampir terdjadi perang saudara. Rusia diantjam revolusi sosial. Itali baru selesai mengalami “Minggu berdarah” jang dapat menuju anarki, dan setiap negara Eropa mengalami keadaan dalam negeri jang tak tenang. Permulaan musim panas tahun 1914 merupakan masa jang aneh mengerikan, jang sekarang sudah diselimuti oleh adanja kedjadian-kedjadian berikunja, dan generasi-generasi jang akan datanglah jang akan memberikannja tempat jang lajak dalam sedjarah manusia²⁵

Nampaknya Mustafa Kemal mencoba membidani lahirnya nasionalisme Turki, yang berdasarkan sistem Eropa Modern. Untukitulah dilenyapkan segala yang berbau Islam tradisional, yang merendahkan perempuan²⁶ dan menyatukan agama dan negara.²⁷

Secara sistematis pula aliran buku-buku dan majalah Islam diputuskan. Kegiatan berbagai organisasi Islam yang ada dibatasi, perjalanan haji secara bertahap dihentikan; bahkan berbagai mesjid diubah fungsinya, antara lain dijadikan sebagai museum, atau tangsi militer.

Dunia Barat sangat bergembira dengan “dinamika” Turki yang

-
- 25 L. Stoddard (1966), *op. cit.*, p. 168. Nampaknya perang saudara Eropa pada 1914-1918 tidak membuat mereka jera, sehingga terjadilah apa yang dikenal sebagai Perang Dunia II. Dalamkaitan ini Bung Karno telah menuliskan: “Perang di Eropah kini sudah djadi betul-betul! Apakah kita menghadapi <djatuhnja negeri Eropah?>”, lihat DBR, I, p. 475.
- 26 Apakah benar Barat sangat memuliakan kaum perempuan? Nampaknya tidak. Untuk lebih jelasnya tolong dikaji uraian berikut ini: Barulah pada tahun 1950 [di Jerman Barat] wanita yang menjadi dosen boleh kawin, sebelumnya harus selibat. (4)
- Di Amerika Serikat baru tahun 1847 lulus dokter wanita pertama di New York. Tahun 1850 di Fakultas Kedokteran Universitas Harvard mulai diterima secara resmi mahasiswa putri, tetapi ia tidak dapat tempat duduk di ruang kuliah, karena mahasiswa putera menentangnyanya. Barulah tahun 1946 Harvard menerima wanita di Fakultas Kedokteran, dan baru kemudian mereica boleh bekerja di rumah sakit. (T. Jacon (1993), *Manusia Ilmu dan Tehnologi*, Yogya: Tiara Wacana, p. 5)
- 27 Dalamkaitan ini, ada baiknya direnungkan apa yang telah diuraikan M. Natsir berikut ini:
Kalau kita terangkan, bahwa agama dan negera harus bersatu, maka terbayang sudah di mata seorang bahlul (bloody fool) duduk di atas singgasana, dikelilingi oleh “harumnya” menonton tari “dayang-dayang”. Terbayang olehnya yang duduk mengepalai “kementrian kerajaan, beberapa orang tua bangsa memegang toga. Sebab memang beginilah gambaran ‘pemerintahan Islam’ yang digambarkan dalam kitab-kitab Eropah yang mereka baca dan diterangkan oleh guru bangsa barat selama ini. Sebab umumnya (kecuali amat sedikit) bagi orang Eropa: Chalifah=Harem; Islam=poligami. (Ahmad Sultelmi (1999), *Soekarno Versus Notsir*, Jakarta: Darul Falah, p. 54.)

sekuler ini, serta berharap segera diikuti umumnya negara-negara Islam yang lain. Harapan tersebut nampak sebagai sekedar mimpi di siang hari saja. Walaupun telah berlangsung cukup lama, usaha Attaturk sekedar berhasil mengganti kulit saja, Turki tetap tidak mungkin dipisahkan dengan Islam.²⁸

Partai Kemalis hanya mampu bertahan selama Attaturk masih hidup. Setelah dia wafat, pihak lawan kaum Kemalis berhasil berkuasa, dan berusaha mengembalikan suasana Islam. Sekalipun usaha ini masih tertatih-tatih, karena cukup sukar untuk menenyapkan pengaruh Kemalis yang telah berjalan sekitar setelah abad.

Saat dunia Islam yang muram, penjajahan yang menyesak-kan dan penuh tidak keadilan, tampil founding fathers yang ingin mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Salah seorang dari mereka itu adalah Bung Karno yang berwasiat agar dimakamkan di tempat beliau berjumpa dengan Pak Marhaen. Pertemuan ini yang mengilhami lahirnya Marhaenisme. Istilah ini adalah orisinal penemuan dan pemikiran Bung Karno sendiri. Marhaenisme adalah paham yang ingin mengangkat dan membela rakyat kecil Indonesia yang menderita. Kaum marhaen bukan nama lain, atau identik, dengan kaum proletar. Konsep proletar masa awal abad XX telah demikian populer dikalangan cendekiawan sosialis Barat, yang sering dijadikan rujukan Pemimpin Besar Revolusi ini. Istilah Marhaen membuktikan Bung Karno mempunyai kemampuan berpikir bebas. Sikap anti dogmatisme ini telah memungkinkan Bung Karno melahirkan, menumbuhkan, dan mengembangkan pemikiran-pemikirannya sendiri.²⁹

Berkaitan dengan penemuan konsep Marhaen dan tempatnya, ada baiknya direnungkan beberapa baris kalimat berikut:

...di desa Cibintinu dan [Kusno] bertemu dengan seorang petani yang bernama Marhaen. Itulah penemuannya. "Marhaenisme!" katanya. Ia paparkan padaku segala pikirannya, segala teorinya. Sebagian aku ingat. Sebagian lagi tidak. Ia jelaskan, seorang Marhaen adalah orang yang mempunyai alat, orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiri. Penghasilannya pun

28 Ali Audah (199), *Dari-Khazanah Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, pp.16- 18.

29 Alfian (1981), *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, p.11.

kecil, hanya cukup untuk mengganjal perut sekeluarganya. Tak ada lebih *riya* sedikitnya pun juga. Tapi dalam pada itu ia tidak bekerja untuk orang lain dan tidak ada orang lain yang bekerja baginya. Tidak ada penghisapan tenaga seseorang oleh orang lain.³⁰

Apa yang disajikan Ramadhan KH dalam karyanya yang bersifat novel sejarah ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Hal ini antara lain telah dibuktikan dengan beberapa penelitian serta sejenisnya.³¹ Untuk lebih memantapkan lagi keabsahan konsep orisinal Soekarno, dapat dilihat dari tulisan Mangil berikut ini:

.. disebut Bung Karno sebagai kaum Marhaen. Mereka ini rakyat miskin, rakyat kecil, rakyat yang susah hidupnya, yang menderita, yang hidupnya papa sengsara. Mereka ini bukan buruh (proletar), sebab Pak Marhaen ini ikut memiliki alat-alat produksi, seperti cangkul, arit dan sebagainya.³²

Betapa hebatnya pemikiran Soekarno, dan *founding fathers* lainnya, nampaknya seperti dilupakan. Realita inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia makin kerdil, bodoh karena buta dengan khazanah kekayaan pernikiran bangsa. Apakah yang menimpa Soekarno ini sebagai kelanjutan sebagian kebijakan pemerintahannya. Bung Karno melarang karya-karya lawan yang dinilai berbahaya bagi kedudukannya, sebagai presiden maupun ajaran demokrasi terpimpinnya Hal ini dapat dilihat dalam artikel Hatta, "Demokrasi Kita." Sebenarnya sikap Soekarno perlu dipertanyakan, karena Bung Hatta telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden, agar presiden mampu mewujudkan impiannya.³³

30 Ramadhan K. H. (1981), *Kuantar ke Gerhang Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno*, Jakarta: Sinar Harapan, p. 62.

31 Untuk kajian betapa eratnya sejarah dengan sastra, dan novel khususnya, lihat H. Haikal (1995), "Persepsi Terhadap Indonesia dalam Sastra Melayu Modern", Perhatian dengan Dana Penyelidikan Jangka Pendek USM, Pusat Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, dan Kuntowijoyo (1984), "Para Priyayi sebagai Novel Sejarah", Editor: Aprinus Salam, Umar Kayant dan Jaring Sennotik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

32 Mangil Martowidjeto (1999), *Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967*, Jakarta: Gramedia; -p. 304.

33 Bagi saya Hatta yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan fair chance (kesempatan yang fair) dalam waktu yang layak kepada presiden Soekarno untuk mengalanti sendiri apakah sistemnya itu akan menjadi suatu sukses atau suatu kegagalan. (Selanjutnya lihat Idayu, op, cit., p. 27.)

Kekhasan orba yang ketakutan terhadap sosok Soekarno dan ajarannya dapat dilihat dari baris-baris berikut:

...sejarawan militer yang mencoba menghilangkan gambar Soekarno dalam sebuah foto mengenai pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan, upaya ini tidak berhasil karena ada protes dari sejarawan lainnya--Abdurrachman Surjomihardjo. Usaha lainnya berupa tindakan politik untuk melarang ajaran Soekarno. Termasuk dalam hal ini pelarangan pendirian Universitas Bung Karno oleh seorang puterinya.³⁴

Ketakutan orba, menunjukkan pemerintahan ini sebagai pelanjut estafet kebijakan pemerintahan Belanda, yang memantapkan *status quo*. Rekayasa penulisan sejarah orba tidak hanya menyentuh bidang pendidikan juga menjadi kurban. Dinamika pesantren dalam bidang pendidikan, maupun dinamika Muhammadiyah belum disentuh.³⁵ Bagaimana dengan posisi Islam di Indonesia zaman itu? Memang belum menggembirakan, apalagi Indonesia berada dalam cengkeraman penjajah Belanda. Umat Islam dibonsai dan memahami Islam secara parsial bukan *kaaf-fah* atau utuh³⁶, kadang-kadang pemahaman Islam mereka hanya bersifat superfisial saja. Mudah dimengerti apabila Hurgronje melihat Islam sulit dapat diharapkan mampu bangkit kembali. Islam dianggapnya sudah membeku dan bergelimang dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Islam dinilai tak akan mampu membimbing dan menggerakkan pemeluknya³⁷ menghadapi kemajuan zaman. Analisa Snouck Hurgronje yang tajam ini didasarkan pada pengalaman dan hasil-hasil penelitiannya di bagian akhir abad lalu dan pada permulaan abad ini, pada waktu Islam memang

34 Asvi Warman Adam, "Pengendalian Sejarah Sejak Orde Baru", dalam Henri Chamber-Loir dan Hasan Muarif Ambary (Eds.) (1999), *Panggung Sejarah*, Jakarta: YOI, p. 572. C. f penulis yang sama dalam "Pertarungan Sejarah", *Gatra*, 24 Oktober 1998, p. 4.

35 H. Haikal (1991), "Sejarah dan Pendidikan Muhammadiyah," *Suara Muhammadiyah*, No. 16/76, p. 15.

36 Salah satu contohnya diuraikan dalam karya Toto Tasmara (2000), *Menuju Islam Kajajah*, Jakarta: Gema Insani Press.

37 Sebagian pemeluknya nampak asyik terjebak dalam adat seperti direkam Hamka berikut ini: "Perkawinan berulang-ulang, kawin dan cerai, kawin dan bercerai pula, adalah adat, adalah kemegahan yang harus dipegang teguh, baik orang yang terkemuka dalam adat atau orang yang terkemuka dalam agama." (Lihat Hainka (1979), *Kenang-kenangan Hidup*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, p. 63.)

relatif masih berada dalam suasana yang digambarkannya. Modernisasi Islam yang kemudian bangkit secara mengejutkan itu masih dalam benih-benih awal pertumbuhannya, mungkin terlalu remeh untuk dapat perhatian yang sungguh. Itulah kiranya yang menyebabkan asumsi Snouck Hurgronje kemudian tidak benar, walaupun tidak sama sekali meleset³⁸.

Pemahaman Hurgronje, sebagaimana orang-orang barat lainnya, menekankan adanya dikhotomi. Dalam banyak hal mereka melihat segala sesuatu seperti warna hitam dan putih saja, jadi berlawanan. Realita alam dan masyarakat nampak lebih berwarna warni dan beragam. Mudah dipahami bila Hurgronje, seperti rekan-rekannya yang lain, sering gagal melihat masyarakat Indonesia yang demikian khas seperti diuraikan dalam baris-baris berikut

...orang-orang Indonesia berhasil menunjukkan kemampuan mereka membangun sintesis antara seluruh pengaruh yang berdatangan itu. Mereka menerima pengaruh yang baru tanpa mengesampingkan yang lama. Mereka lebih menerima dan tidak menolak pengaruh-pengaruh itu. Aspek khusus ini dalam sejarah Indonesia jelas mencerminkan sikap masyarakatnya yang selalu berusaha menemukan konsensus seraya menjauhkan konfrontasi³⁹.

Kekhasan di atas `menimpa' pribadi Bung Karno. Ini antara lain dapat dilihat ketika pada 1926 Soekamo muda menulis "Nasionalisme, Islam, dan Marxisme." Dalam pemahamannya, ketiga paham tadi harus bersatu. Dengan jiwa persatuanlah, kemerdekaan Indonesia dapat direbut. Konflik, permusuhan harus ditiadakan, persatuanlah yang menjadi tujuan bersama.

Teori konflik dan saling menghancurkan merupakan konsep yang akrab dalam paradigma barat. Paradigma inilah yang menghanyutkan dunia barat sehingga terjebak dalam perang saudara Eropa. Perang ini mereka populerkan sebagai perang dunia pertama, sebagai manifestasi rasa superioritas mereka. Teori konflik ini telah turut menyumbangkan dalam berbagai perang agama di

38 Alflan, "Cendekiawan dan Ulama Aceh", dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (eds.) (1983), *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta: LP3ES, p. 129.

39 Alwi Shihab (1998b), *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*, Bandung: Mizan, p. 18.

benua Barat. Sayangnya hal ini juga dieksport ke Indonesia, sekiranya disetujui uraian berikut ini :

Dengan bangkitnya kekuatan Belanda, dimulailah kisah perkembangan Protestan di wilayah ini. Di bawah VOC, agama Kristen didominasi Gereja Reformasi. Mereka mengambil alih jemaah Katolik Portugis dan mengangkat pastor [*sic.*] untuk melayani gereja. Belanda menentang sepenuhnya dan bermaksud menghancurkan apa yang telah dibangun Katolik Roma. Ini terjadi bertepatan dengan perubahan situasi internasional ketika Spanyol dan Portugis yang Katolik tidak lagi menjadi kekuatan utama dunia.⁴⁰

Figur Soekarno sendiri memahami Islam secara utuh relatif agak terlambat. Walaupun benihnya mulai tertanam subur saat kost di rumah H.O.S. Tjokroaminoto. Di Surabaya ini Bung Karno muda sering mengikuti tabligh Ahmad Dahlan dengan konsep pemahaman pemurnian Islam. Tapi saat di Surabaya ini pula dia merasa kecewa ketika berjumpa dengan pemahaman Islam yang *jumud*, yang beku. Peristiwa tersebut sangat membekas sekali, karena terjadi saat beliau akan menikah kali pertama. Untuk lebih jelasnya tolong dikaji uraian berikut:

Ketua masjid dengan seenaknya saja menolak meresmikan [upacara pernikahan saya] karena saya sedang pakai dasi. Ia berkata: "Anak muda, dasi sepenuhnya adalah cara berpakaian orang Kristen dan tidak sesuai dengan adat istiadat Islam kita." "Tuan," saya membalas, "Saya sadar bahwa dulunya seorang pengantin hanya memakai pakaian asli kita sendiri, sarung. Tapi itu adalah cara kuno, hukum-kini telah modern." "Betul," bentaknyanya, "tetapi kemoderenan kita hanyalah boleh sejauh pengantin memakai celana dan leher baju terbuka." "Adalah pilihan saya untuk berpakaian dengan necis dan pakai dasi," komentarku dengan keras. "Dalam persoalan ini karena anda tetap ingin tampilan saya menolak dengan tegas untuk melaksanakan upacara ini _ Sekiranya tidak ada di antara tamu kami yang juga seorang alim (*holy man*) yang mampu melaksanakan kewajiban itu, maka mungkin Sukarno tidak pernah dikawinkan dengan Utari Tjokroaminoto dalam upacara perkawinan suci itu⁴¹.

40 Shihab (1998a), op. cit., p. 10. Tradisi konflik yang melihatkan agama ini sekarang tengah berkecamuk di Ambon, Maluku. (Selanjutnya lihat Rustam Kastor (2000), Fakta, Data, dan Analisa" Yogya: Wihdah Press.

41 Dikutip dari Ahmad Syafli Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES, 1996, p. 54.

Secara intens Bung Karno mulai mendapatkan pemahaman Islam yang *kaaffah* justru saat berada dalam penjara dalam suasana yang serba kekurangan, penuh kesepian ini Bung Karno makin asyik dengan Islam. Pengalaman indah ini diutarakannya kepada orang yang paling dicintainya, Inggit. Dia adalah satu-satunya isteri Bung Karno yang telah banyak berkorban dan cukup matang jiwanya⁴².

“Inggit, benar, cita-cita yang besar datangnya pada saat-saat yang sepi. Cita-cita yang besar dapat membelah dinding penjara.” “Sekarang aku benar-benar mulai membaca al Qur’an, menelan al- Qur’an . . . Kalau aku terbagun, maka aku membacanya. Lalu aku memahami Tuhan itu . . .”⁴³

Makin mantapnya pemahaman Islam yang utuh, makin tersentuh Bung Karno dengan penderitaan kaum Marhaen. Dialog dengan al-Quran dari Islam yang *kaaffah* terus berlanjut, baik ketika Bung Karno berada pembuangan di Bengkulu maupun Endeh. Hanya saja setelah berada dalam puncak kekuasaan dan dalam pelukan kemewahan, nampaknya Bung Karno lupa dengan Islam yang utuh. Islam diperlukan, selama menguntungkan kedudukannya. Demi kekuasaan dan kemewahan, tak apalah paradigma Islam dipinggirkan, walau tetap diutarakan dengan bersemangat secara retorika. Ini nampak jelas dalam konsep Nasionalisme, Islam, dan Marxisme yang kemudian menjadi Nasakom. Nampaknya Soekarno dalam jebakan komunis. Bung Karno tetap memeluk secara utuh Nasionalismenya, tapi membonsai Islam yang menjadi bagian dari agama. Bung Karno yang hanyut dalam buaian Komunis sehingga rela membonsai Marxisme, sehingga diabaikan

42 Dalam kaitan ini cukup menyentuh hati penilaian tulus berikut ini:

Inggit Ganarsih bagi pemuda dan mahasiswa Soekarno mewujudkan kasih ibu Yang hilang itu, yang tidak ia nikmati sebelumnya — betapa paradoksalpun kedengarannya itu. Ia kekasih satu-satunya yang mencintai Soekarno tidak karena harta dan tahtanya, yang memberi dan tak meminta kembali serta satu-satunya yang pernah menemani Soekarno di dalam kemiskinan dan kekurangan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua janda Soekarno dengan segala jasa dan segi positif masing-masing, tetapi saya harus mengatakan, bahwa hanya Inggit Ganarsihlah yang merupakan tiga di dalam satu diri: ibu, kekasih dan kawan yang hanya memberi tanpa meminta. Kekurangan Inggit yang tak mampu melahirkan anak bagi Soekarno merupakan sesuatu yang ditemukan kemudian pada saat yang tepat ketika sesuatu perlu dicari. (Lihat Poeradisastira, S. I., “Kata Pengantar?”, dalam Ramadhan K. H. (1981), op. cit., p. viii.)

43 “Ramadhan (1981), op. cit., p. 249.

Sosialisme, Murbaisme dan yang tinggal hanya Komunisme.

Dalam jebakan Komunislah Bung Karno rela membubarkan Masyumi dan PSI. Kedua-duanya mempunyai visi yang berbeda dan menawarkan alternatif yang cukup bermutu dibandingkan demokrasi dan ekonomi terpimpin. Apalagi Masyumi ditakuti karena massanya yang besar dan PSI merupakan lawan tangguh bagi Komunis. Para penentang yang lain dari Partai Katolik maupun Partindo, tetap bisa santai karena partainya tetap diberi hak hidup dan para pemimpinnya tidak ada yang merasakan dinginnya penjara. Berbagai tokoh Masyumi, seperti Natsir, Roem dan tokoh PSI, seperti Sjahrir, Subandio dipenjarakan tanpa mengalami proses pengadilan.

Bahkan sampai wafatnya karena menderita sakit, Sjahrir masih dalam status tahanan.⁴⁴ Keadaan memprihatinkan kaum *dhuafa* ini yang telah mendorong Ahmad Dahlan, A. Hassan, A. Wahid Hasyim, Dewantara, Hasyim Asy'ari, Moh. Syafeii, maupun Surkati bergerak mendidik mereka agar nasib dan derajat, serta kehidupan mereka terangkat. *Wong cilik* yang selalu menjadi *ka-wida* adalah kaum *inlanders* yang dipinggirkan oleh sistem yang berlaku. Mereka harus dididik serta diperjuangkan agar menjadi warga negara yang penuh⁴⁵. Untuk itu Indonesia harus dimerdekakan, agar melancarkan mereka menjadi pemimpin dan pewaris di bumi. Hal ini sejalan dengan firman Allah: Kami [Allah] bermaksud untuk memberikan karunia kepada orang yang tertindas di bumi; Kami akan jadikan mereka pemimpin dan pewaris di bumi. (Q S. al Qas'nas (28) : 5)

Berbeda dengan Al-Kitab yang seringkali diperalat sebagai alat legitimasi untuk perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji, Al Qur'an relatif terjaga dan tahan kritik. Dengan semangat *re-conquista*, atau penaklukan kembali, Portugis datang membawa semboyan *Gold, Glorious, and Gospel*. Realita ini menggambarkan unsur budaya dalam Nasrani sangat berperan dan sering

44 J.D. Legge (1993), "Intellectuals and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupay ion Jakarta," a. b. Ilasan Basari, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peronan Kelompok Syahrir Jakarta: Graflu, n 244.

45 C.f Kuntowijoyo (1994), Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, Yogyakarta: Shalahuiddin Press dan Pustaka Pelajar.

penuh misteri. Untuk lebih jelasnya silahkan direnungkan uraian berikut ini:

Munculnya gereja pada saat itu, sekali lagi, tidak bisa dipisahkan dari pemikiran bahwa memang hubungan manusia dengan Tuhan diselubungi kabut misteri itu, dan karenanya gereja menggariskan cara bagaimana hubungan itu harus dilakukan. Munculnya konsep Trinitas dan teologi Kristen pada dasarnya adalah juga karena pengaruh Yunani tadi⁴⁶.

Dalam realita sehari-hari nampak kalau ada seseorang Nasrani yang meninggal. Apabila Jesus dikafani, jenazah tadi biasanya diberi pakaian sesuai dengan profesi atau kedudukannya. Mudah-mudahan jenazah seorang petani akan diberi pakaian petani, dan jenazah koprak akan didandani sebagai seorang koprak, serta yang sejenisnya. Hal yang sama juga berlaku dalam perayaan natal. Ini mudah dipahami karena Jesus sendiri tidak lahir pada 25 Desember⁴⁷. Wajar pula kedatangan kaum misionaris bersama-sama dengan penjajah, telah menyebabkan lahir sikap arogan sebagian mereka serta cenderung menegasikan penduduk pribumi. Tentang kritik teks terhadap cukup membaca uraian beberapa baris berikut.

We are all familiar with the term tword of Godi as a name for the Bible. In the past it was, and in some circles today it is, believed that God directly inspired cvery word therein. But the textual criticisin and modern study have made it impossible for modern scholars to hold that belief.⁴⁸

Berkaitan dengan al-Qur'an, cukup membaca uraian Dawson dalam *The Making of Europe*. Dalam bahasa yang padat dan mudah dipahami, sejarawan ini telah menuliskan dua kalimat berikut:

"... the Koran has exercised a greater infhtence on the history of the world than any other single book. Even today it is the suprezne

46 Barbara Brown Zikmund, "Dialog agama-agama datam Konteks Missionarisme Baru," dalam Hidayat, op. cit., p. 27.

47 Silahkan lihat karya-karya berikut; seperti tulisan Carroll V. Newsom (1977), *The Roots of Christianity*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall; Carol Ward (1986), *The Oristian Sourcebook*, New York: A Ballantine; C. Smith (1967), "Christmas and Its Cycle", *New Catholic Encyclopedia*, New York: Mc-Graw-Hill Book Co., Vol. 111.

48 Alfred Guilaume (1968), *Islam*, Baltimore: Penguin Books, p. 55.

authority for the social life and though of 200 million of the human race and is regarded as divinely inspired in every line and syllable.”⁴⁹

Secara lahiriah dunia Barat relatif berhasil dalam kehidupan duniawi. Kemewahan duniawi ini lebih disebabkan kreativitas mereka dalam bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan teknologi telah membuat masyarakat lebih santai dan menikmati hidup ini. Sebagian mereka cukup puas hanya menikmati kelezatan duniawi saja, hingga populerlah istilah *carpediem*, nikmatilah hidup. Sebagian lagi meiakukan pengembaraan yang serius dalam bidang ruhani, dan mempertanyakan agama yang mereka peluk selama ini. Wajarlah apabila lahir kaum agnostik, deis, bahkan atheis. Berbagai kegagalan yang terjadi di tanah leluhur dunia Barat, telah melahirkan penolakan yang ingin melakukan tindakan heroik demi Kristus, yang gagal mereka lakukan di kampung halaman sendiri. Mereka merasa terdorong untuk pergi ke Indonesia. Secara umum mereka benar-benar berhasil dalam usaha mereka untuk menyebarkan ajaran Kristen di Indonesia.⁵⁰

Sebagian usaha misionaris dan zending berhasil dengan baik, tetapi belum seimbang dengan biaya⁵¹, tenaga, dan pikiran yang mereka limpahkan. Padahal dalam pandangan mereka; Islam, pemeluknya, dengan Muhammad sebagai nabi palsu yang tidak

49 Christopher Dawson (1956), *The Making of Europe an Introduction to the History of European Unity*, New York: Mcriidian Books, p. 132.

50 Karel A. Steenbrink, “Dutch Colonialism and in Indonesia: Conflict and Contact (1596-1950)”, a. b. Suryan A. Jamrah, Kawati- dalatn’Perf.*than Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-194211), Bandlirng: p. 143.

51 Salah satu contohnya pada 1928, Belanda memberikan bantuan kepada kaum Nasrani sebesar f. 1.666.300 dan umat Islam hanya diberi sebesar f. 3.950. Selain timpangnya jumlah gulden yang diberikan, tebih timpang lagi kalau diperhitungkan jumlah umat Islam yang lebih dari 95%. Kekhasan sikap Belanda terhadap Islam dan Nasrani dapat dilihat pula dari baris-baris berikut:

Malah residen Surabaya menganjurkan, agar semua kas masjid di karesidennya terus memberikan sumbangan kepada rumah sakit Kristen di Mojowarno, yang dipimpin oleh tokoh zending, J-Kruyt. Menurut Residen sumbangan ini perlu, karena orang Islam juga dirawat di rumah sakit tersebut. Dia belum pernah mendengar keluhan atau protes dari pihak bupati atau penghulu, karena sedekah toh sangat keras dianjurkan dalam undang-undang Islam.

Di daerah Surabaya, menurut Residen, belum pernah timbul keberatan terhadap pembayaran dari kas masjid kepada lembaga yang mempunyai tujuan Kristenisasi! (Steenbrink, Karel A. (1984), *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke19*, Jakarta: Bulan Bintang, p. 228-229.)

berharga sama sekali, sehingga mereka perlu dinasranikan. Kegagalan tersebut disebabkan kecurigaan bahwa misionaris Kristen adalah antek-antek kolonial, serta anggapan bahwa agama Kristen adalah agama kaum penjajah, semakin menghambat pencapaian tujuan-tujuan misionaris. Keberhasilan terbesar misionaris adalah pada masyarakat miskin dan kurang mampu, atau pada suku terbelakang⁵². Kesulitan yang paling besar yang dihadapi kaum misi dan zending adalah agama Islam. Suatu daerah yang telah memeluk Islam, sangat sulit sekali dimasuki ajakan kaum misi maupun zending. Dalam kaitan ini cukup menarik keluhan yang dilontarkan Hendrik Kraemer (1888-1965)⁵³ sebagai berikut:

Islam merupakan masalah bagi misi. Tidak ada agama lain yang membuat misi memaksakan diri bekerja keras dengan hasil yang sedikit dan membuatnya mencakarkan kukunya sampai berdarah dan tercabik-cabik selain Islam.

Dia kemudian melanjutkan, Teka-teki mengenai Islam adalah bahwa walau sebagai agama yang dangkal dan miskin dari segi isi, Islam mengungguli semua agama di dunia dari segi kekuatan mempertahankan orang-orang yang memeluknya⁵⁴.

Kekesalan, kemarahan, rasa superioritas dan harapan merupakan sebagian sisi yang terungkap dalam dinamika misi dan zending. Melihat keluhan Kraemer serta yang sejenisnya, tentunya tidak berlebihan apa yang disajikan oleh Phipps berikut:

Selama lebih dari separo sejarah gereja, musuh yang paling dibenci kaum Kristiani adalah Islam. Superioritas kultural Islam selama milenium pertama setelah kedatangan Islam, tidak dihargai. Sementara agama Kristiani berada dalam "Zaman Gelap"-nya, di negara-negara Muslim, seni dan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Untuk menutupi kecemasan dan ketakutannya, kaum Kristiani sering bersukaria dengan menyebarkan berbagai distorsi. Bagi Gereja Ortodoks Timur, Katolik Roma, maupun Protestan, memfitnah Muham-

52 Alwi Shihab (1998a), op. cit., p. 12.

53 Semacam biografi singkatnya dapat dilihat tulisan E. Jansen Schoonhoen, dalam *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda bagi Pengkajian Islam Indonesia*, pp. 109-118. Tokoh ini dinilai sebagai simbol arogansi dan intoleransi misionaris. Lihat selanjutnya, Alwi Shihab (1998b), op. cit., p. 57.

54 Ali Shihab (1998a), op. cit., p. 11.

mad merupakan kelaziman⁵⁵.

Selain mengenalkan agama Nasrani, kedatangan mereka telah mengenalkan berbagai kebiasaan yang khas. Hal ini identik dengan kebiasaan para pegawai Belanda, katakanlah semacam *home staff*, yang suatu saat berniat kembali ke tanah leluhur Belanda, selalu memelihara budaya yang khas. Budaya khas itu antara lain berupa *babu* yang *all in*, atau budaya menyewa atau mempekerjakan nyai yang tidak terikat dengan perkawinan⁵⁶. Bahkan "... para pegawai muda ini disarankan agar hidup dengan seorang nyai sebelum dia menikahi seorang wanita Eropa"⁵⁷.

Selain melihat berbagai kekhasan di atas, keindahan Indonesia telah mengundang banyak cendekiawan untuk mengamalkan ilmu dan teori-teorinya. Sayangnya sebagian mereka yang meneliti Indonesia menyatakan bahwa Islam di Indonesia tidak lebih dari sebuah lapisan tipis di atas lapisan tebal peninggalan keyakinan-keyakinan keagamaan pra-Islam. Mereka juga menyatakan bahwa Islam di Indonesia adalah produk sintesis antara Islam dan kebudayaan Hindu-Budha. Dengan sikap makin terbuka mereka, terjadi berbagai perubahan yang cukup tajam.

Salah satunya M. Hodgson, dalam bukunya *The Venture of Islam: Cotzscience and Histoty in a World Civilization*, mengkritik pedas pendapat-pendapat di atas. Hal yang sama berlaku pada Mark Woodward dalam bukunya *Islam in Java*. Dia juga sampai kepada kesimpulan bahwa kalau ditelaah secara mendalam dan ditinjau dari segi perspektif Islam secara meluas, didapati bahwa hampir seluruh ajaran, tradisi, dan penekanan yang bersifat spiritual yang selama ini berkembang dalam masyarakat Jawa, pada dasarnya bersumber dari ajaran Islam di Timur Tengah. Apa yang dikenal dalam upacara keagamaan di Jawa seperti *gerebeg*, *selametan*, *kalimasodo*, adalah bagian dari ajaran Islam. Demikian pula doktrin *Kawulo Martabat Tujuh* dari tradisi wayang yang

55 William E. Phipps (1998), "Muhammad and Jesus A Comparison of the Prophets and Their Teachings", a. b. Ilyas Hasan, Muhammad dan Isa Telaah Kritis atas Risalah dan Sosoknya, Bandung: Mizan, pp.

56 J.J. van de V&tie (1987), "Brieven uit Sumatera", a.b. Pustaka Azet, Surat-Surat dari Sumatera, Jakarta: Pustaka Azet, p. 14.

57 Selanjutnya lihat "Iqrar, Tempo, 11 Juni 2000, p. 50. Tempo menyediakan 11 pp. untuk menguraikan masalah sama Indonesia yang ditulis pada zaman penjajahan.

dikenal dan dilestarikan dalam masyarakat Jawa, dapat ditelusuri asal-usulnya dari tradisi tasawuf Islam.

. . .substansinya Islam namun formatnya tampil dengan versi Jawa. Dalam kaitan ini Nieuwenhuize, penulis Belanda dengan sangat indah mengatakan “Kalau masyarakat ini (baca: Jawa) menganggap diri mereka Muslim, maka sangat sulit untuk mempertahankan suatu temuan ilmiah yang berkesirnpulan bahwa masyarakat tersebut tidak demikian”⁵⁸.

D. KESIMPULAN:

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa paradigma Barat dan Islam, di samping paradigma yang lain, banyak mewarnai dinamika bangsa Indonesia. Ada usaha yang terencana, serius, dan beroleh dana yang berlimpah, agar paradigma Islam diabaikan. Terbukti tetap sukar dipisahkan paradigma Islam dan dinamika bangsa Indonesia. Yang ada hanya semacam pasang naik dan pasang surut saja. Ketika dalam dinamika bangsa Islam memberi warna yang kental, lahirlah semacam *loro-loroning atunggal* Islam dan Indonesia. Inilah yang mewarnai proklamasi 17 Agustus 1945. Kita tahu semua itu, tapi umumnya kita lupa bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 terjadi pada hari Jum’at dan pada bulan puasa. Bagi Islam, semua hari baik, tetapi Jum’at adalah *sayiddii ayam*, penghulu segala hari. Bagi Islam, semua bulan adalah baik, tetapi bulan Ramadhan adalah *sayiddil shuhur*, penghulu segala bulan.

Contoh pengumpulan paradigma Barat dan Islam, antara lain dapat dilihat kehidupan pribadi Soekarno. Setelah makin jaya, nampak Bung Karno mulai lupa dengan jasa-jasa Inggit, karena kemudian Bung Karno menikahi Fatimah yang memberinya putera-puteri yang telah lama didambakan. Mungkin paradigma Baratlah yang mendorong kita tidak mengenal Fatimah, tapi Fatmawati. Inggit memberikan segala-galanya, kecuali tidak diberi izin Allah memberikan anak bagi Bung Karno. Terekam dinamika khas Bung Karno dan Inggit seperti terlihat dalam baris-baris berikut:

. . . dibandingkan sewaktu bersama Sanusi dan sewaktu bersa-

58 Alwi Shihab (1998a), op. cit., pp. 314-315.

ma Kusno. Benar, aku ingat, sewaktu dengan Kang Uci kami penuh dengan pesiar, jalan-jalan sampai ke Singapura segala. Sedangkan hidupku dengan Kusno penuh dengan semangat, kerisauan, semangat lagi, kerisauan lagi. Lalu aku seperti berkata kepadaku sendiri, bahwa hidup dengan Sukarno berada dalam perjuangan yang jauh lebih hebat daripada dengan Sanusi⁵⁹.

Lepas dari pelukan Inggit, nampak Bung Karno secara bertahap jatuh dalam buaian Komunis. Apalagi banyak para pemimpin Indonesia, apalagi rakyatnya, sering lupa dengan berbagai tipu daya Komunis. Demikian populernya, hanya apakah benar ada perlawanan komunis pada 1926, sekiranya benar uraian sejarawan berikut:

...[masalah pemberontakan komunis 1926] dikoreksi oleh Syahrir [*sic.*] sendiri ketika dia ada di Tanah Merah, bahwa dia tidak bertemu dengan orang Komunis yang berbicara tentang masalah Leninisme ataupun Marxisme, tapi tentang Quran dan Hadis. Pada tahun 1970 Fakultas Sastra Unpad sudah memberikan koreksi sejarah terhadap penulisan tahun 1926 yang menuliskan bahwa pemberontakan tahun 1926 bukanlah komunis. Adapun yang menuliskan komunisme itulah hanya pemerintah kolonial yang mengategorikan pemberontakan itu dengan komunis. Benderanya putih, tulisannya Allah dan Muhammad dan ditulis oleh orang Banten sendiri⁶⁰,

Lebih menyedihkan lagi, sikap menegasikan budaya maupun penganut agama lain nampaknya masih terus berkembang. Asyik diributkan kurang bermaknanya agama dan budaya pihak lain, padahal kelemahan dapat terjadi⁶¹ dan dapat terulang lagi pada ke-

59 Ramadhan K. H. (1981), op. cit., p. 273; perhatian Bung Karno terhadap Inggit terkam dalam baris-baris berikut: "... waktu itu [Bung Karno] duduk di tempat tidur sambil merangkai bunga melati utukku, untuk sanggup... Memang bukan sekali itu aku biasa ditolong seperti itu oleh suamiku, oleh singa beringas yang mendambakan kemerdekaan [Indonesia] itu. (Ibid., p. 283).

60 Achmad Mansur Suryanegara, "NU: Sejarah dan Politik (Tanggapan atas Ceramah H. Mahbub Djunaidi)", dalam Abdurrahman Wahid (1993), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya., p. 188

61 Salah satu contohnya diuraikan dalam baris-baris berikut:
... kehidupan Geredja makin lama menjadi makin bersifat keduniawian, biara-biara mulai memperkaja diri, adat kesusilaan para rohianian menjadi sangat merosot, berbagai Paus hidup dengan tjara tak pantas. Itu semua adalah tanda-tanda kemerosotan Geredja. Immoralitas jang sedemikian djauh, kemunalikan para rohaniwan, kemewahan kehidupan di istana Paus, menjebakkan orang-orang menjdauhkan diri dari Geredja, dan menggabungkan diri dipihak Reformasi. (Lihat A. Sartono Karto-

lompoknya sendiri. Kehendak serius ingin menyebarkan agama di negara lain yang telah beragama, akhirnya lupa dengan keadaan negeri sendiri⁶². Masih ditekankan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Hanya apakah tuduhan ini benar dan dapat dipertanggung jawabkan? Apalagi kalau dilihat betapa Islam memberikan sifat pengikut al-Masih penuh sifat *ra'fah wa rahmah*, rasa santun dan rasa kasih sayang, seperti disajikan dalam Ali Imran (3): 50. Islam memberikan sebutan lain bagi kaum Nasrani adalah *al-Rawariyun*, pengikut setia al-Masih, sebagaimana dibentangkan dalam Surat al Maidah (5): 111. Lebih menarik lagi, al Qur'an sama sekali tidak menyinggung Ibunda Muhammad, Aminah; menariknya banyak uraian yang menyentuh hati disajikan al-Qur'an mengenai Maryam, atau Maria, Ibunda Jesus. Bahkan dari 114 surat dalam al-Qur'an, satu diantaranya dikenal sebagai S. Maryam. Adakah hal yang sejenis dalam Al-Kitab? Toleransi Islambagi para pemilik lain, diungkapkan pula dalam ayat-ayat berikut ini:

...sesungguhnya orang-orang yang beriman (maksudnya pengikut

dirdjo (1970), "Perbandingan antara Kebudayaan Barat Abad Pertengahan dan Djaman ModemPembelajaran Berdasar Kesedaran Sedjarah", Lembaran Sejarah , no.5 Djuni, p. 32.)

Sejalan dengan hal ini seyogianya dikaji uraian berikut ini:

From the very beginning, Jesus was on one side, while Christianity was on the other. As time has passed, this difference has been transformed into the difference between the divine and the human. This fact could also explain the emergence of the dogma of Jesus as the son of the God. In the Christian myth about the god-man lies the silent admission that pure Christianity is not possible in real life. CALIJA A. IZETBEGOVIC (1993), *Islambetween East and West*, Indianapolis: Ammerican Trust Publications, pp. 254-255.)

- 62 Untuk lebih jelasnya tolong diperhatikan apa yang telah terjadi di Belanda seperti dibentangkan dalam beberapa baris berikut:

. . . jumlah kaum Muslim hampir 0% pada 1960, sekarang pada 1995, sudah hampir 4%. Cukup hebat: dalam jangka waktu kurang dari satu generasi bertumbuh dari nol sampai hampir setaraf dengan jumlah umat Katolik di Indonesia! Di Den Haag, di mana pada 1960 baru dibuka 1 (satu) masjid, yaitu masjid jemaat kaum Ahmadiyah, sekarang sudah dibuka 20 tempat ibadat kaum Muslim. Di Leiden, kota di mana Snouck Hurgronje pernah belajar dan mengajar Islamologi, tetapi tanpa pergaulan langsung dengan umatnya, baru-baru ini kaum Muslim telah membeli sebuah gereja Protestan dengan harga 850.000 gulden atau kurang lebih 1 milyar rupiah. Kemudian menara gereja dirombak dan dibangun kembali dengan bentuk yang lebih langsing, menyerupai menara halus menurut gaya Turki. Lonceng gereja diam pada hari Minggu, tapi pada hari Jum'at dan pada malam-malam bulan Ramadhan digantikan oleh pengeras suara yang memanggil orang di Leiden untuk salat jum'at atau Tarawih. (Karel A. Stcenbrink (1995), op. cit., pp. xiv-xv).

Nabi Muhammad saw) dan Yahudi, Nasrani, Sabean (penganut agama kuna Timur Tengah) dan orang-orang Majusi, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Tuhan dan percaya kepada kehidupan setelah mati dan berbuat baik, sernua akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka dan karena itu mereka itu tidak perlu khawatir ataupun bersedih hati. (S. al- Maidah (5): 69; Q. S. al-Bagarah (2): 120).

Dari apa yang disajikan, di samping berbagai perbedaan terdapat pula persamaan-persamaan. Apakah tidak seyogianya persamaan yang beroleh perhatian, terutama yang berkaitan dengan masalah yang esensial, masalah agama. Sama halnya dengan perbedaan Barat dan Timur, yang lebih dikaitkan karena kelemahan masing-masing yang terlibat⁶³. Apalagi bangsa saat ini tengah dilanda berbagai krisis, apakah tidak seyogianya mencari alternatif pada persoalan-persoalan yang nyata, seperti dalam masalah ekonomi yang makin menjerat leher bangsa dengan banyaknya hutang yang kita warisi. Untuk lebih jelasnya tolong dikaji uraian berikut:

Sejumlah rintisan di bidang ilmu ekonomi jelas menunjukkan secara ilmiah keburukan fatal dari sistem kapitalisme internasional yang . . . nanti akan merupakan sumbangan amat berharga bagi penyusunan ilmu ekonomi baru, yang bebas dari keharusan “paradigma sistemik” nya dewasa ini. Bagaimana menyusun ekonomi bebas-riba, bagaimana membuat keseimbangan antara produktivitas tenaga kerja dan pemerataan hasil kerja, termasuk masalah-masalah yang secara teoritis sedang dikaji para ekonom muslim di mana-mana⁶⁴.

63 Dalam kaitan ini cukup menebar apa yang telah disajikan RGCSiati Abdulgani, salah seorang yang banyak menekuni ajaran Soekarno, uraiannya sebagai berikut: . . . Rudyard Kipling: “East is East, and West is West, and never the twain shall meet”. Namun, kutipan ini tidak lengkap. Masih ada beberapa baitri’a, yang berbunyi: “But there is neither East nor West, Border nor Breed nor When two strong Men stand face to face, though they come from the end of the carth”. Tetapi tidak akan ada garis pemisah antara Timur dan Barat, dernikian pula tidak akan ada garis—pemisali dalam batas, ras clan kettieunan, apabila dua orang berjiwa kuat saling bertatap muka dan berdialog, sekalipun mereka berdua datang dari pojok berjauhan dari dunia ini. (Lihat selanjutnya Roeslan Abdulgani, “Kata pengantar”, Jan Romein, In de ban van Prambanan, Penerjemah Hazil Tanzil (19S9), Dalam Pesona Prambanan: Indonesta di tengah gejolak dunia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, p. xv)

64 Abdurrahman Wahid, “Pengantar”, dalam Hasyim Asy’ari, “Risalah Ahlussunnah wa Al-Jama’alt,” a. b. Khoiron Nandliyyin, Risalah Ahlussunnah Wal Jama’ah, Yogya: LKPSM, pp. vi-vii.

Akhirnya apa yang disajikan ini tidak hanya menyinggung hal-hal yang serba rasio tapi mencoba pula menyentuh yang serba wahyu. Kajian ini tidak ingin sekedar terjebak dalam yang serba literalis tekstualis, tapi bagaimana sampai kepada yang kontekstualis. Sebagian mungkin mudah dicerna karena baru menyentuh taraf *muallaf*, *mukallaf* belum sampai kepada yang *mukasyafah*. Walau bagaimanapun kita semua dituntut bersifat mukhlis agar tidak menjadi muflis.

Jelasnya perhelatan dalam bingkai wahyu yang absolut sebagai *basic idea* yang 'dipadu' dengan pengembaraan pikir insani yang nisbi. Semua ini perlu dilakukan secara serius untuk menjawab berbagai tantangan manusia kekinian agar manusia tidak terbelenggu dalam acuan birokrasi yang sudah lapuk. Seharusnya birokrasi melayani ilmu tetapi dengan makin diperkuatnya perangkat dan dana birokrasi, akhirnya ilmu diselaraskan 'selera' birokrasi yang kaku. Bahkan dalam banyak hal harus mengabdikan kepentingan kaum birokrat yang mapan dan menikmati berbagai kemudahan atau fasilitas yang ada dalam bentuk *status quo* yang ingin diabadikan sampai yang bersangkutan pensiun. Akibatnya, terjadi pembonsaian ilmu dan pembodohan umat, bangsa ini. Sekiranya sebagian yang hadir, masih menjadi bingung, wajarlah sekiranya disetujui apa yang dikatakan Oskar Wilde: "*Anybody can make history; only a great men can write it.*"

PENUTUP

Dalam kesempatan ini, selain ucapan terima kasih yang telah saya sampaikan, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih setulusnya pada semua guru-guru saya sejak sekolah rakyat, sekolah menengah, demikian pula dengan para dosen saya baik di Yogyakarta, Bandung, Jakarta, maupun mereka yang berasal dari manca negara. Banyak dari beliau-beliau yang memberikan warna khusus dalam pribadi saya seperti Prof Drs. H. Woerjanto, maupun Prof. Dr. Darsiti Soeratman. Peranan Prof Dr. Faisal Ismail dan Prof. Drs. A. Muin Umar memperlancar proses saya mencapai jenjang yang sekarang ini, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan rahimnya pada beliau-beliau tersebut. Terima kasih kepada ibu

kos yang demikian baik hati, alrnarhumah Ibu Notorejo, dan Ibu Socratminah yang bersikap 'ngemong' dan selalu membantu para karyawan perpustakaan untuk lebih maju, sehingga banyak yang berhasil menjadi staf edukatif, bahkan ada yang telah berhasil mencapai Prof. Dr. Terutama sekali terima kasih kepada *asatidh*, para guru. SRI, SMI, SGAN di Pekalongan. Dan yang terpenting adalah terima kasih kepada kedua orang tua saya dan kedua mertua saya, serta harapan kepada empat orang putera-puteri⁶⁵ saya, Munir, Humamah, Haamid, serta Halimah, serta ibu mereka. Tak lupa juga kepada semua staf di FIS, dan terutama sekali rekan-rekan maupun mahasiswa di Jurusan Sejarah UNY.

BEBERAPA BACAAN TERPILIH:

- ABA, Imran (1980), *Peringatan Khaul Bukan dari Ajaran Islam adalah Pendapat Yang Sesat*, Kudus: Menara Kudus
- Abdalati, Hammudah (1977), *Islam in Focus*, Damascus: The Holy Koran Pub.
- Adam, Asvi Warman, "Pengendalian Sejarah Sejak Orde Baru", dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (Eds.) (1999), *Panggung Sejarah*, Jakarta: YOI
- (1998), "Pertarungan Sejarah", *Gatra*, 24 Oktober
- Alfian (1981), *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- AM, Imron (1981), *Peringatan Khaul Bukan dari Ajaran Islam*, Surabaya: Bina Ilmu
- Audah, Ali, (1999), *Dari Khazanah Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Baiquni, A. (1983), *Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern*, Bandung: Pustaka
- Baudet, H. dan I.J. Brugrnans (1987), "Balams van Beleid," a.b. Amir Sutaarga, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta: YOI
- Benda, Harry J. (1980), "The Crescent and the Rising Sun, Indonesian Islam under the Japanese Occupation", 1942-1945, a. b. Daniel Dhakidae dengan suntingan Alfian,--bulan *Sabit dan Matahari Terbit dalam Indonesia* pada

65 Bagaimana anda berempati mampu memahami makna hidup sebagai suatu perjuangan, karena hidup unfair, wajarlah apabila sejak awal anda bersiap-siap menghadapi berbagai perlakuan yang unfair dan berusahalah untuk merubahnya. Kalaupun belum berhasil, tak apalah karena banyak hikmah yang tersembunyi dari peristiwa apapun yang kurang menyenangkan, sejalan dengan S. al Baqarah ayat 214. Bagaimana pula anda dapat meneladi Rasulullah; seorang pedagang yang memegang amanah, sesuai dengan sifat beliau amanah, fatanah, siddiq, dan tabligh. Beliau adalah pedagang bertaraf internasional karena telah pergi ke negara lain sejak usia belia. Muhammad bukan sebagai PNS yang nrima ing pandum karena punya NIP, walaupun bagaimanapun anda perlu bersikap qanaah tapi tetap selalu berusaha merubahnya. Hidup bukan untuk makan, dan menjadikan diri sebagai abdul buiun, hamba perut sehingga penting bagaikan kuburan dan akan mengundang beragam penyakit, apalagi kalau anda suka stress atau ngomel melulu.

- Masa Pendudukan Jepang, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Daud, Mustafa H (1992), "Sastera Dakwah: Satu Analisis Kritis terhadap Karya Kreatif Hamka," disertai Universiti Sains Malaysia.
- Dawson, Christopher (1956), *The Making of Europe an Introduction to the History of European Unity*, New York: Meridian Books.
- Drake, Stillnian.(1957), *Discoveries and Opinions of Galileo*, New York: Doubleday Anchor Books.
- Guillaume, Alfred (1968), *Islam*, Baltimore: Penguin Books
- Haikal, H. (1991), "Sejarah dan Pendidikan Muhammadiyah," *Suara Muhammadiyah*, No. 16/76.
- (1995), "Persepsi Terhadap Indonesia dalam Sastera Melayu Modern", Penelitian dengan Dana Geran Penyelidikan Jangka Pendek USM, Pusat Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia.
- Hurgronje, C. Snouck (1983), "De islam in Nederlandsch-Indie", a. b. S. Gunawan, *Islam di Hindia Belanda*, Jakarta: Bhratara.
- Rashad (1984), "Al-Qur'an the Untimate Miracle", a. b. Achmad Rais, *Penemuan Iltiah tentang Kandungan al Quran*, Surabaya: Bina Ilmu
- Kuntowijoyo (1994), *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, Yogya: Bentang
- (1994), *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogya: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar.
- (1984), "Para Priyayi sehai Novel Sejarah", Editor: Aprinus Salam, *Umar Kayam dan Jaring Semiolik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Legge, J. D. (1993), "Intellectuals and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupation Jakarta," a. b. Hasan Basari, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Syahrir*. Jakarta: Grafiti.
- Mahasin, Aswab dan Ismed Natsir (eds.) (1983), *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Manan, I. Abdul (1981), *Peringatan Khol* Bagaimana Sebenarnya Menurut Hukum Islam, Bangil: Pustaka Abdul Muis.
- Mangunwijaya, J. B. (1994), *Tumbal*, Yogya: Bentang.
- Martowidjojo, Mangil (1999), *Kesaksian tentang Bung Karno 1945- 1967*, Jakarta: Gramedia.
- Nasr, Hossein Nasr (1984), *Science and Civilization in Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.
- Newsom, Carroll V. (1979), *The Roots of Christianity*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall
- Phipps, William E. (1998), "Muhammad and Jesus A Comparison of the Prophets and Their Teachings", a. b. Ilyas Hasan, *Muhammad dan Isa* Telaah Kritis atas Risaiah dan Sosoknya, Bandung: Mizan.
- Pirenne, Henri. (1974), *Mohammed and Charlemagne*, New York: Barnes & Noble.
- Ramadhan K. H. (1981), *Kuantar ke Gerbang* Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno, Jakarta: Sinar Harapan.
- Roelsan Abdulgani, "Kata pengantar", Jan Romein (1989), In de ban van Prambanan, Penerjemah Hazil Tanzil, *Dalam Pesona Prambanan: Indonesia di Tengah Gejolak Dunia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Said, Edward 'W. (1979), *Orientalism*, New York: Vintage Books.

- Shauwy, Ahmad As- [et. al] (1999), *Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, Alwi (1998), *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan.
- (1995), *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*, Pengantar Kuntowijoyo, Bandung: Mizan.
- Smith, C. (1967), "Christmas and its Cycle", *New Catholic Encyclopedia*, New York: Mc-Graw-Hill Book Co., Vol. III.
- Steenbrink, Karel A. (1984), *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang.
- , (1995), "Dutch Colonialism and Islam in Indonesia: Conflict and Contact (1596-1950)", a. b. Suryan A. Jamrah, *Kawan dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942) M*, Bandung: Mizan.
- Stoddard, L. (1966), "The Rising of Color", a.b. Pan. Penerbit, *Pasang Naik Kulit Benwarna, [tanpa kota dan badan penerbit]*.
- Toynbee, A. J. (1988), *A Study of History The One-Volume Edition*, London: Oxford Un. Press.
- Van Loon, Hendrik Willem (1960), *The Story of Mankind*, New York: Washington Square Press Book.
- Ward, Carol (1986), *The Christian Sourcehook*, New York: A Ballantine.
- Yayasan Idayu (penyusun) (1982), *Bung Hatta Kita dalam Pandangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Idayu).
- Zain, Shaharir M. (1988), *Pengenalan Tamadun Islam dalam Sains and Teknologi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.
- Zindani, Abdul Majid bin Aziz al- [et. al] (1999), *Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.

DATA PRIBADI

1. Nama lengkap dan NIP : Prof. Dr. Husain Haikal, M.A. / NIP: 130350211
2. Tempat dan tgl lahir : Semarang, 9 September 1944
3. Agama : Islam
4. Pangkat, Gol/Ruang gaji : Pembina Tingkat I, IV/b
5. Jabatan Fungsional : Guru Besar Madya
6. Jabatan Struktural : -
7. Bidang Keahlian : Sejarah Indonesia, Sejarah Eropa, Sejarah Islam dan Kependidikan
8. Fakultas : Ilmu Sosial
9. Alamat Rumah : Jl. Sukoharjo DP 134, Dsn Gejayan, Condong Catur, Yogya 55283, Telp. (0274): 887355
10. Riwayat Pendidikan : S1 Propaeduse FKIP Gajah Mada 1964 B.A dan Drs. FKIS IKIP YOGYAKARTA.
S2 Duquesne University, Pittsburgh, USA Program Ph. D. di Un. of Hawaii at Manoa
S3 Universitas Indonesia
11. Riwayat Jabatan Struktural : a. Sekretaris Jurusan Sejarah
b. Ketua Jurusan Sejarah

12. Jabatan Fungsional : a. Lektor
b. Lektor Kepala Madya
c. Guru Besar Madya
13. Keterangan Lain : a. Dosen Tamu di Universiti Kebangsaan Malaysia.
b. Dosen Tamu di Universiti Sains Malaysia.
c. Membentangkan berbagai makalah dalam seminar di dalam dan luar negeri.
d. Menulis artikel dalam majalah, surat kabar, dan jurnal nasional maupun internasional.

BEBERAPA CONTOH KARYA ILMIAH DALAM JURNAL:

- "Some Notes on European History", *al Jamiah*, No. 40, 1990.
- "Sejarah Lisan dan Pengetrapannya", *Akademika*, No. 3, 1990.
- "Penelitian Sejarah yang Menggigit", *Jurnal Kependidikan*, No. 1, Mei 1991 "Kebudayaan Spanyol Masa Abad Tengah", *Cakrawala Pendidikan*, Edisi Dies 1991.
- "Pesantren, Lembaga Pendidikan "Pinggiran" atau Idaman? *Jurnal Ilmiah Informasi*, No. 1, 1991.
- "Meniti Jejantas Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekular", *Jebat*, No. 20, 1992
- "Ulama Silam dalam Kenangan", (Ulasan Buku) dalam *Jurnal Islamiyyat Vol. XIII*, 1992
- "Menuju Satu Bangsa Malaysia" Makalah Tambahan Seminar Sejarah Malaysia Modern Perspektif Sarawak, 1992.
- "Beberapa Percikan Pemikiran Mas Mansur (1918-1946), *Jurnal Ilmiah Islamiyyat* No. 14, 1993.
- "Warganegara atau Bangsa", Seminar Sejarah Malaysia Modern Perspektif Sarawak, 1993.
- "Sekitar Lahirnya Ma'had Islam Pekalongan", *Al-Hadarah*, 1994.
- "Dari Resmi Ayam Menghala ke Resmi Penyu," Seminar Kesusasteraan Bandingan Seminar on Comparative Literature 1995.
- "Muslim Organizations In Singapore: An Historical, Overview", *Islamic Studies*, 35: 24, 1995.
- "Percikan Pemikiran K.H. Imam Zarkasyi", dalam *Blograji K.H. Imam Zarkasyi di Mata Umat*, 1996.
- "Pencerahan, Identitas, dan Konflik Inggris Amerika Serikat", *Informasi*, No.1, 1997.
- "Menuju Universitas Pendidikan dan Riset", *Cakrawala Pendidikan*, Edisi Dies 1997.
- "Penelitian Sejarah", *Jurnal Ilmiah Jumpa*, No. 2, 1997.
- "Kuasa dan Budaya", dalam *Penjajahan Malaysia: Cabaran dan Warisannya*, 1997.
- "Globalisasi dan Antisipasi (Pendidikan Indonesia Menyongsong Abad XXI", *Cakrawala Pendidikan*, Edisi Khusus Dies 1998.
- "Pembaruan Islam: Syaikh Ahamad Surkati dan Gerakan al Irsyad," *Qur 'an*.
- "The Pondok Modern System (Case Study of Pondok Modern Gontor)", International Conferenee at University of Science Malaysia, 10 Oct. 1994.

Ibn Khaldun dan Sumbangan Historiografinya, Wacana Pemikiran Islam ke V, 1995, UKM

"Muhajir dan Pemikir", Seminar Regional Pengembangan Budaya Penelitian 1997

Beberapa contoh hasil penelitian:

1. "Studi Komparasi Sejarah Lisan dan Sejarah Konvensional";
2. "Keunggulan Kompetitif Pondok Modern Pabelan";
3. "Muhammadiyah dan Alurtadiyah";
4. "Persepsi Indonesia dalam Sastra Melayu Modern";
5. "Peranan GAPENA dalam Pematapan Bahasa Kebangsaan"

Beberapa contoh tulisan populer dalam surat kabar dan majalah: 1. "Muhammadiyah Menghadang Sejarahnya", *Abadi*, 25, 26, dan 27 Nopember 1970;

1. "Peranan Sedjarah dalam Pembangunan dan Pentingnja Buku Pelajaran Sedjarah", *Indonesia Raya*, 1970;
2. "Bambu Masa Depannja Tjukup Gemilang", *Sinar Harapan*;
3. "Pendidikan Muhammadiyah Kurang Rawatan";
4. "Menyambut Tiga Puluh Tahun Ma'had Islam", *Abadi*, Jakarta 2 dan 3 Nop. 1972.

HARMONISASI HUBUNGAN NASIONALISME, NEGARA, DAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PLURALISME MENUJU INDONESIA BARU, SUATU ANALISIS KRITIS

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Disampaikan di Depan Rapat Terbuka
Senat Universitas Negeri Yogyakarta Sabtu, 10 November 2001

PROF. DRS. DALIMAN, M.PD

Guru Besar Ilmu Pendidikan Sejarah
Pada Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta



*To be a patriot
Was to be a member of the faithful,
and the faithful were be known
not only by work
but by signs¹*

*Yang terhormat Rektor/Ketua Senat, Dewan Penyantun, Sekretaris
Senat serta para anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta,
Yang terhormat Dekan dan Para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan
Ketua Program Studi Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial,
Yang terhormat para tamu undangan, rekan sejawat, mahasiswa, dan
hadirin yang berbahagia.*

*Salam dan damai sejahtera bagi kita semua
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Perkenankanlah, pertama-tama saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, atas segala kelimpahan kasih karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga di pagi hari yang penuh kebahagiaan ini saya peroleh kesempatan untuk berdiri di mimbar kehormatan di hadapan sidang yang sangat mulia pada Rapat Senat Terbuka Universitas Negeri Yogyakarta yang sangat terhormat ini.

Sungguh suatu kehormatan bagi saya, apabila pada saat sekarang ini saya diperkenankan untuk menyampaikan pidato pengu-kuhan sebagai guru besar dalam Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta di depan sidang yang terhormat ini. kesempatan penyampaian pidato pengu-kuhan Guru Besar semacam ini hendaknya dipandang sebagai suatu manifestasi pertang-gung jawab pengembangan diri (*Self development*) bagi seorang tenaga akademik yang karena tugasnya sebagai tenaga edukatif di Perguruan Tinggi memang wajib dan harus mengembangkan diri sejauh-jauh dapat tergapai sesuai dengan kesempatan yang

1 Boyd C. Shafer. (1995). *Nationalisme, Myth, and Reality*. New York : A Harvest Book harcourt, Bruce & World Inc. Hlm : 148.

ada demi maksimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang-bidang kependidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara.

Namun, dengan segala kerendahan hati, ketulusan serta kejujuran perlu dan harus saya akui dan saya kemukakan di depan sidang yang terhormat, bahwa kalau jenjang kehormatan ini, kini dan di sini saya terima, bukanlah karena pencapaian prestasi-prestasi besar yang telah saya raih, melainkan karena rahmat, ridha, kasih-karunia Tuhan sendiri, serta penyelenggaraan illahinya (*divina providentia*) yang telah mengantarkan saya untuk berdiri di mimbar ini. oleh sebab itu, kebahagiaan terbesar bagi saya dan keluarga saya yang tak pernah terlupakan ialah bahwa saya dengan dan dalam kesederhanaan serta kekecilan saya melalui orasi ilmiah pada pagi hari ini diperkenankan oleh Allah memuji dan meluhurkan kemuliaan dan kebesaran-Nya.

Dengan terpilih dan terbentuknya pemerintahan baru, duet Megawati-Hamzah Haz, pada tanggal 26 Juli 2001 yang mengakhiri konflik antara DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid sejak kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* tujuh bulan sebelumnya (Januari 2001), maka kepada mereka berdua telah diletakkan harapan-harapan baru untuk dengan segera dapat diatasinya krisis bangsa yang multi kompleks yang berkepanjangan selama ini. Secara optimis, keduanya dipandang ideal, yang secara sinergis diharapkan akan mampu memadukan dua kekuatan, nasionalis dan keberagamaan (Islam), yang dalam perjalanan sejarah bangsa ini masih belum menunjukkan keserasian yang padu.

Keberhasilan kerjasama yang harmonis dwi-tunggal pucuk pimpinan bangsa ini bukan saja diharapkan akan mampu membentuk satu kekuatan besar dan solid justru sangat diperlukan untuk secepat mungkin dapat mengentaskan bangsa ini dari ambang kehancuran, dan horisontal dalam hidup berbangsa dan bernegara, agar demikian dapat diletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi Indonesia Baru yang damai, maju, dan sejahtera dalam bingkai negara bangsa yang berbhineka-tunggal-ika (pluralistik). Dalam rangka ikut serta ambil bagian dalam penyelesaian permasalahan bangsa tersebut, perkenankanlah saya menyampaikan pidato

pengukuhan dengan pokok pembahasan mengenai: *Harmonisasi Hubungan Nasionalisme, Negara, dan Agama dalam Perspektif Pluralisme menuju Indonesia Baru, Suatu Analisis Kritis.*

A. PENDAHULUAN

Kiranya bukan tanpa alasan mendasar, apabila para Bapak Pendiri Bangsa (*the founding Fathers*) seperti Bung Karno, Bung Hatta, Muhamad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan lain-lain dalam mendirikan negara 56 tahun yang lalu memilih bentuk negara kebangsaan (*nation state*) yang diletakkan di atas dasar filsafat (*philosophisvhe grondslag*) kebangsaan Pancasila sebagaimana kita warisi sekarang, dan bukannya negara agama dengan agama sebagai dasar negaranya. Secara formal-konseptual masalah negara kebangsaan dengan Pancasila sebagai ideologi negaranya, sebenarnya sudah selesai 56 tahun yang lalu juga dengan terbentuknya negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan pokok-pokok kaidah fundamentalnya sebagai terumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang keduanya sebagai pilar-pilar bangunan negara kebangsaan (*nation state*) Negara Kesatuan Republik Indonesia tak terpisahkan yang satu dari yang lain. namun, perjalanan sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa cita-cita negara kebangsaan sebagai perwujudan bangunan konsep Persatuan Indonesia (sila ketiga Pancasila) yang menjadi tempat berlindung dengan aman dan damai bagi segenap bangsa Indonesia dengan asal-usul bangsa (ras), agama, etnik, adat istiadat, sosial-ekonomi, sosial-budaya, paham politiknya yang sangat pluralistik, kiranya masih jauh dari harapan. Asas *Bhineka-Tunggal-Ika* (pluralisme) yang dahulu menjadi sumber kekuatan hebat ketika harus menengahkan penjajah, merebut kemerdekaan serta mendirikan negara, maka sesudahnya pada saat-saat derajat kondisi bangsa mendekati pada titik-titik lemah, tak urungkah asas pluralisme tersebut berubah menjadi sumber kerawanan konflik.

Di antara sumber-sumber konflik, agama merupakan pemicu konflik yang terbesar. Apabila samapai dasawarsa tahun 1980-an konflik keagamaan itu lebih bersifat vertikal (antara agama dengan negara), maka pada dasawarsa menjelang milenium ketiga,

meluas menggejala dalam berbagai konflik horisontal, antar umat beragama, yang telah meminta korban jiwa dan harta yang tak terbilang, suatu hal yang sangat memalukan, sebab mana mungkin Allah yang Maha Esa, *Khalik* yang satu dan *sama* bagi semua makhluk, menghendaki umat-umat-Nya saling berbaku hantam.

Maka saat ini kiranya merupakan momentum yang tepat untuk secara tulus hati dengan pikiran jernih kitab bersama-sama merenungkan kembali konsep-konsep dasar mengenai *negara kebangsaan (nation state)* dan dalam hubungannya dengan *agama* sebagai telah diletakkan oleh para Bapak Pendiri Bangsa (*the founding fathers*) untuk kemudian kita jadikan dasar pijakan bersama dalam melakukan reorientasi pemahaman, sikap dan aktualisasi hidup keberagaman dalam nuansa yang lebih konstruktif dan dialogis² untuk kenegaraan yang diletakkan dapat bersama-sama memasuki dan membangun *Indonesia Baru* yang lebih harmonis, bersatu, maju, adil, dan sejahtera. Keyakinan kita akan kebenaran konsep-konsep dasar oleh para Bapak Bangsa di samping dapat dianalisis dari keluhuran, luar jangkauan, serta makna hikmah nilai-nilai filosofisnya³, namun lebih-lebih dapat kita runut dari bukti-bukti *keteladanan* mereka yang telah mempersembahkan seluruh tenaga, pikiran, cita-cita serta seluruh hidupnya dengan tanpa hitung-hitung dan tanpa pamrih apa pun bagi bangsa dan negara.

Kalau pidato pengukuhan saya membahas tema tersebut, sedikitpun saya tidak memiliki pretensi dan kepentingan apa pun. Sejak awal saya adalah guru, insya Allah akan tetap berjiwa guru, dan *Alhamdulillah* pagi hari ini saya dilantik sebagai Guru Besar. mengikuti teladan guru-guru saya, sayapun sebagai seorang guru harus dan akan tetap terdiri di atas dan lepas dari segala prevelensi dan kepentingan. Kalaupun saya dipandang berkepentingan, maka kepentingan saya dengan pembahasan tema tersebut tidak lain adalah suatu harapan, bahkan suatu doa, agar bangsa dan negara ini segera dapat memenuhi tugas kebangsaan dan ken-

2 Mohamad Sofyan. (1999). *Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo. Hlm. 13.

3 Mengenai stratifikasi nilai-nilai dapat dibaca pada tulisan Anton Bakker : *Agama dan Tatahan Sosial Politik dalam Cahaya Sfratifikasi Niali, Basis, XLI, No. 11, November, 1992.*

egaraannya, ialah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. HUBUNGAN NASIONALISME DAN NEGARA KEBANGSAAN

Nasionalisme merupakan salah satu kekuatan yang paling menentukan dalam sejarah berpolitik modern. Secara etimologis kata nasionalisme, *nationalism*, dan *nation* (dalam bahasa Inggris) atau *natio* (dalam bahasa latin) berasal dari kata kerja bahasa latin *nascor* yang berarti "saya lahir", atau dari kata *natus sum* yang berarti "saya dilahirkan".⁴ Kata *renaissance* dalam bahasa Italia juga berasal dari akar kata latin yang sama yakni *renascor* atau *renatus sum* yang berarti "saya lahir kembali" dan "saya dilahirkan kembali". Hanya bedanya *renaissance* melahirkan konsep-konsep kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, sedang nasionalisme menumbuhkan konsep politik dan ketatanegaraan.

Konsep kelahiran menunjuk hadirnya sesuatu yang baru. Hadirnya nasionalisme juga memberi makna datangnya suatu pembaharuan. Nasionalisme sebagai konsep modern lahir pada zaman *renaissance* sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan penemuan-penemuan dalam Ilmu Pengetahuan alam tumbuhlah kesadaran dalam diri manusia akan berpotensi sebagai manusia bebas dan otonom. Apabila pada masa abad pertengahan (abad 5-15) kebebasan individu dan kebebasan berfikir banyak didominasi dogma agama. Reformasi pada awal abad ke-16 merupakan reaksi pertama terhadap otoritas gereja.

Sejarah lahirnya nasionalisme modern tak dapat dilepaskan dari cita-cita kemerdekaan dan harga diri manusia. Cita-cita kemerdekaan inilah yang kemudian mendorong lahirnya negara bangsa, sebagai lahir dari revolusi yang menentang absolutisme para raja, dan sebagian lahir terutama di daerah-daerah jajahan di Asia dan Afrika dari revolusi menentang kekuasaan kolonialisme dan imperialisme.⁵

Hans Kohn, seorang sejarawan yang sangat terkenal dan pa-

4 Boyd C. Shafer.Op.cit. hlm.4

5 Mohamad Noor Syam. (1983). Filsafat Pendidikan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila. Surabaya :Penerbit Usaha Nasional. Hlm : 203-204.

ling banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme, memberikan definisi yang hingga kini tetap digunakan dalam pengajaran di sekolah, dalam teks dan monografi-monografi: "*Nationalism is a state of mind, in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state*".⁶

Konsep nasionalisme tersebut mengungkapkan bahwa selama berabad-abad dahulu kesetiaan orang tidak ditujukan kepada negara kebangsaan, melainkan kepada berbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja feodal, suku, negara kota, kerajaan dinasti, golongan keagamaan atau gereja. Pada masa abad pertengahan kesetiaan orang lebih tertuju kepada agama, gereja. Otoritas agama melebihi otoritas negara atau kerajaan. Kekuasaan dan otoritas agama yang dipersonifikasikan pada Paus di Roma, bersifat universal bagi semua bangsa dan negara. Bangsa-bangsa berada di bawah naungan kedaulatan gereja sebagai perwujudan paham internasionalisme dalam kesatuan paham keagamaan (Kristen).⁷ Protestanisme mematahkan universalitas, internasionalisme dalam hidup keagamaan Kristen Katolik Abad Pertengahan. Reformasi memajukan keaneragaman di lapangan agama.

Dengan demikian nampaklah dengan jelas adanya hubungan antara *renaissance*, reformasi dan nasionalisme. *Renaissance* dan nasionalisme menjadi sumber kekuatan timbul dan terwujud cita-cita kemerdekaan individu dalam wadah negara kebangsaan yang merdeka, sedang *renaissance* dan reformasi menumbuhkan dan mewujudkannya cita-cita kemerdekaan beragama dan yang sekaligus mengakui serta menghormati adanya keaneragaman agama dalam suatu negara kebangsaan.

Hubungan antara nasionalisme dan negara kebangsaan adalah seperti anatara jiwa dan badan. Nasionalisme adalah semangat, kesadaran, dan kesetiaan bahwa suatu bangsa itu adalah satu keluarga dan atas dasar rasa sebagai suatu keluarga bangsa dibentuklah negara. Negara, karenanya adalah nasionalisme yang melembaga. Dengan demikian pada hakekatnya nasionalisme adalah

6 Hans Kohn. (1965). *Nationalism : its meaning and History*. New York : D. Van Nostrand Company, Inc. Hlm: 9.

7 Mohamad Noor Syam. *Op.cit.* hlm. 205.

sebagai dasar universal setiap negara.⁸ Bangsa lebih menunjuk kepada penduduk suatu negeri yang dipersatukan di bawah suatu pemerintahan tunggal yang disebut negara. Sedang negara lebih menunjuk kepada suatu badan politik dari rakyat atau bangsa yang menempati wilayah tertentu yang terorganisir secara politis di bawah satu pemerintah yang berdaulat, dan atau tidak tunduk pada kekuasaan dari luar.

Sering konsep bangsa dan negara dipergunakan secara bergantian, lebih-lebih dalam kaitannya dengan hubungan internasional. Negara selalu diartikan sebagai unit politik. Konsep bangsa dalam beberapa hal dapat diartikan sebagai unit politik. Konsep bangsa dalam beberapa hal dapat diartikan juga negara, ialah apabila tak ada arti lain, kecuali dalam pengertian satu nasionalitas, negara nasional.⁹ Sekarang istilah bangsa Indonesia, misalnya sama artinya dengan negara Indonesia. Namun pada periode antara Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sampai menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945 kita boleh menyebut bangsa kita bangsa Indonesia, namun tidak boleh menyebutnya negara Indonesia. Jadi istilah bangsa dan negara dapat digunakan secara bertukaran yang satu dengan yang lainnya, bahkan dalam makna sebagai suatu padanan, sinonim, apabila keduanya merujuk kepada kekuasaan yang berdaulat dalam konteks hubungan internasional.¹⁰

Semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh lima prinsip nasionalisme¹¹, ialah (1) kesatuan dalam: wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan *policy* kebudayaan; kebebasan dalam beragama, berbicara, dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; (3) kesamaan dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban.; (4) kepribadian dan sebagai neagra kebangsaan yang telah merdeka. Mencakup wilayah dan penduduk yang

8 Ibid. Hlm: 207-208.

9 Louis L. Snyder. (1954). *The Meaning of Nationalism*. New Jersey : Rutgers University press. Hlm : 17-18.

10 Bandingkan pula dengan E.J. Hobsbawm. (1990). *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*. Yogyakarta : Tiara Wacana. Hlm. 21-25.

11 Sartono Kartodirdjo. (1999). *Multi Dimensi Pembangunan Bangsa, Etos Nasionalisme Negara kesatuan*. Yogyakarta : Kanisius. Hlm. 15 dan Boyd C. Shafer. *Op.cit*. hlm. 7-8.

menempati seluruh daerah Hindia Belanda. Kebanggaan sebagai bangsa dinyatakan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kesatuan kita sebagai bangsa diikat dengan kuat oleh bahasa Indonesia dan bendera negara sang merah putih.

Kita pun merasa bahagia bahwa para *Founding Father* telah berhasil meletakkan pilar-pilar bangunan negara kebangsaan kita di atas fondasi dasar filsafat negara, pandangan dunia, pandangan hidup, dan ideologi negara kebangsaan Pancasila yang digali oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dari sejarah kebudayaan dan kepribadian bangsa sendiri, yang karenanya sungguh-sungguh mencerminkan entitas negara kebangsaan yang sedang mereka dirikan bersama. Keserasian antara bentuk bangunan negara kebangsaan Pancasila sebagai jati diri bangsa yang memang telah melekat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup dan kepribadian seluruh rakyat dan bangsa kita, lebih memungkinkan bagi kita untuk dapat menyusun suatu format sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup seluruh bidang kehidupan yang secara terpadu dan harmonis diarahkan untuk mewujudkan tujuan bersama ialah mencapai kesejahteraan serta kebesaran dan kejayaan bangsa dan negara.

Dengan ditetapkannya PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan bahwa Pancasila sebagai ideologi NKRI sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada; Ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia", hal ini mengandung makna telah dikukuhkannya Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan dunia, pandangan hidup, dan ideologi negara yang didasarkan pada paham kebangsaan dan bukan pada paham keagamaan. Namun seperti diuraikan oleh Prof. Dr. Drijarko S.J. dalam Pancasila dan Religi bahwa oleh karena Pancasila dan religi (agama) sama-sama berakar pada realitas yang satu, ialah kodrat manusia,

dalam mana manusia juga dikodratkan untuk taat dan terdorong ke arah Tuhan, maka Pancasila mengakui dan memberikan tempat yang wajar dan kondusif kepada agama.

Penggunaan paham kebangsaan sebagai asas kenegaraan mengandung implikasi dan konsekuensi bahwa tiada kelompok, agama, golongan, mayoritas atau minoritas, juga perorangan dalam Republik ini, apa pun dasar ikatannya yang mempunyai kedudukan istimewa atau *privilege* tertentu. Semua orang atau semua golongan memiliki hak, kesempatan, dan kewajiban, bahkan komitmen yang sama sebagai warga bangsa dan warga negara. Setiap orang berkedudukan sama di depan hukum. Persamaan menjadi asas bagi terwujudnya demokrasi dan keadilan. Pengakuan dan penghormatan atas ketiganya, persamaan, demokrasi, dan keadilan menjadi syarat diakui dan dihormatinya martabat dan hak asasi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hanya atas dasar persamaan demokrasi dan keadilan pula dapat dibangun suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan pengalaman masyarakat negara-negara maju, maka menurut Organski (1985) perkembangan nasionalisme melalui empat tahap ialah :tahap perkembangan politik kesatuan nasional; tahap perkembangan politik industrialisasi; perkembangan politik kesejahteraan nasional, dan perkembangan politik kemakmuran.¹² Setelah bangsa kita pada tahun 1984 digelorakan oleh semacam kerinduan akan nasionalisme dengan adanya keinginan untuk menjadikan bangsa kita sebagai negara yang dihormati dan disegani dan diikuti satu dasawarsa kemudian kemudian pada tahun 1995 kita nyatakan tahap 25 tahun kedua PELITA (1994-2019) sebagai tahap kebangkitan II maka tiga tahun berikutnya, pada tahun 1998 ternyata kita harus menghadapai suatu kenyataan yang sama sekali lain dan tidak kita harapkan, kita terjerumus ke dalam krisis bangsa yang multikompleks dan berkepanjangan serta telah mengancam integrasi bangsa yang hingga kini belum menampakkan tanda-tanda kapan terselesaikan. Krisis bangsa ini telah menarik mundur jarum jam sejarah kita selama selama setengah abad, adalah kembali pada posisi tahun 1950-an yang ditandai

12 J. Soedjati Djiwandono. (1991). Gereja dan Politik. Yogyakarta : Kanisisus. Hlm :88-89.

dengan berbagai konflik kepentingan. Tahap pengembangan nasionalisme kita harus ditarik mundur lagi ke tahap pembinaan politik kesatuan.

C. HUBUNGAN NEGARA PANCASILA DAN AGAMA

Sementara negara-negara maju telah mencapai pada tahap-tahap perkembangan politik kemakmuran dan pengaruhnya dalam memasuki milenium ketiga ini mereka menuntut globalisasi sedang di dalam masyarakat dan bangsa kita sendiri masalah-masalah nasionalisme dan agama masih menduduki peringkat tinggi dalam daftar agenda yang banyak menyita waktu dan energi kita.¹³

Dipilhnya bentuk negara kebangsaan, bukannya negara agama, demikian pula digunakannya dasar dan ideologi Pancasila yang juga bersumber pada paham kebangsaan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menyatukan bangsa Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan persatuan yang bulat, sehingga dapat diakomodasikan seluruh keaneragaman aspirasi masyarakat dan rakyat Indonesia, termasuk aspirasi-aspirasi agama. Maka dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ketika Bung Hatta tampil untuk melakukan perubahan-perubahan pada *Preamble* UUD yang disusun oleh Panitia Kecil, berkatalah dia;

“Oleh karena hasrat kita semua ialah menyatukan bangsa Indonesia seluruhnya, supaya dalam masa yang genting ini kita mewujudkan persatuan yang bulat, maka pasal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari UUD.”¹⁴

Dalam hubungan tersebut Pancasila sebagai ideologi memang berfungsi untuk mempersatukan aspirasi-aspirasi dari berbagai agama, guna mengatasi aneka macam konflik atau ketegangan dengan mengangkat berbagai perbedaannya ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Harus disadari pula bahwa paham kebangsaan sendiri bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan dan bukan dari nilai-nilai khas tertentu.

Sekalipun sejarah kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia

13 Eko Prsetyo dkk. Ed. Op.cit., Hlm. v

dahulu berbentuk negara/kerajaan agama seperti halnya kerajaan Hindu-Majapahit, kerajaan Islam-Demak dan kerajaan Mataram-Islam, namun rupa-rupanya bentuk negara agama bukan merupakan bentuk ideal bagi para pemuka pergerakan. Budi Utomo sebagai perintis Kebangkitan Nasional berdasarkan kebangsaan. Pada rapat kongresnya tahun 1918, Budi utomo menolak usulan program agama dan menyatakan menjunjung tinggi asas kebebasan dalam agama. Ki Hadjar Dewantara pun memandang bahwa agama adalah soal *prive* dan terbatas pada pemeluknya, sedang kebangsaan adalah soal umum yang menjadi perjuangan dan milik bersama. Oleh karena beliau mngkhawatirkan timbulnya perpecahan akibat perselisihan agama.

Maka tidak mengherankan apabila bung Hatta demi keutuhan seluruh bangsa Indonesia, meminta kerelaan wakil-wakil golongan Islam dalam PPKI untuk melepaskan dasar agama Islam dalam mendirikan republik ini. Dan *Alhamdulillah* semua merelakannya. Suatu keluhuran dan kebesaran jiwa yang luar biasa!! Bung Hatta adalah nasionalis dan demokrat sejati, dan tidak menghendaki republik ini hanya bergantung kebijaksanaannya kepada orang yang berkuasa dan hanya menghendaki berdasarkan tanggung jawab kepada rakyat. Tulisnya:

“Juga Indonesia pernah mengalami zaman emasnya dalam masa Kerajaan Majapahit, atas kebijaksanaan Patih Gajahmada. Tetapi masa itu lenyap dengan lekas dengan tiada timbul lagi, oleh karena kebesaran negara bergantung kepada kebijaksanaan orang-seorang yang memegang kekuasaan, tidak bersendi kepada tanggungjawab seluruh rakyatnya.”¹⁴

Masalahnya sekarang ialah dimanakah kedudukan agama dalam Negara Pancasila serta bagaimanakah hubungan keduanya?

Ketentuan yang menjelaskan makna, kedudukan serta hubungan kehidupan beragama dengan negara Pancasila adalah pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa 1) Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa; dan 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

14 Slamet Muljana. (1986). Kesadaran Nasional. Jakarta: Inti Idayu Press. Hlm. 23-24.

dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Pada hakekatnya asal 29 UUD 1945 dengan kedua ayatnya tersebut berasal dan sekaligus sebagai kristalisasi cita-cita hidup bernegara yang harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dikemukakan oleh Bung Karno dalam pidatonya Lahirnya Pancasila di depan sidang BPUKI pada tanggal 1 Juni 1945. Katanya:

“Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri yang Kristen menyembah Tuahn menurut Isa al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhamad SAW.”...

Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dalam konsep Bung Karno tersebut menghendaki agar kita dalam hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Namun tidak berarti bahwa negara dapat mengatur apalagi memaksakan tata aturan kehidupan beragama seperti halnya peribadatan, berdoa, puasa, dan lain-lain. Agama berdasarkan atas dasar keyakinan dan keyakinan tidak dapat dipaksakan. Negara tidak lebih tinggi terhadap agama. Hidup bernegara tidak sama dengan hidup beragama. Negara tidak dapat mengurus relasi batiniah manusia dengan Tuhan. Agama tidak memerlukan pengakuan atau restu dari negara. Negara juga tidak berhak untuk menilai apakah aliran suatu agama itu sesat, tidak sesuai atau bertentangan dengan yang dianggap baku. Hak seperti itu mengandung klaim monopoli atas kebenaran dan hendak memaksakannya kepada orang lain. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Namun juga tidak berarti bahwa tak ada hubungan antara negara dan agama. Memang negara-negara Barat menganut prinsip ini, namun tidak demikian halnya bagi bangsa kita. Tetap terdapat hubungan antara negara dan agama. Kalau negara kita berdasarkan pada Ketuhanan Yanga Maha Esa pada hakekatnya mengandung suatu pengakuan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip atau asas yang lebih dalam dan lebih jauh lagi daripada tujuan negara, ialah tujuan akhir. Tujuan hidup tidak hanya mencapai kemakmuran atau kesejahteraan duniawi saja,

melainkan lebih terdorong untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan sejati manusia. Itulah sebabnya manusia menyerahkan dan mecurahkan saat sekali dirinya kepada sang Khalik. Maka sebenarnya betapa indah prinsip negara kita berdasarkan Pancasila ini. Betapa harmonisnya dan damai negara ini, apabila keyakinan dasar ini teraktualisasi dalam hidup kita masing-masing. Itulah sebabnya negara kita yang berdasarkan Pancasila ini mengakui dan memberi tempat yang sebaik-baiknya bagi agama, ialah menciptakan suasana kondusif bagi kehidupan dan perkembangan agama.

Juga tidak dapat pula negara lebih rendah dari agama. Negara tidak boleh diperalat agama. Agama juga tidak boleh menguasai negara. Keduanya harus pandai menjaga jarak. Terlalu eratnya hubungan anatar agama dan negara juga mengandung bahaya. Bahanya ialah agama bisa dijadikan sebagai alat politik. Bila hal itu terjadi, yang akan rugi tentu saja adalah agama. Agama karenanya direndahkan menjadi sekedar unsur politik. Agama sering hanya dijadikan sarana legitimasi kebijakan politik.¹⁵

Pancasila berupaya menmpatkan hubungan yang sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya antara agama dan negara. Negara Pancasila bukanlah negara agama, namun sekaligus juga bukan negara sekuler. Pancasila berdiri di tengah-tengah. Seperti disebut di atas bahwa tugas agama dan tugas negara berbeda. Dan seharusnya tugas negara dipisahkan dari tugas agama. Tugas negara ialah untuk mewujudkan hasrat bersama dalam mewujudkan kesejahteraan umum, sedang tugas agama lebih tertuju pada hasrat bersama untuk mengagungkan, berbakti, dan bersembah sujud kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ditambah dengan adanya pluralitas dalam hal agama-agama di Indonesia, maka upaya menegakkan negara agama, di samping akan bersifat kontradiktif, lebih-lebih akan berarti pula pemerkosaan hak-hak asasi agama-agama. Dominasi terhadap kaum minoritas dipastikan akan terjadi. Maka menjadi tugas dan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan dalam kehidupan beragama dan menciptakan iklim yang sehat yang memungkinkan dan mendukung dilaksanakan

15 Ibid. Hlm : 77-78.

nya kebebasan beragama itu dalam suasana kerukunan, saling pengertian, saling menghormati, dan bahkan kerjasama.

Kalaupun suatu sekte aliran agama mengajarkan ajaran sesat, dan kalau negara mesti harus bertindak, tindakan negara bukanlah terhadap kesesatan agama itu sendiri, melainkan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum negara yang menyangkut ketertiban umum, khususnya hukum pidana, misalnya pembunuhan massal sebagai ritual yang menjadi persyaratan agama tersebut.

Negara Pancasila juga bukan negara sekuler. Negara Pancasila mengakui bahwa seluruh hidup manusia berada dalam penyelenggaraan Tuhan, eksistensi negara tak pernah lepas dari gerak tangan Tuhan. Negara Pancasila dan agama dijelaskan secara tepat oleh Prof. Dr. N. Drijarkoro, SJ dengan teorinya yang menyatakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena hal itu adalah wajib bagi manusia. Kalau mengurangi tuntutan itu, maka negara kita menjadi negara atheis. Kalau melampaui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wajib maksimal, maka negara akan menjadi negara teokrasi.¹⁶

Hingga kini masih terdapat pula anggapan bahwa terjadi tumpang tindih antara status Pancasila sebagai ideologi bangsa/dasar filsafat negara dengan sebagian sisi-sisi kehidupan beragama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Malahan terdapat pula rasa takut dari gama bahwa kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum serta Pancasila sebagai satu-satunya asas akan mengancam supremasi teologis dari kebenaran yang dibawa oleh agama. Tentu saja anggapan-anggapan dan rasa takut tersebut tidak beralasan. Disadari dengan sesadar-sadarnya bahwa Pancasila bukanlah agama dan karenanya tidak akan berfungsi menggantikan agama dengan merampas supremasi theologis dan hukum-hukum dari suatu agama.

Implikasi dan konsekuensi Republik Indonesia sebagai negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila, bukannya sebagai negara yang berdasarkan agama tertentu, maka negarapun tidak akan mendasarkan sistem hukum dan perundang-undangan pada aja-

16 N. Drjarkoro, SJ. (1976). Pancasila sebagai Ideologi. Yogyakarta : Paramita. Hlm. 48.

ran agama tertentu pula. Ajaran dan hukum agama tidak mengikat negara atau menjadi landasan serta bagian dari sistem hukum dan perundang-undangnya pada ajaran agama tertentu pula. Ajaran dan hukum agama tidak mengikat negara atau menjadi landasan serta bagian dari sistem hukum perundang-undangan negara. Dengan demikian tidak terjadi dualisme peraturan perundang-undangan dan kewajiban warga negara yang diatur oleh negara dan kewajiban keagamaan. Kewajiban negara di bidang agama adalah menciptakan iklim yang sehat untuk menunjang kehidupan beragama yang bebas dan mendorong kerukunan umat beragama.

Demikian pula negara juga tidak berkewajiban mengurus pendidikan agama, yang menjadi tanggung jawab keluarga dan lembaga agama masing-masing. Yang menjadi tanggungjawab negara hanyalah mengenai masalah teknis pengajaran agama.¹⁷ Saya sebagai seorang pendidik sungguh merasa prihatin, mengapa justru pendidikan agama, akhir-akhir ini masih saja menjadi ketegangan di Republik tercinta ini. Untuk mengatasinya sebaiknya masalah tersebut diserahkan saja kepada lembaga yang paling berhak, ialah orang tua siswa dan lembaga-lembaga agama. Di negara-negara Barat, Amerika Serikat misalnya pendidikan agama menjadi tanggung jawab orang tua dan lembaga-lembaga agama. Para orang tua yang mempunyai tugas dan hak dididk utama yang tak tergugatkan, sudah menyadari dan telah menikmati kebebasan sejati memilih sekolah. Sekolah-sekolah negeri, tidak menyelenggarakan pendidikan agama, dan pendidikan agama di seolah hanya diselenggarakan oleh sekolah-sekolah swasta yang mendasarkan diri pada agama tertentu. Konstitusi Amerika Serikat berusaha mengadakan pemisahan antara agama (gereja) dengan negara dengan segala implikasi jangka panjang yang cukup mendasar bagi sistem sekolah. Sekalipun ketentuan konstitusional ini sering diinterpretasikan sebagai bentuk suatu sekuler, yang jelas ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan memperteguh kesadaran dan hak kemerdekaan beragama.¹⁸

17 J. Soedjati Jiwandono. Op.cit. hlm: 97.

18 Morris Janowitz. (1983). *The Reconstruction of Patriotism, Education fo Civic Consciusness*. Chicago : The University of Chicago Press.

Memang di negeri kita istilah sekuler berkonotasi negatif, karena adanya distorsi dan salah interpretasi, sehingga banyak ditakuti. Padahal, makna sekularisasi tidak lebih dari sekedar pemisahan antara fungsi agama dan negara. Sejak abad ke-19 Pemerintah Amerika Serikat tetap menyediakan dana bagi pengembangan pengajaran agama. Dalam revolusi Prancis, khotbah-khotbah para pendeta sangat menekankan bahwa kepentingan negara identik dengan kepentingan agama.

Jelaslah bahwa konsep sekuler tidak diartikan sebagai meninggalkan agama seperti yang dipersepsikan di negeri ini. Kalaupun misalnya pendidikan agama di Indonesia diserahkan kepada orang tua dan lembaga agama, dan dipisahkan dari urusan sekolah atau negara maka juga tidak perlu ditakutkan segala bentuk sekularisasi. Maka makna sekularisasi persis seperti yang dikemukakan Nurcholis Madjid, ialah untuk memposisikan kedudukan agama dan dunia pada tempat yang wajar. Ialah tidak mentrandesikan nilai-nilai yang profan, namun juga sebaliknya tidak boleh memprofanisasi nilai-nilai yang sakral atau illahiah.¹⁹ Atau yang idela sebagai telah dirintis oleh beberapa Perguruan Tinggi lebih bersifat akademik ialah memberikan pengkajian dan studi terhadap semua agama yang ada. Dengan tanpa pretensi dan maksud-maksud tertentu (politik), sifat akademik dalam pendidikan agama semacam ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang luas serta menghilangkan sekat-sekat sikap sempit dan lebih dari itu, akan mampu mengembangkan sikap toleransi, hormat-menghormati, dan membangun sikap persaudaraan yang tulus. Tak perlu pula dihantu oleh bayang-bayang “ancaman iman” sebab iman sejati adalah “panggilan Illahi” sendiri. Lebih dari itu, justru pendidikan agama seperti itulah yang mampu mendewasakan kehidupan beragama.

D.HARMONISASI HIDUP KEBERAGAMAN, DEPOLITISASI AGAMA, DAN NASIONALISASI KEBERAGAMAN.

Perjalanan sejarah Indonesia sebagai negara kebangsaan yang pluralistik senantiasa masih diwarnai oleh berbagai ketegangan

¹⁹ Bahtiar Efeendi. (2001). *Teologi Baru Politik Islam*. Yogyakarta : Galang Press. Hlm : 16-17.

sebagai akibat belum harmonisnya dalam manajemen pluralitas. Sejak lima tahun terakhir (1996-an) ketegangan tersebut sering mengambil bentuk radikalisasi, kerusuhan, bentrokan massal, dan konflik-konflik berdarah yang meminta korban tidak sedikit api penyulut ledakan yang paling fenomenal adalah pluralisme dalam tingkat kesejahteraan hidup ialah kesenjangan ekonomi. Namun di balik kesenjangan ekonomi yang memang rawan terhadap anarkisme massal tersebut terdapat pula faktor-faktor diskriminasi dan represi politik, lebih-lebih masih adanya suasana isolasi yang beku akan tetap menjadi sumber munculnya radikalisme dan ekstrimitas.²⁰

Isu agama tetap merupakan sumber kerawanan konflik yang paling sensitif. Manajemen penyelesaian konflik keagamaan di masa lalu yang tidak tuntas serta cenderung represif dan ditutup-tutupi, tetap menyisakan konflik sosial yang bukannya kian mereda, malahan menjadi semakin kompleks. Konflik sosial keagamaan yang semula lebih bersifat vertikal, antara agama dan negara, akhir-akhir ini telah berkembang menjadi konflik horisontal antara agama yang satu dengan agama yang lain bahkan antara sesama umat beragama.

Konflik vertikal sosial keagamaan antara agama dan negara pada dasarnya lebih mnyangkut pada masalah konflik loyalitas. Konflik loyalitas ini dari pihak agama lebih bersumber pada sikap eksklusivisme dan puritanisme agama. Suatu agama disebut eksklusif apabila menuntut seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara diselenggarakan secara efektif menurut cita-cita agama. Agama yang mengarah pada eksklusivisme jelas sulit untuk merasa puas dalam negara kebangsaan yang pluralistik seperti halnya Indonesia kita ini, namun juga sebaliknya eksklusivisme itu sendiri juga akan membuat agama itu tidak mampu menghayati nilai-nilai nasionalisme yang mampu menampung keanekaragaman agama. Dengan puritanisme dimaksudkan sebagai sikap keagamaan yang ingin memurnikan kehidupan keberagaman dari unsur manusiawi dan profan seperti budaya lokal, moral politik, dan pengaruh asing. Kaum puritan atau kaum fundamentalis

20 Muhamad Sofyan. *Op.cit.* hlm: 2-3.

akan menolak nasionalisme karena dipandang bersifat sekuler.

Sedang konflik horisontal keberagaman antar umat beragama, lebih terikat pada sentimen-sentimen sosiologis karena adanya perbedaan doktrin atau perbedaan kuantitatif penganut-penganutnya. Perbedaan doktrin agama yang cenderung tidak bebas dari salah paham, praduga, argumentatif sejak dahulu sering menimbulkan bentrokan pada tingkat kognitif kualitatif yang lebih dikenal dengan konfrontasi apologetik. Yang dimaksud dengan apologetika adalah bagian dari teologi yang membela dan mempertahankan kebenaran agama yang diimaninya terhadap serangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Kasus monitor tahun 1990 kiranya bersumber dari sikap apologetik. Dalam masyarakat keberagaman yang pluralistik seperti di Indonesia ini penyebabnya yang paling dekat terhadap adanya konflik horisontal adalah berasal dari mayoritas dan minoritas agama. Sekalipun sering tak terhindarkan terjadinya konflik-konflik keagamaan dan yang lebih sering lagi tentu saja kerugian ada pada pihak yang minoritas, namun bagi Indonesia harus diakui bahwa secara konstitusional Pancasila dan UUD 1945 GBHN menjadi pembendung utama terhadap sumber-sumber konflik sosial keagamaan.²¹

Demikianlah telah dibahas secara selintas, namun jelas bagaimana hubungan dan kedudukan antara negara dengan agama serta konsekuensi hubungan antar keduanya dengan kenyataan faktual konflik-konflik yang telah mengemuka dalam proses perjalanan sejarah bangsa sebagai akibat terjadinya perbenturan peran antar masing-masing komponen yang tentu saja meminta dan perlu segera diselesaikan apabila bangsa ini tidak ingin semakin jauh ditinggalkan oleh dinamika globalisasi yang makin hari makin pesat. Masalahnya sekarang ini ialah bagaimana dan mulai darimana upaya penyelesaian konflik itu dilakukan untuk kemudian diwujudkan serta dikembangkan persaudaraan dan kerjasama untuk bersama-sama membangun masa depan Indonesia baru yang lebih manusiawi.

Dalam masyarakat pluralistik religius yang paternalistik seperti Indonesia kita ini dengan tanpa menafikan faktor-faktor pent-

21 Hendropuspito. (1987). Sosiologi Agama. Yogyakarta : Kanisius. Hlm: 152-159.

ing lainnya, harmonisasi sosial keberagaman harus dipandang sebagai solusi kunci bagi manajemen pembangunan watak dan bangsa. Manakala pemeluk-pemeluk agama telah melebur pedang-pedangnya menjadi lebih bijak maka telah tibalah saatnya bagi bangsa ini untuk mewujudkan kerukunan dan persaudaraan sejati, membina persatuan dan kesatuan, untuk mewujudkan ajaran-ajaran para nabi ialah membangun bersama kesejahteraan umat manusia.

Harmonisasi kehidupan sosial keagamaan pada dasarnya merupakan tanggung jawab kultural dari masing-masing agama dan umatnya. Secara moral agama-agama tidak boleh cuci tangan atas disharmoni diantara umat beriman yang telah terjadi selama ini. Para pemeluk agama harus menjadikan ajaran agamanya sebagai motor penggerak kebudayaan dan peradaban manusia dan lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta masyarakat yang secara kultural lebih harmonis dan sejahtera. Agama juga mendorong orang untuk tetap berharap kepada dunia yang lebih baik di masa depan dengan meminimalisasi problem-problem sosial di dunia ini. Peter L. Berger menjelaskan penempatan peristiwa-peristiwa sehari-hari dalam kerangka acuan kosmis menganugerahkan suatu derajat manusia, makhluk yang tidak sempurna dan fana itu sebagai citra keselamatan dan kebahagiaan abadi.

Pandangan Peter L. Berger yang lebih tegas lagi mengenai peranan agama dalam kebudayaan dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *Social Reality of Religion*. Agama adalah usaha dengan mana alam semesta yang suci ditegakkan. Dengan kata lain agama adalah pemantapan alam semesta dengan cara yang suci. Itu semua mengandung makna bahwa dengan agama manusia harus membudayakan alam semesta dalam hal mengolahnya. Termasuk masyarakat dan manusia itu sendiri, sehingga manusia memperoleh kehidupan yang lebih harmonis dan lebih tinggi di bidang rohani maupun jasmani.²²

Menurut konsep di atas agama memiliki fungsi khusus atau tersendiri dalam usaha manusia untuk membangun dunianya. Kekhususan itu dalam pengertian bahwa agama mampu mem-

22 Driyarkara. Tentang Kebudayaan. Yogyakarta : Kanisius. Hlm : 42-43.

berikan makna kepada setiaa usaha manusia itu sebagai sesuatu lebih suci dan adikodrati dan dengan demikian memberikan arti yang lebih tinggi, tentu saja bukan dalam pengertian bahwa agama itu sendiri yang membangun dunia, melainkan agama itu memberikan inspirasi bagi pemeluknya untuk membangun dari dan lingkungan sekitar menurut dan sesuai dengan esensi petunjuk agamanya. Menurut Mul Khan (via Mahfud, 2010: 267), kebijakan politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan keagamaan berbasis monokultur sering menyebabkan warga bangsa ini kehilangan kecerdasan dan kearifan otentik. Multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. *Keempat*, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.

Sikap toleransi adalah nilai-nilai yang terpenting untuk suatu masyarakat (bernegara) yang bersifat pluralis (majemuk), akan tetapi agama dijadikan sebagai ciri khas atau semacam identitas yang membedakan perbedaan-perbedaan tersebut, sikap toleransi yang mulai terdistorsi, mengakibatkan adanya sikap “fanatisme” yang sangat berlebihan yang membuat jurang pemisah diantara perbedaan tersebut. Sikap toleransi yang dilandasi atas dasar saling menghormati dapat mencegah timbulnya praduga-praduga yang ada dalam masyarakat beragama. *Melting pot* menurut Wijaya (2011: 154) adalah sebuah konsep multikulturalisme yang mengarah pada dua kemungkinan, yaitu (a) terjadinya penggabungan ras serta pencampuran sosial dan membentuk kebudayaan yang harmonis, dan (b) terjadinya suatu proses percampuran kebudayaan yang menghasilkan penguatan kebudayaan lama atau munculnya sebuah kebudayaan baru yang berbeda sama sekali dengan kebudayaan lama. Lebih lanjut Wijaya (2011: 158) menerangkan, berbeda dengan *melting pot*, *mosaic* berarti suatu kepingan berwarna-warni yang disusun dan ditempatkan

sedemikian rupa sehingga membentuk gambaran yang mencakup suatu daerah tertentu.

Melalui eksternalisasi manusia melakukan pencurahan konsep-konsep yang kemudian dijadikan rencana atau pola bagaimana masyarakat dan dunia sekitarnya akan dibangun. Objektivitaslah atau aktivasi fisik dan mental untuk mewujudkan konsep-konsep atau gagasan menjadi suatu aktifitas lahiriah yang baru. Melalui tahap internalisasi manusia menjadikan realitas baru yang diciptakan memiliki kemudian menyerapnya untuk menjadi realitas dari struktur dunia objektif ke dalam dunia kesadaran. Pada dasarnya ada dua pengertian tentang pendidikan, yang seringkali diperdebatkan, yakni: Pertama, yang berpandangan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah merupakan proses pewarisan, penerusan, dan sosialisasi perilaku individual maupun sosial, yang telah menjadi model anutan masyarakat secara baku. Kedua, yang mengartikan pendidikan sebagai upaya fasilitatif yang memungkinkan terciptanya situasi atau lingkungan di mana pelbagai potensi dasar yang dimiliki anak-didik dapat berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan mereka pada zaman di mana mereka harus *survive*.

Kemajuan suatu bangsa sebagian besar tergantung dari sistem sosialisasi pendidikan yang diikuti. Dalam hubungan ini, agama ikut memainkan peran yang penting baik secara positif maupun negatif. Agama memiliki peranan positif maupun negatif. Agama harus mampu memenuhi panggilan untuk melihat dan memberi nilai kepada dunia ini menurut matahari iman yang bersifat adikodrati. Sehingga lingkungan sekitar nampaknya kurang berarti menjadi suatu makna dan bernilai tinggi. Sebaliknya peranan agama akan negatif apabila agama tidak sanggup menangkap dimensi supranatural dari dunia seanteronya dan menempatkan dibawah bayang-bayang gelap.

Berhasilnya sistem sosialisasi pendidikan suatu bangsa banyak bergantung pada keberhasilan dalam meletakkan keseimbangan antara dunia profan dan dunia sakral, antara dunia yang telah dibudayakan oleh manusia dan dunia kesadaran yang diresapi nilai-nilai kodrati. Suatu bangsa yang telah melesat tinggi kema-

juannya membuktikan sukses bangsa tersebut dalam menata keseimbangan antara profan dan yang sakral. Depolitisasi agama menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya harmonisasi kehidupan sosial beragama. Terutama dalam negara kebangsaan yang pluralistik seperti Indonesia kita ini, sangatlah penting bahwa orang-orang memiliki pandangan yang tepat mengenai hubungan antara agama dan negara. Ada perbedaan yang jelas pula antara apa yang dijalankan oleh umat beriman entah sebagai perorangan maupun kolektif. Agar agama dapat menjalankan fungsi interpretasi kritis atas kenyataan hidup yang dialami bersama dan agar memberikan orientasi etis, agama memerlukan jarak dan hal itu akan terjamin kalau ada otonomi agama. Oleh sebab itu, tugas dan wewenang negara demikian pula agama tidak terikat kepada satu sistem politik manapun. Di bidangnya masing-masing negara dan agama adalah otonom, masing-masing tidak bergantung satu sama lain. Dengan sumbangan interpretasi kritis, dan orientasi etis dari agama-agama berdasarkan perpektif iman mereka, diharapkan akan menjadi luas tentang masalah keadilan dan kepedulian sosial baik dikawasan bangsa sendiri aupun antar bangsa.

Secara hstoris agama di Barat dimulai sejak abad pertengahan serta masa *Renaissance* dan Reformasi, dan baru menjadi mantap setelah Revolusi Amerika dan Perancis, ialah tumbuhnya negara nasional abad ke-19. Nasionalisme sebagai obyek pusat loyalitas politik mengakhiri sekaligus menggantikan perananan dominasi agama. Untuk dapat melepaskan diri dari peranan politiknya, Gereja Katolik juga memerlukan waktu yng cukup lama dan baru pada persetujuan Lateran tahun 1929 dapat dibebaskan sama sekali dari urusan politik dan berdiri sebagai gereja Katolik yang ototnom dengan Vatikan sebagai residensi Kepausan. Berbicara mengenai hubungan antara negara dan agama dikaji dari segi sistem politik kenegaraan menurut Karl Popper setidak-tidaknya mesti menyangkut tiga masalah pokok: problem mekanisme pemerintahan, problem mayoritas dan minoritas, dan problem pluralisasi pemahaman agama.²³

Pertama berkaitan dengan problem mekanisme pemerintah-

23 Denny JA. (1992). *Memperbincangkan Koalisis Agama dan Negara* :Bernas, 2 Maret 1992. Hlm. 4.

an. Menurut Karl Kopper sistem pemerintahan yang baik bukanlah terutama ditentukan oleh siapa yang memimpin, melainkan bagaimana diciptakan sistem pemerintahan agar kesalahan pihak yang memerintah dengan mudah dapat dikoreksi dan bagaimana pula pemerintah yang salah itu dengan mudah dapat diganti secara tertib dan melembaga. Sistem demokrasi tidak menjamin pemerintah yang memperoleh limpahan kekuasaan dari wakil-wakil rakyat yang sah itu tidak luput dari kesalahan. Siapapun yang memegang kendali pemerintahan, entah dari elit politik maupun non partisipan, dari sipil maupun militer entah dari filsuf maupun agamawan tetap memiliki kelemahan kalau tidak boleh disebut memiliki kecenderunagn yang sama untuk menyimpang dari aturan main yang telah ditentukan bersama. Semakin mudah kesalahan suatu sistem pemerintahan, dapat dikoreksi, akan semakin baik sistem pemerintahan tersebut.

Kedua berkenanan dengan problem mayoritas dan minoritas. Sistem pemerintahan demokrasi didasarkan pada kedaulatan mayoritas dan hak memperoleh perlindungan bagi kelompok minoritas. Melalui pemilihan umum, pihak mayoritas memiliki kemudi dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun hak itu secara serentak dibatasi oleh kewajiban untuk melindungi kepentingan kaum minoritas. Bahkan lebih jauh lagi, kaum minoritas dimungkinkan untuk mengendalikan pemerintahan jika disetujui oleh pihak mayoritas melalui pemilu. Prinsip tersebut merupakan revolusi paling radikal dari prinsip-prinsip demokrasi selama ini. sejak tampilnya tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, dan Karl Popper hak kaum minoritas dijunjung tinggi.

Ketiga problem pluralisasi agama. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa agama dipandang sebagai sumber pengembangan kultural dan etik yang memberikan dasar-dasar orientasi bagi kehidupan individual ataupun komunal. Seiring bertumbuhnya kesadaran diri sebagai subjek, maka sejak itu interpretasi agama menjadi bagian tak terpisahkan dari hak pribadi atau hak komunitas tertentu. Interpretasi tak pernah netral dan tak pernah dapat dilepaskan dari keterbatasan pengetahuan dan kepentingan dan sejak saat itu pula tak terhindari terjadinya pluralisasi pemaha-

man agama. Klaim yang memutlakkan interpretasi orang atau kelompok lainnya, dengan sendirinya telah kehilangan legitimasi. Maka pluralisasi pemahaman agama ini mesti memperoleh hak untuk dilindungi.²⁴

Bila terjadi koalisi antara negara dengan salah satu agama, maka ketiga prinsip Karl Popper di atas akan mengalami distorsi dan pengekangan yang bukan saja tidak membuahkan suatu dinamika, lebih dari itu dapat dipastikan kebekuan akan terjadi. Dengan adanya koalisi agama, dan negara sakralisasi sistem pemerintahan negara memperoleh legitimasi, suatu awal ditutupnya kemungkinan untuk dapat menilai dan mengoreksi kebijakan pemerintah. Eksklusivisme negara bukan saja tidak responsif, lebih dari itu akan anti perubahan dan pembaharuan, suatu hal yang tidak diinginkan lagi pada milenium ini.

Koalisi agama dan negara juga cenderung untuk tidak mengapresiasi hak-hak kelompok minoritas. Dominasi agama tertentu akan terjadi, yang dengan sendirinya akan mengabaikan agama-agama lain. kaum minoritas kecil juga kemungkinan untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pemerintah sesuai dengan mekanisme dan tatacara demokrasi.

Demikian pula pluralisasi pemahaman agama cenderung tidak memperoleh tempat dalam sistem koalisi agama dan negara. Dengan disatukannya agama dengan negara maka agama mengalami proses institusional agama, karenanya cenderung untuk melakukan hegemonisasi dan monopoli interpretasi agama. Interpretasi resmi dilakukan oleh institusi kemudian dikukuhkan sebagai hukum negara dan diberlakukan secara nasional, maka tidak ada tempat bagi pluralitas agama.

Dengan demikian maka koalisi agama dan negara pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Agama dibebaskan dari unsur paksaan, suatu unsur yang senantiasa melekat pada negara suatu hal yang demikian lumrah. Agama sebenarnya mempunyai fungsi kontrol sebagai berikut:

1. Meneguhkan kaidah-kaidah kesusilaan bagi kehidupan moral masyarakat.

24 Denny JA. (1992). Pluralitas KesadamAgama : Bernas, 30 Maret.

2. Mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral dari ancaman destruktif dari kehidupan modern.
3. Memberikan sanksi moral terhadap pelanggarnya.

Fungsi kontrol sosial yang berdimensi tajam atau keras dinamakan fungsi properthis atau fungsi kritis. Kekhususan dari fungsi properthis terletak pada sasaran dan cara. Sasaran kritik ini pada umumnya adalah golongan sosial yang sedang berkuasa atau pemegang tampuk pemerintahan yang dengan atau dalam kedudukannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kaidah kesusilaan sehingga menimbulkan dan penderitaan kepada rakyat.

Depolitisasi agama pada umumnya merupakan suatu bentuk koreksi dari paham nasionalisme terhadap doktrin keagamaan.²⁵ Secara fungsional hubungan keduanya dimurnikan dalam arti tanpa ada pretensi serta kepentingan-kepentingan tersembunyi di belakang dan karenanya hubungan antara nasionalisme dan agama menjadi lebih harmonis. Nasionalisme keberagaman adalah nasionalisme yang menyatukan antara penghayatan iman dan kepedulian hidup berbangsa dan bernegara dengan : "*Menjadi Indonesia 100% dan seorang agamawan 100%*". Dengan konsep nasionalisme keragaman suatu umat beriman dari agama dan keyakinan mampu di negeri ini diserukan bahwa sekarang *sudah saatnya berhenti konflik* tiada yang lebih luhur daripada seorang warga bangsa yang mempersembahkan seluruh tugas kenegaraan sebagai manifestasi pengabdian kepada Tuhan. Tiada yang melebihi kesalehan seorang beriman yang menjadikan seluruh perjuangan dan cintanya kepada tanah air sebagai ibadat suci kepada sang Khalik. Suatu *tassawuf* nasionalisme yang menabuhkan!

E. PENUTUP

Sejak awal para pendiri bangsa memilih negara kebangsaan dengan Pancasila sebagai dasar negara kebangsaan dimaksudkan untuk menyatukan aspirasi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia secara utuh. Negara kebangsaan Republik Indonesia dengan Pan-

25 Abdur Munir Mulkan. (1996). Dialog Reflektif Nasionalisme : Eko Prasetyo, dkk. (1996). Nasionalisme. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar. Hlm : 30.

casila sebagai dasar negara sudah final sejak awal.

Pluralisme masyarakat dan bangsa Indonesia menuntut setiap anggota warga bangsa dan warganegara dengan penuh komitmen semangat pengorbanan serta kerendahan hati untuk mewujudkan harmonisasi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal harmonisasi ini agama-agama diharapkan berdiri paling depan untuk memberi teladan. Dengan upaya-upaya pembudayaan dan peradaban dengan sikap keberagaman yang lebih inklusif, interpretasi teologisnya yang kontekstual terhadap keprihatinan bangsa selama ini, maka bukan saja konflik-konflik keagamaan menjadi terhenti karenanya.

Dengan semangat jiwa nasionalisme dan keberagaman persoalan besar bangsa diharapkan segera dapat diatasi. Konflik-konflik internal dihentikan, dan integrasi bangsa kian dimantapkan, krisis bangsa disembuhkan dan identitas serta kepribadian dikokohkan, rasa ketergantungan ditinggalkan dan sikap kemandirian ditegakkan. Marilah kita bersama-sama untuk menatap ke masa depan yang lebih cerah membangun Indonesia baru yang lebih bersatu, rukun, adil, demokratis, solider, sejahtera, madani, dan maju, serta ke luar terhormat dalam pergaulan internasional bangsa-bangsa di era globalisasi ini, mandiri, dan tetap menjunjung tinggi harga diri, identitas, dan kepribadian bangsa.

Hadirin yang berbahagia

Sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Pemerintah RI dan Mendiknas atas kepercayaan yang diberikan untuk menempati jabatan Guru Besar dalam Ilmu Pendidikan Sejarah, FIS, UNY.

Penghargaan dan rasa terimakasih saya sampaikan pula kepada Rektor dan seluruh anggota senat UNY yang telah menyetujui dan mengusulkan pengangkatan saya sebagai Guru Besar kepada pemerintah dan menerima saya sebagai anggota senat. Penghargaan dan rasa terimakasih saya sampaikan juga kepada Dekan dan anggota senat FIS yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk dapat diusulkan sebagai Guru Besar kepada UNY.

Penghargaan dan terimakasih juga saya sampaikan kepada Tim Program Percepatan Studi Guru Besar dengan ketua Prof. Imam Barnadib, MA, Ph.D dan Prof Drs. Sumantri Wardoyo yang telah mendorong dan membimbing serta memonitor kegiatan-kegiatan saya dalam rangka mencapai jenjang Guru Besar ini.

Kepada Bapak dan Ibu Dosen jurusan Pendidikan Sejarah UNY yang telah mendidik dan mengembangkan saya dan rekan-rekan jurusan yang telah mendorong dan mendukung saya untuk menapak jejak guru Besar ini. kepada segenap anggota civitas akademik FIS, UNY saya sampaikan Terimakasih atas segala dukungan.

Melalui forum ini pula perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua guru saya di Sekolah Rakyat Setran II, SGB Mlati, demikian para dosen IKIP serta Pascasarjana IKIP yang sekarang telah berkembang menjadi UNY. Semoga seluruh amalan beliau dilimpahkan rahmat kepada Allah SWT.

Perkenankan pula pada kesempatan ini saya mengenang kedua almarhum orang tua yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan saya dengan senantiasa disertai doa, restu, dan prihatin serta kedua almarhum mertua saya semoga selalu dilimpahkan rahmat dan berkah dari-Nya.

Teruntuk istri saya V.L Suratmi belahan hati saya yang menjadi tempat berbagi rasa dalam suka maupun duka saya sampaikan terimakasih, yang sekalipun dalam dua tahun terakhir kesehatannya tidak sempurna penuh namun dengan sabar mendorong saya untuk dengan gigih menjalani dan melaksanakan tugas-tugas akademik keseharian saya. Bagimu anak-anak saya Mawar dan Yes menantu bersama cucu-cucu Dahlia dan Leli terimakasih atas segala pengertianmu. Hadirin yang berbahagia, anak saya yang satu lagi, anak kedua, Tantri P. Nurnugraha telah dipanggil Allha Sang Pencipta tiga tahun lalu, yang sempat membuat saya dan istri larut dalam ratap, duka, dan putus asa. Setelah menyadari bahwa sebagai orang beriman tidak boleh kehilangan harapan. Perkenankan saya sekeluarga untuk mempersembahkan orasi ilmiah saya yang sederhana ini kepada Tuhan semoga dapat menggenapi karya tulis mendiagn anak saya dan semoga kerahiman Illahinya membebaskan dia dari dosa-dosa dan kekurangannya serta

diperkenankan menikmati kebahagiaan yang abadi di kehadirannya. Dan semoga pada hari ini saya sekeluarga bersama pula mendiang Tantri P. Nugraha diperkenankan memanjatkan puji syukur atas segala kelimpahan kasih karunia Allah yang tak terhingga. Amin.

Demikianlah pidato pengukuhan saya. Atas kesabaran dan perhatian para hadirin saya sampaikan terimakasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan di penghujung akhir pidato pengukuhan saya perkenankanlah saya mengenang bait terakhir sajak saya yang mengungkapkan cinta saya sebagai guru sejarah dan berjudul *Sekolah itu*, yang saya tulis tahun 1968 dan dimuat dalam majalah *SEMANGAT* :

Kalau kian merunduk

Punggung sejarah

Di bawah beban-beban zaman

Di sekolah itu

Usiaku menunggu waktu

Karya-karya tertuai

Sekian, terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb

Damai sejahtera bagi kita semua.

BIODATA

A. Daliman lahir di Sleman, Propinsi DIY, 8 Januari 1942. Menamatkan Sekolah Rakyat di Setran II tahun 1955, SGB Negeri Melati (lulus Kelas II) tahun 1958, dan tahun 1961 tamat dari SGA Negeri Yogyakarta. Dengan bekal ijazah SGA mulai bekerja sebagai guru, pertama di Yayasan Xaverus Lampung (1 Agustus 1961-31 Desember 1962), sebagai guru Xaveru di Pringsewu (1962-1966) kemudian pindah ke Jawa di yayasan Kanisius DIY (1 Februari 1966- 31 Juli 1980) dengan mengajar tugas di SMP Kanisius Wonosari (1966-1967), SMP Kanisius Nanggulan Kulon Progo (1967-1973) dan terakhir di SMP Kanisius Klepu), Sleman (1973-1980)

Sambil mengajar di SMSP Kanisius Klepu, sejak 1974 mengikuti kuliah

di jurusan Pendidikan Sejarah, FKIS, IKIP Yogyakarta. Menjadi Sarjana Muda tahun 1977 dan mengikuti perkuliahan sarjana tahun 1978 diangkat sebagai Asdos dengan gelar Sarjana dicapai pada tahun 1979 dan tahun berikutnya (1980) diangkat sebagai staf pengajar tetap di Jurusan Pendidikan Sejarah. Tahun 1984 ditugaskan mengikut iperkuliahan pascasarjana di IKIP Yogyakarta dan lulus tahun 1987 dengan gelar Magister Pendidikan. Tahun 1987 mengikuti Refresher Program di University of Iowa.

Berbagai penelitian dan penulisan artikel telah dilakukan terutama berkaitan dengan Sejarah. Mengenai bidang yang sama juga dipergunakan dalam pengabdian masyarakat seperti penyuluhan candi (1996), Tim Pembimbing LKTI, ceramah Sejarah (1999), *reviewer* modul Sejarah UT, dan lain sebagainya. Mengikuti seminar dan menjadi pemakalah dalam seminar, Munas Sejarah sebagai penyaji MUKERNAS SEJARAH X di Universitas Padjadjaran (1990), sebagai Kongres Nasional Sejarah. Untuk seminar internasional pernah mengiuti *Joint Conference Iowa Association of supervision dan Curriculum Development* dan mengikuti *fall conference lining outside world to your classroom* di Iowa tahun 1997.

Karya Tulis untuk tiga tahun terakhir adalah 1) standarisasi Pendidikan Sejarah dalam Rangka Menghadapi Globalisasi (dalam *Cakrawala Pendidikan*, edisi tahun 1998), 2) Pola Situasi dan Kondisi Perlindungan Kerja terhadap Pramuniaga Wanita di Pusat DIY 3) Reorientasi Pendidikan Sejarah melalui Pendekatan Budaya Menuju Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa (*Cakrawala*, 1999), 4) Identifikasi Diri Sebagai Wisnu dan Perannnya bagi Pembinaan Sikap Heroisme dan Nasionalisme Sultan Yogyakarta (*Cakrawala*, 2000), Penggunaan Sumber Primer dalam Pembelajaran Sejarah di Kelas serta Peranan dalam Peningkatan Kualitas Kemampuan Intelektual (Widya Darma, *Majalah Universitas Sanata darma*, 2000), 7) Peranan Industri Seni Kerajinan Perak di DIY sebagai pariwisata Budaya, (*Humaniora, Jurnal Fakultas Sastra UGM*, 2000), 8) Peranan Suasana Pembelajaran Sejarah di Kelas dalam Proses Sosialisasi Nilai-Nilai Nasionalisme (*Jurnal Kependidikan*, 2001)

PERANAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DALAM PROSES BELAJAR- MENGAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Diucapkan di Depan Rapat Terbuka Senat
Universitas Negeri Yogyakarta
Sabtu, 20 Oktober 2004

PROF. DR. ABDUL GAFUR DANIAMISENO

Guru Besar dalam Bidang Ilmu Teknologi
Pembelajaran Pengetahuan Sosial
pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Yogyakarta



PENGANTAR

Yang terhormat Rektor/Ketua Senat, Sekretaris Senat dan para Anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta.

Yang terhormat para Pembantu Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Yang terhormat para Dekan dan Pembantu Dekan, para Ketua Lembaga, Direktur dan Asisten Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta,

Yang terhormat para Kepala Biro dan para Pejabat di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta

Ibu dan Bapak, para tamu undangan, dan Saudara hadirin yang saya muliakan,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. *Alhamdulillahirabbil aalamiin*. Atas berkah, hidayah, inayah, dan taufiq Allah semata-mata maka pada hari ini saya berkesempatan berdiri di hadapan para hadirin untuk mengucapkan pidato pengukuhan guna memenuhi pertanggungjawaban ilmiah dan persyaratan untuk menjadi anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta sehubungan dengan pengangkatan saya sebagai Guru Besar oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Guru Besar merupakan suatu jabatan akademik tertinggi yang sangat diidamkan oleh setiap dosen pada setiap universitas. Oleh karena itu sungguh merupakan anugerah dan kehormatan bagi saya kalau pada akhirnya jabatan itu sampai pula pada diri saya.

Melalui pidato pengukuhan ini, saya mengajak para hadirin untuk sejenak menengok perspektif Teknologi Pembelajaran yang perwujudannya berupa proses maupun produk teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses belajar-mengajar, khususnya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

A. PENDAHULUAN

Tujuan akhir pendidikan nasional secara umum adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Secara terinci dalam pasal 3 UU No.3 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pendidikan dan pembelajaran yang efisien dan efektif, baik internal (sebanding tidaknya hasil pendidikan dengan biaya yang telah dikeluarkan) maupun eksternal (relevan atau berpengaruh tidaknya hasil pelaksanaan pendidikan dengan penghasilan lulusan setelah bekerja) (Lokheed & Hanushek, 1996: 299). Tidak dapat dipungkiri, bahwa pendidikan kita belum memuaskan. Efisiensi, efektivitas, dan kualitas masih rendah. Beberapa indikator masih rendahnya efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan kita, seperti dikemukakan oleh Indrajati Sidi (2002: 1), misalnya: (1) NEM SD sampai sekolah menengah relatif rendah; (2) lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan yang baik; (3) adanya ketidakpuasan berjenjang di mana suatu sekolah merasakan bekal lulusan dari sekolah sebelumnya kurang baik untuk memasuki sekolah berikutnya; (4) munculnya gejala lulusan SMP dan sekolah menengah menjadi pengangguran di pedesaan.

Banyak faktor yang berpengaruh atau berperan dalam mencapai tujuan pendidikan seperti tercantum dalam UU sisdiknas pasal 3 tersebut. Salah satu di antaranya adalah teknologi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Teknologi pembelajaran yang dewasa ini aplikasinya berupa pemanfaatan proses dan produk teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology* disingkat ICT untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan memiliki banyak manfaat atau keuntungan. Untuk menerapkan ICT secara optimal, perlu disusun strategi pemanfaatan yang tepat untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pendidikan dan pembelajaran termasuk untuk pembelajaran bidang Ilmu Pengetahuan Sosial.

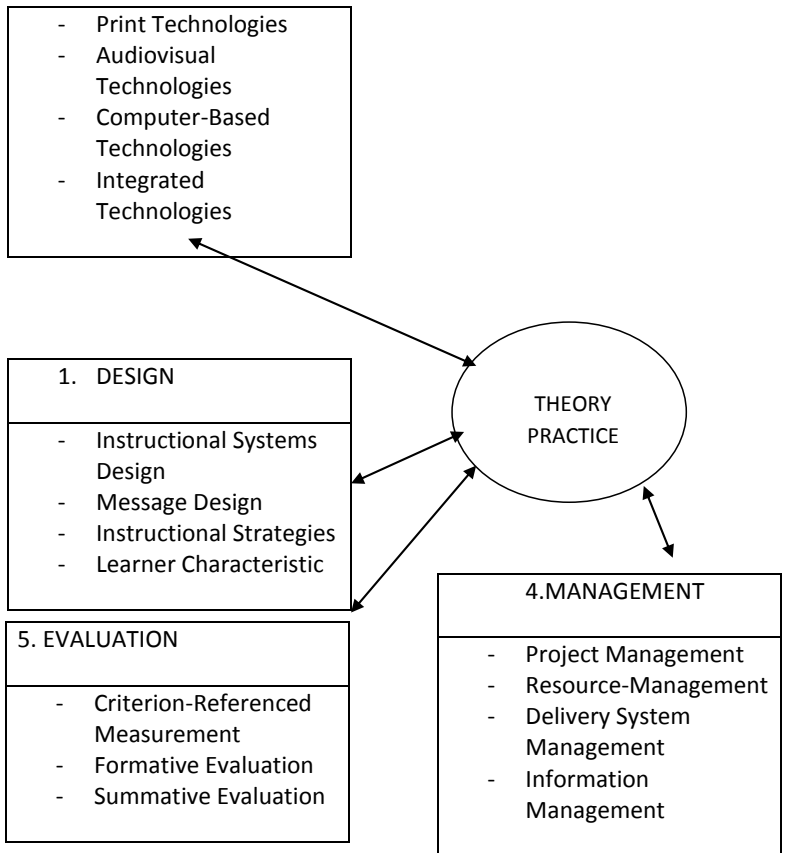
B. TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAN MANFAATNYA

Istilah teknologi pembelajaran (*Instructional Technology*) sering digunakan secara bergantian dengan istilah teknologi pendidikan (*Educational Technology*). Penggunaan secara bergantian atau secara bersamaan tersebut sebenarnya kurang tepat jika didasarkan atas alasan bahwa “pembelajaran” merupakan bagian atau “sub-set” dari “pendidikan”. Pendidikan (*educational*) mengacu pada belajar dalam arti umum di banyak lingkungan, termasuk di rumah, sekolah, lingkungan kerja, sedangkan istilah pembelajaran (*instructional*) memberikan konotasi hanya belajar yang berarah tujuan, khusus di sekolah. Berdasar alasan tersebut lebih tepat jika dikatakan bahwa “teknologi pembelajaran merupakan “subset” dari “teknologi pendidikan” (AECT, 1977: 76, Seels & Richey, 1994: 4. Gafur., dkk, 1986: 3). Namun perkembangan dewasa ini lebih menunjukkan digunakannya istilah “teknologi pembelajaran” secara luas oleh kalangan profesi yang bergerak di bidang tersebut. Menurut Seel & Richey (1994: 3) hal ini didasarkan atas alasan: (1) Teknologi pembelajaran lebih dapat mendeskripsikan secara tepat fungsi teknologi dalam pendidikan; (2) Teknologi pembelajaran lebih menunjukkan penekanan pada masalah belajar dan mengajar.

Konsep teknologi pembelajaran dapat dilihat pada definisi bidang teknologi pendidikan/pembelajaran ini. Pada awal pertumbuhannya, Teknologi Pembelajaran dipandang sebagai media. “*Early definitions of the field of instructional echnology focused on instructional media: the physical neans via which instruction is presented to learner*” (Reiser Dempsey, 2002: 7 ; Anglin, 1991: 14).

Konsep teknologi pembelajaran mutakhir dapat dilihat dalam definisi yang dikeluarkan oleh Association for Educational Communications and Technology (AECT) sebagai berikut: “*Instructional Technology is the theory and practice of design, development, utilization, management and evaluation of processes and resources for learning*” Seels & Richey, 1994: 10).

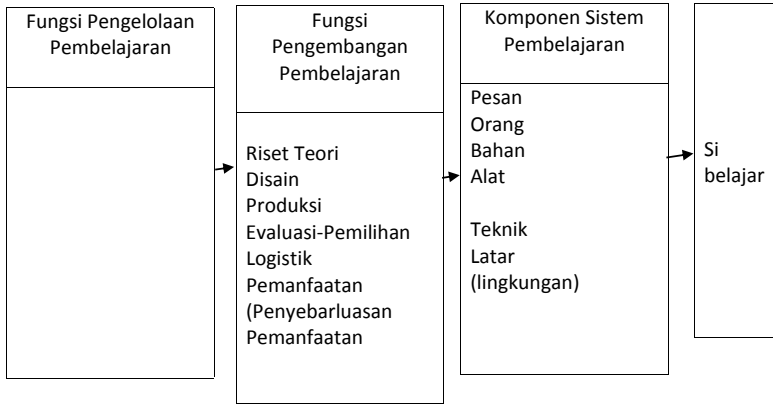
Berdasar definisi tersebut, kawasan (domain) teknologi pembelajaran dapat dilihat pada bagan 1 (Sumber: Seels & Richey, 1994: 26).



Bagan 1: *The Domains of Instructional Technology*

Perumusan definisi teknologi pembelajaran tahun 1994 lebih sederhana jika dibandingkan definisi sebelumnya, yaitu definisi tahun 1977 yang berbunyi:

“Instructional technology is a complex, integrated process involving people, procedures, ideas, devices, and organization, for analyzing problems, and devising, implementing, evaluating and managing solutions to those problems. in situation in which learning is purposive and controlled. (AECT, 1977: 3).



Bagan 2.

Kawasan Teknologi Pembelajaran (Sumber Gafur dkk, 1986:4).

Menurut definisi tahun 1977. Teknologi Pembelajaran dipandang sebagai teori, bidang garapan, dan profesi, yaitu teori, dan profesi yang berusaha membantu proses belajar melalui upaya pemecahan masalah-masalah belajar dengan jalan memanfaatkan sumber belajar atau komponen sistem pembelajaran melalui fungsi pengembangan dan pengelolaan baik pengelolaan organisasi maupun pengelolaan personel. Dengan dirumuskannya definisi Teknologi Pembelajaran tahun 1994 oleh AECT, maka definisi Teknologi Pembelajaran tahun 1977 menjadi kurang populer lagi.

Jika dianalisis secara mendalam, komponen definisi Teknologi Pembelajaran menurut AECT 1994 terdiri dari: (1) teori dan praktik; (2) desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi; (3) proses dan sumber; (4) belajar.

Misi utama Teknologi Pembelajaran adalah membantu, memicu dan memacu, proses belajar, serta memberikan kemudahan atau fasilitas belajar. Tercapainya tujuan belajar berupa berubahnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara relatif tetap yang diakibatkan oleh pengalaman, bukan karena kedewasaan merupakan kriteria pokok keberhasilan pembelajaran. Hal ini sejalan

dengan pengertian “*learning is a change in human disposition or capability which persists over a period of time, and which is not a scribble to processes of growth*” (Gagne, 1997: 3).

Pemberian fasilitas belajar tersebut dilaksanakan dengan jalan mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi proses dan sumber belajar.

Proses yang dimaksud dalam Teknologi Pembelajaran adalah proses desain dan proses penyampaian pembelajaran. Suatu proses mencakup tata urutan yang terdiri dari masukan, tindakan, dan keluaran. Contoh proses misalnya sistem penyampaian, seperti konferensi jarak jauh, berbagai cara penyampaian pengajaran seperti sistem belajar mandiri, sistem kontrak, dsb. Model pembelajaran seperti model induktif dan deduktif, model pengembangan pembelajaran seperti model pengembangan desain sistem pembelajaran merupakan contoh lain dan proses. Proses dapat bersifat prosedural dan non-prosedural.

Sumber yang dimaksud dalam komponen definisi ini adalah sumber belajar. Sumber belajar ini dikategorikan menjadi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan (Gafur, dkk. 1986: 4: AECT. 1977: 3) atau sumber belajar yang direncanakan dan sumber belajar yang digunakan, “*some of these resources become Reaming resources by design and others become learning resources by utilization*” (Januszewski, 2001: 54) Agar proses dan sumber dimanfaatkan, optimal, perlu didesain, dikembangkan, dikelola, dan dievaluasi.

Desain pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi merupakan lima komponen utama definisi Teknologi Pembelajaran. Setiap komponen tersebut memiliki keunikan tersendiri dan melahirkan kegiatan profesi dan bidang kajian atau penelitian yang berbeda-beda. Dari kelima komponen tersebut, komponen desain dan pengembangan telah berkembang jauh lebih luas daripada ketiga komponen lainnya. Kawasan desain telah memberikan sumbangan lainnya paling luas di bidang teori dan praktik Teknologi Pembelajaran Begitupun kawasan pengembangan. Di bidang desain telah banyak riset dan teori yang dihasilkan oleh para peneliti di bidang ini. Literatur dengan judul “*Instructional*

Design” telah banyak dihasilkan. Praktisi di bidang desain telah banyak melahirkan profesi “*Instructional Designer*” baik yang bekerja pada lembaga pendidikan maupun lembaga pelatihan. Dengan kata lain terdapat kecenderungan berkembangnya profesi desain dalam berbagai lingkungan (Reiser & Dempsey, 2002: 195). Kawasan desain mencakup desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan identifikasi karakteristik siswa.

Kawasan pengembangan juga telah banyak membenkan sumbangan pada Teknologi Pembelajaran, utamanya di bidang praktik produksi teknologi media cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu.

Kawasan pemanfaatan dipandang belum begitu banyak berkembang baik secara teori maupun praktik. Meskipun usaha penggunaan media telah banyak dilakukan, namun keadaannya masih ketinggalan bila dibandingkan dengan dua kawasan terdahulu. Teori dan praktik pada kawasan pemanfaatan ini meliputi pemanfaatan media, penyebarluasan inovasi, implementasi dan institusionalisasi, serta kebijakan dan regulasi.

Kawasan pengelolaan berperan penting, sebab pelaksanaan fungsi-fungsi yang terdapat dalam lima kawasan Teknologi Pembelajaran yang senantiasa melibatkan banyak orang, banyak waktu, dan banyak sumber memerlukan pengelolaan. Kawasan pengelolaan ini meliputi pengelolaan proyek pengelolaan sumber belajar, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan sistem informasi.

Kawasan evaluasi tergolong paling sedikit perkembangan dan sumbangannya. Sumbangan paling banyak dari kawasan evaluasi adalah evaluasi formatif, misalnya “*The formative evaluation of tape/slide guide to library instruction*” (Evans & Leedham, 1985: 218), juga “*Evaluation of a multimedia package and paedagogical design and display visual*” (Akhori & Kumar, 1999 1). Kawasan evaluasi ini meliputi analisis masalah, analisis kebutuhan, pengukuran acuan patokan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif.

Teori dan praktik telah banyak dihasilkan dari kelima komponen utama Teknologi Pembelajaran tersebut teori dan prak-

tik dalam Teknologi Pembelajaran banyak menggunakan model, baik model prosedural maupun model konseptual “Model prosedural adalah seperangkat langkah yang diikuti secara tetap dalam mengenakan suatu tugas” (Gafur, 1986: 27). Banyak model pengembangan sistem pembelajaran yang dihasilkan oleh Teknologi Pembelajaran Gustafson (1991) antara lain mengadakan survei untuk menganalisis dan membandingkan 13 model. Juga Wittich & Schuller secara mendalam membahas 9 langkah model *Instructional Development Institute* (IDI) (1979: 299), Teori dapat pula menghasilkan model yang menggambarkan hubungan antar konsep. Model demikian disebut model konseptual.

Sampai dengan tahun 1994, definisi teknologi pembelajaran telah mengalami 7 kali perubahan, berturut-turut (1) Definisi AECT tahun 1963, (2) Definisi Komisi Teknologi Pembelajaran tahun 1970, (3) Definisi Silber tahun 1970, (4) Definisi Mackenzie and Fraut tahun 1971, (5) Definisi AECT tahun 1972, (6) Definisi AECT tahun 1977 dan (7) Definisi AECT tahun 1994. (Januszewski, 2001: 17; Seel & Richey, 1994: 15-20).

Perbedaan mendasar dari perubahan definisi tersebut adalah bahwa pada mula pertama pertumbuhannya, teknologi pembelajaran dipandang sebagai teori dan praktik tentang penggunaan sarana komunikasi audiovisual untuk keperluan pembelajaran. Definisi definisi berikutnya memasukkan konsep-konsep baru seperti konsep sistem, manajemen, sumber belajar, desain, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dsb

Apakah manfaat atau keuntungan Teknologi Pembelajaran seperti diuraikan di depan? Mengingat Teknologi Pembelajaran merupakan teori, praktik, bidang garapan, dan profesi yang berupaya membantu proses belajar manusia, maka jelas banyak manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan menerapkan konsep dan prinsip Teknologi pembelajaran tersebut.

Sejak dekade awal perkembangannya, telah dirasakan manfaat atau keuntungan teknologi pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil identifikasi *Presidential Commission on Instructional Technology* tahun 1969 yang menyimpulkan adanya enam keuntungan atau kegunaan potensial Teknologi Pembelajaran yaitu

bahwa Teknologi Pembelajaran membuat pembelajaran: produktif, individual, ilmiah, berdaya mampu tinggi, akrab, dan merata (Miarso, 1987 E10, Burton & Lockee, 2000: 1) Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Afzalnia (1990: 94). Dia menyebutkan enam keuntungan teknologi pembelajaran, yaitu:

- 1) *Instructional technology can increase the output of the educational system in term of both quality and quantity;*
- 2) *Instructional Technology can individualize both instruction and learning;*
- 3) *Instructional technology can place the development of instruction on a more scientific base,*
- 4) *Instructional technology can use more powerful techniques to obtain planned objectives*
- 5) *Instructional technology can accelerate the learning process and make learning more easier than conventional methods,*
- 6) *Instructional technology can provide easy access to information sources and existing knowledge for all people at different ages and with various interests*

Contoh manfaat Teknologi Pembelajaran untuk pembelajaran bidang sosial dapat dilihat pada hasil penelitian penggunaan multimedia interaktif untuk perkuliahan Simulasi Bisnis yang dilakukan oleh Klassen dan Drummond (2000: 1) Tujuan penggunaan multimedia tersebut adalah untuk memberikan pengalaman sedekat atau senyata mungkin kepada mahasiswa dalam bekerja pada bank multinasional dengan tugas di bidang penerimaan pegawai baru, Hasil evaluasi akhir menunjukan bahwa mahasiswa merasa senang dan termotivasi dengan penggunaan multimedia tersebut. Lebih daripada itu, simulasi tersebut secara signifikan memberikan sumbangan kepada mahasiswa pemahaman tentang proses pengangkatan pegawai baru. Penggunaan multimedia lebih memberikan kejelasan bila dibandingkan dengan pengajaran secara tradisional.

Contoh lain, adalah hasil penelitian implementasi atau tindak lanjut hasil penataran pembelajaran portofolio kewarganegaraan (*civic*) terhadap 63 orang guru SMP di DIY tahun 2002. Dengan menerapkan konsep dan prinsip Teknologi Pembelajaran, mulai

dari desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, evaluasi, dan dengan menggunakan produk ICT berupa presentasi komputer multimedia, OHP, VCD. video, Audio, display portfolio, diperoleh hasil bahwa para guru dapat dengan mudah memahami isi penataran dan mampu menerapkan hasil penataran di lapangan (*training by objective*) (Gafur, 2003:66)

Meningkatkan hasil atau keluaran pendidikan, membuat pembelajaran bersifat individuai, pengembangan pembelajaran menjadi lebih ilmiah, berdaya mampu tinggi, aktual, dan merata kesemuanya merupakan manfaat seimbang, atau keuntungan teknologi pembelajaran.

C. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI BIDANG IPS

Secara garis besar, kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran IPS ialah agar siswa (a) memahami lingkungan sosialnya dalam arti luas, baik dari segi substansi maupun tempat serta waktu, (b) mampu memanfaatkan lingkungan sosial tersebut baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dan (c) mampu memanfaatkan berbagai proses sosial yang diterima masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan sosial demi kemaslahatan bersama (Ditjen Dikdasmen, 1998: 4).

Dengan mengambil contoh pembelajaran Kewarganegaraan (*civic*) sebagai rumpun IPS, prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan meliputi: (a) interaktif antar sesama siswa, guru, dan sumber belajar (b) realistik dan aktual dalam pemilihan materi pembelajaran, (c) penggunaan masyarakat sebagai sumber belajar, (d) dukungan dari pihak sekolah dan pihak-pihak lain yang terkait (CCE. 2001: 1; CCE, 2000: 1) Prinsip-prinsip tersebut dipertukan untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran *civic* yaitu *the wide spread participation in the political process of citizens who are knowledgeable and committed to the realization of the fundamental values and principles of constitutional democracy* (Quigley & Buchanan, 1991: 27; CCE, 1997: 1) Untuk mencapai tujuan akhir tersebut perlu dirumuskan standar kompetensi dan

dipilih standar materi yang mencakup (a) nilai *civic* (*civic virtue*, *civic disposition*), (b) partisipasi *civic* (*civic participation*), dan (c) pengetahuan *civic* dan keterampilan intelektual (*civic knowledge and intellectual skills*) (Quigley & Buchanan, 1991. 1, CCE, 1997; 3), Dengan penguasaan standar materi dan standar kompetensi tersebut diharapkan siswa menjadi “warga negara yang berpengetahuan, terampil, berkarakter, kompeten, percaya diri, dan memiliki komitmen (Ditjen Dikdasmen, 2002: 10)

Penjabaran lebih lanjut standar isi atau standar materi tersebut tercermin dalam 12 standar kompetensi mata pelajaran *civic* seperti tercantum dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1:
Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan SMU

No	STANDAR KOMPETENSI
01.	Menganalisis manusia sebagai <i>zoon politikon</i>
02.	Menghubungkan nilai, norma, dan moral
03.	Menunjukkan pentingnya norma-norma dalam masyarakat
04.	Menganalisis bangsa dan negara
05.	Menganalisis konstitusi
06.	Menganalisis lembaga tinggi negara dan lembaga non pemerintahan
07.	Menganalisis kewarganegaraan
08.	Menganalisis sistem politik demokrasi Pancasila
09.	Menganalisis makna dan implementasi negara hukum dan peradilan bebas
10.	Menganalisis peranan Indonesia dalam hubungan internasional
11.	Mengonstruksi pengembangan keterampilan kewarganegaraan (<i>civic skill</i>)
12.	Menunjukkan sikap dan watak kewarganegaraan

(Sumber: Ditjen Dikdasmen, 2002: 15)

Adapun materi keilmuan yang perlu dipelajari dalam rangka mencapai standar kompetensi tersebut terdiri atas empat materi pokok yaitu politik, hukum, moral, dan keterampilan kewarganegaraan. Selengkapnya terdapat pada tabel 2:

Tabel 2:
Struktur Keilmuan Mata Pelajaran Kewarganegaraan

No	Dimensi	Bidang Kajian
1.	Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manusia sebagai <i>zoon politikon</i> 2. Proses terbentuknya masyarakat politik 3. Proses terbentuknya bangsa 4. Asal usul negara 5. Unsur-unsur negara, tujuan negara, dan bentuk-bentuk negara 6. Kewarganegaraan 7. Lembaga politik 8. Model-model sistem politik 9. Lembaga-lembaga Tinggi dan Lembaga Tertinggi Negara 10. Demokrasi Pancasila 11. Indonesia dalam Hubungan Internasional
	Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rule of Law</i> 2. Konstitusi 3. Sistem Hukum 4. Sumber Hukum 5. Subyek hukum, obyek hukum, peristiwa hukum, dan sanksi hukum 6. Pembidangan Hukum 7. Proses Hukum 8. Peradilan
3.	Moral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian nilai, norma, dan moral 2. Hubungan antara nilai, norma, dan moral 3. Sumber-sumber ajaran moral 4. Norma-norma dalam masyarakat, 5. Implementasi nilai-nilai moral Pancasila
4.	Keterampilan dan watak warga negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan keterampilan intelektual kewarganegaraan 2. Pengembangan keterampilan posisi diri 3. Pengembangan keterampilan partisipasi 4. Pengembangan watak kewarganegaraan

(Sumber Dikdasmen, 2002: 12-13)

Dalam pembelajaran *civic* “siswa perlu dikenalkan berbagai permasalahan masyarakat baik kepada lingkup lokal, nasional, regional, maupun global sehingga terbentuk semacam kelas global (*global classroom*)” (Depdiknas, 2000: 3). Melalui pendekatan tersebut, diharapkan terjadi perpaduan yang sinergis an-

tara pengalaman belajar *civic* di sekolah dengan kegiatan dalam masyarakat.

Untuk memfasilitasi pembelajaran *civic* yang efektif perlu didesain, dikembangkan, diproduksi, dimanfaatkan, dikelola, dan dievaluasi bahan belajar interaktif yang dikemas dalam berbagai media seperti bahan cetak, bahan elektronik, bahan belajar yang digali dari lingkungan masyarakat, pengalaman langsung atau simulasi pengalaman, dsb. Kesemuanya itu merupakan tantangan bagi teknologi pembelajaran untuk mewujudkannya.

Dalam menerapkan konsep dan prinsip ICT dalam pendidikan dan pembelajaran, masalah, isu, ataupun tantangan tersebut perlu diperhatikan agar ICT benar-benar dapat membantu proses pembelajaran secara optimal. Permasalahan dan tantangan dimaksud secara garis besar meliputi perbedaan kondisi wilayah atau daerah, dan praktik atau pelaksanaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan.

1. Kondisi Daerah atau Wilayah

Kondisi geografis, demografis, ekonomis, dan budaya kita berbeda-beda atau bervariasi. Perbedaan tersebut negara membawa perbedaan seperti keterbatasan dalam sumber daya manusia sumber daya non manusia, infrastruktur teknologi komunikasi, mobilitas tenaga ahli komunikasi, pasokan tenaga listrik, langka atau kurangnya dana untuk mendukung pengembangan ICT dalam pendidikan, khususnya pendidikan guru, dsb. Masalah atau isu-isu tersebut berdampak pada banyaknya sekolah yang belum terjamah teknologi informasi dan komunikasi maju seperti komputer dan internet, dan sedikitnya guru yang mempunyai keahlian untuk menerapkan ICT dalam proses pembelajaran. Budaya masyarakat yang kaya dengan sumber dana berbeda dengan masyarakat yang kekurangan dana. Di satu pihak masyarakat yang kaya begitu cepat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, di pihak lain masyarakat yang kurang mampu masih berkuat dengan teknologi kuno. Kondisi tersebut menjadi tantangan untuk mencari strategi yang setepat-tepatnya untuk menerapkan teknologi pembelajaran.

2. Praktik atau Pelaksanaan Pendidikan dan Pembelajaran

Terdapat perbedaan besar antar daerah atau sekolah dalam penggunaan ICT untuk pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, satu di antaranya karena perbedaan keterampilan pihak guru dalam menggunakan ICT faktor lain karena kurikulum pendidikan guru yang belum memasukkan ICT sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Ketiadaan sarana dan prasarana yang ICT juga merupakan faktor penting penyebab bervariasinya lembaga-lembaga pendidikan dalam memanfaatkan ICT bagi banyak guru terutama di pedesaan atau daerah terpencil, akses ke komputer atau produk teknologi pendidikan yang lain agaknya masih berupa impian. Sebaliknya bagi guru-guru di perkotaan telah banyak yang dapat memanfaatkan kemajuan ICT untuk pendidikan seperti internet, komputer multimedia, VCD, DCD, dsb.

Tantangan utama manakala ICT hendak diterapkan secara optimal dalam pembelajaran adalah *“both teachers and students are learning new skills related to ICT”* (UNESCO, 2003: 20). Namun perlu diingat bahwa untuk menguasai keterampilan baru tersebut perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Ditinjau dari segi sumber belajar atau komponen sistem pembelajaran masalah-masalah yang berkenaan dengan penerapan ICT dalam pembelajaran menyangkut pendidik/guru, pesan/kurikulum, perangkat keras, perangkat lunak, informasi, pengembangan paket pembelajaran, evaluasi, pendanaan, dsb. (Abdul Gafur, 1999:40; Abdul Gafur, 2001: 92; APEID, 1994: 19). Secara terinci masalah-masalah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kurikulum

- 1) Belum dikembangkannya kurikulum yang berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) baik sebagai matapelajaran yang berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan matapelajaran lain sesuai konsep pembelajaran terpadu. (Di prodi UNY berdasar Kurikulum 2004 matakuliah Teknologi Informasi baru diberikan mulai semester gasal 2004).

Dewasa ini ada tuntutan diterapkannya standar kompetensi di bidang ICT, baik untuk guru maupun murid. Stan-

dar tersebut diharapkan dapat digunakan oleh para pendidik sebagai acuan kerja, yaitu untuk mengorganisasikan kurikulum, memilih materi pembelajaran, dan pedoman pembelajaran. Telah ada standar ICT yang dikembangkan oleh *The International Society for Technology in Education* (ISTE) yang secara luas telah digunakan oleh banyak negara (UNESCO, 2003: 22). Standar tersebut berisikan sejumlah kompetensi di bidang ICT yang diharapkan dikuasai baik oleh guru maupun siswa. Berdasar standar tersebut, para guru diharapkan menguasai dua hal. Pertama standar mengenai apa yang harus diajarkan, kedua berkenaan dengan tanggungjawab untuk mengintegrasikan ICT ke dalam proses pembelajaran. Tanggungjawab ini menyangkut pula penguasaan pengetahuan dan ketrampilan baru termasuk di dalamnya pengkajian tentang bagaimana siswa belajar dengan cara baru.

Sekali lagi, tantangan yang perlu mendapatkan perhatian jika diharapkan ICT digunakan secara integral dalam proses pendidikan, maka masalah standar kompetensi perlu mendapatkan perhatian. Pengelola sekolah dan guru perlu memahami peran ICT dalam membantu mereka mencapai keseluruhan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. Tanpa pemahaman ini, manfaat ICT tidak akan dapat diperoleh secara maksimal.

- 2) Dalam pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Belum banyak sekolah-sekolah yang memanfaatkan ICT pada tahapan *infusing* apalagi *transforming*. Seperti diketahui, ada empat tahap dalam proses pengintegrasian ICT ke dalam sekolah. Keempat tahap tersebut meliputi "*Emerging, applying, infusing, and transforming*" (UNESCO 2003: 19). Pada tahap *emerging*, pengelola sekolah dan guru baru mulai mengeksplorasi potensi ICT. Pada tahap *applying*, para guru mulai menggunakan komputer untuk olah kata, dan olah data. Pada tahap *infusing*, ICT telah secara luas digunakan secara integral dalam kurikulum. Pada tahap *transforming*, pengelola sekolah dan guru

telah mengadakan rekonstruksi kurikulum secara integratif dengan memanfaatkan ICT sehingga proses pembelajaran misalnya menjadi berpusat kepada siswa, interaktif, berorientasi pada pemecahan masalah, dsb.

- 3) Evaluasi prestasi belajar siswa belum mengacu pada pemanfaatan ICT (misalnya dalam Sistem Pembelajaran Jarak Jauh, siswa ditugasi mengirimkan jawaban soal latihan, soal tes menggunakan e-mail).

b. Pendidik/Guru

- 1) Pengembangan staf pengajar agar memiliki kemampuan profesional di bidang ICT masih banyak mengalami hambatan baik disebabkan oleh terlalu banyaknya staf maupun karena terbatasnya waktu, sarana, dana dan tenaga yang tersedia. Pada hal guru perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang inovatif agar ICT dapat diterapkan dengan baik sehingga memberi manfaat kepada siswa. *“Without willing and competent teachers students will not be able to benefit from the many opportunities afforded by the use of ICT in their education”* (<http://www.unesco.bkk.org/ledu/ictw2/info>).
- 2) Sikap pendidik yang enggan mengikuti perubahan dan rasa takut terhadap teknologi informasi baru. Ada pendapat yang menyatakan bahwa guru, sebagaimana halnya siswa, hanya mau mempelajari keterampilan baru manakala ada tuntutan kebutuhan untuk itu. Mereka enggan mengikuti inovasi teknologi bila teknologi tersebut tidak relevan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka melaksanakan tugas mereka.

c. Perangkat Keras (*Hardware*)

- 1) Terbatasnya akses untuk mendapatkan produk ICT baru.
- 2) Ketidakesesuaian produk-produk teknologi dengan kebutuhan pemakai.
- 3) Terbatasnya biaya pengadaan perangkat keras ICT.
- 4) Kesulitan mengikuti cepatnya perkembangan produk ICT.

- 5) Terbatasnya biaya pemeliharaan.
- 6) Kesulitan pengoperasian perangkat keras.
- 7) Kesulitan mengadakan perbaikan, perawatan, dan penggantian suku cadang.

d. Perangkat Lunak (*Software*)

- 1) Masalah hak cipta yang harus dihormati dan dihargai jika hendak menggunakan hak milik orang lain Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang hak cipta banyak biaya yang harus dikeluarkan.
- 2) Sedikitnya produk pengembangan perangkat lunak untuk semua bidang studi dan semua tingkatan pendidikan.
- 3) Terbatasnya inovasi pengembangan perangkat lunak yang dapat memacu pengembangan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan teknologi ICT.
- 4) Kebanyakan perangkat lunak dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris. Pengguna yang tidak menguasai bahasa Inggris akan mengalami kesulitan.

e. Jaringan Informasi

- 1) Belum luasnya pengembangan jaringan informasi baik yang bersifat lokal, regional maupun global/internasional pada setiap lembaga pendidikan.
- 2) Belum meratanya penyebaran informasi tentang pengembangan dan pemanfaatan ICT.

f. Paket Pembelajaran

- 1) Terbatasnya pengembangan paket belajar dengan memanfaatkan ICT untuk keperluan pendidikan dan pembelajaran.
- 2) Sedikitnya paket pembelajaran yang ada di pasaran yang sesuai dengan kebutuhan setempat (Untuk bidang non IPS sudah memadai, tetapi untuk IPS masih langka).

g. Evaluasi

- 1) Ketiadaan prosedur dan instrumen evaluasi yang menyangkut pengembangan dan pemanfaatan ICT.
 - 2) Sedikitnya kajian/penelitian secara sistematis dampak penggunaan ICT terhadap proses dan hasil belajar siswa.
- h. Dana
Keterbatasan sumber dana untuk pengembangan dan pemanfaatan ICT.

D. STRATEGI PEMANFAATAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Agar ICT dapat bermanfaat secara optimal dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pendidikan, termasuk untuk pembelajaran IPS, perlu diterapkan strategi sesuai konsep dan prinsip teknologi pembelajaran. Langkah-langkah sistematis pengembangan dan pemanfaatan ICT secara terperinci meliputi “desain, pengembangan/produksi, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi” (Seels & Richey, 1994: 10). Sesuai dengan konsep dan prinsip teknologi pembelajaran tersebut, berikut disajikan strategi sistematis pengembangan dan pemanfaatan ICT dalam pendidikan dan pembelajaran.

1. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum/materi pelajaran yang berisikan muatan ICT dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat baca ICT (*ICT literate*). Kurikulum dan materi tersebut diperuntukkan bagi siswa, guru/calon guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Perlu dikembangkan standar kompetensi yang diharapkan dikuasai baik oleh guru maupun siswa di bidang ICT. Perlu pengintegrasian ICT ke dalam kurikulum dan proses pendidikan atau proses belajar mengajar (Backhouse, 2003:5 <http://Mwww.ed.gov.mb.ca/ksAltech/ct/indexhtml>).

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang ICT bagi: Guru (*preservice* dan *inservice training* untuk meningkatkan kompetensi di bidang ICT, siswa, pengelola/administrator pendidikan, penulis buku-buku tentang ICT, perancang dan pengembang ICT

(UNESCO, 2004:1). Dengan kata lain perlu “*building capacity of teachers/facilitators in technology-pedagogy integration for improved teaching and learning*” (UNESCO, 2003: 23) Dengan pendidikan dan pelatihan/penataran tersebut para pendidik dan pihak-pihak yang terkait akan “semakin dalam dan kaya pemahamannya tentang peranan dan potensi teknologi dalam pendidikan (Nickerson & Zodhiates, 1991: 98).

3. Penyiapan Perangkat Lunak (*Software*)
 - a. Mengembangkan/memproduksi program ICT berbasis komputer multimedia seperti hypermedia, interactive video, CD-ROM, DCD, VCD (Heinich, et al. 1996: 257).
 - b. Mengembangkan prototype program ICT .
 - c. Mengoleksi program ICT dengan jalan membeli atau berlangganan.
 - d. Mengadakan ujicoba/evaluasi penggunaan program ICT untuk pembelajaran.
4. Penyiapan Perangkat Keras (*Hardware*)
 - a. Identifikasi kriteria perangkat keras ICT yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
 - b. Meneliti rasio yang paling efektif tentang jumlah perangkat keras dan perangkat lunak dengan jumlah siswa dan guru.
 - c. Meneliti cara memasang (*installing*) peralatan ICT.
 - d. Mengembangkan kriteria pemilihan peralatan ICT.
 - e. Mengupayakan dana yang cukup untuk pengadaan peralatan ICT.
5. Pengelolaan, Organisasi, Lingkungan (*Setting*)
 - a. Mendirikan pusat-pusat ICT (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan dan Pembelajaran) pada berbagai tingkatan wilayah Perguruan Tinggi, Sekolah, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dsb).
 - b. Memaksimalkan penggunaan pusat-pusat ICT yang ada untuk mengembangkan dan memproduksi program ICT.
 - c. Menjalinkan kerjasama antar instansi/lembaga yang terkait untuk mendapat dukungan (universitas, pusat ICT dan sekolah).

- d. Mengembangkan jaringan informasi (*network*) antar pengembang dan pengguna ICT baik lokal, regional, maupun internasional (menggunakan internet dan website).

6. Evaluasi

Perlu disiapkan rencana evaluasi dan *monitoring* untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan penerapan strategi pemecahan masalah-masalah dalam menerapkan konsep dan prinsip Teknologi Pembelajaran Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan tindak lanjut berupa perbaikan jika terjadi kegagalan, dan penyebarluasan jika hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

E. KESIMPULAN

Perwujudan mutakhir teknologi pembelajaran berupa ICT (baik berupa sumber belajar berbasis komputer multimedia yang memiliki kemampuan olah kata, angka, gambar dan suara maupun sumber belajar non komputer) merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi dunia. Para pendidik mendapat tantangan untuk pendidikan, mengembangkan dan memanfaatkan ICT dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. ICT dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pendidikan. ICT dapat digunakan untuk keperluan pendidikan/pelatihan, komunikasi, administrasi, manajemen, media pembelajaran mandiri, alat bantu pengajaran, dsb ICT dapat digunakan untuk membantu tercapainya misi, tujuan, kompetensi dan penguasaan materi pembelajaran IPS sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran IPS (interaktif, realistik, aktual, penggunaan multisumber dan dukungan berbagai pihak).

Agar dapat memanfaatkan peluang berupa keunggulan yang dimiliki teknologi pendidikan dan pembelajaran, perlu diatasi masalah/hambatan dalam pengembangan dan pemanfaatan ICT dengan jalan menerapkan secara sistematis strategi pemecahan masalah yang berkenaan dengan pesan (kurikulum/materi pelajaran), personalia guru, siswa, tenaga kependidikan), peralatan ICT (*hardware*), perangkat lunak (*software*), pengelolaan, organisasi dan lingkungan (*setting*).

Khusus bagi para guru dan calon guru/pendidik perlu membekali diri dengan standar kompetensi di bidang ICT agar memiliki kemampuan dalam memilih strategi pengembangan dan pemanfaatan ICT Strategi pemanfaatan itu meliputi pengembangan sumber belajar yang meliputi pesan, orang, bahan, teknik dan lingkungan/*setting*) dan pengelolaan, baik pengelolaan organisasi maupun pengelolaan personel.

Arah pengembangan dan pemanfaatan ICT perlu diselaraskan dengan konsep dan prinsip teknologi pembelajaran yang meliputi desain, pengembangan/produksi, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi terhadap proses dan sumber untuk belajar.

F. PENUTUP

Untuk sampai pada jabatan Guru Besar ini, sangat banyak pihak-pihak yang berperan tiada tara dalam membantu saya. Oleh karena itu, pada penghujung pidato ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih.

Pada saat menuntut ilmu: Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-bapak Guru Sekolah Rakyat (SR) Gentong dan Kerten, Ngawi. Kedua, kepada Bapak- bapak dan Ibu-ibu Guru SGB dan SGA Negeri Ngawi. Ketiga, Bapak dan Ibu Dosen Jujusan Civics Hukum FKIS-IKIP Yogyakarta. Ketiga, kepada para Dosen ketika saya mengambil program master pada Syracuse University New York Keempat, para Dosen ketika saya menempuh program Doktor di Pasca Sanana IKIP Jakarta dan University of Southern California Los Angeles. Semoga amal beliau menjadi amal jariyah yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. kepada para Guru dan Dosen saya yang telah wafat, saya mendoakan *Allahummaghfir-fahu warhamhu, wa'afih wafu'anh. Allahummaghfirlaha warhamha, wa 'afiha va fuanha*. Amien

Pada lingkungan di mana saya pernah dan sedang bekerja saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya Pertama kepada Kepala Sekolah dan rekan-rekan Guru SD Muhammadiyah Kleco Kotagede. Kedua, kepada Ketua Jurusan dan Rekan-rekan Dosen PPKn FIS. Ketiga, kepada Dekan, para Pembantu Dekan, segenap karyawan, dan para mahasiswa FIS UNY.

Keempat, kepada Direktur, Asisten Direktur, Karyawan, dan para mahasiswa Program Pasca Sarjana UNY. Kelima, kepada Rektor, Ketua Senat Universitas Negeri Yogyakarta, Sekretaris Senat UNY, para anggota Senat, dan para Guru Besar yang telah memeriksa karya tulis saya sehingga akhirnya UNY memberikan persetujuan atas pengangkatan saya sebagai Guru Besar. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para Guru Besar yang menjadi tim penyerasi pidato pengukuhan ini Selanjutnya terima kasih saya sampaikan kepada Pembantu Rektor, Pejabat Teras UNY, dan Karyawan UPSB. Keenam kepada Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Jakarta yang telah memberi kepercayaan dengan menugasi saya sebagai Kepala Balai Produksi Media Radio (BPMR) Yogyakarta selama 15 tahun. Terima kasih kepada rekan rekan karyawan BPMR Yogyakarta dan Pustekkom Jakarta atas kerjasama yang baik selama saya bertugas di BPMR Pustekkom Ketujuh, kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional yang telah mengangkat saya sebagai Guru Besar dengan SK no. 37333/A2.7/KP/2003 tertanggal 1 Desember 2003.

Selanjutnya pada lingkup keluarga, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak saya Abdullah Syarifin (Almarhum). *Allahummaghfirlahu warhamhu, waafhi wafu'anhu.* dan ibu saya Hj. Amiyatun Abdullah yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan, dan senantiasa menolong serta mengasahi saya. Kedua kepada Bapak dan Ibu mertua H. Mochammad Nawawi Daman (Almarhum). *Allahummaghfirahu warhamhu, wa'afih wa fu'anhu,* dan Ibu Hj. Siti Hasanah (Almarhumah) *Allahummaghfiraha warhamha, wa'afina wa fuanha"* yang telah membantu dan membimbing saya.

Akhirnya secara khusus, saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada isteri saya tercinta Hj Siti Hazimah atas kesetiaan, kegigihan, dan kesabarannya dalam mendampingi, membantu, mendorong, dan menyemangati saya dalam melaksanakan semua tugas yang harus saya laksanakan Kepada anak-anak saya, Laily Johanah, S.Pd, Dr Ir Ronggo Sadono (menantu), dan Dwi Nuryan Dani, SP, serta kedua cucu tersayang Endianati Dewandaru

Sadono (Daru) dan Freistane Rakhmalia Sadono (Anel) saya ucapkan terima kasih atas setia dan bakti kalian semua terhadap bapak ibu, kakek dan nenek kalian. Semoga kalian menjadi anak dan cucu yang saleh dan solihah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama Amien. Selanjutnya, kepada kakak Mutingah (Almarhumah) dan suaminya Muh Ma'ruf (Almarhum), serta adik Muh Syamsudin (Armahum) yang semasa hidupnya banyak berjasa dan membantu saya ketika sekolah, saya ucapkan terima kasih semoga Allah mengampuni dan mengasihi almarhumah dan almarhum. Akhimya kepada adik-adik saya dari keluarga Bani Abdullah Ngawi, dan kakak-kakak serta adik dari Bani Nawawi Kotagede, saya ucapkan terima kasih pula atas semua doa, bantuan, dan dorongan yang diberikan kepada saya.

Demikianlah saya akhiri pidato saya, sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas perhatian dan kesabaran para hadirin untuk mengikuti pidato ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita. Amien.

Wassalaamu a'laikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur, dkk (1986), *Definisi teknologi pendidikan*, Jakarta: VC Rajawali.
- _____, (1986). *Desain instruksional Suatu langkah sistematis penyusunan pola dasar kegiatan belajar dan mengajar*. Sala: Tiga Serangkai.
- _____, (2001) "Pendidikan dalam tantangan teknologi ICT", *Cakrawala Pendidikan: Majalah ilmiah Kependidikan* Mei 2001 Th. Xx No 2 pp 90-95.
- _____, (1999). "Peranan alat Bantu ajar dalam peningkatan mutu pendidikan Teknologi dan informasi pendidikan", (*TEKNODIK*) Vo IV. No. 6 April 1999 (pp. 40-44).
- _____, (2003) "Evaluasi implementasi hasil penataranportofolio kewarganegaraan (Civic) guru PPKn SLTP di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Teknologi Pembelajaran: Teori dan penelitian*. Tahun 11, No. 2, Oktober 2003, pp 66-79.
- AECT, (1977). *The definition of educational technology*. Washington D.C : AECT.
- Atzania, Reza. (1990). "The benefits of educational technology". *Educational technology research and development (ETRD)*. Vol 38 No.3 pp 93-96.
- Ahon, Kanji & Kumar, KL. (1999). "Evaluation of a multimedia packa on paedagogical design and display visual". *International journal of educational technology* Vo 1, No. 1.
- Anglin, Gary J. (1991). *Instructional technology past present, and future*. Engle-

- wood CO: Libraries Unlimited Inc.
- APEID. (1994). *Final report of the Asia and the Pacific Seminar on Educational Technology*. Tokyo: The Japan National Commission for UNESCO.
- Backhouse, Bruce. (2003). "Information and communication technology integration: Beyond the early adopters". *Technology Trends (TechTrends)*. May/June 2003 Vol. 47, No. 3, pp. 5-9
- Burton, John & Locke, Barbara (2000). "Building equity through learning Instructional! Technology for rural community development". *International journal of educational technology*. July, 2000, Vol. 2, No. 1
- Curriculum Information Technology Integration (CIT) Project (<http://www.edu.gov.mb.ca/ks4/tech/citvindex.htm>)
- Evans, Lionel & Leedham, John. (1985). *Aspects of educational technology: Educational Technology for continuous education*. London: Kogan Page Ltd.
- Gagne, Robert M. (1997). *The conditions of learning*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Gustafson, Kent L. (1991). *Survey of instructional development models*. New York: ERIC Clearinghouse on information resources Syracuse University.
- Heinich, et al. (1996), *Instructional media and technologies for learning*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Indrajati Sidi. (2002). *Konsep pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life skill) melalui pendekatan pendidikan berbasis luas*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen
- Januszewski, Alan. (2001), *Educational technology: the development of a concept*. New Jersey: Englewood Publ.
- Lockheed, M E and Hanushek, EA (1996) "Concepts of educational efficiency and effectiveness" *International encyclopedia of educational technology*. New York : Pergamon
- Center for Civic Education (CCE). (2002). *The citizen and the constitution Teacher's guide*. Calabasas: CCE.
- _____. (2000), *Foundations of democracy: Authority, privacy, responsibility, and justice Teacher's guide*. Calabasas: CCE
- _____. (2001). *Foundations of democracy Authority, privacy responsibility, and justice Teachers guide*, Calabasas: CCE.
- _____. (1997). *National standards for civic and government*. Calabasas: CCE
- Depdiknas. (2000). *Standar kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah*, Jakarta: Depdiknas
- Ditjen Dikdasmen. (2002). *Standar operasional prosedur (SOP) pengembangan silabus berbasis kemampuan dasar siswa sekolah menengah umum pelajaran kewarganegaraan*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- _____. (2002). *Pedoman khusus pengembangan sistem pengujian hasil belajar berbasis kemampuan dasar siswa sekolah menengah umum (SMU) mata pelajaran kewarganegaraan*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Ditjen Dikti. (1998). *Profil kurikulum dan garis besar program pembelajaran (GBPP) program pendidikan penyertaan diplomalll (D-III) PGSLTP Pendidikan IPS bidang studi PPKN*. Jakarta: Ditjen Dikti
- Klassen J. & Drummond, D. (2000). "Human resource skills Learning through an interactive multimedia business simulation". *International journal of educational technology (JET)*. July, Vol 2 No. 1.

- Miarso, Yusufhadi (1987). *Landasan falsafah dan teon teknologi pendidikan*, Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana UNJ
- Nickerson, Reymond S. & Zodhiates, Philip P. (1991) "Technology in education: Looking toward 2020"
Educational technology research and development Vol 39, No. 3, 1991
- Quigley, Charles N. & Buchanan Jr, John H. *Civitas a frame work for civic education*. Calabasas CCE
- Reiser, Robert A. & Dempsey, John V. (2002) *Trends and issues in instructional design and technology*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Seels, Barbara B, & Richey, Rita C. (1994). *Instructional technology: The definition and domains of the field*. Washington D.C: Association for Educational Communications and Technology (AECT)
- UNESCO. (2003) *Building capacity of teachers as facilitators in pedagogy integration for improved teaching and learning*. Bangkok: UNESCO Bangkok
- _____. (2004). *Final report the workshop on the development of guideline on teacher training in ICT integration and standards for competency in ICT*. Bangkok: Pacific Regional Bureau for Education UNESCO.
- Wittich, A. & Schuller Charles F. (1979), *Instructional technology: its nature and use*. New York: Harper & Row, Publisher.

BIODATA

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Prof. Dr. Abdul Gafur Daniamiseno, M.Sc.
NIP : 130358900
Tmpt/tgl, Lahir : Ngawi, 6 Agustus 1944
Agama : Islam
Jabatan : Guru Besar
pangkat/Gol : Pembina Utama Muda Gol IV/c
Alamat rumah : Jl Masjid Perak No. 3 Kotagede Yogyakarta 55172
Telp : 0274-371304
e-mail : agafurda@yogya.wasantara.net.id.
HP : 08122958082
Alamat kantor : Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang 55281 Tilp, 586168 Psw 384

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) lulus tahun 1957
2. Sekolah Guru B (SGB) lulus tahun 1960
3. Sekolah Guru A (SGA) lulus tahun 1963
4. Sarana Muda Hukum (BA) FKIA-IKIP Yogyakarta, lulus tahun 1966.
5. Sarjana Keguruan Ilmu Hukum FKIS-IKIP Yogyakarta, lulus tahun 1969
6. Masters of Instructional Technology, Syracuse University New York, lulus tahun 1978

7. Doktor Teknologi Pendidikan (S3) Sandwich Program FPS IKIP Jakarta dan University of Southern California (USC) Los Angeles, tahun 1987.
- C. Riwayat Jabatan Fungsional dan Pangkat
1. Asisten ahli Madya, Penata Muda tgl. 1-3-1972
 2. Asisten Ahli. Penata Muda Tkt I. III/b tgl 1-4-1974
 3. Lektor Muda, Penata IIIc tgl. 1-4 1976
 4. Lektor Madya, Penata Tkt. I. IIIId tgl, 1 -4 1979
 5. Lektor, Pembina. IVIa tgl, 1-4-1981
 6. Lektor Kepala, Pemb. Tkt. I, IVIb tgi. 1 10 1984
 7. Guru Besar, Pembina Tkt. I, IV/b tgl 1-12-2003
 8. Guru Besar, Pemb. Ut. Muda, IV/c tgl. 26-4-2004
- D. Riwayat Jabatan Struktural
1. Dosen FPIPS IKIP YOGYAKARTA (sekarang FIS UNY) sejak 1972 sampai sekarang
 2. Kepala Biro Thesis FKIS-IKIP YK tahun 1975 1977
 3. Kepala Bagian Media Pendidikan (BAMEDIK) IKIP YOGYAKARTA, tahun 1980 1984
 4. Kepala Balai Produksi Media Radio Yogyakarta Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (BPMR- PUSTEKKOM DIKBUD) tahun 1994 2000,
 5. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Profesional Guru (P4G-IKIP) Yogyakarta, tahun 1999 2000
 6. Kepala Bidang Media Pendidikan pada Unit Layanan Pendidikan dan Pengajaran (ULP3) IKIP Yogyakarta, tahun 1999-2000,
 7. Kepala Unit Pengembangan Sumber Belajar UNY (UPSB UNY) tahun 2001 2004
- E. Pengalaman Mengikuti Training/Pelatihan
1. Pelatihan penulisan naskah siaran radio pendidikan (SRP), 1 bulan, di Semarang, tahun 1976
 2. Pelatihan penerjemahan buku, 2 minggu, di Cisarua Bogor, tahun 1979
 3. Penataran analisis kompetensi profesi teknologi pendidikan, di Yogyakarta, 1 minggu tahun 1980
 4. Training on Educational Technology Development, at the University of Southern California Los Angeles, months, 1980
 5. Research training on the area of instructional technology, at Indiana University Blomington, (3 months) May July 1988

6. Training on Developing Course Materials using Web Course Tools (WEBC), at Pustekkom Jakarta, 2000

F. Mata Kullah yang pernah dan masih diajarkan

1. Ilmu Negara, 1972-1974
2. Azas-azas Hukum Tata Negara 1973-1975
3. Hukum Tatanegara, 1973-1976
4. Pancasila, 1974-1976
5. Desain Instruksional 1978-sekarang
6. Media Pendidikan, 1980, 1988
7. Program Remedial, 1980, 1988
8. Kurikulum dan Buku Teks,, 1999-2000
9. Teknologi Pengajaran, 1990-sekarang
10. Evaluasi Hasil Pembelajaran, 1990-sekarang
11. Desain Pesan, 1997-2000
12. Metodologi Penelitian Pendidikan, 1990- sekarang
13. Audiovisual Aids (AVA), 1990 sekarang
14. Media Komunikasi,, 1990 sekarang
15. Komputer Multimedia, 1999 sekarang
- 16.. Produksi Media Radio TV dan Film 2000 sekarang
17. Produksi Media Radio, 1999- sekarang
18. Perencanaan Pembelajaran, 1997-sekarang
19. Teori Pembelajaran, 2001 sekarang
20. Landasan Teknologi Pembelajaran, 2002
21. Pengelolaan Sumber Belajar
22. Multimedia Pembelajaran, 2002-sekarang
23. Web Pembelajaran, 2003 sekarang
24. Teknologi Informasi, 2004

G. Pengalaman Mengikuti Seminar Simposium, Lokakarya (10 tahun terakhir)

1. karya ilmiah berjudul The Utilization of Educational Radio for Nonformal Education dalam International Seminar on The Utilization of New Information Technology for Non-Formal Education Tokyo Japan, 1994.
2. Peserta The First International Symposium on Networking into The 21 St Century. Prospects of Distance Education in Yogyakarta, from Nov 27- Dec. 1, 1995.
3. Peserta Simposium Teknologi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Abad XXI, tanggal 17-18 Desember 2000 di Yogyakarta.

4. Penyaji makalah berjudul Penggunaan Multimedia untuk Keperluan Komunikasi Islam: Tinjauan Etis dan Praktis dalam Seminar Nasional Multimedia dan Komunikasi Islam Abad yang diselenggarakan oleh HMJ Dakwah KOMAKOM -LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 15 Juli 1997 di Yogyakarta.
5. Peserta The Third Symposium on Distance Education and Open Learning: Future Vision, in Denpasar Bali, 20-25 Nov. 1999.
6. Penyaji karya ilmiah berjudul Model-model Pengembangan Kurikulum dalam Seminar & Lokakarya Pengembangan Kurikulum Perkuliahan yang diselenggarakan oleh Center for Teaching Staff Development IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 14 Februari sd 4 Maret 2000 di Yogyakarta.
7. Penyaji karya ilmiah berjudul Anatomi dan Desain Kurikulum dalam Seminar & Lokakarya Pengembangan Kurikulum Perkuliahan yang diselenggarakan oleh Center for Teaching Staff Development IAIN.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG ILMIAH DAN AMALIAH

Disampaikan di depan Rapat Terbuka Senat
Universitas Negeri Yogyakarta
Selasa, 5 April 2011

**PROF. DR. AJAT SUDRAJAT,
M.AG.**

Guru Besar Pendidikan Agama Islam
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta



PENDIDIKAN AGAMA ISLAM yang ILMIAH dan AMALIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang saya hormati:

Rektor/Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta.

Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Direktur dan Asisten Direktur Tamu undangan, rekan sejawat, sanak keluarga, dan hadirin sekalian

Alhamdulillah rabbi 'alamin, wa bihi nasta'in, 'ala umurid dunya wad-din, ash-shalatu was-salamu 'ala asyrafil anbiya'i wa al-mursalin, nabiyyina Muhammadin, wa 'ala alihi wa ashhabih, wa al-tabi'ina ajma'in, birahmatika ya arhama al-rahimin, amma ba'du.

Puji dan syukur yang tak terhingga, marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan maghfirah-Nya kepada kita sekalian. Karenanyalah, Al-hamdulillah, pada hari yang insya Allah diliputi rahmat Allah ini, kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan kita sekalian. Semoga kita tergolong umat yang amanah dan istiqomah dalam menjalankan ajaran yang telah disampaikannya, amien.

Sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya, karena pada hari ini, saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama Rektor/Ketua Senat Universitas Negeri Yogyakarta, atas semua perkenannya ini.

*Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, saya akan menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul: **"Pendidikan Agama Islam yang Ilmiah dan Amaliah"***

Hadirin yang saya hormati

A. PENDAHULUAN

Salah satu ciri manusia, seperti dikatakan Mircea Eliade, bahwa dia merupakan jenis *homo religiosus* (Sastrapratedja, 1982:37). Menurutnya, *homo religiosus* adalah tipe manusia yang hidup dalam alam yang suci, penuh dengan nilai-nilai keagamaan, dan dapat menikmati kesucian yang ada dan tampak pada alam semesta. Dalam pandangan *homo religiosus* kehidupan di dunia ini tidak semata-mata bersifat alamiah, tetapi terikat dengan kehidupan dunia lain yang digambarkan dengan kehadiran Tuhan. Tuhan menjadi pusat kehidupan dunia. Seperti dikatakan Nottingham:

Sesuatu yang sakral lebih mudah dikenal daripada didefinisikan. Ia berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. Dalam semua masyarakat yang kita kenal terdapat perbedaan antara yang suci dengan yang biasa atau sering kita katakan, antara yang sakral dan yang sekuler atau duniawi (Nottingham, 1985:9-10).

Kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia di dunia telah melahirkan adanya seperangkat keyakinan, norma, dan praksis yang berpusat kepada-Nya. Kumpulan dari seperangkat keyakinan, norma, dan praksis ini kemudian disebut dengan nama *agama*, *religion*, atau *al-din*. Dalam kenyataan sosial, mengikuti kajian kalangan ahli antropologi agama, sosiologi agama, dan sejarah agama, adanya agama dipandang sebagai gejala yang sudah sangat tua. Bahkan disebutkan kalau fenomena agama ini senantiasa menyertai kehidupan manusia kapan dan di mana pun (Nottingham, 1985:2). Kenyataan dewasa ini menunjukkan, bahwa sebagian besar umat manusia adalah pemeluk dari agama, seperti Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Shinto.

Gejala umat manusia yang tidak lepas dari agama menunjukkan bahwa agama menempati kedudukan yang penting atau bahkan sangat penting dalam kehidupannya. Namun demikian, apabila ditelusuri lebih jauh, arti penting agama tampaknya ber-

beda antar satu orang dengan lainnya. Dalam hal ini, arti penting agama ada yang bersifat artifisial dan substansial. Bagi yang pertama agama terbatas pada fungsi identitas dan sosialisasi belaka. Agama hanya ditempatkan sebagai pelengkap identitas dan sarana berinteraksi dan sosialisasi dengan sesamanya. Bagi yang kedua, agama memang betul-betul menempati kedudukan yang pokok, karena agama sebagai obor yang menjadi penerang untuk mencapai hakikat kehidupan ini.

Berangkat dari hal tersebut, uraian pidato ini akan mencoba menelusuri kembali keberagamaan manusia. Apakah betul telah terjadi kemerosotan atas fungsi dan peran agama dalam kehidupan, sehingga muncul pernyataan yang menggugat akan fungsi dan peran agama, dan juga pendidikan agama (Pendidikan Agama Islam) dalam membangun kehidupan manusia. Kalau gugatan dan keraguan itu benar, di mana letak kelemahannya dan bagaimana sebaiknya kegiatan Pendidikan Agama Islam dilaksanakan.

Hadirin yang saya hormati

B. AFILIASI KEAGAMAAN MANUSIA

Sebagai gejala universal, keberagamaan (*religiosity*) manusia dapat dilihat dalam kehidupan sosial setiap saat. Apabila kenyataan tersebut ditelusuri, dapat ditemukan dua model afiliasi keagamaan yang melekat padanya, yaitu afiliasi yang sifatnya tradisional dan rasional.

1. AFILIASI TRADISIONAL.

Secara umum dapat dikatakan bahwa afiliasi manusia kepada suatu agama tertentu mengikuti model afiliasi tradisional. Afiliasi tradisional adalah suatu model kepegangan terhadap suatu agama tertentu dengan mengikuti tradisi agama yang hidup dalam keluarga. Agama yang dianut suatu keluarga --dapat dipastikan-- akan menentukan agama yang dianut oleh anak dan keturunan keluarga yang bersangkutan. Dalam hal ini, yang berlaku adalah semacam model warisan, artinya seorang anak atau anggota keluarga akan mewarisi agama yang dianut leluhurnya.

﴿ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ ﴾ (الحدث)

Artinya: "... setiap anak yang dilahirkan dia dalam keadaan fithrah (Islam), maka orang tuanyalah yang kemudian menjadikan anak itu menjadi penganut agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi" (H.R. al-Bukhari, 1/1292; Ibn Hibban dalam *Shahih*-nya,1/129; al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, 6/11918).

Dalam al-Quran pada surat al-A'raf ayat 172 dinyatakan:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): «Bukankah Aku ini Tuhanmu?» mereka menjawab: «Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi». (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: «Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)» (Q.S. al-A'raf (7): 172).

Model afiliasi tradisional merupakan cara yang ampuh untuk menjaga kelestarian suatu agama. Kelestarian agama-agama yang ada dewasa ini akibat dari model afiliasi ini. Kuatnya afiliasi tradisional dapat terlihat, baik dalam bentuk pelestarian agama yang bersifat vertikal, dari ayah ke anak ke cucu dan seterusnya, maupun yang bersifat horizontal. Arah horizontal misalnya dapat dilihat dalam hubungan menyamping pada saat seseorang akan menikah. Satu di antara prasyarat utama yang harus dipenuhi calon mempelai adalah kesamaan agama.

Pada saat bersamaan, afiliasi tradisional menjadi semakin kuat, karena di dalamnya menyertakan tanggung jawab keluarga yang bercorak emosional. Rasa kebersamaan sebagai keluarga kadang-

kadang mengalahkan rasionalitas seseorang. Oleh karena itu, unsur emosional memberikan sumbangan yang kuat dan penting terhadap kelestarian suatu agama. Dapat terjadi, seseorang yang secara rasional lebih bisa menerima ajaran agama lain, tetapi karena emosi kekeluargaan yang kuat, dia tidak dapat melepaskan diri dari agama yang dianut keluarganya. Demikian juga dapat terjadi ketika seseorang akan berpindah kepada agama lain atas pertimbangan rasionalitasnya, tetapi mendapatkan ancaman dari pihak keluarga, seperti tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga, dia akan tetap beragama sesuai dengan agama keluarganya. Memperhatikan fenomena keagamaan melalui afiliasi tradisional, seakan telah terjadi 'pemaksaan' agama oleh keluarga. Keluarga telah berperan sebagai lembaga yang memaksakan agama kepada para anggotanya.

Model afiliasi tradisional diakui telah memperlihatkan kekuatannya. Tetapi di dalamnya ditemukan adanya beberapa kelemahan. Kelemahan yang utama adalah, berhubungan dengan 'transferensi' (pemindahan) ajaran-ajaran, nilai-nilai, norma-norma dan praktik-praktik keagamaan. Tidak semua keluarga atau bahkan kebanyakan keluarga dapat melakukan 'transferensi' ajaran-ajaran, nilai-nilai, norma-norma dan praktik-praktik keagamaan dengan baik. 'Transferensi' yang dimaksudkan di sini adalah pemindahan ajaran-ajaran, nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik keagamaan dari orang tua kepada anak. Kunci persoalannya adalah terletak pada dimensi pengetahuan agama yang tidak dimiliki secara memadai oleh para orang tua dan umat beragama pada umumnya. Ada beberapa implikasi yang dapat dicatat dari kurangnya pengetahuan agama.

Implikasi pertama dari tidak memadainya dimensi pengetahuan agama yang dimiliki seseorang, antara lain terlihat pada pemeluk-pemeluk agama yang bercorak nominal. Seseorang mengaku sebagai penganut agama tertentu, tetapi dalam praktik kehidupannya jauh dari cita-cita yang ada dalam agamanya. Dengan mudah dijumpai orang-orang beragama, tetapi tidak melakukan kegiatan yang merupakan kewajiban yang mestinya dilakukan seorang penganut agama. Oleh karena itu dapat di-

mengerti ketika misalnya Clifford Geertz (1989) membagi ragam keberagamaan orang Islam di Jawa kepada ragam *abangan*, *sant-ri*, dan *priyayi*. Geertz mengatakan: “... *three main cultural types which reflect the moral organization of Javanese culture as it is manifested in Modjokuto, the general ideas of order in terms of which the Javanese farmer, laborer, artisan, trader or clerk shapes his behavior in all areas of life. These are the abangan, santri and prijaji*” (Robertson, 1971:166).

Ragam *abangan* dipakai oleh Geertz untuk menunjuk kepada orang-orang yang secara nominal mengatakan beragama, tetapi tidak mempraktikkan ajaran-ajaran atau kewajiban agamanya dengan baik. Salah satu praktik keagamaan yang paling menonjol bagi mereka adalah *slametan*. Dikatakan oleh Geertz: “*The abangan religious tradition, made up primarily of the ritual feast called the slametan, of an extensive and intricate complex of spirit beliefs and of a whole set of theories and practices of curing, sorcery and magic, is the first subvariant within the general Javanese vil-lage*” (Robertson, 1971:166).

Pada gejala yang demikian, agama dilihat sebatas melengkapi identitas seseorang. Dalam pandangannya, kehidupan sosial yang dihadapinya telah mensyaratkan seseorang untuk menganut suatu agama tertentu. Agama merupakan ‘keharusan sosial’ atau ‘hukum sosial’. Agama belum menjadi kebutuhan substansial seseorang, tetapi semata sebagai sarana identifikasi sosial. Seperti halnya keluarga, di sini pun masyarakat telah ‘memaksa’ seseorang untuk beragama.

Implikasi kedua dari tidak memadainya pengetahuan agama adalah sering terjebaknya umat beragama pada sesuatu yang sifatnya permukaan (*artificial*). Ketika mereka melakukan kewajiban agama yang sifatnya praktik, dalam bentuk peribadatan atau ritual, mereka hanya mementingkan terpenuhinya perbuatan tersebut secara formal (*formal-practical*). Formalitas itu misalnya, mereka merasa cukup hanya dengan memenuhi syarat dan rukun suatu perbuatan. Mereka tidak mampu menyelami lebih dalam hakekat dari perbuatan yang dilakukannya. Mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan itu karena terikat dengan kata

‘wajib’ atau kata perintah lainnya. Dengan kata lain, mereka terjebak pada ‘rutinitas’ yang kering dan gersang akan pemaknaan. Rutinitas dalam bentuk pengulangan belum mampu memberikan sumbangan terhadap pembangunan kepribadiannya.

Ketika afiliasi tradisional, baik dalam bentuk yang nominal maupun ritual yang *artificial* dan *formal-practical*, dimasuki unsur emosi keagamaan, kemungkinan yang akan terjadi adalah adanya perilaku ‘taklid buta’. Seseorang yang dalam keadaan bertaklid buta, biasanya akan melahirkan sikap fanatik yang berlebihan terhadap seseorang atau kelompok. Ada anggapan bahwa kebenaran agama bersifat tunggal, yaitu yang sesuai dengan apa yang diketahuinya atau apa yang diterimanya dari seseorang atau kelompok. Sikap yang demikian dapat mengarahkan seseorang untuk hanya membenarkan diri dan kelompoknya, dan menyalahkan orang-orang yang berbeda dengan diri dan kelompoknya. Gejala ini akhirnya dapat mengarah pada terjadinya konflik di dalam internal agama.

Implikasi ketiga dengan tidak memadainya pengetahuan agama adalah kemungkinan terjadinya konversi agama (Uren, 1928:238). Konversi agama atau perpindahan agama bisa disebabkan karena dua hal, yaitu kebodohan dan keragu-raguan. Gejala terjadinya perpindahan agama, pada umumnya disebabkan seseorang tidak mengetahui dengan benar kedudukan agama dalam kehidupannya. Pada mereka yang beragama secara nominal, apabila ada penawaran yang dipandang menguntungkan kehidupan duniawinya, dengan tidak merasa berdosa atau penyesalan di kemudian hari, dia akan menerima perpindahan itu. Sementara bagi mereka yang mengerti kedudukan agama, sekalipun dalam keadaan hidup yang sulit, tidak akan rela melepaskan agama untuk berganti dengan agama lain. Agama tidak seperti rumah atau pakaian, kalau sudah rusak dan lusuh bisa diganti begitu saja (Anshari, 1979:109). Seperti yang juga dinyatakan Thouless:

“Konversi agama” adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan suatu sikap keagamaan; proses itu bisa terjadi secara berangsur-angsur atau secara tiba-tiba. Sangat boleh jadi ia mencakup perubahan keya-

kinan terhadap beberapa persoalan agama tetapi hal lain akan dibarengi dengan berbagai perubahan dalam motivasi terhadap perilaku dan reaksi terhadap lingkungan sosial. Salah satu di antara berbagai arah perubahan ini tampaknya bisa memainkan peranan penting dalam perubahan konversi itu; katakanlah misalnya konversi-konversi *intelektual*, *moral*, atau *sosial* (Thouless, 1992:198).

Implikasi keempat dari afiliasi tradisional, terlihat pula pada cara pandang yang keliru terhadap agama. Agama dipandang sebagai seperangkat aturan dan ketentuan yang memaksa kepada manusia. Agama dirasakan seperti 'penjara' yang selalu membatasi gerak kehidupan. Apabila agama dilihat sebagai bentuk 'paksaan', dengan sendirinya seseorang tidak akan pernah merasa nyaman dan damai dalam beragama. Agama bahkan dilihat sebagai bagian yang membebani kehidupannya. Kesan yang akhirnya muncul adalah adanya 'ketakutan' dalam menjalankan ajaran agama. Tuhan dipandang sebagai *Dzat* Mengerikan yang akan memberikan hukuman kepada setiap orang yang melanggar perintah-Nya. Dengan demikian terjadi ketundukan dan kepatuhan yang semu.

Implikasi kelima yang dapat dicatat dari model keagamaan ini adalah kemungkinan terjebaknya seseorang pada apa yang disebut 'kultus individu atau kelompok'. Kultus ini antara lain diperlihatkan dalam bentuk 'pembenaran' terhadap setiap 'kata dan perbuatan' yang berasal dari seseorang atau kelompok. Model keagamaan seperti ini akan sangat berbahaya kalau kemudian disusupi oleh muatan-muatan yang bersifat politik. Dalam hal ini agama akan menjadi alat legitimasi, dan karena itu mungkin saja atas nama agama (seseorang atau kelompok) rela mati karenanya. Afiliasi tradisional berbeda dengan afiliasi rasional seperti berikut ini.

Hadirin yang saya hormati

2. AFILIASI RASIONAL.

Untuk sampai ke model afiliasi rasional, pada hakekatnya se-

seorang yang beragama melewati dulu model afiliasi tradisional. Tangga kehidupan keluarga adalah pintu masuk yang mengantarkan seseorang pada agama tertentu. Pada tahap itu, seseorang diperkenalkan dengan ajaran agama yang dianut dalam keluarga. Bermula dari perilaku yang berupa pembiasaan praktik-praktik agama, hafalan terhadap ucapan yang menyertainya, dan kemudian meningkat ke arah memberikan pengertian mengenai hakekat agama. Dari tahapan-tahapan itu, ketika seseorang memasuki usia *aqil-baligh*, pengertian mengenai hakekat agama harus sudah dimilikinya. Pada usia *aqil-baligh* inilah seseorang masuk ke tahap kehidupan yang lain, yaitu semua perilakunya tidak lagi disandarkan kepada orang tuanya atau walinya, melainkan kembali kepada dirinya sendiri (*mukallaf*).

Pada masa kanak-kanak, tanggung jawab perilaku seorang anak ada pada orang tua atau walinya, tetapi setelah masa *aqil-baligh* tanggung jawab itu dikembalikan kepada dirinya. Oleh karena itu dalam setiap praktik keagamaan, seperti ibadah atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, selalu menuntut adanya syarat *aqil-baligh*. Pada usia ini, merupakan waktu yang tepat bagi seseorang untuk menegaskan kembali 'kesiapan' dirinya untuk menjadi Muslim. Penegasan bahwa dirinya betul-betul siap menjadi Muslim. Muslim adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan secara total. Penting untuk ditekankan bahwa ketundukan dan kepatuhan itu bukan karena paksaan keluarga, masyarakat, atau agama sekalipun (Q.S. al-Baqarah (2): 256).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali

yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. al-Baqarah (2): 256)

Masa *aqil-baligh* adalah waktu yang tepat bagi terjadinya proses rasionalitas dalam memasuki kehidupan agama. Pilihan atas agama yang semula merupakan pilihan keluarga atau masyarakat, harus mendapatkan penegasan ulang dari dirinya. Agama yang dianutnya tidak semata karena faktor keluarga dan masyarakat, tetapi merupakan pilihan sendiri. Hal ini seiring dengan beralihnya tanggung jawab keluarga kepada dirinya. Sekalipun tidak ada ritual yang formal, semacam pengucapan kembali ‘syahadatain’, sebagai ciri yang menandai masuknya seseorang ke dalam komunitas keagamaan Islam, tetapi hendaknya diingatkan bahwa ketika itulah seseorang memasuki wilayah agama yang secara pasti meminta pertanggungjawaban.

Penerimaan atas agama secara rasional dipandang sebagai cara beragama yang baik. Karena di dalam diri seseorang sudah tersedia ruang untuk menanggung konsekuensi dari pilihannya itu; ada usaha maksimal dari cara ini untuk hidup sesuai dengan ajaran agamanya. Dengan demikian seseorang akan menjalani kehidupan agamanya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Dengan rela dia akan melakukan apa pun yang menjadi keharusan seorang hamba untuk mengabdikan kepada Tuhannya. Kepatuhan dan ketundukan kepada Tuhan merupakan cara hidup terbaik; cara yang paling menyelamatkan dan akan membawa kebahagiaan.

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ۖ إِنَاءُ الْبَيْتِ سَاجِدًا ۖ وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ۖ وَرَبِّ جُورٍ رَحِمَةً
رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
الْأَلْبَابِ

Artinya: Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (Q.S. az-Zumar (39): 9).

الدِّينُ هُوَ الْعَقْلُ لَا الدِّينَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

“Agama adalah akal, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnyanya”.

مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً

Artinya: “... Apabila kamu berbicara kepada suatu kaum yang tidak bisa diterima oleh kemampuan akalnyanya, maka apa yang kamu sampaikan akan mendatangkan fitnah” (H.R. Muslim).

Rasionalitas yang demikian akan tercapai dengan baik apabila seseorang dilengkapi dengan pengetahuan keagamaan yang memadai. Pengetahuan agama dalam hal ini akan mengarahkan kepada pemahaman terhadap segala sesuatu yang diajarkan oleh agama. Ketika rasionalitas yang demikian dipadukan dengan emosi keagamaan, diharapkan akan melahirkan apa yang disebut dengan ‘kesadaran beragama’ (*religious consciousness*). Ada beberapa implikasi yang juga dapat dicatat dari model afiliasi rasional ini.

Implikasi pertama yang dapat dilihat dari model afiliasi rasional adalah adanya cara pandang yang positif terhadap agama. Semisal ketika seseorang memikirkan dirinya, dia dapat berpikir jernih bahwa segala sesuatu yang melekat dalam dirinya dan segala perlengkapan kehidupan yang telah tersedia di alam ini adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu sudah sepantasnya dan semestinya kalau dia bersikap tunduk dan patuh mengikuti kehendak Tuhan. Terdapat keyakinan dalam dirinya bahwa jalan yang telah disiapkan Tuhan merupakan ‘jalan terbaik’ baginya.

Kesadaran semacam itu secara tulus muncul dalam diri seseorang. Dengan kata lain ada kesadaran yang sifatnya ‘fitriyah’, suatu kesadaran yang mengalir dari lubuk hatinya. Akibat positif dari cara pandang ini adalah penglihatan kepada Tuhan sebagai

Dzat Yang Maha Kasih; Tuhan yang telah melimpahkan demikian banyak kenikmatan hidup dan karunia kepada dirinya. Kehidupan yang diperolehnya tidak disia-siakan untuk sesuatu yang tidak berguna atau bahkan mencelakai diri. Kehidupannya dimanfaatkan secara maksimal untuk mengabdikan kepada Tuhan. Kehidupannya diarahkan sesuai dengan ‘tujuan penciptaannya’.

Implikasi kedua dari model afiliasi rasional adalah, seseorang akan dapat merasakan sepenuhnya kenyamanan dan kedamaian dalam menjalankan ajaran agama. Hatinya bagai cermin tanpa noda yang setiap saat menyerap cahaya atau nur yang bersumber dari Tuhan. Dirinya merasakan kehadiran Tuhan di mana dan kapan pun. Ketika mendapat cobaan hidup akan bersikap sabar; dan ketika mendapatkan anugerah akan senantiasa bersyukur. Semuanya dikembalikan kepada Tuhan.

Implikasi ketiga dari kepegangan agama yang bercorak rasional adalah berkaitan dengan konversi agama. Peristiwa konversi agama biasanya berawal dari adanya keragu-raguan yang dialami seseorang. Keragu-raguan ini dapat diperkirakan karena bekerjanya rasionalitas yang dimiliki seseorang. Rasionalitasnya bekerja ketika dia harus menerima ajaran-ajaran dari agama yang dianutnya. Ketika ada ajaran agama yang meragukan, dia terdorong untuk memperbandingkannya dengan ajaran agama lain. Atas dasar pertimbangan rasionalitasnya, saat itulah kemungkinan terjadinya perpindahan agama. Perpindahan agama yang terjadi dilakukan dengan penuh pertimbangan, dan tidak didasarkan pada adanya tekanan baik yang bercorak ekonomi maupun politik.

Implikasi yang keempat dapat dilihat dalam hal peribadatan. Peribadatan-peribadatan yang harus dilakukan, bagi model afiliasi rasional tidak semata sebagai bentuk kewajiban. Peribadatan-peribadatan itu dilihatnya sebagai mekanisme yang akan melembagakan hubungannya secara permanen dengan Tuhan. Bagi mereka, peribadatan-peribadatan itu menjadi sarana kontrol dalam rangka membangun hubungan antara dirinya dengan Tuhan. Kelanggengan hubungan itu senantiasa terbina melalui mekanisme peribadatan.

Dalam pelebagaan hubungan ini ada mekanisme yang rentang waktunya sangat dekat dan pendek seperti 'niat', yang dilakukan di setiap peralihan suatu perbuatan. Niat adalah bentuk kegiatan yang mengarahkan orientasi perbuatan seseorang, apakah karena atas nama Tuhan atau karena sesuatu yang lain. Dalam pandangan Islam, orientasi yang benar adalah diatasnamakan kepada Tuhan.

Siklus peribadatan ini ada juga yang model harian, salat misalnya. Salat tidak semata merupakan kewajiban lima kali sehari, melainkan dilihatnya sebagai mekanisme untuk melanggengkan hubungannya dengan Tuhan. Salat juga dilihat sebagai mekanisme untuk 'memperbaharui kontrak' dan 'melembagakan kemusliman' seseorang. Di dalam salat seseorang mengucapkan 'syahadatain' yang secara formal menandai masuknya seseorang ke dalam komunitas Islam. Ada juga peribadatan yang bersifat mingguan, seperti pelaksanaan salat Jum'at; dan ada pula yang bercorak tahunan, seperti pelaksanaan puasa; dan haji yang dilakukan sekali seumur hidup.

Rutinitas atau sifat pengulangan dari suatu peribadatan tidak hanya bersifat refleksi, melainkan sebagai sarana pelebagaan dan pembaruan hubungannya dengan Tuhan. Apabila hubungan ini terlembaga secara permanen, maka keterikatannya dengan Tuhan semakin kuat. Dalam suasana demikian, perasaan yang disebut 'cinta kepada Allah' (*mahabbah billah*) akan tumbuh. Perasaan cinta kepada Tuhan adalah puncak kesadaran tertinggi dalam kehidupan seseorang yang beragama. Ruang di dalam hatinya tidak tersisa lagi untuk sesuatu yang lain kecuali Tuhan. Ibarat orang yang sedang jatuh cinta, yang diinginkannya adalah kapan dan di mana pun senantiasa bersama orang yang dikasihi. Dia juga rela berkorban apa saja demi menyenangkan perasaan orang yang dicintainya.

Hadirin yang saya hormati

C. DIMENSI-DIMENSI KEAGAMAAN

Kelengkapan yang sempurna yang dapat mengarahkan se-

seorang mencapai tingkat kesadaran agama adalah dengan terpenuhinya semua dimensi keagamaan. Dimensi-dimensi keagamaan ini seperti yang dikemukakan Glock and Stark (Robertson, 1971:256-257) ada lima, yaitu: dimensi keyakinan (*belief*), dimensi peribadatan atau praktik agama (*practical*), dimensi pengalaman (*experiential*), dimensi pengamalan (*consequential*), dan dimensi pengetahuan agama (*intellectual*). Dikatakannya: *“Five such dimensions can be distinguished; within one or another of them all of the many and diverse religious prescriptions of the different religions of the world can be classified. We shall call these dimensions: belief, practice, experience, consequences, and knowledge”* (Roland Robertson, 1971:256).

Pertama, dimensi keyakinan. Dimensi ini berisi seperangkat keyakinan yang terpusat pada keyakinan adanya Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ini kemudian melahirkan seperangkat keyakinan yang berkaitan dengan kehidupan alam gaib dan alam nyata. Bagaimana misalnya konsep penciptaan alam, penciptaan manusia, dan adanya roh dalam diri manusia. Begitu pula tentang dunia lain yang akan menjadi tempat kembalinya manusia. Dimensi ini pada umumnya memberikan muatan-muatan yang bercorak doktrinal.

Kedua, dimensi praktik peribadatan. Dimensi ini pada hakekatnya merupakan refleksi langsung dari dimensi pertama. Ketika agama menkonsepsikan adanya Tuhan yang menjadi pusat penyembahan, pada saat bersamaan harus ada mekanisme yang bisa dijadikan cara untuk melembagakan hubungan antar manusia dengan Tuhan. Pelembagaan hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan dengan cara yang beraneka ragam, tetapi memiliki tujuan yang sama. Pelaksanaan praktik atau peribadatan ini biasanya mengikuti siklus tertentu, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Semua bentuk peribadatan itu, tidak lain merupakan sarana untuk melestarikan hubungan manusia dengan Tuhan. Lestarnya hubungan ini akan berakibat pada terlembaganya agama itu secara permanen.

Ketiga, dimensi pengalaman. Pengalaman keagamaan adalah bentuk respon kehadiran Tuhan yang dirasakan oleh seseorang

atau komunitas keagamaan. Respon kehadiran Tuhan dalam diri seseorang atau komunitas keagamaan tercermin pada adanya emosi keagamaan yang kuat. Terdapat rasa kekaguman, keterpesonaan, dan hormat yang demikian melimpah, atau '*mysterium tremendum et fascinans*' (Djamari, 1988:68) terhadap Tuhan. Adanya dimensi ini telah menyebabkan seseorang atau komunitas keagamaan demikian hormat dengan segala sesuatu yang dikaitkan dengan Tuhan. Sesuai dengan sifat Tuhan yang suci, segala yang terkait dengan Tuhan memiliki sifat kesucian. Kumpulan firman-Nya yang dibukukan dipandang suci, dan mensyaratkan kesucian bagi orang yang menyentuhnya. Tempat-tempat peribadatan juga dijaga untuk tetap dalam keadaan suci. Di tempat itulah dilakukan penyembahan yang ditujukan kepada Tuhan. Begitu juga bagi orang yang melakukan peribadatan, dia harus dalam keadaan suci. Kesucian Tuhan berimplikasi pada semua perbuatan manusia yang beragama.

Keempat, dimensi pengamalan. Dimensi ini berupa pelaksanaan secara konkrit dari tiga dimensi di atas. Pengamalan adalah bentuk nyata dari semua perbuatan manusia yang disandarkan kepada Tuhan. Hidup dalam pengertian ini merupakan pengabdian yang sepenuhnya diabdikan kepada Tuhan. Orientasi dari semua perilaku dalam hidup semata tertuju kepada Tuhan. Komitmen seorang pemeluk suatu agama akan nampak dari dimensi yang keempat ini (Wach, 1984:185).

Kelima, dimensi pengetahuan. Dimensi ini memuat konsep-konsep yang terdapat dalam suatu agama, baik berkaitan dengan sistem keyakinan, sistem norma dan nilai, mekanisme peribadatan, dan bagaimana caranya seorang beragama memiliki penghayatan yang kuat terhadap agamanya. Dimensi ini akan sangat mendukung bagi munculnya kesadaran keagamaan dalam diri seseorang yang beragama.

Memperhatikan pembahasan di depan, pengetahuan keagamaan memiliki makna penting yang kuat terhadap lahirnya kesadaran keagamaan dalam diri seseorang. Oleh karena itu dapat dimaklumi apabila semangat penyebaran agama tidak hanya ditekankan pada aspek doktrinal, tetapi lebih dari itu menekankan

pentingnya pendekatan keilmuan atau ilmiah dalam beragama. Karena seperti pada analisis di depan, kurangnya pengetahuan agama berakibat negatif terhadap perkembangan keagamaan seseorang.

Dalam menuju kesadaran beragama ini, usaha yang mesti dilakukan adalah menempatkan pengetahuan keagamaan pada posisi yang *fundamental-substantial*. Sekalipun mata pelajaran pendidikan agama (Pendidikan Agama Islam) sudah masuk dalam kurikulum pendidikan umum sejak tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, tetapi pendidikan agama kadang dilihat oleh siswa atau mahasiswa sebagai mata pelajaran pelengkap. Pendidikan agama sekalipun pokok tetapi sebagian siswa dan mahasiswa masih menempatkannya pada posisi pinggiran (*peripheral*). Barangkali tepat apa yang dikatakan al-Ghazali mengenai perlunya pendekatan keilmuan dalam mendalami ilmu agama yang sifatnya *fardlu 'ain* ini (Al-Ghazali, 1977: 39-73).

Pendekatan keilmuan atau ilmiah yang dimaksud adalah pengetahuan keagamaan yang akan mengantarkan seseorang memiliki kesadaran beragama dalam mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Jika pengetahuan keagamaan yang mendasar disertai pendekatan ilmiah dalam memahami agamanya, maka peluang bagi lahirnya kesadaran beragama menjadi sangat mungkin. Gejala demikian inilah yang sebenarnya diharapkan dari disampaikan pendidikan agama (PAI) di lingkungan pendidikan, terutama pendidikan tinggi.

Hadirin yang saya hormati

D. METODE PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Untuk mengantarkan pendidikan agama yang membawa peserta didik pada kesadaran beragama secara rasional, maka Pendidikan Agama Islam harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah (lihat Q.S. al-'Alaq (96): 1-5). Pendekatan yang semata-mata sifatnya doktrinal dalam menyampaikan ajaran agama tampaknya harus diubah dan diperbarui. Karena kesan yang diterima dari cara-cara yang doktrinal hanya menempatkan peserta didik seba-

gai objek yang pasif dan pada keharusan menerima setiap ajaran agama tanpa melibatkan emosi dan intelektualnya.

Pendidikan Agama Islam yang dilakukan dengan tanpa melibatkan emosi dan intelektualitas seseorang, akan berakibat pada bentuk kehidupan keagamaan yang pasif dan pasrah saja. Untuk menghindari kepasifan dan kepasrahan yang demikian, harus dilakukan perubahan dalam proses Pendidikan Agama Islam. Perubahan itu adalah dengan cara dialogis, dengan melibatkan emosi dan rasionalitas para peserta didik dalam memahami ajaran agama Islam.

Pendidikan Agama Islam harus dilakukan dengan cara dialogis. Keterlibatan emosi dan rasionalitas akan memberikan kepuasan dalam diri seseorang dalam beragama. Dialog-dialog dan percakapan yang kritis ini, terutama dimulai ketika seseorang memasuki pendidikan lanjutan tingkat pertama, yaitu masa seseorang memasuki *aqil-baligh*. Sementara pada pendidikan dasar, pelibatan emosi dan rasionalitas ini disesuaikan dengan tingkat kecerdasan mereka, yaitu dengan mengembangkan rasionalitas sederhana.

Pendidikan agama yang diselenggarakan dengan melibatkan emosi dan rasionalitas diharapkan dapat melahirkan umat beragama yang benar-benar memahami dan memiliki agamanya; seseorang yang menyadari betul kedudukan agama dalam kehidupannya. Kesadaran beragama yang diperolehnya muncul bukan sekadar paksaan doktrinal, melainkan bersandarkan kepada kepehaman terhadap ajaran agama. Beragama dengan cara demikian lebih memberikan kepuasan, karena secara emosional dan rasional dia merasakan manfaat dan nikmat yang diperoleh dari beragama. Agama dilihatnya sebagai anugerah Tuhan yang akan membawa kemanfaatan terhadap kehidupannya.

Ada pendekatan dalam menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam yang bisa dilakukan dan diperkirakan dapat mengarahkan peserta didik pada tingkat emosi dan rasionalitas secara seimbang dan memadai. Menurut Douglas Superka (Atmadi, 2000:77 dan Suyanto, 2006: 84-85) model pendekatan seperti ini sering diberi nama metode VCT (*Value Clarification Technique*). Metode ini meliputi beberapa tahapan pendekatan, antara lain:

Pertama, Pendekatan Evokasi atau Ekspresi Spontan. Pada tahapan pendekatan ini para peserta didik diberi kebebasan dan kesempatan penuh untuk mengungkapkan atau mengekspresikan tanggapan, perasaan, penilaian, dan pandangannya terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Melalui pendekatan ini akan diketahui keterikatan emosional dan rasional peserta didik. Kedudukan atau posisi agama pun akan dapat ditelusuri sejauh mungkin dalam kehidupan peserta didik ini. Melalui pendekatan ini akan terungkap ungkapan yang sifatnya emosional maupun rasional, atau penilaian yang bersifat positif ataupun negatif.

Kedua, Pendekatan Sugestif Terarah. Pada tahapan pendekatan kedua ini peran seorang pendidik sangat menentukan. Pada tahapan ini, melalui stimulus yang sudah direncanakan, peserta didik 'digiring' atau 'diarahkan' secara emosional dan rasional menuju suatu pemahaman atau kesimpulan yang sudah ditentukan. Pada tahapan ini, sekalipun merupakan tahapan 'pengarahan' atau 'penggiringan', tidak berarti tahapan ini didominasi oleh pendidik. Tahapan pendekatan ini tetap melibatkan peran aktif peserta didik.

Ketiga, Pendekatan Pertanyaan Menyelidik (*Inquiry Questioning*). Ketika tahapan pendekatan kedua berlangsung, agar keterlibatan emosi dan rasionalitas peserta didik dapat terpadu dengan baik, maka 'pengarahan' atau 'penggiringan' itu dilakukan melalui pendekatan 'pertanyaan menyelidik' atau *inquiry questioning*. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyelidik ini bisa dilakukan dalam bentuk pertanyaan bersayap (*horizontal*) dan bertingkat (*vertikal*). Pertanyaan-pertanyaan ini berangkat dari persoalan-persoalan yang sangat kongkrit dan sangat sederhana menuju persoalan-persoalan yang bersifat konseptual atau abstrak.

Pertanyaan menyelidik ini bisa diberlakukan untuk semua bidang atau unsur-unsur pokok agama, yaitu akidah, syari'ah, dan akhlaq. Dalam bidang akidah misalnya, berangkat dari pertanyaan mengenai dirinya sendiri bisa diarahkan sampai pada konsep penciptaan yang berpusat kepada Tuhan. Masih berkaitan dengan persoalan dirinya, juga bisa diarahkan sampai pada konsep

ketentuan Tuhan, baik yang berupa syari'at maupun akhlak. Pertanyaan menyelidik ini bisa dilakukan di setiap jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa disiapkan sedemikian rupa oleh pendidik. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, maka peserta didik terlibat secara langsung dalam memahami setiap ajaran agama, sekaligus juga membangun emosionalitas mereka secara rasional.

Melalui tiga tahapan pendekatan di atas diharapkan akan menghasilkan apa yang disebut kesadaran beragama (*religious consciousness*). Secara keseluruhan pendekatan yang demikian, seperti dikemukakan Kohlberg (Atmadi, 2000:78) dapat disebut dengan *Cognitive Moral Development* (Pembangunan Moral Secara Kognitif). Melalui pendekatan ini, Pendidikan Agama Islam dapat benar-benar memberikan sumbangan tidak hanya dalam membangun kesadaran bergama, tetapi juga amaliah keagamaan mereka, dalam bentuk amal shalih.

Hadirin yang saya hormati

E. KESIMPULAN

Dari paparan di depan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Afiliasi seseorang untuk menjadi pengikut suatu agama tertentu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui model afiliasi tradisional dan afiliasi rasional. Kedua cara ini memiliki implikasi yang berbeda, antara lain melihat agama sebagai sebuah 'paksaan' di satu sisi, sementara di sisi lain agama dilihatnya dengan penuh kesadaran karena merupakan cara Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan manusia.
2. Untuk menuju kesadaran keagamaan yang utuh, maka setiap umat beragama harus memenuhi dimensi-dimensi keagamaan secara keseluruhan. Dimensi-dimensi itu ialah: dimensi keyakinan, dimensi peribadatan, dimensi pengalaman, dimensi pengamalan dan dimensi pengetahuan. Dari dimensi tersebut, dimensi pengetahuan sangat berperan terhadap munculnya kesadaran keagamaan.
3. Agar kesadaran keagamaan itu muncul dengan baik dalam ke-

hidupan seorang penganut agama, maka model pendidikan agama sangat menentukan. Untuk itu, model pendidikan keagamaan yang harus dikembangkan tidak lagi semata bersifat doktrinal, dengan menekankan serangkaian ajaran dan kewajiban kepada pemeluk agama. Pendidikan agama harus dilakukan dengan melibatkan emosi dan rasionalitasnya. Pelibatan emosi dan rasionalitas ini tentu saja disesuaikan dengan tingkat kecerdasan peserta didik.

4. Pendidikan agama yang akan mengantarkan pada kesadaran keagamaan (*religious consciousness*) dapat dilakukan melalui metode *Value Clarification* dan *Cognitive Moral Development* yang meliputi pendekatan ekspresi spontan, sugestif terarah dan pertanyaan menyelidik.

Hadirin yang saya hormati

F. PENUTUP

Sebagai penutup dari pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya mencapai jabatan Guru Besar ini.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah mengangkat saya dalam jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Ucapan terimakasih, juga saya sampaikan kepada Rektor/Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta, Dekan FISE, Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Kaprodi Ilmu Sejarah FISE UNY, dan U-MKU UNY, atas semua dukungannya sehingga saya dapat mencapai jenjang ini.

Rasa terimakasih juga saya sampaikan kepada tim tujuh, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Wuradji, MS, yang telah memberi arahan berkenaan dengan bidang keahlian dalam guru besar ini, yaitu Pendidikan Agama Islam. Demikian juga dengan tim penyelaras pidato guru besar ini, yang terdiri dari Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA, Prof. Dr. Wuradji, MS, Prof. Dr. Nurfina Aznam, SU, Apt., Prof. Darmiyati Zuchdi, Ed. D., Prof. Dr. Abdul Gafur D., dan Prof. Dr. Husain Haikal, atas semua masukannya.

Ucapan terimakasih saya sampaikan pula kepada semua rekan-rekan dosen baik di Jurusan Pendidikan Sejarah, Unit MKU, dan FISE umumnya, atas semua dukungannya. Kerjasama dan suasana akademik yang dibangun selama ini, ternyata telah memberikan dorongan kepada saya untuk sampai pada jenjang Guru Besar ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada seluruh guru SDN Kertahayu IX Pamarican, MTs N Pamarican, terutama Bapak (alm) Jaenuddin, atas bimbingannya, sehingga saya bisa mengikuti Jambore Nasional Pertama di Sibolangit Sumatera Utara. Semua pembimbing dan guru di Pondok Pesantren-MAN Darussalam Ciamis, terutama (alm) K.H. Irfan Hielmy (Kang Irfan), atas semua bimbingan dan nasehatnya yang sangat mendalam dan berkesan, karena itulah nama-nama dari ketiga anak saya terkait dengan nama beliau dan pesantrennya; juga kepada seluruh dosen di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Agama, terutama (alm) Bapak Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, atas kuliahnya selama 4 semester di tingkat Doktoral, yang dalam satu semester bisa mencapai 36 pertemuan, padahal untuk mata kuliah 2 SKS. Ucapan terima kasih yang dalam juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Karel Andrian Steenbrink, selaku pembimbing skripsi saya di S1. Beliau inilah orang kedua setelah (alm) Prof. Dr. HA Mukti Ali, yang telah melecut saya untuk menulis skripsi sebaik mungkin, dan pinjaman bukunya yang demikian banyak, sehingga skripsi tersebut akhirnya diterbitkan oleh penerbit Bumi Aksara Jakarta pada tahun 1995.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan pula kepada Prof. H. Ahmad Syaffi Maarif, Ph.D., selain sebagai promotor saya, beliau juga pembimbing, guru, dan sejawat yang selalu mendorong dan memotivasi saya untuk terus maju. Saya sangat tertantang dan terkesan begitu dalam, ketika pada awal tahun 2000an, beliau meminta saya untuk mendampinginya di Program Pascasarjana UNY, ketika itu beliau mengatakan “Anda pasti bisa”.

Ucapan terimakasih yang sangat dalam, juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. H. Jammanuri, MA., selaku promotor saya, yang

juga merupakan dosen saya di S1, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, masukan, dan juga nasehat-nasehatnya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak kelas saya, Dr. Sekar Ayu Ariyani, yang sekarang sebagai Wakil Rektor I UIN Suka Yogyakarta, yang ketika S1 selalu *menjewer* saya dalam berbagai kegiatan dan juga mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi. Juga kepada Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen, yang telah mendorong saya pada tahun 1989, untuk melamar jadi dosen di IKIP Negeri Yogyakarta. Juga semua sejawat di Ikatan Alumni Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ikatan Alumni Darussalam, Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam (ADPISI), baik pusat maupun daerah, atas semua dukungannya, dan juga keluarga besar Takmir Masjid al-Mujahidin, LPIM, Penge-lolan Tutorial dan UKKI Universitas Negeri Yogyakarta.

Doa yang tulus, senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah Swt, untuk ayahanda (alm) Bapak Muslih Supono, semoga beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Swt, demikian juga untuk (almrh) Ibu Mertua saya, Ibu Parsiah. Rasa hormat dan doa yang tulus, juga senantiasa saya panjatkan untuk Ibunda Hj. Alfiah, dan Bapak Mertua Hj. Supardi, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan ketenteraman, sehingga dapat memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Swt. Mereka itulah, yang dengan kasih sayang dan doanya yang tulus, dan juga keteladanannya, telah menjadi penyemangat dan dorongan bagi keberhasilan saya dan keluarga.

Kepada adik-adik saya, Drs. Solihin Salam, Mukhlas Iskandar, dan Sofyan Abdullah, masing-masing beserta keluarga dan putera-puterinya, saya ucapkan terima kasih yang dalam atas perhatian dan kasih sayang yang selama ini terjalin dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak dan adik ipar saya, Mas Suwanto dan adik Hasan Tri Hartono, A.Md., masing-masing dengan keluarganya, atas jalinan kasih sayang yang terbina selama ini.

Doa dan ucapan terimakasih yang tulus, juga saya sampaikan secara khusus untuk keluarga Bapak Duriyat (alm dan almrh), semoga Bapak dan Ibu Duriyat (alm dan almrh) mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah swt. Terima kasih yang dalam saya

sampaikan secara khusus kepada keluarga Ibu Dr. H. Siti Irine Dwiningrum dan Ir. Setiawan Hardan, M.Sc., beserta keluarga besar Duriyat, atas semua kebaikannya selama ini, sampai-sampai Ibu Duriyat (almrh) memasukkan saya sbagai bagian dari keluarga besarnya.

Ucapan terimakasih yang sangat dalam dan tiada terhingga atas kesabaran, ketulusan, keihlasan, kasih sayang, kesetiaan, canda dan tawa, saya sampaikan untuk isteri saya tercinta lim Wartimah. Demikian juga atas pengertian, perhatian, dukungan, dan canda dari anak-anak saya tersayang: Muh. Hielmy Zaenul Ala, Muh. Irfan Zaky Mubarrak, dan Fitri Tsalisa Fadlilarahma, yang senantiasa menjadi sumber energi dan kebahagiaan keluarga.

Kepada hadirin yang telah dengan sabar dan penuh perhatian mengikuti pidato pengkuhan ini, saya sampaikan terima kasih. Saya mohon doa restu agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Guru Besar dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Amien.

Billahi al-taufiq wa al-hidayah

Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih (ed.). (2000). *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Djamari. (1988). *Agama Dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti.
- Endang Saifuddin Anshary. (1979). *Ilmu, Filsafat, dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Geertz, Clifford. (1989). *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Al-Ghazali. (1977). *Ihya Al-Ghazali*. Terj. Tk. H. Ismail Yakub. Kudus: Menara Kudus.
- Jamaluddin Ancok (ed.). (1994). *Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nottingham, Elizabeth K. (1985). *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Terj. Abdul Muis Naharong, Jakarta: Rajawali Press.
- Robertson, Roland (ed.). (1972). *Sociology of Religion*. Victoria: Penguin Books Australia Ltd.
- Sastrapratedja (ed.). (1982). *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Suyanto. (2006). *Di Belantara Pendidikan Bermoral*. Yogyakarta: UNY Press.
- Thoules, Robert H. (1992). *Pengantar Psikologi Agama*. Terj. Machnun Husein, Jakarta: Rajawali Press.
- Uren, A. Rudolph. (1928). *Recent Religious Psychology*. Edinburgh: T. & T. Clark.
- Wach, Joachim. (1984). *Ilmu Perbandingan Agama*. Terj. Djamannuri. Jakarta: Rajawali Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas:

1. Nama Lengkap	Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag
2. NIP	131862252/19620321 198903 1 001
3. Nomor Sertifikat Pendidik	091103817220090
4. NPWP	59.744.335.7-542.000
5. Jabatan	Guru Besar/1 Oktober 2010
5. Pangkat dan golongan	Pembina Muda TK I /IVc
6. Tempat dan Tanggal lahir	Ciamis, 21 Maret 1962
7. Alamat Kantor	1. Jurusan Pendidikan Sejarah, Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY(0274) 586168, pswt.582) 2. Unit MKU UNY (0274) 586168, pswt. 251).
8. Alamat Rumah	Jl. Candi Sambisari, RT. 04/RW 01, Dusun Kadirojo I, Purwamartani-Kalasan Sleman
9. No. Hp.	08122751512
10. No. E-mail	ajat@uny.ac.id/ajat_sej@yahoo.co.id
11. Mata Kuliah	1. Pendidikan Agama Islam (UNY) 2. Filsafat Sejarah (Pendidikan dan Ilmu Sejarah) 3. Sejarah Asia Barat (Ilmu Sejarah) 4. SKI Islam (Ilmu Sejarah) 5. Sosiologi Agama (Pendidikan Sosiologi) 6. Seminar Proposal Tesis (Pasca UNY) 7. Perilaku Moral (Pasca UNY)
12. Isteri	lim Wartimah (5 April 1973)
13. Anak	1. Muh. Hielmy Zainul Alam (26 Sept. 1992). 2. Muh. Irfan Zaky Mubarrak (10 Sept. 1997). 3. Fitri Tsalisa Fadlilarahma (26 Desember 2001).

2. Riwayat Pendidikan:

Tahun	Pendidikan
1974	Lulus SD Negeri Kertahayu IX Pamarican, Ciamis, Jawa Barat
1977/78	Lulus M Ts N Banjar, Ciamis, Jawa Barat
1980/81	Lulus MAN Darussalam, Ciamis, Jawa Baatr
1987/88	Lulus dari Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1995	Lulus S2 Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta (UIN)
2009	Lulus Doktor (S3) di UIN Yogyakarta (27 Februari).

3. Riwayat Pekerjaan:

Tahun	Pekerjaan
1990– sekarang	Dosen pada Unit MKU UNY dan Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah, Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Univeritas Negeri Yogyakarta
1991 – 2000	Dosen Luar Biasa pada IAID Ciamis Jawa Barat
1999 – 2004	Asisten Prof. H.A. Syafii Maarif, Ph.D. pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta
2000 – 2006	Dosen Luar Biasa pada Politeknik PPKP Yogyakarta
2002 – 2003	Konsultan pada Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas dalam penyusunan Buku Panduan KBK untuk Rumpun Pendidikan Agama
2009 - Sekarang	Dosen Pasca Sarjana UNY

4. Penelitian:

Tahun	Judul Penelitian	Sumber & Jmlh Dana
1991	Etos Kerja dan Kesadaran Beragama Para Pedagang Pertokoan Kotagede Yogyakarta	DIKS
1992	Perkawinan Di Usia Mahasiswa	DIKS
1995	Pemikiran Teologis K.H. Ahmad Rifa'i dari Kalisalak Pekalongan (Tesis)	
1996	Pelaksanaan Tutorial Pendidikan Agama Islam dan Religiositas Mahasiswa Muslim di IKIP Yogyakarta	DEPAG
1997	Menonton Televisi dan Kehidupan Keagamaan Anak- Anak Keluarga Muslim Dusun Mlangi Nogotirto Gamping Sleman DIY	DIKS
1999	Tradisi Dzikiran Sya'banan Di Dusun Kadirojo Purwamartani Kalasan Sleman DIY	DIKS
1999 - 2000	Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kalangan Siswa SMU Yogyakarta (Penelitian Latihan Kelompok)	DEPAG
1999 - 2000	Persepsi Ulama Terhadap Perbedaan Peran Gender di Kabupaten Bantul DIY (Penelitian Kelompok dengan Biaya dari DIKTI)	DIKTI
1999 - 2000	Kerukunan Umat Beragama Dalam Teks Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum (Penelitian Kelompok atas biaya Depag RI)	DEPAG
1999 - 2000	Model Pendidikan Luqman Al-Hakim di Dalam Al-Qur'an (Penelitian Kelompok)	DIKS
2002	Hadis-Hadis Tentang Perempuan Yang Bersifat Mesogonik (Kelompok)	DIKTI

2005	Jerusalem: Kota dalam Sengketa (Mandiri)	DIPA
2007	Situs Ambarketawang Sebagai Laboratorium Alam Pendidikan Sejarah	DIPA
2008	Konsep Pendidikan Dalam Pemikiran Konfusius	DIPA
2009	Membangun Kultur Akhlak Mulia di Kalangan Siswa Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah di Indonesia	DPPM/ DIKTI Ketua
2009	Studi Realitas dan Ekspektasi Terhadap Rasio Dosen PAI-Mahasiswa PTU, Kompetensi Dosen PAI dan Kelembagaan PAI pada PTU di DIY dan Jateng	DPPM/ DIKTI Anggota
2010	Pembentukan Karakter Terpuji di SD Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta (dalam proses).	DIPA UNY
2010	Corak Berpikir Keagamaan dan Toleransi (Studi Kasus Mahasiswa Aktivistis Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta)	DPPM/ DIKTI Anggota

5. Penulisan Karya Ilmiah:

Tahun	Judul Karya Ilmiah
1991	Mesianisme Dalam Protes Sosial (Kasus Perjuangan Petani di Jawa Abad XIX dan XX (<i>Cakrawala Pendidikan</i> No. 2, Th. X, Juni 1991, IKIP YK)
1992	Tesis Weber dan Islam di Indonesia (<i>Cakrawala Pendidikan</i> , No. 1, Th. XI, Februari, IKIP YK)
1992	Membangun Kesadaran Yang Berorientasi Teologi (Jurnal <i>Informasi</i> , No. 1, Th. XX, April 1992, FPIPS IKIP YK).
1993	Kekuasaan dan Elit Politik dalam Islam (<i>Cakrawala Pendidikan</i> , No. 3, Th. XII, November, IKIP YK)
1994	Imam Al-Khumaini dan Negara Republik Islam Iran (<i>Cakrawala Pendidikan</i> , No. 1, Th. XV, Februari, IKIP YK)
1995	Islam, Pendidikan, dan Masyarakat (<i>Cakrawala Pendidikan</i> , No. 3, Th. XV, November, IKIP YK)
1996	Haji dan Jaringan Ulama Indonesia (Jurnal <i>Informasi</i> , No. 2, Th. XXV, FIS IKIP YK)
1997	Perkembangan Lembaga Pendidikan di Indonesia (<i>Tajdid</i> , No. 5, Tahun IV/1997 IAID Ciamis)
1998	Perang Diponegoro: Antara Gerakan Mahdisme dan Mistisisme Islam (<i>Cakrawala Pendidikan</i> , No. 1, Th. XVII, Februari, IKIP YK)
1999	Pendidikan Agama Islam Menuju Masyarakat Madani (<i>Cakrawala Pendidikan</i> , No. 3, Th. XVIII, Juni, IKIP Yogyakarta)

2000	Pendidikan Ideologis Dalam Sistem Pendidikan Nasional (<i>Cakrawala Pendidikan</i> , Edisi Khusus Dies, Mei, IKIP YK)
2000	K.H. Ahmad Rifa'i dan Gerakan Protes Sosial Abad 19 (<i>Jurnal Informasi</i> , No. 1, Th. XXVIII, FPIPS IKI YK)
2000	Perkembangan Islam Di Singapura (<i>Jurnal Informasi</i> , No.3, Th. XXIX, FIS UNY)
2000	Islam Politik Sebagai Oposisi Loyal (<i>Jurnal Perspektif</i> , Edisi 2/Tahun III/November IKADA YK)
2001	Pendidikan Agama Menuju Pembangunan Kesadaran Religiositas (<i>Cakrawala Pendidikan</i> , No. 2, Th. XX, Mei, UNY)
2002	Agama dan Perilaku Politik (<i>Jurnal Humanika UPT MKU-UNY</i> , No. 1. Th. 1. 2002)
2004	Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi dalam Perspektif Islam (<i>Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial FIS UNY, SOCIA</i> , Volume 1, Nomor 1, Mei 2004).
2004	Pendidikan Moral dalam Perspektif Islam (<i>Jurnal Humanika UPT MKU-UNY</i> , Volume 4 Nomor 1, Mei-Agustus 2004)
2004	Islam dan Demokrasi (Masalah Adaptasi Parsial) (<i>Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial</i> , Vol. V, No. 5, Oktober 2004, FKIP Universitas Jember).
2006	Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Moral Bangsa. <i>Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran</i> . FKIP Universitas Lampung. Volume 4 Nomer 1, Marer 2006./Teakreditasi
2006	Koneksi Perdagangan Mediterania: Interaksi Dunia Islam dan Eropa Kristen Abad Pertengahan, <i>Istoria</i> , Vol. 1, Nomor 2 Maret 2006.
2006	Pornografi dalam Lintasan Sejarah. Unit MKU UNY. <i>Jurnal Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum</i> . Volume 6 No. 1, Maret 2006.
2006	Relasi Islam dan Kristen: Beberapa Faktor Pengganggu. FKIP Universitas Lampug. <i>Jurnal Mainstream: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora</i> . Vol. 6 No. 2 Meri 2006.
2006	Kajian Sosiologi Makna Pendidikan Bagi Penanaman Nilai-Nilai Budaya Bangsa. LPM IAIN Sunan Ampel, <i>El-Ijtima: Media Komunikasi Pengembangan Masyarakat Madani</i> . Vol. 7 No, 2, Juli-Desember 2006.
2006	Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah dan Ham Universal), <i>Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial</i> FKIP Universitas Jember. Vol. VII, No.3, Oktober 2006/Terakreditasi.
2006	Penerapan Kembali Syariah dalam Kehidupan Bermasyarakat. Fakultas Hukum Universitas YARSI. <i>Jurnal YARSI</i> , Vol. 3 No. 3 Nopember 1006.
2008	Nasionalisme di Dunia Islam. Program Studi Ilmu Sejarah FISE UNY. <i>MOZAIK</i> , Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume III, Nomer, 1 Juli 2008.

2009	Jerusalem: Kota dalam Sengketa, <i>Tajdid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam dan Kebudayaan</i> , Vol. 16 No. 2 September 2009.
2009	Al-Quran dalam Perpektif Budaya, <i>Humanika</i> , Vol. 9 Nomor 1, Maret 2009.
2009	Khilafah Islamiyah dalam Lintasan Sejarah. <i>INFORMASI</i> , No. 2, XXXV Th. 2009.
2010	Sejarah dan Peradaban: Sketsa Pemikiran Malik Binnabi. <i>MOZAIK</i> , Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume V, Nomer, 1, Januari 2010.
2010	Membangun Karakter Akhlak Mulia pada Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah di Indonesia, <i>Jurnal Kependidikan</i> , Lembaga Penelitian UNY,
2010	Kedudukan al-Ruh dalam Pementukan Karakter Manusia, <i>Proceding Seminar Nasional Membangun Pendidikan dalam perspektif Karakter dan Kebangsaan FISE UNY</i> , 12 Mei 2010.

6. Kegiatan Seminar, Lokakarya, Penataran, Workshop

No	Nama, Tempat, dan Waktu Kegiatan	Jenis Partisipasi	
		Penyaji	Peserta
Tahun 1999			
1	Pemikiran Politik Abul A'la Maududi, disampaikan dalam Kajian Ramadhan di Masjid Kuningan Yogyakarta	✓	
Tahun 2000			
1	Pemikiran Politik Islam pada Periode Klasik, disampaikan pada Kajian Rutin elemen Masjid al-Mujahidin UNY (Ta'mir, UKKI, dan Tutor PAI).	✓	
Tahun 2001			
1	Penulisan Karya Ilmiah, disampaikan pada Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah untuk guru-guru SD se Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bantul, pada tanggal 12 Agustus 1999, di Kantor Diknas Bantul.	✓	
2	Integrated Learning untuk Pendidikan Agama Islam di SLTP, disampaikan dalam Pelatihan Guru-Guru SLTP, bertempat di PPG Matematika Yogyakarta	✓	
Tahun 2002			
1	Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Teks Buku PAI pada Perguruan Tinggi Umum, disampaikan dalam Temu Dosen PAI se Jawa di Kantor Subdit PTU Depag Jakarta, pada tanggal 3 April 2000.	✓	

Pendidikan agama Islam yang ilmiah

2	Aneka Warna Suku Bangsa di Indonesia dan Masalah Integrasi Nasional, disampaikan dalam Pelatihan Sosiologi-Antropologi Guru-Guru MAN se DIY, pada tanggal 23 Oktober 2001 di PPG Matematika Yogyakarta.	✓	
3	Agama dan Perilaku Politik , disampaikan dalam rangka Mapolid KAMMI UNY, pada tanggal 2 Maret 2002, di Masjid al-Mujahidin UNY.	✓	
4	Islam dan Demokrasi: Pengalaman di Indonesia, disampaikan dalam kajian rutin elemen Masjid al-Mujahidin UNY (Ta'mir Masjid al-Mujahidin, UKKI, Tutorial PAI, dan KAMMI UNY), pada tanggal 29 Maret 2002, di Masjid al-Mujahidin UNY.	✓	
5	Hasan al-Banna dan Perjuangan Ikhwanul Muslimin, disampaikan dalam kajian SOLID UNY	✓	
6	Memberikan materi tentang Evaluasi Keberhasilan PAI di Perguruan Tinggi Umum, Kerjasama Departemen Agama RI dengan Universitas Islam Indonesia, bertempat di PPPG Matematika YK. 25 Mei 2002	✓	
7	Seminar Nasional Reorientasi Peran Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Menyongsong Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi		✓
Tahun 2003			
1	Kehidupan dan Perjuangan Politik Nabi Muhammad SAW, disampaikan dalam kajian SOLID-KAMMI UNY.	✓	
2	Kehidupan Politik Pada Masa Khulafa al-Rasyidin, disampaikan dalam Kajian SOLID-KAMMI UNY.	✓	
3	Melakukan Supervisi Keterlaksanaan KBK di SMU Negeri 3 Subang dan SMU Muthahhari Bandung (Tugas dari Direktorat PMU kerja sama dengan PPS UNY). 24-27 Februari 2003		
4	Menjadi Konsultan di Direktorat PMU untuk Program Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan BBE-LS. Mei-Desember 2003		
5	Mengikuti Workshop Fasilitator Pusat dalam Persiapan Implementasi KBK dan LS di Direktorat PMU Jakarta. 28-30 April 2003		✓
6	Seminar Nasional Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Ilmu Sosial, FIS UNY, 11 Mei 2003.		✓

7	Mengikuti Workshop Persiapan Sosialisasi KSPBK SMU di Hotel Graha Dinar, Jl. Raya Puncak Km. 79 – Cisarua Bogor (Tugas dari Direktorat PMU) 13-15 Mei 2003		✓
8	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pelatihan KBK tingkat SMU untuk Rumpun Agama di PPPG Keguruan Parung Bogor (Tugas dari Direktorat PMU). 23 – 24 Juni 2003	✓	
9	Menjadi Penatar pada TOT KBK untuk SMU bagi Fasilitator/Widyaiswara BPG seluruh Indonesia di PPPG Keguruan Jakarta, Parung-Bogor (Tugas dari Direktorat PMU) 23-28 Juni 2003	✓	
10	Malaksanakan Uji Keterbacaan Pedoman Silabus dan Sistem Penilaian Program BBE-LS di Propinsi Sulawesi Tengah (Tugas dari Direktorat PMU). 15-16 Septem. 2003	✓	
11	Melakukan Supervisi, Inventarisasi Kondisi dan IHT di SMU Negeri 1 dan SMU Negeri 10 Ambon (Tugas dari Direktorat PMU) 12-17 Oktober 2003	✓	
12	Melaksanakan TOT, Supervisi, Inventarisasi Kondisi, dan IHT Keterlaksanaan Kurikulum 2004 di SMU Negeri 11 Yogyakarta (Tugas dari Direktorat PMU). 13- 16 Januari 2004	✓	
Tahun 2004			
1	Melaksanakan TOT, Supervisi, Inventarisasi Kondisi, dan IHT Keterlaksanaan Kurikulum 2004 di SMU Gotong Royong Semin Yogyakarta (Tugas dari Direktorat PMU). 17-19 Januari 2004	✓	
2	Menjadi Nara Sumber dalam Workshop KBK Guru SMU Muhammadiyah Sewon, bertempat di Gedung Muhammadiyah DIY, Jl. Gedongkuning 130 B Yogyakarta. 23-25 Januari 2004	✓	
3	Menjadi pembicara dalam SOLID KAMMI DIY, bertempat di Masjid Mujahidin UNY. 27 Januari 2004	✓	
4	Menjadi pembicara dalam SOLID KAMMI DIY, bertempat di Masjid Mujahidin UNY. 3 Februari 2004	✓	
5	Malaksanakan pengumpulan data tentang Dampak Ujian Akhir Nasional tingkat SMP/Mts, SMA/MA, dan SMK tahun pelajaran 2003/2004 di Propinsi Kalimantan Selatan (Tugas dari Balitbang Puspendik Departemen Pendidikan Nasional). 12-18 Mei 2004	✓	

Pendidikan agama Islam yang ilmiah

6	Menjadi Tim Mapel pada TOT Fasilitator KBK untuk SMP di Pusdiklat HAM dan Kehakiman Jl. Gandul Cinere Jakarta (Tugas dari Direktorat PLP). 14-28 Juni 2004	✓	
7	Menjadi Tim Akademik dan Tim Mapel pada Pelatihan KBK untuk SMP Region Bali, bertempat di LPMP Denpasar Bali (Tugas dari Direktorat PLP) 19-25 Juli 2004	✓	
8	Menjadi Tim Akademik dan Mapel pada Pelatihan KBK SMP di Kalimantan Selatan, bertempat di LPMP Banjarmasin (Tugas dari Direktorat PLP) 10-16 Agust. 2004	✓	
Tahun 2005			
1	Meneladani Akhlak dan Perjuangan Shalahuddin al-Ayyubi, disampaikan dalam forum UKM WAMIKA STMIK AKAKOM Yogyakarta	✓	
2	Pelatihan Powerpoint, P3AI UNY, 24-25 Juni 2005		✓
3	Seminar "Ahmad Syafii Maarif: antara Pemikiran dan Pendidikan Sejarah", FIS UNY, 16 Juli 2005.	Mod.	
4	Seminar Kebebasan Beragama antara Hakikat dan Kenyataan: Telaah Multi Perspektif dalam Konteks Pluralitas, Universitas Katolik Soegiyapranata Semarang, 1 Oktober 2005.		✓
Tahun 2006			
1	Saatnya Khilafah Memimpin Dunia dengan Syariah, disampaikan dalam Diskusi Intelektual yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia Wilayah Yogyakarta, 18 April 2006, di Masjid Mujahidin UNY Yogyakarta	✓	
2	Menjadi Tim Akademik Mapel Pendidikan Agama Islam pada Workshop Tim Pengembang Kurikulum SMP Tahun 2006 di Riau, bertempat di Hotel Furaya, Jln Jenderal Sudirman no. 72-72 Pekanbaru, Telp. 0761-26688. 30 Juni -7 Juli 2006		
3	Lokakarya Integrasi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian ke dalam Mata Kuliah Fakultas, UPT MKU kerjasama dengan P3AI UNY, 9 Agustus 2006	Mod	✓
4	Seminar Internasional "Reinventing Paradigms of Social Studies in Indonesia", HISPISI, Hotel Garuda Yogyakarta, 11-13 Agustus 2006.		✓
5	Lokakarya Model Pendampingan Tutorial Pendidikan Agama Islam, UPT MKU UNY, 6 September 2006		✓
6	Pelatihan Class Action Research, SP4 Pendidikan Sejarah FIS UNY, 9 September 2006		✓

2007			
1	Menjadi Nara Sumber dalam Bintek KTSP SMP TPK Propinsi di Hotel Dinasti Makasar, Tanggal 21-27 Juli 2007	✓	
2	Seminar dan Workshop Model Sosialisasi dan Implementasi Integrasi Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan Ke dalam Mata Kuliah, Tanggal 26-27 Juli di Gedung Rektorat UNY		✓
3	Ofisial MTQ Mahasiswa Tingkat Nasional, 28 Juli -2 Agustus 2007, di Universitas Sriwijaya Palembang.		✓
4	Seminar Implementasi Nilai-Nilai Moral Keagamaan dan Kebangsaan dalam Kehidupan Kampus, Tanggal 14 Agustus 007 di Gedung Rektorat UNY		✓
5	Mengikuti Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di Universitas Sebelas Maret, Tanggal 1 September 2007		✓
6	Kajian dan Perumusan Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan dan Penanganan Terorisme di Indonesia, Tanggal 8 November 2007, di Hotel Melia Purosani Yogyakarta		✓
2008			
1	Seminar Pendirian Museum Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, Tanggal 25 Februari 2007, di Gedung Rektorat UNY		✓
2	Workshop Persiapan BINTEK KTSP dan VERIFIKATOR SMP TPK Propinsi, di HoteL LPP Convention, Tanggal 6-10 Maret 2008		✓
3	Menjadi Nara Sumber dalam Bintek KTSP SMP TPK Propinsi di Hotel Graha Dinar Cisarua Bogor, Tanggal 17-21 Maret 2008	✓	
2009			
1	Seminar Nasional "Paradigma Baru Mutu Pendidikan di Indonesia" dalam rangka Dies Natalis UNY ke-45, 29 April 2009.		✓
2	Menjadi Nara Sumber dalam Bintek KTSP SMP TPK Propinsi di Hotel Hotel Country Heritage Surabaya, 1-5 Juni 2009.	✓	
3	Seminar Kerjasama FISE UNY- Kedaulatan Rakyat "Kabinet SBY 2009-2014 dalam Konteks Sosio Kebangsaan". Tanggal 8 September 2009.		✓
4	Pelatihan Jurnalistik FISE UNY, 26 Oktober 2009.		✓

Pendidikan agama Islam yang ilmiah

5	Seminar Nasional “Pengembangan Kurikulum Ilmu Sosial Berorientasi Pada Profesionalisme Tenaga Kependidikan”, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja-Bali, 30 Oktober 2009.		✓
6	Pelatihan Pembelajaran IPS Untuk Dosen FISE UNY, 6-7 November 2009.		✓
7	Pelatihan IT untuk Dosen FISE UNY, 18 November 2009.		✓
2010			
1	Sejarah dan Peran Masjid al-Mujahidin Yogyakarta	✓	
2	Studum General Sekolah Khatib UNY dengan makalah “Dakwah Kampus: Antara Peluang dan Tantangan”, 27 Maret 2010, di Gedung Dekanat Lt. 2. FPMIPA UNY	✓	
3	Pidato Ilmiah pada Wisuda Sarjana STAIMS (Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada) Yogyakarta, Tanggal 31 Maret 2010, di Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY.	✓	
4	Seminar Nasional FISE UNY dengan tema “Membangun Pendidikan dalam Perspektif Karakter dan Kebangsaan”, tanggal 12 Mei 2010 di Ruang Ki Hajar Dewantara FISE UNY.		
5	Pemakalah dalam Paralel Sessioan dalam rangka Seminar Nasional Membangun Pendidikan dalam Perspektif Karakter dan Kebangsaan dengan judul: Kedudukan al-Ruh dalam Pembentukan Karakter Manusia, pada tanggal 12 Mei 2010, di Ruang Sidang Dekan FISE UNY.		
6	Nara sumber pada BINTEK Pengembangan KTSP dan Soal Terstandar Direktorat Pembinaan SMP, di Hotel Furaya Pekanbaru – Riau, tanggal 17 – 21 Mei 2010.		
7	Nara sumber pada BINTEK Pengembangan KTSP dan Soal Terstandar Direktorat Pembinaan SMP, di Hotel The Sun Sidoarjo-Surabaya, pada tanggal 23-27 Mei 2010.		
8	Nara sumber pada BINTEK Pengembangan KTSP dan Soal Terstandar Direktorat Pembinaan SMP, di Hotel Singgasana – Makasar, tanggal 2 – 7 Juni 2010.		
9	Mengikuti Pelatihan Penilaian Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD sampai SMA, yang diselengakan Oleh BSNP-PUSBUK, di Hotel Safari Garden Cisarua Bogor, pada tanggal 7-9 Juni 2010.		

10	Mengikuti Penilaian Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD sampai SMA, yang diselenggarakan Oleh BSNP-PUSBUK, di Hotel Safari Garden Cisarua Bogor, pada tanggal 18-23 Juni 2010.		
----	--	--	--

7. Penulisan Buku/Diktat:

Tahun	Judul Diktat/Buku
1995-2001	Din Al-Islam (Pengantar Kuliah PAI di UNY) (Buku-Penerbit Percetakan IKIP/UNY)
1997	Etika Protestan dan Kapitalisme Barat Relevansinya dengan Islam di Indonesia (Buku-Penerbit Bumi Aksara, Jakarta)
1997	Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern (Buku Terjemahan, Penerbit Titian Ilahi Press, Yogyakarta)
2000	Sejarah dan Studi Pemikiran Dalam Islam (Diktat)
2000	Pemikiran Politik Islam Kontemporer (Diktat)
2000	Pluralisme dan Integrasi Nasional (Diktat)
2001	Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan (Buku Terjemahan, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta)
2002	Din Al-Islam (Buku-UPT Percetakan UNY)
2002	Pendidikan Agama Islam di PTU (Diterbitkan Depag RI).
2003	Agama Islam (Buku-PPKP Press)
2004	Pendidikan Agama Islam 1 SMP (Mediatama, Surakarta)
2004	Pendidikan Agama Islam 1 SMA (Mediatama, Surakarta)
2009	Perang Salib dan Kebangkitan Kembali Ekonomi Eropa (Leutika, Yogyakarta)
2010	Agama dan Gerakan Protes Sosial: Pemikiran Teologi Kyai Haji Rifai (M3, Yogyakarta)

8. Pengabdian Pada Masyarakat:

Tahun	Judul	Sumber & Jmlh Dana
1990	Pelatihan Perawatan Jenazah pada Masyarakat Pendowoharjo Sleman	DIKS
1996	Pelatihan Perawatan Jenazah pada Masyarakat Kadirojo	DIKS
1998	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Keagamaan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Gunungkidul	DIKS

Pendidikan agama Islam yang ilmiah

2000	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Sekolah Dasar Se Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Banguntapan	DIKS
2001	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Sekolah Dasar Se Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bantul	DIKS
	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Keagamaan di Pondok Pesantren Pabelan	DIKS
2004	Pelatihan KBK Guru SMU Muhammadiyah Sewon 23-25 Januari 204	
2005	Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan Pembelajaran TPA di Pedesaan, Rejosari, 31 Juli 2005.	DIPA
2007	Menjadi Nara Sumber dalam Bintek KTSP SMP TPK Propinsi di Hotel Dinasti, Tanggal 21-27 Juli 2007	
2008	Menjadi Nara Sumber dalam Bintek KTSP SMP TPK Propinsi di Hotel Graha Dinar Sisarua Bogor, Tanggal 17-21 Maret 2008	
2009	Menjadi Nara Sumber Bimbingan Teknis Pengembangan KTSP Bagi Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota Tahun 2009, yang dilaksanakan Hotel County Haitage, Surabaya-Jawa Timur, Tanggal 1 s/d 5 Juni 2009.	
2010	Studium General Sekolah Khatib UNY dengan makalah "Dakwah Kampus: Antara Peluang dan Tantangan", 27 Maret 2010, di Gedung Dekanat Lt. 2. FPMIPA UNY	

EPILOG

MERINTIS MAZHAB KARANGMALANG¹

DR. SUHARNO, S.PD., M.SI.

Penulis adalah Doktor Kebijakan Publik, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Program Pascasarjana UNY

Laju pembangunan dan perubahan sosial di Indonesia, dan dunia, kontemporer menuntut peran besar perguruan tinggi. Di usianya yang memasuki 51 tahun, Universitas Negeri Yogyakarta menghadapi tuntutan yang sama.

Dunia pendidikan pasca 70 tahun kemerdekaan RI dihadapkan pada dua tantangan pokok. Pertama, pendidikan tidak atau belum betul-betul menjadi panglima. Melihat bagaimana presiden ke presiden mengambil kebijakan dasar sebagai pijakan pembangunan negara bangsa, kita pernah mendapati politik sebagai panglima, pada masa Presiden Soekarno. Semua aspek fundamental bernegara mulai dari ekonomi pembangunan hingga pertahanan “mengabdikan” pada mercusuar politik Bung Karno, seperti “Trisakti”, “Anti Nekolim”, “Setrika Amerika, Linggis Inggris, Kepang Jepang”, “Nasakom”, dan lain sebagainya.

Bung Karno menjadikan politik sebagai mercusuar pembangunan bangunan bangsa dan negara serta karakternya (*nation and character building*). Harga diri Indonesia di usianya yang masih belia dibangun melalui pendetakan penguatan identitas politik, martabat dan marwah politik, serta gengsi politik kolektif, baik dalam ranah domestik maupun dalam tata hubungan antar negara.

Pada pemerintahan selanjutnya, kita memasuki filosofi tata kelola dan pembangunan negara yang berbeda. Pada masa rezim

1 Tulisan tayang pertama kali di Rubrik Opini Majalah *Pewara Dinamika UNY*, Volume 15 Nomor 89, Agustus 2015

Soeharto, ekonomi menjadi panglima. Atas nama pembangunan ekonomi, elemen-elemen dasar bernegara dikorbankan. Bahkan hukum pun di negara hukum ini pada masa itu harus “mengabdikan” kepada ekonomi.

Sejak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita mendapati hukum dijadikan sebagai panglima. Ruang publik sering dijejali dengan wacana dan praktek penegakan hukum, meskipun tidak jarang proses penegakan hukum tersebut berujung pada ketidakadilan.

Melihat trajektori paradigma dasar pembangunan dari pemerintahan ke pemerintahan tersebut, kita patut mengajukan pertanyaan kritis: Kapan kita akan menjadikan pendidikan sebagai panglima?

MENTALITAS MANUSIA INDONESIA

Kedua, perkara mentalitas manusia Indonesia. Ini tantangan serius berikutnya. Para “pekerja” sosial-humaniora telah meratakan mentalitas negatif manusia Indonesia.

Mochtar Lubis, salah satu budayawan besar kita, pada tahun 1977 sudah mencoba mengidentifikasi ciri dominan manusia Indonesia. Enam yang pokok di antaranya adalah: munafik atau hipokrit, enggan dan segan bertanggungjawab, bersikap dan berperilaku feodal, percaya pada takhayul, artistik, dan watak yang lemah.

Koentjaraningrat (2000) juga mengidentifikasi sifat dominan yang menggambarkan mentalitas bangsa Indonesia, tak jauh berbeda dengan renungan Lubis. Beberapa sifat tersebut menghambat kemajuan dan proses pembangunan bangsa Indonesia, antara lain: mentalitas meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya kepada diri sendiri, tak berdisiplin, dan mengabaikan tanggung jawab.

Mentalitas negatif tersebut terus mengakar dalam diri manusia-manusia Indonesia hingga kini. Itulah penjelasan paling fundamental atas korupsi yang semakin marak, pembegalan dan kriminalitas dengan kekerasan menggejala, kemandirian ekonomi

masih jauh, kedaulatan politik menjadi isu mewah, dan kesenjangan sosial-ekonomi antar komponen bangsa semakin menganga. Ujungnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baru sebatas impian.

Dua tantangan tersebut idealnya merupakan titik pijak utama, dalam membangun dunia pendidikan sejak usia dini, atau minimal di bangku persekolahan. Inilah konteks aktual pengembangan pendidikan yang harus menjadi perhatian serius Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK)/eks IKIP, seperti UNY. Perguruan tinggi berbasis di Karangmalang ini harus mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk menjadi bagian besar dari solusi bagi masalah mendasar pendidikan nasional.

Dalam satu dekade belakangan ini, UNY telah memilih untuk kembali kepada *khittah* pendidikan. Hakikat pendidikan pada mulanya terletak pada soal mencetak manusia, membangun jiwa dan kepribadiannya, serta mengunggulkan watak dan mentalitasnya. Kepandaian urusan belakangan. Itulah mengapa perguruan tinggi yang berbasis di Karangmalang ini memilih untuk mengusung visi: Bertaqwa, Mandiri, dan Cendikia.

Visi tersebut memang terkesan “melangit” dan sulit diukur karena ranahnya yang abstrak. Secara faktual-konseptual, para ahli dan praktisi pengukuran pembelajaran dan pendidikan memang menyadari bahwa ranah afektif, seperti bertaqwa dan mandiri, tidak cukup mudah untuk dinilai derajat dan implementasinya dalam praktik pendidikan formal. Efektivitas evaluasinya kompleks dan membutuhkan waktu yang lama.

Namun justru disitulah tantangannya. Ke dalam, UNY harus semakin bekerja keras untuk merumuskan indikator-indikator institusional dan organisasional berdasarkan visi ketaqwaan dan kemandirian tersebut. Ke luar, UNY harus semakin bersumbang-sih pada praktik-praktik peyelenggaraan pendidikan dengan basis pokok ranah afektif, bukan kognitif.

MOMENTUM REVOLUSI MENTAL


Yang jelas, konteks politik negara membuka momentum baru. Revolusi mental, sebagaimana kita tahu, menjadi *tagline* utama

pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini. Dunia pendidikan tampaknya akan secara serius dikembalikan pada hakikatnya: mencetak manusia seutuhnya. Itu yang bisa kita lihat dari kebijakan peninjauan kurikulum, reposisi UN, dan pembentukan Direktorat Pendidikan Keluarga. Ini tentu momentum yang sangat baik untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan guna membangun manusia Indonesia sejati.

Bagi UNY, agenda mendesaknya tentu bukan bagaimana belajar dari negara-negara Barat. Membangun kemitraan dengan partner dan jejaring asing jelas merupakan keharusan, akan tetapi mengeksplorasi dan reaktualisasi apa yang nyata-nyata sudah kita miliki merupakan sebuah kemendesakan. Kita harus bekerja keras untuk menggali keluhuran nilai, budaya, tradisi, kearifan, dan bahkan sistem pendidikan lokal, yang pada zamannya melahirkan kejayaan Nusantara, mengkombinasikannya dengan filosofi pendidikan Indonesia modern sebagaimana dipikirkan oleh para guru bangsa, seperti HOS Tjokroaminoto dan Ki Hadjar Dewantara, lalu mengaktualisasikannya dengan perubahan sosial (*social change*) dan kemajuan teknologi (*technological progress*).

Resultante dari proses eksplorasi dan reaktualisasi tersebut kemudian kita jadikan *baseline* untuk berbagai fokus, orientasi, strategi, dan agenda-agenda UNY, baik internal maupun eksternal. Program-program penelitian dan studi-studi ilmiah harus mengacu dan diwarnai oleh filosofi ke-Indonesia-an, visi global-kemanusiaan, dan berorientasi pada transformasi nilai-nilai dan mentalitas manusia Indonesia yang otentik, membumi, sejati, sungguh-sungguh, dan tidak hanya dalam rumusan naskah-naskah pidato dan peraturan perundang-undangan.

Jika hal itu dilakukan secara serius, maka langkah itu lebih dari cukup untuk menjadi rintisan bagi upaya melahirkan “Mazhab Karangmalang”, alternatif baru dalam melihat dan menerapkan pendidikan di Indonesia. Semoga. Bravo UNY!.



FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

Jalan: Colombo No.1
Yogyakarta 55281

Telepon: 0274-586168 psw
247, 248, 249, 0274-548202,
Fax. 0274-548201

Laman: Website: <http://www.fis.uny.ac.id>

email: fis@uny.ac.id